OD. No. 664

Naam REPUBLIKEINSE VOORLICHTINGSDIENST

Zie ook: [redacted]

Uit		In	Uit		In	Uit		In	Uit		In
Datum	Aan	Datum	Datum	Aan	Datum	Datum	Aan	Datum	Datum	Aan	Datum
29.3.47	C	2.4.47									

OD. No. 664

naam REPUBLIKEINSE VOORLICHTINGSDIENST

e ook: [redacted]

Uit		In	Uit		In	Uit		In	Uit		In
Datum	Aan	Datum	Datum	Aan	Datum	Datum	Aan	Datum	Datum	Aan	Datum
29.3.47 2½	C 1e D II	2.4.47. 2½									

DOSSIERNo.: OD 664 **NAAM:** Republikeinse Voorlichtingsdienst.

Uit		In	Uit		In	Uit		In	Uit		In
Datum	Aan	Datum	Datum	Aan	Datum	Datum	Aan	Datum	Datum	Aan	Datum
24/7	4	24/7	12/4	4	12/4						
20/8	B	22/8	63428 3/6	C	14/6						
12/9	B	13/9	14/6	IV	82/6						
13/9	I	2/10	28/7	4B	29/9						
2/10	B	7/10									
7/10	I	8/10	16/1'52	KB	20/1						
8/10	4	9/10	30/1 is	C'	2/7						
9/10	B	16/10	17/5-54	PIC	18 MEI 1954						
21/10	B	21/10	7/1-55	D	13 JAN 1955						
1/11	4	1/11	12-11-86	KJA/4	14 NOV. 1986						
6/11	4	6/11									
7/11	4	7/11									
12/11	4	12/11									
17/11	4	18/11									
28/11	4	29/11									
5/12	4	6/12									
8/12	4	8/12									
11/12	B	16/2-48									
16/2-48	B	20/2 48									
24/3	4	24/3									
23/4	4	23/4									
11/6	C2	15/6									
9/7	4	9/7									
20/9	4	20/9									
2/1	4	21/1									
19/3'49	B	31/3									

MINUTENBLAD no.2.

DOSSIER No. OD 664. NAAM: Republikeinse Voorlichtingsdienst.

12. Ingezien in verband met CO 63428.
ACD gelieve de stukken betreffende dr.K.J.Brouwer over te nemen ten dienste van het aan te leggen dossier Brouwer.
Passages hieromtrent zijn te vinden in stuk 17293 dd 13 Juni '47, idem 10(?) Juni 1947 en 19637 dd 24 Juli 1947, idem dd 7 Augustus.
Afdeling C/I, 9 Juni 1949.

13 PD 8452 t.n.v dr.K.J.Brouwer aangelegd op 21.6.49.ACD-4b.H

14. Jenin, Carl, 1/7 '50

MINUTENBLAD

DOSSIER No. OD 664 NAAM: Republikeinse Voorlichtingsdienst

B VIII 28/7
26-7-47

Aan B VII. In dossier betr. Ad. Jeugd-Parlement een verwijzing op nieuw naar het inliggende stuk 17207.

Ingezien n.a.v. CO 29265 Soeripno. C II 11/6/48

B III. a. I.d. Amsterdam inlichten over resultaat onderzoek Ds Brouwer.

B III 28.7.47.

Door onbekendheid met schrijven I.d Amsterdam 4062 a/47, dd. 10.6.1947, is bij het vragen van inlichtingen aan Engeland over het congres van „De rechten van de mens" geen melding gemaakt van het feit, dat Klinkenberg aan dit congres heeft deelgenomen. B III

J.V.H. ACD

Ik moge in overweging geven de titel van deze bundel te wijzigen in „Republikeinse Voorlichtingsdienst". Dit is dan in overeenstemming met de huidige benaming.
Er is bij ACD nog een bundel waarin een circulaire (met fotografische reproductie) van de Rep. Voorlichtingsdienst. Deze stukken waren hierbij te voegen. Daarna zou ik het geheel weer gaarne terugontvangen.

B VIII 12/9.

B VIII 2/10.47

ACD

+) Deze stukken heb ik ook nog nodig. Het is een circulaire (no. 8) van de Republikeinse Voorlichtingsdienst. Dat behoort ook hierbij. Na bijvoeging zal terug aan mij

B VIII 3/10.

40216 - '46

B VIII 9/10.47

B VIII 17-2-48.

Retour ACD

B VIII 19/2

Ingezien n.a.v. CO 29285 Soeripno. C II 11/6/48

13 JUNI 1952
ACD/14/705

R A P P O R T

VAN: CAW/II

Bijl.: vier

Betr.: "Sari Warta dan Ichtisar Pers dari Indonesia"
(Dagelijks nieuws en persberichten uit Indonesië)

Ondershands ontvangen van ID Amsterdam, "Sari Warta dan Ichtisar Pers dari Indonesia", van 13, 20, 27 en 30 Mei 1952.

Verzoeke agenderen en retour CAW.

13-6-1952.

No. 27.
Selasa, 13 Mei 1952.-

SARI WARTA DAN ICHTISAR PERS

D A R I

I N D O N E S I A

Terbit pada tiap2 hari Selasa dan Djum'at.

Dikeluarkan oleh
Dinas Penerangan Indonesia
Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag.

HS/2857.-

GUBERNUR ABDUL HAKIM MENGHENDAKI LEKAS TERBENTUKNJA DPR PROPINSI

Sedjak tanggal 24/4 jl telah ada di Djakarta, gubernur Sumatera Utara, Abdul Hakim, jang bermaksud hendak mengadakan pembitjaraan2 dinas dengan Kementerian Dalam Negeri. Gubernur Abdul Hakim akan kembali ke Medan pada kira2 tanggal 2 Mei jang akan datang.

Dalam pertjakapan dengan Antara gubernur Abdul Hakim mengenai keadaan di Sumatera Utara menerangkan, bahwa hasrat rakjat disana ialah hendak melihat usaha2 pembangunan jang positif. Dari itu rakjat disana bekerdja dengan alat2 seadanja untuk memberi isi misalnja terhadap kekurangan2 dilapangan pertanian, pengadjaran dll.nja.

DPR belum ada.

Menurut gubernur Abdul Hakim, banjak kesulitan jang patut mendapat perhatian ialah belum adanja DPR propinsi di Sumatera Utara dan ini hendaknja lekas dapat diselesaikan dengan suatu peraturan pemerintah dari pusat. Saja rasa perlu benar adanja DPR ini jang dibentuk dengan resmi oleh pemerintah pusat atau dengan suatu pemilihan umum. Dengan terbentuknja perwakilan rakjat itu, saja jakin, bahwa pemerintahan propinsi akan dapat berdjalan dengan lebih baik.

Sekitar karet rakjat.

Berbitjara mengenai perusahaan karet rakjat, gubernur Abdul Hakim menerangkan, bahwa karet rakjat dewasa ini mengalami pukulan jang hebat. Perusahaan karet rakjat itu adalah sumber penghasilan jang penting, akan tetapi sampai sekarang usaha2 pemerintah jang menundjukkan tentang pengertian akan besar artinja sumber itu, belum njata kelihatan. Jang dimaksudkan ialah terhadap perbaikan tanaman karet, pengolahan daripada produksi, perbaikan organisasi memperdagangkan karet rakjat dll.nja itu. Dalam suatu peraturan pemerintah ada suatu ketentuan jang menjatakan, bahwa 60% dari hasil uitvoerrecht karet rakjat diuntukkan bagi daerah masing2, a.l. untuk membantu perbaikan tanaman, perbaikan pengolahan dan perbaikan organisasi. Sampai sekarang urusan ini belum dapat diselesaikan dipusat.

Oleh sebab itu, pada saat ini sudah diadakan usaha2 untuk menjiapkan suatu jajasan karet rakjat di Sumatera Utara dengan maksud supaja jajasan itulah jang akan mengurus bahagian jang diuntukkan bagi propinsi itu. Kredit2 jang diberikan dari pusat, menurut gubernur Abdul Hakim, djauh daripada mentjukupi.

Sumatera Utara djuga kekurangan beras.

Di Sumatera Utara orang djuga merasa adanja kekurangan beras, kata Abdul Hakim, tapi kekurangan ini diharapkan dapat ditutup apabila produksi padi nanti telah dapat dikerdjakan setjara machinaal. Pekerdjaan ini akan dilakukan oleh Pusat Perkebunan Negara dengan mesin2 jang didatangkan dari luar negeri dan persiapan2 sudah sedemikian djauhnja sehingga pada pertengahan tahun ini pekerdjaan dengan mesin itu akan dapat dimulai. Demikian gubernur Sumatera Utara Abdul Hakim kepada Antara. (Antara 25 April 1952).

PEMERINTAH PUSAT DAPAT MENERIMA POKOK PIKIRAN DARI "NOTA KEAMANAN"

Komisi Nasib Rakjat, jang terdiri atas para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah propinsi Djawa Barat Djajarachmat, Husein Kartasasmita, njonja Pardjaman, Pahit Prawira, Dasuki dan para anggota Dewan Pemerintah Daerah propinsi Djawa Barat Affandi Ridwan dan Ojasumantri, Kamis pagi telah menghadap pemerintah pusat di Djakarta dengan maksud untuk mengetahui pendapat pemerintah pusat tentang "Nota Keamanan" tertanggal 7 Desember 1951 dan disusun serta diadjukan oleh DPRDS propinsi Djawa Barat itu.

-Komisi-

Komisi tsb. diterima oleh Perdana Menteri Mr.Wilopo dan wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito.

Sebagaimana diketahui, didalam "Nota Keamanan" itu tersimpul keinginan DPRDS propinsi Djawa Barat, bahwa usaha penjelesaian keamanan tidak bisa ditjapai dengan djalan kekerasan sadja, tapi pun harus ditindjau, dengan menggunakan bahan2 penjelidikan jang adil dan luas, untuk mendapatkan apa jang mendjadi sebab2nja,

Komisi jang diutus menghadap pemerintah itu merasa puas dengan keterangan Perdana Menteri Mr.Wilopo, jang menjatakan bahwa "pokok pikiran dalam nota itu dapat diterima" dan ditambah dengan pendapat Prawoto Mangkusasmito, jang mengatakan,bahwa "penjelesaian soal keamanan tidak dapat tertjapai dengan kekerasan semata-mata".

Dalam pembitjaraan itu terdapat djuga kesan, bahwa pemerintah sedang menindjau penjelenggaraan tehnis setjara integraal tentang bagaimana tjaranja menjelesaikan soal keamanan itu, sehingga dikalangan Komisi Nasib Rakjat timbul harapan besar, bahwa penjelesaian jang akan diusahakan itu akan lebih berhasil daripada usaha2 jang sudah2, kalau mendapat sambutan dan bantuan dari rakjat banjak.

Dapat ditambahkan, bahwa sebelum Komisi Nasib Rakjat itu berangkat ke Djakarta, di Bandung komisi telah mengadakan pemundingan2 jang bersifat "understanding" dengan Panglima Tentara dan Territorium III, dengan Polisi Negara, dengan C.P.M. dan dengan pemerintahan sipil. (Antara 26 April 1952).

BANK PASAR DENGAN MODAL RP.100.000.-

Menurut tjatatan jang diperoleh, selama lk 1½ tahun Bank Pasar Kotabesar Semarang jang dibentuk atas inisiatip walikota jang dulu Mr.Kusubyono dengan modal pertama Rp.100.000.- telah mendapat keuntungan Rp.177.580.- lebih.

Bank itu mula2 didirikan di Pasar Djohar kemudian, di 7 pasar jang lain dan belakangan dibuka di 5 ketjamatan dalam daerah kotabesar.

"Bank Pasar" bekerdja dengan maksud untuk menolong pemberian pindjaman pada dan atau menerima simpanan uang dari pedagang2 ketjil serta menengah jang ada didalam pasar sedangkan "Bank Ketjamatan" untuk mereka jang terdapat diluar lingkungan pasar.

Modal tsb jang tadinja diperoleh dari pindjaman kini telah lunas dikembalikan. (Antara 26 April 1952).

MENUDJU KEARAH PERSATUAN JANG BULAT

Baru2 ini di Semarang telah terbentuk sebuah panitya jang terdiri dari 14 organisasi2 tenaga pedjuang untuk menudju kearah fusi. Panitya sematjam itu telah dibentuk pula dilain2 tempat dengan Djakarta sebagai pusatnja jang kelak akan ketempatan kongresnja untuk melaksanakan fusi tsb.

Dalam pertemuannja dengan pembesar2 sipil dan militer setempat tg 25/4 maksud fusi tsb didjelaskan dan jang berwadjib diminta perhatiannja.

Dalam pada itu residen Milono menjatakan kegembiraannja, bahwa dengan bersatunja organisasi2 tsb bantuan jang diberikan oleh pihak jang berwadjib bisa desentralisir dan berguna.(Antara 26 April 1952).

SOAL KEPEGAWAIAN DAN PERBURUHAN DIBITJARAKAN KABINET

Dalam rapatnja jang berlangsung tadi malam Kabinet telah membitjarakan antara lain soal2 kepegawaian dan perburuhan.

Menurut pengumuman jang dikeluarkan oleh Sekretariat Dewan Menteri, Kabinet telah menjetudjui suatu instruksi mengenai

-penghasilan-

penghasilan buruh harian pada djawatan2 dan kantor2 Pemerintah di Djawa Barat jang dilaksanakan sambil menunggu penjelesaian lebih landjut untuk seluruh Indonesia, jang perumusannja akan ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat pertimbangan dari suatu panitya resmi jang dibentuk untuk itu.

Menurut pengumuman itu selandjutnja, keterangan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat akan diutjapkan pada tg 9 Mei 1952.

Mengenai penghasilan buruh harian di Djawa Barat, lebih landjut diterangkan oleh djuru-bitjara Kabinet, Ruslan Abdulgani, bahwa mereka jang dulu sudah bergadji Rp.4.50 bisa naik upahnja mendjadi Rp.5,25. Kemungkinan kenaikan upah ini telah disun didalam instruksi tersebut, dan peraturan ini diadakan dengan maksud untuk memperbaiki nasib buruh bawahan.

Menurut Ruslan Abdulgani, soal2 upah itu telah ditindjau pula oleh Kabinet didalam rangka antjaman penogokan2 sekarang ini. Pemerintah berpendirian untuk sedapat-dapatnja dengan mengingat batas2 kemampuan negara, memenuhi tuntutan2 jang pantas dari pihak buruh, dan pada pandangan Pemerintah nasib kaum buruh rendahan memang perlu mendapat perbaikan.

Dalam pada itu Pemerintah tidak akan lengah untuk mengambil tindakan2 jang dipandangnja perlu guna menjelamatkan masjarakat dari perbuatan2 jang tidak dapat dipertanggung-djawabkan didalam lapangan produksi dan kerdja. Demikian Ruslan Abdulgani.

Tentang soal perburuhan di Djawa Timur dan Djawa Tengah, Kabinet selekas mungkin akan membentuk panitya2 penjelesaian soal perburuhan buat kedua propinsi tsb. (Antara 26 April 1952).

SEKITAR ORANG2 JANG MENGHILANGKAN DOKUMEN2 DAN PETA2 GEOLOGIE

Atas pertanjaan Antara mengenai 3 tenaga dari Djawatan Pertambangan dan Geologie, jaitu Dr.Ir.Ter Bruggen, Dr.A.L.Simons dan Ir. Beukers jang tersangkut dalam perkara hilangnja dokumen2 dan peta2 geologie dan mengenai protes Sarbupi (Sarikat Buruh Pertambangan Indonesia), Menteri Perekonomian Mr.Soemanang memberikan keterangan sebagai berikut:

Pertama, saja minta dan harapkan goodwill dari semua pihak jang bersangkutan, supaja djangan mempersulit keadaan jang sudah serba sukar ini dengan tidak ada faedahnja. Sebab kalau lebih dahulu diperlukan mendapatkan keterangan dari pimpinan Kementerian Perekonomian, segala ramai2 itu tidak akan perlu sama sekali, tidak lain oleh karena beberapa feiten jang dikemukakan, adalah tidak benar.

Mengenai kedatangan Ir.Tampubolon dan Ir.Surodjo ke Djakarta misalnja, tidak ada sangkut-pautnja sama sekali dengan rehabilitasi 3 tenaga ahli itu. Kemarin dan hari ini saja mengadakan pembitjaraan dengan kedua insinjur itu dan atas pertanjaan saja, benarkah kedatangan mereka djuga berhubungan dengan rehabilitasi 3 tenaga ahli tersebut, mereka mendjawab: Tidak sama sekali".

Kedua, saja harapkan pula ada suatu saling mempertjajai dan kesadaran akan adanja satu bedrijfs- atau administratieve discipline. Adalah soal beleid atau kebidjaksanaan, didalam hal apa dan sampai seberapa djauh diadakan perundingan lebih dulu antara pimpinan atas dengan pembantu2 dibawahnja, tetapi jang berhak memutuskan ialah pimpinannja, dalam hal ini menterinja.

Saja melihat ada suatu tendens jang buruk dan berbahaja, karena bahan jang keliru tentang demokrasi. Didalam satu bedrijf atau apparaat tidak mungkin tiap hal dirundingkan dulu dengan pembantu2 bawahan dan maksudnja djuga tidak begitu. Menteri bertanggung djawab kepada parlemen dan disanalah nanti saja bisa diminta mendjelaskan beleid saja. Dengan satu mosi tidak pertjaja, saja dapat dipaksa meletakkan djabatan saja dan kalau itu terdjadi, buat saja persoonlijk, saja akan mengadakan pesta.

-Ketiga-

Ketiga, tenaga ahli Belanda tersebut memang sudah sepantasnja direhabilitasi dan tentang hal itu Kedjaksaan Agung pun djuga tahu. Bahwa mereka masih ada dalam sesuatu urusan tuduhan, itu tidak benar. Selandjutnja tidak benar pula, bahwa ketiga tenaga ahli itu akan menduduki tempat jang sangat penting atau sleutel-posities. Sebab, bahwa tudjuan pemerintah djuga menjerahkan kedudukan penting kepada tenaga Indonesia, kiranja hal itu sudah tjukup terang. Dalam pada itu, baiklah kita sadar, karena amat kekurangannja tenaga2 ahli kita sendiri dan saja tidak takut memakai tenaga2 Belanda, karena tjukup pertjaja pada diri sendiri.

Demikian keterangan tertulis Menteri Perekonomian Mr.Soemanang kepada "Antara". (Antara, 26 April 1952).

DJALAN TERBUKA UNTUK PERHUBUNGAN DAGANG DENGAN S.U.

Kalau nanti akan diadakan hubungan diplomatik dengan Sovjet Uni maka hal ini akan membuka pula kelantjaran perhubungan dagang Indonesia dengan negara besar itu, demikian dinjatakan Prof.Dr. Mulia, anggota Dewan Ekonomi Indonesia Pusat dalam pertjakapan dengan "Antara".

Dikatakan pula bahwa pada konperensi ECAFE Oktober jang lalu di Singapura, wakil2 Sovjet telah menjatakan kesanggupannja mengadakan persetudjuan dagang. Wakil Sovjet menundjukkan kemungkinan mengadakan perundingan untuk persetudjuan dagang tersebut di Den Haag. Tapi kalau ditempat ini suasana tak baik, maka disarankan tempat berunding di London, dimana terdapat perwakilan dagang SU jang terbesar di Eropah.

Sekarang djalan terbuka bagi kita untuk mengadakan langkah2 baru antara lain mengadakan perhubungan dagang dengan Sovjet Uni. Dalam hal ini kita mesti mempertimbangkan barang2 apa jang bisa diimport oleh kita. (Antara, 26/4-'52).

MASJUMI TUNTUT KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI SATU PROPINSI.

Dalam konperensinja jang baru lalu tadi, bertempat di Samarinda, Masjumi wilajah Kalimantan Timur menuntut agar Kalimantan Timur didjadikan satu propinsi tersendiri, jang terpisah dari Kalimantan Selatan dan Barat.

Alasan jang dikemukakan, a.l. ialah soal letak dan kedudukan daerah, soal keuangan, soal politis dan psychologisch. (Antara, 26/4-'52).

PERUNDINGAN MENGENAI PEMBANGUNAN SUMATERA.

Mengenai perundingan tentang pembangunan Sumatera jang pagi ini dilangsungkan di Kementerian Perekonomian selama 2½ djam, Dr.Sumitro Menteri Keuangan, menerangkan kepada "Antara", bahwa rentjana tersebut adalah meliputi pelbagai lapangan antara lain pertanian, perindustrian dan perekonomian rakjat.

Rentjana ini sebetulnja sudah lama dipertimbangkan dan mendjadi suatu bahagian daripada rentjana pembangunan jang luas ialah dalam kader plan Sumitro.

Jang mendjadi dorongan terhadap penetapan rentjana tersebut sekarang ini adalah perekonomian rakjat di Sumatera dewasa ini jang sangat pintjang serta kemunduran membeli rakjat jang sangat merosot.

Dr.Sumitro menegaskan, bahwa rentjana ini dalam garis2 besarnja sudah mendapat persetudjuan para Menteri2 Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Presiden-Direktur Javasche Bank Mr.Sjafruddin.

Anggaran belandja untuk pelaksanaan rentjana ini belum dapat diberikan, tapi Dr.Sumitro menerangkan, bahwa begroting harus selaras dengan kebutuhan2 jang rieel. Pada prinsipnja opset rentjana tersebut adalah sebagai berikut: Dari Pemerintah Pusat hanja ditetapkan garis2 besarnja, kemudian masing2 pemerintahan daerah diberi bevoegdheden pula merentjanakan pembangunan daerah2nja masing selaras dengan kebutuhan perkembangan regional dengan pertimbangan bahwa tiap2 daerah di Sumatera mempunjai masing2 kesukaran serta kemungkinan. Pemerintah2 daerah kemudian diharuskan memberi pertanggungan djawab kepada

-Pemerintah.....-

Pemerintah Pusat. Sesudah itu Pemerintah Pusat dapat selandjutnja mengadakan perbaikan atau tambahan.

Dalam batas2 rentjana ini akan diadakan djuga penanaman modal dari Pemerintah dan diharapkan djuga perhatian kaum partikelir dalam hal ini. Sekalipun rentjana ini adalah rentjana dalam djangka pandjang tapi dalam djangka pendek diharapkan djuga terlaksananja terutama perbaikan dalam perekonomian rakjat, pertanian rakjat serta industri rakjat.

Rentjana ini tentu memerlukan begroting jang tjukup terutama mengenai pengeluaran produktif. Dalam hal ini bisa diharapkan adanja penghematan dalam hal2 pengeluaran konsumtif.

Pada tanggal 21/5 jang akan datang akan diadakan pula konperensi antara para gubernur2 seluruh Indonesia untuk membitjarakan rentjana selandjutnja, sebab langkah pertama ini diperluas lagi dengan langkah2 kearah pembangunan seluruh Indonesia. (Antara, 26/4-'52).

DALAM DEMONSTRASI MAHASISWA LAPD

Dengan mendapat perhatian besar, terutama dari para peminat olahraga, semalam digedung Concordia telah dilangsungkan "sport-demonstrasi" setjara besar2an oleh para mahasiswa dari Lembaga Akademi Pendidikan Djasmani dengan bantuan peladjar SMA/SMP.

Demonstrasi ini meliputi nomor2 seperti tari ketimuran, bersenam, peladjaran bertindju, bersenam-berirama, persiapan dasar2 bersenam, anggar, bentuk dasar melontjat dan melontjat pakai peti lontjatan. Semua nomor ini dipertundjukkan dengan penuh gaja, rythme dan harmonie, sehingga mendapat sambutan hangat dari para penonton.

Dalam kata sambutannja Dr.A.Halim antara lain menerangkan, bahwa perkembangan olahraga di Indonesia kini madju dengan pesatnja. Tapi organisasi2 olahraga dinegeri kita belum dapat dikatakan sempurna, demikian pula tenaga2 ahli untuk didjadikan pelatih (coach) masih sangat dirasakan kekurangannja.

Maka adalah mendjadi tugas dari para mahasiswa LAPD untuk menjumbangkan pengetahuannja dalam soal2 keolahragaan, demikian Dr.A.Halim.

Dapat didjelaskan, bahwa tugas kewadjiban LAPD sementara terletak pada pendidikan tenaga guru untuk memberi peladjaran, jang mana sangat kekurangan, diantaranja mereka jang dapat memberi pimpinan dan bimbingan dalam keolahragaan dan kepanduan (jeugdwerk) dan lembaga ini ditetapkan berada dibawah pengawasan Fakultet Kedokteran dari Balai Perguruan Tinggi R.I. di Djakarta. (Antara, 26/4-'52).

PERLETAKAN BATU PERTAMA GEDUNG FAKULTET PERTANIAN.

Presiden Sukarno hari Minggu tanggal 27/4 telah meletakkan batu pertama bagi pendirian gedung Fakultet Pertanian di Baranangsiang, Bogor dalam suatu upatjara resmi jang disaksikan oleh pelbagai pembesar, antaranja Menteri Pekerdjaan Umum Suwarto, Menteri PP & K Bahder Djohan, Menteri Urusan Pegawai Suroso, Gubernur Djawa Barat Walikota Djakarta, Presiden Universitet Indonesia dll beserta ribuan penduduk Bogor jang datang pada upatjara itu.

Menurut Menteri Suwarto, gedung itu menurut rentjana akan selesai dalam 5 tahun dengan biaja l.k. 80 djuta rupiah.Gambar2 projeknja dibuat oleh Ingenieurs Bureau Ingeneren Vrijburg, pemborongannja dikerdjakan oleh NV de Kondor.

Prof.Kuileman katakan, bahwa persoalan kekurangan bahan makanan dalam abad ke-20 ini, bukan lagi termasuk soal jang harus dipetjahkan setjara akademis. Jang diperlukan ialah tenaga2 jang giat bekerdja. Presiden Sukarno kupas soalnja setjara luas, dengan mengemukakan bahaja2 jang kita hadapi dalam soal bahan makanan itu, dan kemungkinan2 mengatasinja bila semua dilakukan dengan plan dan kegiatan.

-Problem-

Problem makanan rakjat. Presiden katakan,bahwa kini hidup dimasa penuh dengan problem, dan salah satu daripadanja ialah problem makanan rakjat.

Ditahun 1940 rata-rata tiap orang di Indonesia makan 86 kg beras didalam satu tahun, belum terhitung makanan lain2-nja. Kalau 86 kg itu mendjadi ukuran, maka kini untuk 75 djuta diperlukan 6,45 djuta ton beras, sedang jang kita hasilkan tiap tahun sekarang hanja 5,5 djuta. Itu sebabnja, tiap tahun Indonesia harus membeli beras dari luar, dari Siam, Saigon, Birma.

Tahun ini sadja Indonesia harus mentjari beras 700.000 ton. Oleh Presiden dikatakan, bahwa ketekoran ini makin lama makin bertambah, karena djumlah penduduk selalu bertambah.

Ditahun-tahun jang achir ini penduduk Indonesia tiap tahunnja bertambah dengan 800.000 orang, dan tambahannja ini kelak akan senantiasa bertambah besar, dan bila memakai ukuran keadaan sekarang, maka kekurangan beras itupun akan senantiasa bertambah besar. Ditahun 1960--jaitu kalau para pemuda-pemudi jang sekolah pada perguruan tinggi pertanian itu kelak sudah mendjadi pemuka2 praktis dalam masjarakat--menurut perhitungan Presiden penduduk Indonesia akan mendjadi lk. 83 djuta, sehingga kekurangan beras itu bukan lagi seperti sekarang 700.000 ton, tetapi 2,2 djuta ton, jaitu kalau produksi tidak bertambah dan dibiarkan rakjat mendapat sehari seorang hanja 1712 kalori, jang sesungguhnja djauh kurangnja daripada seharusnja. Sebagai perbandingan dikemukakan angka2 makanan rakjat dilain2 negeri sbb: di India 2121 kalori, di Birma 2348 kalori, di Cuba 2918 kalori, di Malaya 2337 kalori,di Ceylon 2167 kalori, di Indo China 2127 kalori, djadi semuanja lebih banjak daripada di Indonesia, sedang di Nederland orang makan sehari 2958 kalori, di Australia 3128 kalori dan di Amerika 3249 kalori.

Kalau ditahun 1960 itu tiap orang sehari harus dapat makan 2250 kalori, maka untuk 83 djuta penduduk Indonesia produksi makanan kita harus ditambah bukan dengan 2,2 djuta ton sadja, tetapi dengan 6,3 djuta ton.

Produksi harus ditambah. Dikatakan oleh Presiden,bahwa problem makanan ini adalah terang problem "mau hidup atau mau mati", dan tegaskan, bahwa problem ini tidak dapat dipetjahkan dengan cynisme, dengan sekedar menuduh, sekedar mentjemooh, karena kesulitan soal ini terletak objektif kepada ketidak-seimbangan antara produksi dan konsumpsi, dan tidak subjektif karena durhakanja sesuatu orang.

Ditegaskan oleh Presiden, bahwa persediaan bahan makanan itu dapat ditambah, pertama dengan berichtiar memperluas daerah pertanian kita, dan kedua dengan menggiatkan (mengintensiver) usaha- pertanian kita, chusus dengan seleksi dan pemupukan.

Mengenai jg pertama Presiden katakan, bahwa di Djawa kemungkinan memperluas sawah dan ladang itu hampir tidak mungkin lagi, tetapi diseluruh Indonesia luasnja daerah pertanian ini masih dapat ditambah dengan sedikitnja 1 djuta ha, atau 1½ djuta ha, atau barangkali 2 djuta ha. Tanah2 di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian memang menunggu transmigran2 kita.

Mengenai intensivering pertanian Presiden tegaskan, bahwa luas sawah di Indonesia sekarang hanja ada l.k. 4½ djuta ha, antaranja 3.384.000 ha dipulau Djawa. Kini sudah dikenal djenis padi jang baik, jaitu padi Bengawan, jang ketjuali enak, dapat pula memberikan hasil-tambah rata2 8 quintal padi se ha-nja, atau 4½ quintal beras. Menurut penjelidikan kini ada l.k. satu djuta ha jg dapat ditanamai djenis padi itu, dan satu djuta ha lagi jg dapat ditanami dg djenis lainnja jg djuga banjak produksinja, sehingga ini dapat menambah produksi l.k. 600.000 ton beras,satu djumlah jg lumajan. Ditegaskan oleh Presiden,bahwa prakteknja tidak mudah, karena djenis padi jang memuaskan disatu daerah, belum tentu memuaskan dilain daerah.Sebelum padi Bengawan itu

-bisa-

bisa disiarkan diseluruh kepulauan Indonesia, maka perlulah lebih dulu didirikan balai2 seleksi-daerah diberpuluh-puluh tempat.

Disamping seleksi dikatakan oleh Presiden, bahwa untuk menambah produksi diperlukan djuga pemupukan dengan pupuk-tiruan (kunstmest) fosfat. Ini ternjata amat menaikkan produksi, sehingga ada sawah2 jg dg pupuk itu bertambah hasil 5 quintal se-ha-nja, bahkan ada jg lebih. Dengan pemupukan ini bisa, diperoleh hasil-tambah lk 360.000 ton, sehingga dengan hasil-tambahan dari penanaman padi Bengawan dan djenis2 lainnja jg baik itu, hasil-tambahan seluruhnja bisa mendjadi 960.000 ton, atau bulat 1 djuta ton.

Ini lumajan, tetapi kalau ditahun 1960 itu, dengan dasar hanja 1700 kalori seorang kita kekurangan 1½ djuta ton, maka dengan tambahnja produksi 1 djuta ton itu kekurangannja masih ada 1½ djuta ton. Dan djika kita masih bertjita-tjita menaikkan arbeidsprestatie rakjat dengan memberikan makanan kepadanja 2250 kalori seorang sehari, maka ketekoran itupun masih 6,3 djuta ton - 1 djuta ton = 5,3 djuta ton.

Dengan demikian maka seleksi dan pemupukan sadja dan ichtiar memperluas daerah-pertanian berupa sawah, belum tjukup. Disamping itu sepenuh perhatian harus ditjurahkan kepada pertanian ditanah kering, jang menurut Presiden kini masih "dianak-tirikan".

Pertanian ditanah kering lebih luas daripada pertanian disawah. Di Djawa luas sawah ada lk. 3.384.000 ha, tanah kering jg diusahakan untuk pertanian ada lk 4.500.000 ha. Diluar Djawa luas pertanian ditanah kering ada l.k. 3.500.000 ha, sehingga total pertanian tanah-kering diseluruh Indonesia ada l.k. 8 djuta ha.

Ditanah kering inilah, letaknja "way out" mutlak jg kita tjari, kata Presiden. Dikatakannja, bahwa pertanian-tanah-kering ini dapat dibikin mendjadi sungguh2 bermanfaat dengan melakukan empat ichtiar, jaitu pertama dengan melakukan pemupukan, kedua dengan mendjalankan seleksi, chusus untuk tanah-kering, ketiga dengan memperlipatgandakan perchewanan ternak, dan keempat dengan mechanisasi.

Kader pertanian

Pada achir pidatonja Presiden katakan, bahwa Indonesia kekurangan kader bangsa, terutama dilapangan pertanian dan peternakan, dan sesalkan, bahwa- sedangkan rakjat Indonesia akan mengalami bentjana dalam waktu dekat kalau soal makanan rakjat tidak segera dipetjahkan- hanja ketjil sekali minat dikalangan pemuda dan pemudi untuk studie ilmu pertanian dan ilmu perchewanan. Buat tahun 1951/1952 jang mendaftarkan diri sebagai mahasiswa bagi Fakultet Pertanian hanja 120 orang, dan bagi Fakultet Kedokteran Chewan hanja.....7 orang.

Setjepat mungkin kita membutuhkan paling sedikit 350 insinjur pertanian, 150 ahli kehutanan, ratusan ahli seleksi, ratusan ahli pemberantasan hama, ratusan ahli pemupuk, ratusan ahli tubuh-tanah, ratusan ahli irrigasi-pertanian-rakjat, ratusan ahli kechewanan, dokter2 chewan dan ahli pemeliharaan ternak, demikian Presiden jang achirnja-mengenai bahaja jang dihadapi oleh Indonesia sekarang dalam soal kekurangan makanan itu katakan: Politik bebas, prijsstop, keamanan, "masjarakat adil dan makmur", "mens sana in corpore sano", - semua itu mendjadi omongan kosong belaka, selama kita kekurangan bahan makanan, selama tekort kita ini makin lama makin meningkat, selama kita hanja main cynisme sadja dan senang tjemooh-mentjemooh, selama kita tidak bekerdja, keras, memeras keringat mati-matian menurut plan jang tepat dan radikal. Revolusi Pembangunan harus kita adakan, Revolusi Besar disegala lapangan, Revolusi Besar dengan segera, tetapi paling segera diatas lapangan persediaan makanan Rakjat. (Antara 28 April 1952)

-KARENA-

KARENA MOGOK SEBDA MENDJADI PETJAH BELAH?

Dari sebelah pihak jang berkepentingan "Antara" memperoleh kabar, bahwa tanggal 26/4 seorang wakil ketua Sebda Kota Besar Semarang telah menjatakan mengundurkan diri dari organisasi itu karena tidak setudju tindakan dari pimpinan mengenai masalah pemogokan jang kini tengah terdjadi.

Keluarnja wakil ketua itu kabarnja djuga diikuti oleh beberapa puluh orang anggota jang rupanja takut2 akan antjaman Pemerintah itu dan segera mendaftarkan diri untuk bekerdja kembali.

Lebih djauh diperoleh kabar resmi bahwa dalam kalangan Sebda Kabupaten Semarang tidak terdjadi pemogokan, sekalipun uang tundjangan jang mendjadi tuntutan DPP Sebda itu belum terlaksana didaerah otonoom itu.

Dari pihak Sebda sendiri belum diketahui bagaimana sikapnja mengenai perkembangan2 itu lebih djauh. (Antara,28/4-'52).

SYMPOSION DI DJAKARTA.

Semalam selesailah symposion jang diadakan digedung Adhuc Stat Djakarta sedjak malam Minggu, dimana berbitjara antara lain Sutan Sjahrir, Dr.J.Ismael, Prof.Dr.Slamet Santoso, Moh. Said, Drs.Tan Goan Po dan Mr.Sjafruddin Prawiranegara, dengan dihadiri oleh banjak para terkemuka dimasjarakat Djakarta. Antara lain tampak Djenderal Major Simatupang, Kepala Kepolisian Negara Sukanto, Menteri Bahder Djohan, ketua Dewan Kurator Universitet Indonesia Mr.Suwandhi, bekas Menteri Mr.Wongsonegoro, Menteri Sumitro, Dr.Saroso, Mr.Maria Ulfah, Nj.Kartowijono, Mr.Ali Budiardjo, Lukman Hakim,Hamid Algadri dll.

Sebagai telah dikabarkan, symposion ini adalah mengenai sosiologi, psychologi dan ekonomi, dengan masing2 pembitjara mengemukakan analysenja mengenai persoalannja, kemudian pendapatnja mengenai pemetjahan soalnja.

Symposion tersebut diselenggarakan oleh sebuah panitya, dari kalangan Gelanggang, Lekra, Liga Komponis, Pen-Club Indonesia dan Pudjangga Baru. (Antara, 28/4-'52).

KESUKARAN2 INDONESIA DITINDJAU DARI SUDUT SOSIOLOGIS
Symposium Sjahrir dan Dr.Ismael.

"Keadaan jang kita alami sekarang ini pada umumnja tidak memuaskan,malahan bagi banjak orang jang tadinja memasang harapannja telah tinggi, mengetjewakan. Kerapkali kita mendengar keluhan orang, bahwa kemerdekaan tidak membawa apa jang diharapkan, jaitu perbaikan dan kemadjuan didikan segala lapangan kehidupan. Banjak pula orang jang mengatakan, bahwa kemerdekaan jang kita peroleh, hingga kini hanja membawa kemadjuan dan perbaikan nasib untuk sebagian ketjil dari bangsa kita, jaitu kaum politik dan kaum terpeladjar jang sekarang menduduki tempat2 dalam masjarakat, jang dahulu hanja mendjadi monopoli kaum pendjadjah. Sedang untuk rakjat, umumnja, keadaan bertambah djelek", demikian Sjahrir memulai pidatonja.

Setelah diterangkannja, bahwa soal keadaan sekarang akan dipandangnja dari sudut sosiologis, tetapi dengan tidak terikat kepada dari bangsa Indonesia adalah pertanian dan lingkungan sebagian besar rakjat adalah dusun dan desa. Terutama jang hidup di Djawa, Sulawesi Selatan, Sumatera Tengah dan Selatan mengusahakan pertaniannja dengan bersawah. Pertama jang dilakukan setjara begitu, telah berlaku beratus tahun lamanja, dan telah melalui sedjarah feodalisme, pendjadjahan bangsa Barat dan kini zaman kemerdekaan. Semua perubahan itu berlaku dikeliling dan diluar lingkungan sipenjawah, dan karena itu tidak mempengaruhi pokok2 pandangan hidup, angan2, nilai dan tingkahlakunja.

Pada pokoknja keadaan didesa menggambarkan pula keadaan dan kemungkinan masjarakat Indonesia umumnja. Selama sebagian rakjat

-jg-

jg hidup dedesa belum dibebaskan dari ikatan2 hidup, dibiarkan hidup terus menurut kebiasaan, selama itu pula ia akan tetap djauh dari kemadjuan. Selama itu pula masjarakat desa tidak bergerak statis,

Jang diam dikota pun masih tetap ada hubungannja dengan desanja. Banjak diantara mereka jang tiap kali pulang kedesanja, djika susah dikota, djika mereka menganggur, atau sakit, atau hendak beristirahat. Hidup mereka dikota hampir sama dengan dikampung. Malahan kota2 Indonesia jang ketjil tidak dapat dibedakan dengan kampung. Kehidupan kota di Barat tidak dapat disamakan dengan kehidupan rakjat dikota2 kita. Karena itu dikota2 kita kurang dinamik, kurang rationaliteit.

Tetapi masjarakat kita selalu berobah. Perobahan itu belum berarti perbaikan. Penduduk bertambah sesak, kelebihan djiwa lebih besar dari kesanggupan bumi memberi makan, dan banjak orang jang tidak dapat hidup dari hasil pertanian mentjari rezeki dikota-kota. Sebab itu penduduk kota berlipat ganda, seperti Djakarta, Medan. Urbanisasi masjarakat berlaku dengan tjepat, dan proletarisasi dan tawaran tenaga untuk dipeladjarkan diluar pertanian bertambah besar dan tjepat.

Tetapi pada waktu ini, terutama di Djawa, hampir ditiap kota kaum pertengahan itu adalah bangsa Tionghoa, totok atau peranakan. Mereka jang membeli hasil tani rakjat, dan mendjual barang2 kepada kaum tani. Sebagian dari keuntungan perusahaan mereka mengalir keluar negeri, ke Barat dan ke Tiongkok. Karena itu tidak heran, setelah berdiri Tiongkok Komunis, lebih banjak Tionghoa menanam modalnja dinegeri kita ini. Pada tingkatan bawah barulah bangsa Indonesia jang merupakan buruh tangan dan kepala. Ini menundjukkan kelemahan posisi bangsa Indonesia dalam susunan ekonomi kita diluar pertanian. Dari gambaran jang diberikan njatalah, bahwa jang menguasai kehidupan dikota adalah bangsa asing, bukan bangsa kita.

Keadaan jang digambarkan diatas mendjadi sumber ketegangan dan pertentangan jang menentukan alam pikiran dan perasaan orang2 dinegeri ini. Kedudukan bangsa asing menjebabkan perasaan anti-asing, dan berangsur2 memperkuat djaminan bagi kehidupan orang ketjil jang ekonomis lemah, dan membuat kita takut dan menentang modal besar.

Kaum terpeladjar kita, diantaranja politisi, kerapkali dipandang sebagai golongan jang mempunjai kehidupan sendiri, dan merupakan faktor terpenting untuk nasib kita selandjutnja. Tetapi biarpun tinggi kedudukannja dalam pemerintahan, mereka belum tentu berkuasa didalam masjarakat. Mereka sebagian besar berasal dari kaum ningrat dan pegawai, golongan jang lemah ekonomis didalam masjarakat.

Setelah diterangkan pandjang lebar penjakit2 didalam masjarakat Indonesia pada waktu ini, Sjahrir mengambil kesimpulan, bahwa kemadjuan harus lebih ditegaskan didesa2. Membawa organisasi, alam baru kedesa jang mungkin melepaskannja dari kekuasaan dan perbudakan kepada kebiasaan, tachjul dan kebodohan. Didesa dimasukkan pendidikan dan penerangan, dan gotong-rojong setjara kuno dan feodal diobah mendjadi gotong-rojong sadar dan rationeel, dibentuk dalam susunan koperasi modern.

Dikota2 perlu lebih banjak kesedaran dan pengertian tentang keadaan sebenarnja, jang perlu dihadapi dan dikerdjakan.

Dalam pada itu haruslah kita menjandarkan segala usaha kita kepada kenjataan, bahwa rakjat kita terutama orang ketjil dan miskin, dan untuk membentuk tenaga dan kekuatan harus dari usaha bersama. Ketjondongan kepada kollektivisme adalah satu hal jang lajak untuk masjarakat kita. Usaha jang kita adakan harus berdasarkan kollektif, dengan tidak melenggahkan inisiatif dari tiap2 anggotanja.

Hanja dengan djalan begitu dapat terdjamin segala usaha akan bernilai rationeel. Mempertinggi kesadaran dalam bagian2

masjarakat kita jang pokok didesa dan kota, sama dengan memupuk tanah untuk kebudajaan Indonesia.

Bertambah besar kegiatan kita berpikir, bertambah besar kesanggupan untuk merasakan. Jang mana berarti bertambah kaja alam perasaan dan pikiran kita. Dinamik alam perasaan dan pikiran kita inilah jang mesti mendjadi sumber tenaga kebudajaan kita.

Sebagai penutupnja Sjahrir mengatakan, bahwa sjarat terutama bagi negeri kita adalah usaha kaum terpeladjar kita, pendukung kebudajaan untuk menghubungkan kedudukan nasib dan kemadjuan serta perbaikan nasib kita. Kalau ini berhasil, maka dengan sendirinja akan terbuka kemungkinan baru jang merupakan ilham bagi pudjangga, seniman, ahli pikir, jang perlu bagi kemadjuan kebudajaan kita.

Pandangan Dr. Ismael.

Dr. Ismael sebagai pendebat menerangkan, bahwa baginja dalam menghadapi tjeramah Sjahrir, ia tidak melihat adanja soal2 jang akan dapat didjadikan sasaran untuk diperdebatkan. Pemandangannja hanja sekedar melengkapi pandangan2 Sjahrir. Tetapi dalam pada itu Dr.Ismael kemukakan, bahwa pandangan Sjahrir terlampau Barat, sedangkan bangsa Indonesia mempunjai penilaian sendiri berdasarkan kebudajaannja.

Kemudian didalam pemandangannja, Dr. Ismael, seorang ahli ilmu kemasjarakatan, menerangkan, bahwa kesulitan2 jang dialami oleh masjarakat Indonesia sekarang ini disebabkan karena terikatnja desa oleh adat. Penghidupan kaum tani sehari-hari tergantung kepada kekuatan alam. Hal ini berbeda dengan keadaannja di Eropah. Disana tehnik madju dan orang sudah sanggup menguasai alam.

Di Indonesia orang didesa sebanjak mungkin berusaha, supaja tenaga2 alam bersikap baik kepada mereka. Akibatnja mereka hidup didalam alam mystiek, berpemandangan konservatif, dan takut kepada hal2 jang datang dari luar. Begitulah koperasi jang pada hakekatnja merupakan kolektivisme jang tidak asing bagi penghidupan didesa, tidak mendapatkan tanah jang subur didesa, disebabkan karena koperasi itu mempunjai bentuk dan pengertian Barat.

Urbanisasi (peralihan dari desa kekota) tidak membawa banjak perubahan didalam alam pikiran mereka dan urbanisasi disini tidak berdjalan dengan sempurna, karena ikatan2 dengan desa masih ada, misalnja orang belum dapat berfikir setjara kritis. Satu hal lagi jang penting ialah, bahwa orang dikota sudah terlepas dari ikatan2 sosial didesa. Sampai dikota mereka dihadapkan kepada kebudajaan Barat, dan belum mempunjai ukuran2 (normen) jang baru, sehingga menjebabkan mereka tidak mempunjai keseimbangan diri (onevenwichtig) dan emotioneel. Karena mereka tidak kritis, maka dengan gampang mereka dapat didjadikan alat bagi golongan2 jang hendak menggunakannja untuk tudjuan2 politik. Peranan mereka didalam penghidupan politik adalah negatif, sedang pengertiannja tentang demokrasi adalah bebas sama sekali, tidak mengenal ikatan2 hukum djawab. Keadaan demikian berbahaja dan explosief.

Selandjutnja oleh Dr. Ismael disebut kaum bordjuis ketjil sebagai golongan jang tersendiri dikota. Mereka tumbuh karena adanja pendidikan Barat (Belanda). Dalam pada itu sistem kolonial mengadakan pembatasan2 bagi kemadjuan dan perkembangannja, sehingga mereka mendjadi lawan jang sengit daripada kekuasaan Barat dan wakil2nja. Setelah kemerdekaan politik itu tertjapai, maka masih kedapatan kebentjian terhadap Barat.

Usaha mentjapai kedudukan jang sama dengan bangsa asing, karena individueel lemah, maka mereka menggabungkan diri kedalam partai2 dan kemudian oleh partai2 diadakan perbedaan diantara jang ada didalam organisasinja dan jang ada diluarnja, seolah2 jang ada diluar partai itu bukan kawan. Karena minat kaum bordjuis ketjil itu terlampau ditudjukan pada soal itu, maka mereka melupakan, bahwa disamping mereka masih ada golongan tani dan proletariat.

Pada umumnja kaum bordjuis ketjil itu perasaan sosialnja masih tipis. Selain itu kaum terpeladjar umumnja sedikit hubungannja dengan rakjat, padahal untuk mentjapai kemadjuan bangsa, harus di-mobilisir golongan rakjat itu.

-Menurut.....-

Menurut Dr. Ismael, Sjahrir terlampau berpemandangan Barat. Dr. Ismael sendiri berpendapat, bahwa dalam mengupas kesulitan2 masjarakat kita sekarang ini, harus dilihat tenaga2 sosial didalam masjarakat, dan apakah hal2 jang didapat dari Barat itu menguntungkan bagi perkembangan kebudajaan kita pada umumnja. Dr. Ismael menghendaki tertjapainja keseimbangan diantara "geestelijk denken" dan kemadjuan tehnis.

Selandjutnja dikemukakan dua kenjataan oleh Dr. Ismael, jaitu: pertama soal kebudajaan jang sangat penting. Dikatakannja, bahwa selama mentaliteit bangsa Indonesia belum berubah, maka tiap peraturan jang ditudjukan untuk perbaikan penghidupan ekonomi, tidak akan berhasil. Kedua, kalau melihat sedjarah bangsa kita, Indonesia dimasa jang lampau telah dikundjungi oleh berbagai bangsa asing, dan selama itu Indonesia dari sudut kebudajaan selalu menerima, tetapi tidak pernah memberi.

Timbullah pertanjaan: apakah hal itu disebabkan pembawaan-(aangeboren aanleg), ataukah karena pengaruh lingkungan. Ia sendiri tidak pertjaja pada pembawaan itu, dan masih optimistis dalam menghadapi perkembangan kebudajaan Indonesia.

Dr. Ismael berpendapat, bahwa kalau hendak membangunkan masjarakat Indonesia, maka harus ada perasaan kemasjarakatan pada orang2 jang mempunjai tugas untuk itu. (Antara, 28/4-'52).

PERKARA WESTERLING HARUS DITJARI PENJELESAIANNJA SETJARA POLITIS.

Wartawan Antara di Nederland menulis tentang perkara Westerling sbb.:

Orang Belanda jang berkepala dingin pada berpendapat, bahwa memang Westerling patut mendapat hukuman jang seberat2nja untuk perbuatan2nja di Indonesia jang melampaui batas peri-kemanusiaan itu. Akan tetapi golongan besar rakjat Belanda, terutama oposisi kanan seperti Rijkseenheiddsb, sangat beda pendapatnja. Mereka ini memandang Westerling sebagai pahlawan nasional jang dengan gagah mentjoba mempertahankan keradjaan Belanda. Golongan ini pula, jang belakangan kadang2 mengeritik politik pemerintah jang terlalu tjondong pada Amerika Serikat. Bagaimana pun djuga oposisi ekstrim kanan ini merupakan faktor jang harus diperhitungkan oleh pemerintah Belanda.

Bagi rakjat Indonesia pertanjaan dapat tidaknja Westerling mendapat hukuman untuk perbuatan2nja penting sekali didjawab. Maka bagaimanakah kemungkinan2 dalam hal ini? Umum mengetahui, bahwa sebenarnja soal2 juridis jang timbul dalam perkara Westerling ini tidak akan menentukan kesudahannja, melainkan soal politik jang harus ditindjau untuk mentjoba meramalkan perkembangan dihari2 kemudian dalam perkara2 sematjam ini.

Kalau seumpamanja Amerika Serikat jang meminta diserahkannja Westerling oleh karena ia melakukan kedjahatan politik dinegeri itu, maka pasti pemerintah Belanda akan melulusi permintaan itu, walaupun misalnja diantara Belanda dan Amerika Serikat tidak ada perdjandjian penjerahan. Jang menentukan ialah bagaimana perhubungan Belanda dan Indonesia? Dalam perundingan Den Haag belakangan ini tentang Unie-statuut dan Irian terbukti, bahwa baik Indonesia maupun Belanda, tidak mudah saling memberikan concessie. Mengenai Irian sudah terang Belanda bersikap keras sekali untuk mempertahankan daerah itu.

Melihat sikap kaku itu ketjil kemungkinan bahwa Belanda suka menundjukkan goodwill. Bagi pemerintah Belanda besar kemungkinannja bahwa Westerling ini didjadikan "martelaarsfiguur" fihak oposisi kanan. Mereka dapat mengatakan, tjoba lihatlah orang jang djasanja begitu besar dikorbankan begitu sadja; inilah akibat politik lemah terhadap Indonesia, sampaipun kehormatan nasional didjual pada Indonesia. Maka tidak bisa masuk akal bahwa suatu pemerintahan menghadiahkan martelaarsfiguur pada oposisinja, jang dengan itu dapat memukuk pemerintahan itu sendiri.

Pertimbangan kedua ialah sendjata jang dipegang oleh Westerling sendiri. Pernahlah ia sesumbar di Brussel setahun jang lalu,

-bahwa ia akan-

bahwa ia akan menjeret beberapa orang terkemuka Belanda kalau ia akan ditangkap. Dapat dimengarti bahwa pemerintah Belanda pun memperhitungkan faktor ini. Mengingat akan dua faktor tersebut diatas, maka dapat diramalkan,bahwa dari fihak Belanda tidak akan bisa diharapkan perbuatan jang manis terhadap Indonesia untuk memperbaiki perhubungan Indonesia dan Belanda jang agak renggang karena pertikaian mengenai masalah Irian. (Antara, 20/4-'52).

KONPERENSI PERSATUAN PAMONG DESA DJAWA BARAT.

Konperensi Persatuan Pamong Desa Indonesia Komisariat Djawa Barat tadi malam telah mengadakan resepsi dilobby hotel Homann jang mendapat perhatian besar, antara lain dihadiri oleh Hamdani mewakili Menteri Dalam Negeri, Gubernur Djawa Barat, beberapa orang Residen, Walikota dan Bupati2.

Konperensi kedua dari PPDI Djawa Barat ini selain dikundjungi oleh utusan2 pamong desa dari berbagai pelosok di Djawa Barat, djuga dihadiri oleh penindjau2 dari Sumatera Tengah.

"Kalau kami kemukakan disini keluh kesah pamong desa,tidaklah berarti bahwa ia ingin diistimewakan,tidak berarti bahwa ia ingin dianggap lain dari pada golongan lain". Demikian diutjapkan oleh ketua PPDI Djawa Barat D.Rachman Sainan dalam pidatonja. "Keluh kesah pamong desa ini berarti djuga keluh kesah rakjat jang memilihnja, jang sekarang masih menderita", demikian D.Rachman Sainan selandjutnja.

Ia menjesalkan beleid politik pemerintah pada tahun 1951 jang tetap berpedoman kepada "Inlandsche Gemeente Ordonnantie", padahal undang2 kolonial inilah jang dituntut oleh pamong desa supaja segera lenjap. Pamong desa bukanlah menantang pemerintah, djika ia dalam perdjoangannja "memberontak" terhadap hukum2 dan ikatan2 jang lapuk itu, kata D.Rachman Sainan.

"Memberontak" terhadap hukum2 jang lapuk adalah hak tiap rakjat.

Gubernur Djawa Barat,setelah menghargai kebidjaksanaan perdjoangan PPDI Djawa Barat selama ini, menegaskan bahwa "memberontak terhadap ikatan2 lama jang lapuk adalah hak bagi tiap2 rakjat jang ingin madju". Ia mendoakan, agar "pemberontakan" pamong desa itu berhasil setelah dilakukan dengan tertib.

"Inlandsche Gemeente Ordonnantie" diakui oleh Gubernur harus diganti dengan peraturan atau undang2 jang membawa kemadjuan. Tapi, kata Gubernur, membikin undang2 adalah gampang,sedang melaksanakannja tidaklah demikian. Tentang ini ditjontohkannja undang2 no. 22 dan 48 jang pelaksanaannja menghadapi kesulitan2.

Gubernur mengandjurkan, supaja sebelum "Inlandsche Gemeente Ordonnantie" dihapuskan, hendaknja sudah terlebih dahulu tersedia suatu konsepsi baru jang berisi djaminan2, bahwa konsepsi itu akan lebih madju daripada jang diganti.

Hamdani jang mewakili Menteri Dalam Negeri mengatakan,bahwa desa adalah sendi pemerintahan jang akan berpengaruh buruk atau baik kepada organisasi tata-negara,maka kehidupan desa2 itu haruslah dipelihara dengan baik2.

Hamdani djuga menjatakan, bahwa untuk memodernisir desa itu tidaklah dapat dilakukan dengan merombak2 begitu sadja. (Antara, 30/4-'52).

ROMBONGAN OLYMPIADE INDONESIA BERANGKAT PERTENGAHAN DJUNI

Mengenai pengiriman utusan2 Indonesia ke Olympiade Helsinki jang akan dimulai pada tanggal 19 Djuli hingga tanggal 3 Agustus, lebih djauh diperoleh kabar, bahwa telah direntjanakan untuk memberangkatkan rombongan Olympiade Indonesia itu pada pertengahan bulan Djuni.

Berhubung dengan djabatannja jang baru sebagai Menteri Pertahanan, maka Ketua Komite Olympiade Indonesia S.P.Hamengku Buwono ke IX tak djadi berangkat. Jang akan menggantikannja sebagai pemimpin rombongan ditetapkan Dr.A.Halim, wakil Ketua K.O.I.

-Turut serta-

Turut serta sebagai pemimpin tehnik Dr.A.Saleh Ketua Komisi Tehnik K.O.I. jang ditugaskan djuga sebagai dokter dari rombongan Indonesia ke Helsinki nanti.

Selain kedua anggauta putuk pimpinan K.O.I. itu akan turut djuga dalam rombongan Indonesia itu, Major Suhardi,Ketua Komisi Peralatan K.O.I. jang mungkin djuga akan mewakili PASI dalam kongres I.A.A.F. (International Amateur Atletic Federation).

Lain2 anggauta rombongan ada disebut2:
Dr.Poerwo Soedarmo selaku wk. Persatuan Berenang Seluruh Indonesia jang akan menghadiri kongres federasi berenang sedunia.

Joemarsono selaku wakil PSSI untuk menghadiri kongres F.I.F.A.
H.I.Moh.Arifin selaku wakil IAWLA untuk menghadiri kongres International Halter Ophile at Culturist.

Para peserta perlombaan2 ditetapkan:
Sudarmadja pemenang rekord Indonesia dalam lontjat tinggi.
Soeharko djuara PON ke II dalam perlombaan berenang gaja bebas djarak 200 M.
Thio Ging Hwie "the best lifter" dari IAWLA Senioren Contest tahun 1952. (Antara, 29/4-'52).

MENTERI PERTAHANAN: ANGKATAN PERANG AKAN GIRANG APABILA SOB DAPAT DIHAPUSKAN DENGAN LEKAS.

Pihak Angkatan Perang akan merasa girang, apabila S.O.B. dapat dihapuskan dengan selekas-lekasnja, sebab memang bukanlah mendjadi kewadjiban Angkatan Perang untuk mendjalankan tugas polisionil. Penghapusan S.O.B. akan membebaskan Angkatan Perang dari tugasnja sekarang ini, jang terasa berat olehnja, dan akan memberi kesempatan kepadanja untuk mengadakan konsolidasi kedalam, dan untuk mempertinggi mutunja. Demikian keterangan Menteri Pertahanan Hamengkubuwono kepada pers kemarin di Istana Merdeka, setelah selesai upatjara penjumpahan Menteri Luar Negeri Mukarto.

Oleh Menteri Pertahanan ditambahkan, bahwa untuk penghapusan S.O.B. itu polisi dan pamongpradja hendaknja sudah siap untuk mengoper pekerdjaan2 jang sampai sekarang dipikulkan kepada pihak tentera didalam lapangan keamanan didalam negari.

Berhubung dengan maksud mengadakan konsolidasi didalam Angkatan Perang itulah maka menurut Menteri Pertahanan, perhatiannja sekarang terutama ditjurahkan untuk penglaksanaan dengan sebaik-baiknja reorganisasi Angkatan Perang. Hal itu dipandangnja sebagai kewadjibannja jang utama, dengan tidak mengurangkan perhatiannja pada masalah2 pemulihan keamanan didalam negeri.

Tentang pemulihan keamanan didalam negeri Menteri Hamengkubuwono menundjukkan optimisme jang besar.(Antara, 30/4-'52).

CB SOBSI SOKONG PENUH KABINET WILOPO

"Antara" mendapat keterangan bahwa CB SOBSI telah memberikan instruksi kepada semua tjabangnja diseluruh Indonesia,supaja segera mengambil tindakan menghentikan aksi2,sesuai dengan garis pendirian jang telah diambil oleh SOBSI guna memberikan sokongan kepada kabinet Wilopo sekarang.

Ini berarti bahwa dalam waktu jang singkat, kaum buruh diseluruh Indonesia, terutama sekali jang telah tergabung dalam SOBSI akan memperlihatkan sokongannja jang konkrit terhadap kabinet Wilopo sekarang sesuai pula dengan kepertjajaan bahwa kabinet Wilopo akan senantiasa sanggup mengatasi segala perselisihan perburuhan dengan dasar jang menguntungkan kepada fihak buruh.

Dan sikap ini tidak boleh tidak adalah satu backing jang terkuat dari masjarakat terhadap kabinet Wilopo, jaitu suatu backing jang belum pernah didapat oleh lain2 kabinet sedjak Renville. (Antara, 30/4-'52).

KONPERENSI PARA INSPEKTUR DAN KEPALA2 DJAWATAN SOSIAL

Dengan maksud untuk mengadakan persiapan2 bagaimana melaksanakan penjerahan kekuasaan dari Pusat ke Propinsi dengan sebaik2nja, kemarin pagi telah dimulai konperensi dinas para inspektur dan kepala2 Djawatan Sosial seluruh Indonesia di Djati Petamburan, Djakarta, dibuka oleh Menteri Sosial Anwar Tjokroaminoto. Kemudian oleh Sekretaris Djenderal Kementerian Sosial, Mr.Iman Sudjahri, didjelaskan rentjana penjerahan kekuasaan Pemerintah Pusat kepada Propinsi dan hal2 jang berhubungan dengan itu,misalnja soal2 kepegawaian dan keuangannja. (Antara, 30/4-'52).

-MENTERI-

MENTERI DJUANDA TENTANG BERACHIRNJA KEADAAN PERANG DENGAN DJEPANG

Berkenaan dengan berachirnja keadaan perang antara beberapa negara dengan Djepang dan mulai berlakunja perdjandjian perdamaian San Francisco, Menteri Perhubungan Djuanda menjatakan pendapatnja kepada "Antara", bahwa bagaimanapun djuga hendaknja setjepat mungkin diatur perhubungan umum antara Indonesia dan Djepang dan tidak boleh dibiarkan terlalu lama.

Mengatur perhubungan umum antara Indonesia dan Djepang itu, menurut Djuanda, ada dua djalan jang bisa ditempuh. Pertama, jaitu mengadakan perdjandjian perdamaian tersendiri dengan Djepang atau meneruskan usaha kearah itu dengan melalui saluran2 jang terdapat dalam piagam San Francisco. Mana diantara dua djalan ini jang dianggap terbaik, Menteri Djuanda belum bersedia menerangkannja, akan tetapi ia katakan, bahwa apabila perhubungan itu telah dapat diatur, maka Djepang akan mempergunakannja untuk memperkuat kedudukan ekonominja dan mereka membutuhkan hubungan itu terutama dengan negara2 Asia dan barangkali jang paling penting dengan Indonesia. Dalam hubungan ini Djepang sangat memerlukan bahan2 mentah dari Indonesia untuk membangun perekonomiannja dan sebaliknja buat Indonesia faedahnja ialah, bahwa dengan export bahan2 mentah itu, kita dapat menggerakkan dan memperkembangkan produksi.

Menteri Djuanda terangkan, ia tidak merasa chawatir terhadap kebangunan kembali bangsa Djepang itu, tetapi jang dichawatirkannja ialah djustru apabila bangsa Indonesia tidak tjepat dapat membangun negaranja dilapangan perekonomian.

Menurut Menteri Djuanda, pelaksanaan perhubungan dengan Djepang terutama dalam lapangan perekonomian itu dapat didjalankan, antara lain misalnja dengan investasi modal Djepang untuk mendirikan perusahaan2 tjampuran, dengan sjarat2, bahwa kita jang akan memegang saham jang terbesar. Kemungkinan2 jang sedemikian itu, kata Djuanda, telah dibitjarakannja setjara informil dengan pembesar2 tinggi pemerintah Djepang dan pemuka2 dalam dunia perdagangan sewaktu mengundjungi Djepang beberapa waktu jang lalu. (Antara, 29/4-'52).

SUARA PERS INDONESIA TENTANG DJEPANG.

Tentang dikembalikannja lagi kedaulatan Djepang pada tg.28/4 ini beberapa harian di Djakarta menulis perdapatnja sbb:

Pemandangan: Antjaman buat negara2 Asia.

Hidupnja kembali militerisme Djepang, adalah merupakan antjaman buat negara2 Asia jang mendjadi negara2 tetangganja. Pengalaman pahit jang baru dirasakan oleh sementara negara2 Asia tetangga Djepang bukan hanja belum kundjung lupa, tapi sebagian belum lagi sembuh dari luka-lukanja.

Meskipun undang2 dasar Djepang tidak menghendaki persendjataan kembali Djepang, dan Djenderal Mac Arthur telah menimbulkan kesan kepada dunia seolah-olah bangsa Djepang sudah ditjitak djiwanja dengan demokrasi, tapi hakekat keadaan jang sebenarnja belum ada perobahan jang penting dalam djiwa bangsa Djepang. Djaman pendudukan jang 6½ tahun itu, belumlah sanggup merobah bangsa Djepang dari sumber-dasarnja. Jang tampak berobah selama ini sebetulnja tjuma terbatas pada kulitnja sadja. Malah, bukan suatu mustahil sesudah hari ini, dunia akan menjaksikan betapa reaksi akibat tertekannja djiwa bangsa Djepang selama masa pendudukan tentara Serikat itu.

Disamping orang dapat pahamkan timbulnja reaksi-djiwa jang demikian pada bangsa Djepang djuga tidak bisa diabaikan rol jang dipegang oleh Amerika bagi mendjadikan Djepang sebagai bentengnja terhadap komunisme disamping Pilipina sehingga persendjataan kembali Djepang dan hidupnja militerisme Djepang serta akibat2 selandjutnja, harus pula dipertanggung-djawabkan kepada pihak Amerika. Demikian Pemandangan.

Abadi: tergantung pada sikap Djepang sendiri.

Penerimaan Djepang dalam lingkungan keluarga bangsa2 merdeka buat sebagian besar akan tergantung kepada sikap bangsa Djepang sendiri. Rakjat didunia dan teristimewa dinegara2 jang pernah mendjadi korban pendudukan

-tentara Djepang-

tentara Djepang masih belum lupa kepada tindakan2 bangsa Djepang dahulu dan adalah suatu hal jang mudah dimengerti,djika bangsa2 lainnja didunia ingin melihat bukti bahwa rakjat Djepang telah insjaf kepada kesalahan2nja dimasa jang lampau dan bahwa sekarang mereka telah mempunjai niat dan kesungguhan untuk memperbaiki kesalahan2nja jang dahulu dengan perbuatan2 jang dapat mengembalikan kepertjajaan bangsa2 lainnja terhadapnja.

Disamping itu apa jang Djepang akan perbuat diwaktu jang akan datang ini, akan djuga mendjadi udjian bagi politik Amerika di Timur Djauh, oleh karena pemulihan kedaulatan Djepang jang setjepat ini merupakan tanggung-djawab jang terutama dari Amerika Serikat.

Sekarang mendjadi pertanjaan, apakah selama 6 tahun pendudukan Amerika Serikat rakjat Djepang jang dahulu terkenal sebagai ultranasionalistis, chauvinistis, militeristis dan aggressief itu memang telah berobah achlaknja mendjadi bangsa jang tjinta kemerdekaan dan tjinta perdamaian, bukan sadja buat diri sendiri tetapi djuga bagi dunia lainnja.

Djika Djepang dapat menjesuaikan dirinja dengan penuh keinsjafan kepada tanggung-djawab dan kewadjibannja dilingkungan bangsa2 merdeka lainnja, maka Djepang akan disambut dengan ramah-tamah oleh bangsa2 lainnja, akan tetapi djiga terlihat tanda2 bahwa Djepang hendak mengulangi perbuatan2nja djang dahulu, maka Djepang dapat jakin bahwa dia tidak bisa mendapat sahabat2 diantara bangsa2 lainnja didunia ini. Demikian Abadi.

Sumber: Baru namanja jang berdaulat.

Dengan masih tinggalnja tentara Amerika di Djepang itu barulah namanja sadja Djepang kembali berdaulat, sedang pada hakekatnja garis umum politik Djepang baik keluar, maupun kedalam, kiranja masih tetap dibawah pengawasan Amerika, dan bagi Djepang sendiri keadaannja masih tetap serba sulit, lebih2 karena funksi jang tempo hari didukung regiem Chiang Khai Shek di Asia, jakni merupakan tangan-kanan Amerika digaris pertahanan terdepan terhadap komunisme, kini dipikulkan atas bahu Djepang.

Dengan penjerahan kedaulatan setjara formil ini, kiranja Djepang akan menggunakannja untuk membuka perdagangannja kembali dengan Tiongkok (RRT sekarang), karena hidup-tidaknja Djepang sedjak dari dahulu telah merupakan kenjataan, adalah tergantung pada perdagangan dengan Tiongkok jang termasuk daerah terbesar jang membeli paling banjak barang2 Djepang, lebih2 karena djaraknja jang begitu berdekatan itu.

Andai kata Djepang berhasil membuka perdagangannja kembali dengan Tiongkok sebagai sediakala, maka kiranja bukan perdagangan barang (materie) sadja nanti jang akan dilakukan,tapi djuga perdagangan dalam ideologie, dan dalam hal sedemikian agaknja adalah susah sekali bagi Djepang untuk menahan "bandjir" komunisme kenegerinja, sekalipun tentara Amerika tetap berada di Djepang.

Djika hal ini terdjadi, akibatnja akan besar artinja bagi dunia, djuga bagi Indonesia jang belum djuga meratipiser Perdjandjian Perdamaian dengan Djepang.

Dilihat dari sudut ini, harian Sumber menganggap baik djika tertjapainja perdjandjian bilateral antara Indonesia dengan Djepang diusahakan selekas-lekasnja.
Demikian Sumber. (Antara, 29/4-'52).

-KESAN2 DARI.....-

KESAN2 DARI SANGIHE-TALAUD
(Oleh Subakir)

I.

Dari redaksi:Wartawan "Antara" Subakir jang bersama2 dengan rombongan Djawatan Penerangan Propinsi Sulawesi telah menindjau daerah kepulauan Sangihe-Talaud,menuliskan kesan2nja dalam artikel berturut2 mengenai pemerintahan, dewan perwakilan, kehakiman,perhubungan, faktor2 ekonomis, pendidikan, perburuhan, kebudajaan dan lain2 dengan kesimpulan, bahwa masjarakat Sangihe-Talaud jang terpentjil itupun sedang berkembang dalam segala lapangannja, tumbuh mentjari djalan untuk menjesuaikan diri dengan panggilan zaman jang patut mendapat perhatian dan bimbingan tegas dari Pemerintah Pusat, maupun dari para pemimpin.

Kata pengantar

Djika seorang intelek-tinggi seperti doktor Blankhart dalam memorandumnja menghendaki supaja kemungkinan2 pembangunan Sangihe-Talaud diselidiki oleh seorang ahli (insinjur) ekonomi dalam waktu enam bulan, maka mustahillah bagi seorang wartawan! dalam perdjalanan beberapa hari sadja mendapatkan pengetahuan jang mendalam tentang masjarakat Sangihe-Talaud. Dalam hubungan ini, maka segala sesuatu jang saja tuliskan adalah sekedar kesan2 berdasar atas keterangan2 jang saja perdapat dari kalangan2 jang karena pekerdjaannja atau kedudukannja dipandang mengetahui persoalannja.

Maksud terutama dari tulisan ini, ialah memperkenalkan Sangihe-Talaud, daerah kita jang terpentjil itu, kepada chalajak ramai dengan pengertian, bahwa tanah-air kita meliputi daerah jang sangat luasnja, diantaranja banjak sekali jang masih terpentjil letaknja, tetapi jang tiada ketjuali menunggu hasil usaha pembangunan dalam segala lapangan. Kesempatan menindjau kepulauan Sangihe-Talaud sengadja kita ambil, djustru karena letak daerah itu pada bagian jang paling Utara dari tanah-air kita dan merupakan daerah perbatasan dengan negara tetangga Pilipina. Dan meskipun letaknja sangat djauh dari Djakarta dan tidak mudah ditjapai karena sukarnja perhubungan, namum akan segera terasa bagi tiap2 penindjau, betapa besar pengaruh revolusi jang tertjetus dari pusat meluas sampai kemasjarakat jang seterpentjil2nja sekalipun. Proses masjarakat Sangihe-Talaud jang terutama ialah usaha meloloskan diri dari alam feodal jang beku dan tumbuh berkembang mentjari djalan untuk menjesuaikan diri dengan panggilan zaman. Proses pertumbuhan itu berwudjud dalam usaha2 membangun pemerintah jang demokratis, membangun dalam lapangan ekonomis dan pendidikan. Rintangan terutama daripada usaha2 itu terletak dalam masalah sangat kurangnja atau hampir tidak adanja alat2 perhubungan modern (kapal atau perahu2 bermotor) jang memudahkan persambungan antara pulau jang satu dengan pulau jang lain serta kedaerah luaran. Dan sebagai pembawaan daerah jang minus, rakjat Sangihe-Talaud pada umumnja melarat, dan inipun merupakan suatu faktor jang prinsipieel pula jang tidak memudahkan pembamgunan ekonomis.Menurut keterangan resmi, 30% dari djumlah patient dirumah sakit Taruna menderita kekurangan zat makanan dan karenanja lalu mudah kena penjakit umum jang ada disana, jakni malaria.

Rakjat Sangihe taat kepada Pemerintah Pusat, dan ketaatan inipun telah di-"demonstreer" oleh penduduk pulau2 diutara,misalnja Miangas, Marure dan sebagainja jang penghidupan ekonomisnja tergantung kepada Mindanao (Pilipina), tetapi tetap kuat kesadarannja, bahwa mereka adalah warganegara Indonesia.

Dengan singkat, masjarakat Sangihe-Talaud ingin membangun dan sedang membangun dengan apa jang ada, jang sepatutnja lebih mendapat perhatian dan bimbingan dari Pemerintah Pusat, maupun dari para pemimpin, agar segala sesuatu dapat tjepat dikonsolideer,

-terutama-

terutama berhubung dengan sangat pentingnja letak kepulauan itu sebagai daerah perbatasan.

Kepulauan Sangihe-Talaud dan penduduknja.

Daerah Sangihe-Talaud terdiri atas kl. 70 pulau ketjil dan besar, tersebar diantara 2°-4' dan 5°-35' Noorderbreedte serta 125°-30', dan 127°-10' Oosterlengte, seolah2 merupakan batu2 lontjatan diantara Mindanao (Pilipina) dan Minahasa. Luas daerah ada 2.070 Km^2 dengan penduduk 150.296 djiwa, sehingga rata2 tiap Km2 ada 73 djiwa. Tetapi karena tidak semua pulau2 itu didiami, terutama karena sulitnja perhubungan dan karena keadaan pulau itu sendiri, maka disamping adanja pulau2 jang lengang, terdapat pula pulau2 jang padat atau setengah padat dengan penduduk. Misalnja pulau Tagulandang jang luasnja 90 Km2 dan letaknja 64 mil dari Menado mempunjai 157 penduduk tiap 1 Km2. Jg terdapat adalah pulau Siau, jaitu 214 djiwa per 1 Km2, sedang pulau Sangihe-Besar berpenduduk 124 djiwa per 1 Km2, pulau Talaud sebagai pulau jang terbesar (1.190 Km2) mempunjai 22 penduduk tiap 1 Km2. Karena padatnja pulau Siau berpuluh ribu penduduknja merantau ke Minahasa dan Sulawesi Utara, kebanjakan memburuh dikebun2 kelapa.

Pulau jang terutara adalah pulau Miangas, luasnja 11 Km2, letaknja djauh lebih dekat ke Mindanao (Pilipina) daripada ke Taruna (ibukota Sangihe-Talaud), sehingga penduduk pulau Miangas jang djumlahnja lebih kurang 2.000 itu dalam kehidupan ekonominja lebih banjak tergantung pada Mindanao daripada ke Taruna, terutama pula karena sukarnja perhubungan. Oleh karena letaknja jang "istimewa" itu, tidak sadja diwaktu2 belakangan ini penduduk pulau Miangas tersebut terlibat dalam "persoalan" dengan negeri tetangga kita Pilipina, bahkan didjaman Hindia Belanda pernah terdjadi perbedaan paham antara Amerika disatu pihak dan Belanda dilain pihak tentang pengertian siapa sebenarnja jang berhak atas pulau Miangas (Palmas) itu, jang achirnja atas keputusan arbitrage internasional ditentukan, bahwa pulau Miangas masuk daerah Hindia Belanda (1928).

Untuk mendapatkan gambaran betapa luasnja lingkungan lautan jang menggabungkan kepulauan2 Sangihe-Talaud jang terserak menabur keutara itu, baiklah kita tjantumkan angka2 djarak mil antara pulau2 jang terpenting, sebagai berikut:

Menado-Tagulandang 64 mil. Tagulandang - Siauw 32 mil, Siau-Sangihe 60 mil, Sangihe -Talaud 108 mil, Talaud - Nanusa 69 mil, Nanusa - Miangas 58 mil, Menado - Miangas 391 mil (1 mil = 1.8 Km).

Dari djumlah 150.296 penduduk Sangihe-Talaud, terdapat kurang lebih 2.800 penduduk golongan Tionghoa, 130 golongan Arab dan 6 perang Eropa. 743 penduduk Tionghoa, menolak kewarga-negaraan Indonesia, begitu djuga 6 orang Eropa tersebut, sedang 7 penduduk Arab totok ingin masuk mendjadi warganegara Indonesia dengan djalan naturalisasi.

Sebagian terbesar dari penduduk Sangihe- Talaud memeluk agama Protestan (85%), pemeluk Islam ada 15.000, Katholik 3.000 dan animisten jang disana disebut dengan istilah "kapire" ada 2 sampai 3.000 orang.

Pemerintahan

Daerah Sangihe-Talaud terdiri atas 6 swapradja, jaitu swapradja Kendahe-Tahuna, swapradja Manganitu, swapradja Tabukan, swapradja Siau, swapradja Tagulandang dan swapradja Talaud. Sebagai pembawaan revolusi jang pada umumnja tidak menghendaki lagi kekuasaan radja2, maka daerah Sangihe-Talaud jang terpentjil itupun mengalami ketegangan2 disekitar kekuasaan-pemerintahahan jang mengakibatkan terdjadinja beberapa phase perubahan organisasi pemerintahan.

Phase perubahan jang terachir mengenai organisasi pemerintahan itu, berwudjud dengan terbentuknja suatu kabupaten-otonom

-dengan-

dengan DPD serta DPR-nja, meskipun pembentukan itu belum mempunjai kekuatan hukum, pertama kali karena masih adanja dualisme antara peraturan NIT No.44 dan Undang2 Republik No.22, kedua kalinja karena peraturan Hindia Belanda tentang kekuasaan swapradja (zelfbestuursregelen 1938) sampai kini belum ditjabut, sehingga dengan begitu "juridisch formeelnja" kekuasaan pemerintahan sebenarnja masih ada pada swapradja.

Dengan begitu pemerintah daerah kabupaten-otonoom jang djiwanja disatu pihak sesuai dengan Undang2 Republik No.22, dan dilain pihak sesuai dengan undang2 NIT No.44 itupun lalu mengambang (drijven) diatas keswapradjaan jang sendinja (althans juridisch formeel) sangat berlainan dengan djiwa undang2 No.22 maupun 44 tersebut.

Dualisme jang sedemikian itu tentunja akan mempersukar djalannja pemerintahan, andai kata tidak ada faktor:

1. 5 dari 6 radja sudah tidak mendjadi kepala swapradja lagi (diantaranja jang 3 dipantjung oleh Djepang didjaman pendudukan), dengan begitu, ketjuali swapradja Talaud jang sampai kini masih ada radjahja (bahkan atas kontrak politik 1949 dengan Hindia Belanda), kelima swapradja lainnja itu diwakili oleh para adatfunctionaris, jang 4 oleh Djogugu, jang satu (Siau) oleg seorang "Presiden Pengganti Radja".
2. Keinsjafan pihak swapradja, bahwa rakjat jang berevolusi tidak menjukai lagi kekuasaan swapradja, dan dalam hal ini keinginan rakjat itu telah tersalurkan dalam bentuk resolusi DPR daerah Sangihe-Talaud jang menghendaki hapusnja swapradja.
3. Terlepasnja kekuasaan swapradja dalam pengadilan karena adanja reorganisasi badan2 kehakiman di Sangihe-Talaud jang menudju kearah pembentukan pengadilan negeri.
4. Terlepasnja kekuasaan perundang2an dari tangan swapradja ketangan DPR daerah.
5. Kenjataan, bahwa tidak ada satupun dari ke-enam swapradja itu jang mempunjai daerah dan penduduk serta status jang begitu besar atau tinggi sehingga dapat disamakan dengan satu kabupaten, sehingga dengan begitu memudahkan "penggabungan" swapradja2 itu kedalam suatu kabupaten otonoom jang dikepalai oleh ambtenaar negara jang diangkat oleh pusat pemerintah.
6. Kenjataan, bahwa bupati, patih dan alat2 negara lainnja jang diangkat oleh Pemerintah itu, karena pendidikan dan pengalamannja dapat menundjukkan "keunggulannja" dalam hal ilmu pemerintahan modern, sehingga mau tidak mau pihak swapradja mengakui "superioriteit" mereka, meskipun DPR jang telah gagal dalam hal mentjalonkan kepala daerah dari kalangan tenaga2 di Sangihe-Talaud sendiri kini masih bersikap "wait and see" terhadap kebidjaksanaan kepala daerah jang diangkat oleh Pemerintah Pusat dari luar Sangihe-Talaud itu.

Demikian faktor2 jang memudahkan djalannja pemerintahan di Sangihe-Talaud, sehingga pada hakekatnja soal swapradja sudah tidak mendjadi soal lagi. Usaha memperkuat kedudukan pemerintahan daerah didjalankan lebih landjut dengan persiapan pembagian Sangihe-Talaud mendjadi 7 katjamatan jang tergabung dalam 3 kawedanan. Djika persiapan ini kelak sudah terlaksana, praktis tiap2 swapradja "digenggam" oleh satu ketjamatan, ketjuali swapradja Talaud jang luas itu jang akan "digenggam" oleh dua ketjamatan. Pembentukan 3 kawedanan itu dipersiapkan sebagai berikut:

1. Kawedanan Sangihe,
2. Kawedanan Siau-Taguladang, dan
3. Kawedanan Talaud.

Para adat functionarissen, pengganti2 kepala swapradja itu kabarnja telah disuruh memilih antara dua, tetap djadi adat-

functionaris ataukah mendjadi antenar negara (pamong pradja). Apabila mereka memilih mendjadi antenar negara, mereka akan terlepas dari hak2 keswapradjaannja (dapat dipindahkan dsb.) dan harus pula memenuhi sjarat2 jang diperlukan, sebaliknja djika mereka memilih tetap mendjadi adat-functionaris, sudah boleh dibajangkan, bahwa peraturan2 jang akan datang tentunja akan lebih mempersempit "kenikmatan2" jang sampai kini masih bisa diperdapat oleh seorang adat-functionaris.

Tidak begitu meleset kiranja, djika dikatakan, bahwa proces kearah mendemokratiseer pemerintahan di Sangihe-Talaud seolah2 merupakan suatu gerak kaka-tua (nyptang) dari atas dan dari bawah, jaitu dari pemerintahan dengan usaha2nja melaksanakan pembentukan kabupaten otonom jang volwaardig dan dari rakjat melalui DPR-nja jang telah meminta hapusnja swapradja. Dan djika kedua gigi kaka-tua itu bertemu, maka swapradja akan terdjepit dan patah, dan lambat-laun akan hilang pula sisa2 pengaruhnja, pembawaan revolusi!

Sungguhpun begitu - supaja segala sesuatu berdjalan menurut hukum - penting sekali adanja undang2 pembentukan daerah2 otonom jang uniformeel buat seluruh Indonesia dan perlu ditindjau kembali zelfbestuursregelen 1938 itu untuk disesuaikan dengan kehendak zaman.

Sebagai tjatatan, patut pula dikemukakan, bahwa rentjana begroting Sangihe-Talaud 1952 besarnja Rp.13.075.000.- terbagi atas pos2 dinas biasa Rp.8½ djuta dan dinas luar biasa (pembangunan) Rp.4½ djuta. Dari begroting dinas biasa itu lk. 40% dipergunakan untuk pengeluaran pos pengadjaran. (Antara 24 April 1952).

Akan disambung.

Ruang Kebudajaan

Kesenian.

MEMPERINGATI PENJAIR CHAIRIL ANWAR

Pada saat ini kita berhadapan muka dengan tugawaktu peringatan kematian seseorang, jang tiada bisa dilalukan begitu sadja, teristimewa oleh orang2 jang mengikuti kehidupan kesusasteraan dan kebudajaan Indonesia dewasa ini. Seseorang disini ialah, manusia dan penjair Chairil Anwar, jang mendjelang usia 27 tahun, meninggal 28 April 1949, djadi 3 tahun jang lalu di Djakarta. Almarhum Chairil Anwar lahir pada tanggal 26 Djuli 1922 di Medan.

Barangkali, terlepasnja nilai2 tradisionil dan keagamaan kolot jang tiada memberi kemungkinan2 hidup lebih luas dan dalam dari djalinan kepertjajaan dan alam pikiran angkatan muda dewasa ini dan kebentjian Chairil Anwar sendiri kepada formalisme jang didukung sepenuhnja sehingga malakalmaut mengachiri riwajatnja, membawakan pula anggapan jang tjenderung untuk mengurangi arti peringatan meninggalnja penjair Chairil Anwar pada hari ini. Suatu kebiasaan adanja kehilangan2 dan penemuan2 jang diakibatkan djurang2 ternganga jang tersembul sebelum dan sesudah perang jang kedjam dan revolusi jang meletus disana-sini. Seledjang terbang nampak serupa dilema jang sederhana. Namun bagi saja sendiri, pandangan saja terhadap tokoh sematjam Chairil Anwar, adalah pandangan terhadap suatu revolusi jang tersendiri, dalam tradisi kesusasteraan Indonesia (terutama puisinja), dalam pengertian jang sebenarnja, dimana apabila saja terkenang kepadanja, saja tunduk terpaku sebagai penghormatan jang sewadjarnja. Penghormatan terhadap adanja wilajah pemikiran dan perasaan jang penuh dengan nilai2 baru. Pengertian revolusi tadi, bukanlah titik perhentian jang tergenang darah semata-mata, melainkan suatu kegiatan jang ditudjukan kearah suatu harmoni, jang mendjadi idam-idaman seluruh ummat manusia dalam lingkungannja masing2. Dalam

-hubungan ini,-

hubungan ini, segala bentuk pemudjaan jang sia-sia dan chianat jang tiada beralasan terletak diluar watas-watasnja.

Barangkali pula, dalam susunan perumusan bentuk dan nilai kesempurnaan manusia jang begitu pudar dan pelik, kepada Chairil Anwar orang melemparkan kritik-kritik jang tadjam (jang sering menikam jang melemparkannja sendiri), orang mendjauhinja dan kemudian memandangnja dari djarak jang tertentu. Tetapi hari ini kita menempatkan Chairil Anwar pada kedudukannja jang sesungguhnja, bukan sebagai ahli pikir, bukan sebagai penulis roman, tetapi sebagai seseorang jang memahatkan pemikiran, romannja, dalam daerahnja, dalam sadjak-sadjaknja, sebagai seorang penjair.

Siapakah sebenarnja Chairil Anwar?

Djawabnja tiada terletak kepada kata2 Chairil: Aku akan menjerahkan seluruh hidupku bagi kesenian, jang walaupun nampaknja terlalu pamflettieus, lebih merupakan sembojan bagi dirinja sendiri. Walaupun dari djurusan tertentu, karena tiadanja kritik jang imanen ada penolakan, Chairil Anwar adalah sebuah revolusi. Atau sedikitnja, dalam perbandingan kebesarannja masing2, Chairil Anwar dapat dipersamakan artinja dengan Rainer Maria Rilke jang djuga sedikitnja mempengaruhi perkembangan peribadi Chairil Anwar, sebuah tokoh besar jang mendukung peralihan dari djaman klasik ke djaman romantik, jaitu djaman Barok. Tetapi pada Chairil Anwar, jang berlaku bukan sadja pemindahan tempat subjek. (Pedoman Radio, 27/4-'52).

LANGENDRIJAN.

Meskipun tidak sering diselenggarakan seperti halnja dengan Wajang Orang, Wajang Kulit, Golek, Ketoprak dsb.nja namun kesenian ini sangat tinggi nilainja.

Rakjat sendiri tidak begitu mengenalnja sebab pertundjukan ini seperti halnja dengan Serimpi, Bedojo dsb.nja termasuk suatu pertundjukan di Kraton atau istana teristimewa Mangkunegaran atau setidak-tidaknja pada hari2 jang istimewa sadja.

Jang mentjiptakan permainan adalah Seri Paduka Mangkunegoro jang ke-IV, hingga karenanja djuga didaerah inilah pertundjukan ini sering diadakan.

Langendrijan mempertundjukkan tjeritera keradjaan Madjapahit pada waktu seorang puteri, Ratu Aju namanja jang mendjadi radjanja dan Menak Djingga, radja di Belambangan jang djuga mendjadi djadjahan keradjaan Madjapahit melakukan pembrontakan.

Malapetaka jang menimpa negara tersebut hanja dapat dielakkan oleh seorang Ksjatria, Damarwulan namanja, jang pertama-tama tidak dikenal oleh siapapun,akan tetapi ketika pahlawan2 Madjapahit semuanja sudah tidak ada jang berani berlawan lagi dengan Menak Djingga, maka ialah jang dapat membunuhnja dan jang kemudian kawin dengan Ratu Aju.

Jang dipentingkan dalam pertundjukan Langendrijan ini ialah njanjiannja. Dan memang seluruh tanja djawab, "perang tanding" dsb.nja semuanja disertai oleh njanjian jang meraju hati,menggembirakan, dan sangat menarik sekali.

Memang disinilah letak keindahan Langendrijan.
(Pedoman Radio, 27/4-'52).

SENI SUNDA STUDIO DJAKARTA.

Tiap hari minggu pagi Gedung Artja di Djakarta senantiasa dihandjiri oleh bermatjam-ragam pengundjung. Mereka tidak hanja datang untuk melihat dan dilihat, tetapi terutama untuk menikmati bunji gamelan, jang telah bertahun-tahun menetap disitu didjaga oleh patung Buddha, Sjiwa, Wisnu dan para pengiringnja. Salah suatu siaran jang sangat populer dan menarik penonton banjak adalah permainan Seni Sunda Studio Djakarta.

Seni Sunda Studio Djakarta kini dipimpin oleh Tuteng Djauhari. Dia dilahirkan di Bandung pada tanggal 17 April 1914. Dia seorang seniman jang bertjita-tjita djauh. Diakuinja bahwa sering ada kritikan pedas terhadap dia sebagai pemimpin suatu gamelan Sunda. Misalnja bahwa dia terlampau banjak beraliran modern.

-Tetapi sesungguhnja-

Tetapi sesungguhnja Pak Tuteng lebih dari tjinta pada lagu2 patokan. Hanja ia berpendapat, bahwa dalam abad ini Seni Sunda tidak melulu untuk didengarkan oleh orang Sunda jang mengerti seninja. Seni Sunda harus pula dapat dimengerti oleh angkatan muda, jang tentu telah berobah alam pikiran dan alirannja. Pun harus dikenal oleh orang2 Indonesia jang berasal dari daerah2 lain. Dan tertjernakan oleh orang2 asing. Maka Tuteng Djauhari selalu berusaha untuk mentjiptakan lagu2 denga aliran baru. Perkataannja disusun dalam bahasa Indonesia dan sedemikian rupa, sehingga dalam isinja tersimpul penerangan bagi rakjat. Tjiptaannja jang kini sedang populer adalah "Gandrung Irian", "Suasana baru".

Berturut-turut telah dilahirkannja: Putera Samudra, Pahlawan Angkasa, Pahlawan Negara, Bhinneka Tunggal Ika, Sabda Ibu Pertiwi, Djerit Dewi Asri, Gotong rojong, Ngawuluku, Kulu2 R.R.I., Bapak Tani, Pantjasila, Masjarakat gumbira.

Tiap hari Pak Tuteng mengadakan latihan dengan para pemain dan Pesinden, guna melantjarkan lagu-lagu patokan dan mempeladjari lagu-lagu baru. Boleh dikatakan, bahwa setiap saat, dirumah maupun distudio dipergunakannja untuk meninggikan deradjat para seniman Sunda dan mentjari djalan supaja siaran-siaran Seni Sunda Studio Djakarta dapat bertambah madju. Pada tiap siaran selalu terlihat Pak Tuteng serupa seorang dirigent suatu orkes. Memperhatikan suara gamelan dan pesinden, memberi petundjuk2 pada pemain, sehingga harmonie antara gamelan dan njanjian selalu baik. Seni Sunda Studio Djakarta mempunjai tiga pesinden: Warnasari muda, Enok Marjamah dan Upit Sarimanah.

Warnasari muda dilahirkan di Krawang pada tgl. 25 Mei 1928. Disamping tamat sekolah rakjat, djuga bersekolah pada Sekolah Seni Sunda 8 tahun.

Enok Marjamah jang biasa menjanjikan lagu2 patokan adalah seorang seniwati jang berpengalaman. Dari tahun 1940 dia bekerdja sebagai pesinden Wajang Golek dan Orkes Ketjapi Pantjawarna di Studio Bandung. Kemudian pada Gamelan Wirahmasari.
Kini berhasil mentjiptakan lagu2 Pantjasila dan Djakarta Raya pada tahun 1951. Achirulchalam jang sekarang mendjadi buah bibir para pendengar dan penonton, ialah Nji Upit Sarimanah. Telah mendjadi ketentuan baginja untuk membawakan lagu-lagu jang bertjorak modern. Karena memang suaranja dan tjara ia menjanji adalah tepat bagi pembawaan lagu-lagu sematjam itu. Upit dilahirkan di Purwakarta pada tanggal 16 April 1928. Pada tahun 1945 dia tamat S.M.P. dan sekolah Seni Sunda sampai 8 tahun. Dengan bimbingan Pak Tuteng ia tak djemu untuk melatih diri. (Pedoman Radio, 27/4-'52).

--oooOooo--

fcr CAN II/k 13/11

No. 28.
Selasa, 20 Mei 1952.-

SARI WARTA DAN ICHTISAR PERS

D A R I

I N D O N E S I A

Terbit pada tiap2 hari Selasa dan Djum'at.

Dikeluarkan oleh
Dinas Penerangan Indonesia
Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag.

HS/2865.-

PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

Information Service Indonesia

SARI WARTA INDONESIA

AHLI TEKNIS2 DJERMAN UNTUK PENATARAN ANGKATAN LAUT

Dalam pertjakapan dengan "Antara" Letnan Kolonel Romein, direktur Penataran Angkatan Laut Surabaja menjatakan, bahwa hari Sabtu j.l. telah datang di PAL dengan diantarkan oleh Mr.Oei dari Panitya tehnik Pusat dua orang Djerman, jaitu Ir.Köhnenkamp penasehat teknis dan K. von Dietlein, manager dari firma gelanggang perkapalan di Hamburg Stülken.

Letnan Kolonel Romein selandjutnja menjatakan, bahwa tenaga2 jang ada sekarang pada PAL ini tjukup untuk rentjana pekerdjaan dalam tahun ini, jaitu pekerdjaan2 pemeliharaan dan pembangunan2 ketjil. (Antara, 30/4-'52).

SYMPOSIUM

DR. SLAMET IMAN SANTOSO & MOH.SAID

"Pada masa kekalutan di Indonesia sekarang, orang telah memandang keadaan ini dari berbagai sudut, ekonomis, keamanan,politik dsb., tetapi djarang dipandang dari sudut ilmu djiwa", demikian Prof. Slamet Iman Santoso memulai pidatonja hari Minggu, tg. 27 April, di Adhuc Stat, pada bagian kedua dari symposium jang telah dimulai kemarin malam dengan pidato Sjahrir, dan debat dari Dr. Ismael.

"Walaupun ilmu djiwa tidak mempunjai prestasi dapat mengurangkan kekalutan", kata Prof. Slamet,"tetapi untuk lengkapnja,perlu pula keadaan ini disinari dari sudut ilmu djiwa. Dengan bantuan beberapa sudut lain mungkin kekalutan ini dapat diatas".

"Pada umumnja, seorang pribadi walaupun merupakan satu djiwa tunggal, tidak dapat dipandang bebas dari masjarakat. Memang sudah mendjadi nasib, takdir d.s.b.. bahwa seseorang hanja satu bagian dari golongannja. Bila seorang mengasingkan diri dari masjarakat maka ini satu keanehan, tidak biasa, dan mungkin merupakan penjakit. Seorang jang mengasingkan diri untuk mentjari kenikmatan sendiri, bertindak demikian karena ketjewa dalam masjarakat".

"Tudjuan hidup ini", kata Prof.Slamet selandjutnja,ialah mentjari kenikmatan sempurna, baik dalam dunia kebendaan,maupun dunia kebatinan. Orang jang mentjarinja ada dengan bersama2,dan pula jang mau mentjari sendiri. Tetapi kenikmatan setinggi2nja hanja tertjapai dalam satu masjarakat, baik bagi jang memimpin maupun jang dipimpin. Bagaimana bahaja seseorang jang mau hidup sendiri?"

Kedudukan satu individu dipengaruhi oleh masjarakat. Djarang sekali mendapat kenikmatan jang sesuai dengan kehendak sendiri, jang mempunjai kekuasaan mutlak. Pada awalnja mungkin ia merasa berkuasa,tetapi lama-kelamaan ia akan menderita pembatasan dari masjarakat jang tersusun, dan ia terpengaruh oleh orang2 lain.

Demikianlah dalam satu masjarakat orang pengaruh mempengaruhi antara pemimpin dan jang dipimpin. Dalam proces kompromi antara dua pihak itu, lambat laun terdjadi satu pendirian jang agak pasti, jang diakui oleh masjarakat sebagai optimaal,demikian Prof.Slamet. Pendirian optimaal ini mendjadi tudjuan dan ukuran kenikmatan hidup dari pemimpin dan mereka jang dipimpin.

Dalam masjarakat demikian keadaan agak stabil, karena tiap anggota tunduk kepada pendirian optimaal tadi. Pendirian optimaal ini tidak dapat berlangsung lama. Bila tjukup lama, maka kekuatannja untuk menguasai masjarakat dinamakan tradisi. Tetapi tradisi ini djuga berangsur2 diobah oleh evolusi, dan satu2 waktu dilanggar oleh revolusi. Sebabnja, tradisi itu amat kaku dan terbatas dan tidak dapat mengikuti perkembangan djiwa, atau karena perkembangan djiwa terlalu tjepat, lebih tjepat dari perobahan tradisi.

-Kemudian Prof.Slamet-

Kemudian Prof.Slamet mengupas keadaan di Indonesia.

Mula2 dianalisi olehnja riwajat hidup kerochanian seluruh bangsa Indonesia mulai dari Perang dunia pertama, jang sesudah masa itu Indonesia sebagai kolonie Keradjaan Belanda ditempatkan oleh sedjarah didalam lingkungan dan rangka lalu-lintas dunia internasional, dimana peranan Indonesia dititik-beratkan pada usaha perniagaan internasional. Sedjak itu maka bangkitlah kekuatan sosial dalam masjarakat jang didjadjah itu, jaitu kesadaran akan beban pendjadjahan jang mengekang rakjat seluruh Nusantara ini. Bangkitnja dan berkembangnja rasa anti-pendjadjahan ini boleh dikonstatir sebagai suatu thema lagu jang utama dan berulang2 didengar dalam seluruh lakon perdjuangan bangsa Indonesia menentang sipendjadjah. Disebutkan oleh pembitjara beberapa incident sebagai peledakan rasa anti-kolonialisme itu dizaman jang sudah, diantaranja pemogokan buruh kereta api, petjahnja huru-hara di Djawa Barat ditahun 1926, penangkapan dan pembuangan pemimpin2 rakjat. Dibelakang dan disamping itu, teruslah berdjalan proces perkembangan ("vormings-proces") dari hidup-kerochanian rakjat Indonesia itu.

Baik oleh konstelasi alam kolonialisme, maupun oleh daja rasa anti-pendjadjah jang meresap dan mengekang djiwa seluruh bangsa, maka tumbuhlah sifat2 kerochamian jang tergores pada djiwa bangsa Indonesia seluruhnja.

Sifat2 rochani asalnja dari dan merupakan accumulatie (terhimpunnja) rasa2 "anti". Proces ini tentu berdjalan didalam rangka onderbewustzijn. Sifat2 jang berkembang oleh karena accumulatie itu, dan seolah2 mengakibatkan kekuatan berfikir(ratio) dan merupakan "kenang-kenangan" sadja boleh didiagnosir sbb:1.tidak mendjelmanja suatu pedoman jang njata, 2. tidak terkembangnja rasa kesedjelmanja suatu pedoman jang njata, 3. tidak terkembangnja rasa kesedaran (bewustwording), ke-4 tidak terkembangnja rasa tanggung djawab kollektip. Dimasa perang dunia kedua accumulatie (berhimpun) rasa2 anti-kolonialisme dibubuhi lagi dengan djandji Djepang jang bersembojan: "Indonesia akan merdeka dikelak kemudian hari....." jang merupakan seakan2 "tijd-bom" sadja. Maka kemudian meletus dan berkobarlah perasaan anti-kolonialisme itu dengan pernjataan proklamasi kemerdekaan. Tetapi tetaplah pernjataan itu tidak terdukung oleh suatu sikap jang tegas, tidak bersandar pada keinsjafan dan pikiran tentang bagaimana melihat bentuk dari "kebebasan"itu.

Selama perdjuangan bangsa Indonesia mulai dari 1945 hingga 1949 maka accumulatie perasaan2 "Anti" itu dipersatukan dan disalurkan seluruhnja kedalam suatu aliran raksasa, jaitu rasa"anti-Nica" jang hasilnja merobohkan perlawanan materieel dari bangsa Belanda jang berkali2 lipat-ganda keunggulan alat perlengkapannja.

Diwaktu perdjoangan itu, maka siapa sadja jang tjara berfikirnja tidak masuk rangka rasa "anti-Nica" dan misalnja tumbuh dari ratio, dianggap musuh.

Datanglah suatu historis dalam riwajat proces "ziel- en geestesvorming" bangsa Indonesia jang merdeka itu. Dalam hal ini oleh Prof.Slamet Santoso lalu dikonstatir tanda sintegratie (petjahnja) accumulatie rasa2 "anti", jang disebabkan oleh hilangnja sasaran dari "rasa-anti" itu.

Sementara berdjalan disintegratie rasa "anti" itu, maka terdapat beberapa tanda seperti berkembangnja usaha kepartaian,diadjukannja tuntutan2 dalam segala bunji dan bentuk, dan tumbuhnja sebagai djamur setelah hudjan programma2 partai jang masing2-nja berasal dari rasa "egocentriciteit" (mengutamakan kepentingan diri sendiri) dus djauh dari rasa kollektivistis).

Menurut Prof.Slamet maka olehnja dipandang arti kemerdekaan itu hanja sebagai "code". Dan "code" itu harus diisi dengan hak maupun kewadjiban, pembatasan, hukum2 dan ukuran2 moril.

Jang lazim diketahui umum sebagai U.U.D. itu, oleh Prof. Slamet dikwalifisirnja hanja sebagai perumusan juridis sadja. Isi dari code kemerdekaan itu, malah, menurut pendapatnja,sebagainja

-harus merupakan-

harus merupakan suatu hal jang tidak tertulis (ongeformuleerd), jang bentuknja mendjelma dan didasarkan atas nilai2 tradisionil, dan merupakan pembaharuan alam berfikir dan rasa (ratio dan emotie) jang pernah dan masih mempunjai potensi dalam djiwa bangsa Indonesia. Kekuatan dan tenaga sosial itu merupakan sari dari pandangan hidup, tjara hidup (levenstijl), hukum adat-istiadat dan seluruh kebudajaan bangsa Indonesia ini.

Dalam membentangkan tjara2 bagaimana memetjahkan soal2 jang dihadapi oleh masjarakat Indonesia pada dewasa ini disegeala lapangan apapun sadja, maka achirnja oleh Prof. Slamet diandjurkan terbentuknja suatu "braintrust" (kumpulan tenaga berfikir) untuk penjelidikan tradisi lama dan baru, jang tugasnja bukan sadja memikirkan dasar rasionil sadja, tetapi djuga faktor2 emotionil. Sebab ratio sadja kandas untuk mendjadi dasar tradisi.

Dalam hubungan ini dapat diterangkan, bahwa kepertjajaan salah satu hal jang bulat dari bangsa Indonesia, tidak ada, sedang ratio berkembang djauh, berkat pengaruh dunia luar. Berkembangnja ratio sesuai dengan individualisasi, jang pada dewasa ini dan dinegeri kita mendjadi anarchistis. Dan anarchistisme inilah jang menimbulkan kekatjauan. Demikian Prof.Slamet.

Pemandangan Moh.Said.

Sebagai pendebat tampil Moh. Said, pemimpin Taman Siswa Djakarta Raya. Menurut pendapat saja, kata Moh. Said, proses individualisasi jang dikemukakan Prof. Slamet sebagai hakekat kekalutan dewasa ini hanja merupakan satu faktor dari proses dissosiasi jang sedang dialami masjarakat Indonesia. Tiap masjarakat mengandung faktor assesiatif dan faktor dissosiatif, dan keadaan dewasa ini adalah sedemikian rupa, hingga faktor dissosiatif lebih besar dari lawannja dalam djumlah maupun kekuatannja. Meradjalelanja faktor dissosiatif inilah jang mendjadi dasar dan hakekat kekatjauan dewasa ini.

Mengisi kemerdekaan didjadikan tudjuan dewasa ini, tetapi apakah artinja belum difahami oleh golongan pemimpin, apalagi golongan jang dipimpin. Pada pendapat Moh.Said, ini disebabkan oleh:

1) Bangsa Indonesia masih sangat muda;
2) Bangsa Indonesia belum mempunjai pemimpin jang mampu untuk memberi bimbingan.

Selandjutnja Moh. Said menerangkan, bahwa arti "bangsa merdeka" tidak difahami rakjat, dan pengharapannja untuk memperoleh nasib jang lebih baik tidak terpenuhi dan akibatnja terlepas nafsu diri dan nafsu golongan setjara liar, perebutan pangkat dan kedudukan, menuntut penghargaan djasa berlebih-lebihan dipihak jang terdik, keketjewaan putus asa dan sakit hati dipihak jang lemah dan bodoh.

Tanggung-djawab dari segala ini terletak sebagian besar pada kita, golongan jang dapat berfikir, jang tahu memimpin, jang ternjata gagal didalam tugas membimbing rakjat kearah djalan jang benar.

Rakjat ketjewa karena pengharapannja akan bernasib lebih baik tak dipenuhi. Rakjat sakit hati, merasa tertipu dan diperkuda, karena lapisan atas jang menikmati kemerdekaan. Tidak heran djika rakjat mentjuri, merampas dan membunuh. Seorang pentjuri kaju pernah berkata:"Saja mentjuri hanja jang dapat saja pikul. "Bapak-bapak" mengambil berwagon-wagon dengan satu tjoretan sadja".

Kita tidak berani mengoreksi anasir korup dan tjurang, karena kita sendiri ikut menghabiskan uang negara untuk pesta, membelandjai pic-nic partie, (djalan2) keluar negeri, untuk hidup serba mewah. Djawa-centriciteit dari pemerintahan menimbulkan rasa kedaerahan jang tidak enak. Penampungan bekas pedjuang tidak beres, sehingga mereka sakit hati. Usaha memelihara semangat kebangsaan dengan menggembor2kan soal Uni, KMB dan Irian tidak berhasil, karena rakjat sudah kehilangan kepertjajaan kepada pemimpin2nja. Lalu Moh. Said menguraikan kesimpulannja: 1. Kekalutan dewasa ini merupakan

-perwudjudan dari-

perwudjudan dari proses dissosiasi jaitu proses terpetjah-belah jang sedang dialami oleh masjarakat Indonesia.
2. Sebab2nja:
   a) tidak adanja daja mengikat jang kuat seperti tradisi,kebudajaan, tjara hidup.
   b) belum adanja pemimpin jang dapat mengembalikan kepertjajaan rakjat.
   c) meradjalelanja daja jang memetjah-metjah didalam masjarakat, seperti nafsu mementingkan diri dan golongan sendiri,karena ketjewa, sakit hati, dan nilai kesusilaan merosot.
3. Penjelesaian soal ini dapat ditjapai dengan djalan mentjiptakan suatu daja pengikat baru, misalnja satu tudjuan jang tegas jang dapat didjadikan pegangan oleh rakjat didalam hidupnja. Tetapi ini hanja mungkin, kalau kepertjajaan rakjat kepada pemimpin dan dirinja dapat dihidupkan kembali.

Inilah tugas mereka jang menganggap diri tergolong lapisan masjarakat jang pandai berfikir dan memimpin. Demikian Mohammad Said. (Antara, 29/4-'52).

TIDAK ADA INSTRUKSI SENTRAL BIRO S.O.B.SI.

Tentang adanja instruksi S.B. SOBSI supaja aksi2 didaerah2 dihentikan adalah tidak benar. Demikian pengumuman Sentral SOBSI jang dikeluarkan hari ini. Pengumuman itu selandjutnja mendjelaskan, bahwa hingga sekarang S.B.SOBSI belum pernah mengeluarkan instruksi kepada tjabang2 SOBSI supaja . dengan segera menghentikan aksi2 didaerah.

Mengenai aksi buruh harian daerah otonoom Djawa Tengah jang dipimpin oleh DPP SEBDA, diterangkan, bahwa Sentral Biro SOBSI segera telah mengambil tindakan langkah2 jang diperlukan terutama berhubung dengan adanja pemetjatan jang besar2an terhadap kaum buruh jang melakukan pemogokan.

Dalam pada itu ditegaskan, bahwa sikap SOBSI terhadap kabinet Wilopo sampai begitu djauh belumlah ada perubahan2. Artinja sikap SOBSI masih tetap seperti bunji surat Sentral Biro SOBSI jang dikirim kepada P.M. Wilopo jang dalam pokoknja menganggap bahwa "pada kabinet Wilopo ada tanda2 bahwa kabinet ini lebih madju daripada kabinet Sukiman". (Antara, 30/4-'52).

TUDJUAN DARI JAJASAN KAS PEMBANGUNAN

Berhubung dengan diterimanja usul tentang pembentukan Jajasan Kas Pembangunan oleh sidang Dewan Perw. Rakjat Sementara Kotapradja Djakarta Raya jang bersidang Selasa malam jang baru lalu,maka guna lebih mendjelaskan lagi maksud dan tudjuan daripada jajasan itu, pihak pengurus jajasan memberikan keterangan kepada "Antara" sbb:

A. Kas Pembangunan ini bertudjuan membantu memadjukan pendirian rumah2 berdasarkan atas "Peraturan Pembiajaan Pendirian Perumahan 1951".

B. Kas Pembangunan ini menghendaki mentjapai tudjuannja dengan djalan:

1. Memberi kesempatan pada rakjat untuk menabung agar dengan uang tabungan itu dapat didirikan rumah jang dapat dimilikinja.
2. Mendirikan rumah2 untuk didjual pada rakjat. 3. Djika perlu, mendirikan rumah2 sewaan. 4. Memberi bantuan uang kepada perusahaan2 untuk mendirikan rumah2 buat pekerdja2nja.

Dalam pasal III dinjatakan, bahwa Jajasan Kas Pembangunan didjalankan sebagai suatu perusahaan (bedrijfstechnisch).Pembukaan dan administrasinja diatur menurut peraturan2 jang diberikan oleh Bank Pembangunan; Kas Pembangunan tidak mengedjar keuntungan.

Keuangan Jajasan Kas Pembangunan didapat dari:
a. uang muka, uang pindjaman dan uang pemberian dari Bank Pembangunan
b. uang premie jang diterima dari penabung2 pembangunan, dan
c. uang pendapatan dari tarip2, d. hasil dari pendjualan rumah2 kepada penabung2 termasuk djuga angsuran sewa-beli. (Antara,30/4-'52)

-PIDATO.....-

PIDATO SAMBUTAN MENTERI TEDJASUKMANA MENDJELANG 1 MEI.

Dalam pidato-radionja semalam untuk mendjelang 1 Mei Menteri Perburuhan Tedjasukmana a.l. mengemukakan hasil2 usaha jang telah ditjapai dan masih diusahakan tertjapainja dalam lapangan djaminan sosial bagi buruh, perundang-undangan dan peraturan2 perburuhan, dan artinja semua itu dalam usaha mempertinggi produksi nasional jang perlu sekali diperhatikan. Dalam penutup pidatonja ia kemukakan beberapa hal, a.l. ia njatakan, bahwa semua kelas dinegara kita menudju kesuatu tudjuan, baik ia itu pengusaha nasional, pedagang ketjil, tani, terpeladjar, pegawai negeri atau buruh, jaitu tudjuan memberi isi kepada kemerdekaan, tudjuan perbaikan nasib dan hari kemudian jang bahagia. Kenjataan ini--kata Tedjasukmana--menghendaki perdamaian nasional dan persatuan nasional, dan oleh karena itu tiap tindakan atau sifat memetjah atau meretakkan perdamaian nasional dan kerdja sama antara kelas2 nasional, apalagi jang mendatangkan perpetjahan dalam golongan buruh sendiri, disinjalirnja sebagai bahaja dan pengatjau perdjuangan buruh.

Selandjutnja Menteri Perburuhan katakan, bahwa negara kita beserta pemerintahannja adalah negara dan pemerintah nasional, hasil perdjuangan nasional menentang kolonialisme Belanda dan imperialisme dunia, dan merupakan modal atau alat jang utama untuk perdjuangan seterusnja kearah kesedjahteraan dan bahagia rakjat. Karena itu, kata Tedja, tiap sikap atau tindakan jang membahajakan keselamatan negara adalah a-nasional dan anti rakjat. Begitupun serangan2 terhadap pemerintah nasional setjara meliwati batas dan berlebih-lebihan, adalah a-nasional karena berarti memetjah kerukunan nasional.

Selandjutnja ia terangkan, bahwa ekonomi negara ada dalam situasi jang genting, kekurangan produksi, kekurangan pula alat2 produksi, sebab itu ia peringatkan djangan sampai melakukan tindakan2 jang tjeroboh, jang merusak alat2 produksi. Ia andjurkan, supaja kaum buruh memperkenalkan pergerakan buruh kepada seluruh golongan nasional lainnja setjara sebaik-baiknja, supaja semuanja faham, bahwa perdjuangan buruh adalah merupakan suatu kepentingan nasional.

Demikian Menteri Tedjasukmana. (Antara, 1/5-'52).

PENDIRIAN "SEKOLAH PENDIDIKAN GURU PELADJARAN LUAR BIASA" DI BANDUNG

Kementerian PP & K telah memadjukan permintaan kepada Unesco, supaja Indonesia mendjadi anggota dari "Section for the Education of disable children", jaitu sebuah seksi dari Unesco untuk pendidikan anak2 tjatjad.

Maksud mendjadi anggota seksi tersebut ialah supaja Indonesia mendapat kesempatan untuk mendapat keterangan2, mengadakan kontak serta pembitjaraan2 dengan wakil2 negara lainnja dan mendapat bahan2 serta alat2 jang dibutuhkan untuk keperluan pendidikan lapangan jang masih baru itu.

Sebagai langkah pertama untuk memasuki lapangan pendidikan anak2 tjatjad itu, maka Pemerintah akan mendirikan sebuah Sekolah Pendidikan Guru Peladjaran Luar Biasa di Bandung. Demikian keterangan Inspektur PP & K, R.Amongpradja. (Antara, 1/5-'52).

MR. SUNARIO TENTANG POLITIK BEBAS INDONESIA

Mr. Sunario, ketua Seksi Luar Negeri Parlemen, dalam pertjakapan dengan "Antara" menerangkan, bahwa kita sekarang sedang mengalami waktu jang tidak berketentuan, karena kita belum benar2 sepaham dan bersatu tentang tjara mendjalankan politik bebas.

Menurut Mr. Sunario lapangan politik bebas itu bersangkutan dengan berbagai hal jang konkrit, misalnja:

1. Perdjandjian perdamaian San Francisco dan Tokio agreement.
2. Soal M.S.A.
3. Soal Uni dan Irian.
4. Dan sekarang soal pembukaan perwakilan diplomatik Indonesia di Moskow.

-Semua masalah-

Semua masalah itu harus diputuskan setjepat-tjepatnja,dan dari penjelesaiannja akan tergantung kekuatan kabinet sekarang, kata Mr. Sunario.

Mr. Sunario setudju dengan maksud Menteri Luar Negeri Mukarto untuk lekas mengusahakan pembukaan suatu ambassade Indonesia di Moskow, tetapi harus terdjadi atas dasa reciprociteit mengenai staf ambassade dan kemerdekaan bergerak. Apakah hal ini djuga telah diperhatikan oleh pemerintah didalam menjelenggarakan hubungannja dengan lain2 negara, diantaranja dengan R.R.T. ia belum tahu.

Atas pertanjaan bagaimana pengertiannja tentang politik bebas Indonesia, dinjatakan oleh Mr. Sunario, bahwa menurut pandangannja politik bebas itu tidak lain daripada politik luar negeri jang sesuai dengan deradjat dan kedaulatan Indonesia jang tidak ingin mengakui ikatan lain dari inter-dependentie umum dibawah hukum international. Sehingga dengan demikian hubungan Uni dengan Nederland misalnja masih merupakan inter-dependentie istimewa jang terlalu mengikat Indonesia.

Kata Mr. Sunario, djadi djuga mengenai hubungan2 lain seperti jang terdapat didalam perdjandjian San Francisco dan M.S.A. itu, harus kita selalu perhatikan apakah selain daripada faedahnja bagi negara kita, karena harapan akan memperoleh keuntungan jang langsung, djuga apakah hubungan2 sematjam itu tidak akan mengikat kita setjara lama.

Tak setudju penanaman modal Djepang.

Hal ini berlaku djuga bagi perhubungan Indonesia dengan Djepang, jaitu djangan sampai Indonesia akan menerima "bantuan2" jang pada hakekatnja akan memberi kedudukan kepada Djepang di Indonesia jang dapat memberi kekuasaan kepada negeri itu disini, terutama didalam lapangan ekonomi. Oleh karena itu Mr. Sunario tidak dapat menjetudjui pikiran Menteri Perhubungan Djuanda untuk mengizinkan penanaman modal Djepang di Indonesia, teristimewa dalam perusahaan tambang2, karena hal itu akan dapat mendjadi vitaal bagi industri perang Djepang jang sekarang mulai dibangunkan kembali. Politik sedemikian mengandung anasir2 "putus asa dan berbahaja", kata Mr.Sunario. Padahal kita sedang berusaha untuk melepaskan diri dari pengaruh modal asing jang terlampau "ingrijpend" (mendalam). Kalau kita membutuhkan modal, maka pada pendapat Mr. Sunario,modal itu dapat diperoleh dengan djalan pindjaman, tetapi tidak dari negeri2 jang masih mengandung bahaja imperialisme bagi Indonesia.

Atas pertanjaan, apakah perdjandjian M.S.A. sekarang ini sudah mengikat bagi Indonesia, dinjatakan oleh Mr.Sunario,bahwa M.S.A. itu belum mengikat kepada Indonesia, karena harus diratificir dulu setelah mendapat persetudjuan dari Parlemen,sehingga keterangan2 jang lain dari itu dianggapnja tidak benar,karena bertentangan dengan hukum internasional dan djuga bertentangan dengan hukum konstitusionil Indonesia sendiri (pasal 120 UUD). Djangan dilupakan djuga, kata Mr. Sunario, bahwa pemerintah jang lalu dengan diwakili oleh bekas Menteri Luar Negeri Subardjo "implicit" (dengan tidak diutjapkan) telah mengakui hal ini waktu dibitjarakan mosi Seksi Luar Negeri Parlemen mengenai penglaksanaan pasal 120 UUD tersebut.

Kalau kita masih memerlukan bantuan dari Amerika,maka hendaknja ditjarilah djalan lain.

Mengenai penjelesaian masalah Uni (dan Irian) Mr.Sunario masih berpendapat, bahwa kedua-dua soal itu perlu diselesaikan selekasnja dan ia tetap berpendapat, bahwa soal Uni kalau perlu dengan pemutusan setjara unilateral , karena ia tidak dapat melihat kemungkinan jang lain, apalagi selama pihak Belanda masih tetap berpegangan pada tuntutan mengenai ekonomi dan keuangan jang djuga mempertahankan kekuasaanja atas Irian. (Antara, 2/5-'52).

-UNDANG2 KEWARGANEGARAAN-

UNDANG2 KEWARGANEGARAAN HARUS DIDASARKAN ATAS DASAR PERBEDAAN ECONOMIS LEMAH DAN KUAT, BUKAN ATAS DASAR KETURUNAN

Dalam Konperensi Dinas Urusan Peranakan dan Bangsa Asing seluruh Djawa Barat, jang hari ini dimulai di Bandung, kepala UPBA propinsi Djawa Barat, O.Karnabrata disamping menguraikan tugas jang telah didjalankan hingga tg 27 Desember '52 dan jang masih dihadapi jaitu pendaftaran, mengupas djuga soal perundang-an2 jang masih harus diselesaikan negara Indonesia.

Menurut Karnabrata, antara warganegara/bangsa Asing dan warganegara Indonesia harus diadakan perbedaan jang tegas untuk membuktikan apa artinja bukan warganegara dan warganegara. Pemerintah harus memperlindungi warganegaranja dalam segala lapangan penghidupan dari persaingan bangsa asing.

Tentang soal politik pemerintah terhadap warganegara,di-terangkannja, bahwa melihat kenjataan sekarang, antara golongan2 warganegara itu belum ada perlakuan persamaan, baik dalam hukum, maupun dalam lapangan sosial-ekonomi kebudajaan dsbnja. Untuk memenuhi semangat undang2 dasar jang menginginkan perlakuan sama terhadap warganegara asli dan warganegara bukan asli,maka dalam undang2 nasional nanti harus diusahakan supaja perlakuan sama itu terwudjud.

Dalam mempersamakan perlakuan itu sekarang pun timbul soal2 seperti mengenai undang2 agraria; demikian pun dalam lapangan pendidikan, dan dalam lapangan perekonomian.

Karnabrata berpendapat, bahwa harus didjaga supaja dasar peraturan dari undang2 jang akan dibuat itu djangan perbedaan jang didasarkan atas keturunan, tapi jang sungguh2 berdasarkan atas perbedaan "economisch lemah dan economisch kuat".

Mengenai proses assimilasi, dikemukakan, bahwa pokok-tudjuan-nja ialah mentjapai suatu masjarakat jang homogeen,bertjorak nasional Indonesia. Hal ini kelak akan ditetapkan oleh masjarakat sendiri dengan melalui hukum2 sosiologi. Sehingga tiap orang jang mendjadi warganegara itu dapat mengatakan "saja bangsa Indonesia". Dalam masa peralihan sekarang ini peleburan tidak akan dipaksakan. Tandanja tiap golongan ketjil diberi kedudukan dalam dewan2 perwakilan, selama golongan2 ketjil itu belum meleburkan diri begitu djauh sampai saat lenjapnja sama sekali.

Gubernur Djawa Barat Sanusi Hardjadinata dalam pidato sambutannja, menjatakan bahwa proses assimilasi itu tidak mudah dan dalam pelaksanaannja orang2 dari UPBA akan berhadapan dengan barriere2 jang diadakan oleh mereka jang kukuh memegang "raciale sentimentennja" dan djurang2 jang dibuat oleh mereka jang memupuk "kliek-geest", jang hanja ingin berketjimpung dalam golongannja masing2.

Tapi dalam menghadapi penghambat2 itu,demikian gubernur, UPBA akan mendapat djuga bantuan dari mereka jang bisa memaham-kan dan sadar bahwa, usaha untuk melaksanakan tudjuan proces itu bukanlah merupakan sesuatu jang bersifat mewah,tapi sesuatu hal jang langsung mengenai kepentingan Negara kita. (Antara, 2/5-'52).

MUKTAMAR KE XIX NAHDLATUL ULAMA SETUDJU KELUAR DARI MASJUMI.

Dalam sidangnja jang kedelapan, jang sifatnja tjampuran antara Sjuriah, Fizijah, Muslimaat dan Ansjor, dan dihadiri oleh utusan2 tjabang2 dan konsul2, sesudah melalui perdebatan jang sengit dalam dua termijn, Muktamar ke XIX dari Nahdlatul Ulama memutuskan menerima dan menjetudjui beleid Pengurus Besar N.U. jang telah memutuskan dalam rapat plenonja pada tanggal 5-6 April jl. di Surabaja, bahwa N.U. harus memisahkan diri dari Masjumi setjara organisatoris, dengan mengusulkan supaja Masjumi berben-tuk federatief. Hasil pemungutan suaranja adalah 66 setudju, 9 menolak dan 7 blanco. (Antara, 2/5-'52).

KITA DAPAT DIRIKAN SENDIRI RAFFINADERY MINJAK DI SUMATERA UTARA, KATA MR. TEUKU HASSAN

Wakil Ketua Panitya Negara Urusan Pertambangan Mr. Teuku Mohammad Hassan dalam interview dengan "Antara" tentang kemungkinan mengerdjakan produksi minjak Sumatera Utara oleh pihak Indonesia sendiri, berpendapat bahwa menurut kenjataan di Tjepu sekarang telah dibuktikan oleh tenaga2 Indonesia kesanggupannja memperbaiki dan membangun kembali tambang minjak Tjepu dengan tiada bantuan pemerintah. Begitupun ia terangkan, bahwa mengingat kesanggupan2 tenaga ahli tambang2 minjak di Sumatera Utara dan Tjepu, dapatlah diambil kesimpulan, bahwa dengan keadaan materiaal dan tenaga ahli jang ada sekarang, ditambah dengan beberapa orang ahli lain, serta pimpinan jang tjakap dan djudjur dapat didirikan satu raffinadery dengan kekuatan l.k. 1.000 ton sehari di Pangkalan Brandа, dengan djalan memindahkan material jang ada di Tjepu ke Sumatera Utara. Dan bila diperlukan, menurut Teuku Hassan, dapat pula dipesan lagi beberapa unit raffinadery dari Djepang untuk memperlengkapkan tambang minjak Sumatera Utara hingga mentjapai kapasitet l.k. 3.800 ton sehari sebagaimana jang telah disanggupi oleh suatu maskapai di Djepang.

Selandjutnja ia terangkan, bahwa rentjana susunan bezetting tambang minjak Sumatera Utara dapat disiapkan, karena ternjata tjukup tengga ahli untuk itu. (Antara, 2/5-'52).

PERTANJAAN TENTANG KEPALA PTT DAN KEPADA DJAWATAN PERTAMBANGAN

Berkenaan dengan penangkapan pihak militer Belanda atas diri kepala Djawatan PTT RI Mas Suharto di Jogja pada tanggal 17 Djanuari malam tahun 1949 jang lalu, hari ini anggota parlemen Asraruddin memadjukan pertanjaan2 kepada pemerintah diantaranja minta pendjelasan tentang keadaan nasib dari Mas Suharto tersebut jang hingga kini belum diketahui itu.

Selandjutnja ditanjakan sampai dimana pemerintah telah berusaha untuk mendapatkan keterangan2 dari pemerintah Belanda dan bagaimanakah sikap pemerintah selandjutnja mengenai peristiwa Mas Suharto dan djuga mengenai dibunuhnja alm. kepala Djawatan Pertambangan RI Lasut dan lain2 pegawai jang tidak suka bekerdja dengan pemerintah Belanda. (Antara, 2/5-'52).

KANAK2 DJAKARTA.

Presiden Sukarno telah menjumbangkan kepada panitya Pekan Kanak2 Rp. 6.000 untuk perajaan Pekan Kanak2 jang akan diadakan pada tanggal 17, 18 dan 19 Mei jad. ini.

Seperti telah diketahui atas andjuran Kongres Wanita Indonesia telah terbentuk pada tg. 9 April 1952 di Djakarta Panitya Pekan Kanak2 dengan maksud mengusahakan pengiburan jang teristimewa ditudjukan kepada kanak2 dari segala lapisan rakjat dan dari semua golongan jang ada di daerah Djakarta Raya. Jang dimaksudkan kanak jalah anak sampai berumur 14 tahun. Hari2 penghiburan tersebut telah ditetapkan pada tanggal 17,18 dan 19 Mei jad ini, djustru karena kanak2 sekolah rakjat mengachiri tahun peladjarannja dan akan mulai berlibur pada tg. 22 Mei jad. Panitya tersebut selandjutnja dihari kemudian akan terus berusaha untuk lebih memperhatikan soal2 kanak2 jang mendjadi bibit bangsa Indonesia dengan rentjana jang tertentu.

Dan Panitya tersebut mengharapkan sangat kepada masjarakat Djakarta Raya agar Pekan Kanak2 tidak hanja diusahakan oleh Panitya tersebut sadja, akan tetapi djuga oleh tiap2 Ibu dan Bapak terhadap anak2nja masing2, atau bersama-sama dengan keluarga lain2. Pada pokonja agar siapak dapat merasakan bahwa merekapun mempunjai hari kanak2 sendiri dan agar mereka sadar, bahwa mereka akan dihibur pada hari itu, asal sadja mereka berkelakuan baik, seterusnja, agar dapat mendjadi anggauta masjarakat jang baik dikemudian hari.

-Atjara pada Pekan-

Atjara pada Pekan Kanak2 tersebut ialah a.l. permainan kanak-kanak dan perlombaan2 olahraga dsb., kesenian/pertundjukan film dikelurahan2. Selain dari itu diadakan baby-show untuk baji-baji dari 1 sampai 12 bulan dan Pasar Malam untuk kanak2.

Panitya pekan tersebut dibantu oleh Kementerian Penerangan, Djawatan Pemerintah Kotapradja Djakarta, Djawatan Penerangan Kotapradja Djakarta Raya, dll. djawatan serta organisasi2 wanita Indonesia dan organisasi wanita bangsa asing jang ada di Djakarta Raya.

Seperti telah dikabarkan Walikota Sjamsuridzal mendjadi pelindung, sedangkan Ibu Sukarno dan Ibu Hatta mendjadi anggauta2 kehormatan dari Panitya tersebut jang diketuai oleh nj.Arudji Kartawinata. Demikian dikabarkan oleh Panitya Pekan Kanak2 bag. Penerangan. (Antara, 2/5-'52).

ROMBONGAN WAKIL PRESIDEN TIBA KEMBALI

Groot grondbezitters penghalang kemadjuan di Lombok.

Rombongan Wakil Presiden Moh. Hatta jang mengadakan perdjalanan penindjauan dikepulauan Sunda Ketjil sedjak tanggal 18 April jl., telah tiba kembali di Djakarta.

Kepada "Antara" Wakil Presiden menerangkan, bahwa dalam perdjalanannja dikepulauan Sunda Ketjil itu, ia telah mengundjungi terutama berbagai objek ekonomi jang sudah ada dan tempat2 jang mempunjai kemungkinan untuk dibangunkan. "Saja mendapat kesan jang baik, semangat bekerdja untuk membangun kelihatan baik, asal sadja mereka mendapat pimpinan", demikian kata Wakil Presiden.

Kesulitan2 jang dialami oleh pemerintahan daerah, menurut Wakil Presiden, ialah keadaan di Lombok dimana terdapat groot grondbezitters jang mendjadi penghalang bagi kemadjuan. Alat2 untuk dipakai dalam pembangunan diberbagai lapangan dikatakan sangat kekurangan. Kata Wakil Presiden, jang terpenting ialah, supaja otonomi pemerintahan daerah segera dapat diselenggarakan, sehingga daerah bisa menjelenggarakan keuangannja sendiri. (Antara, 3/5-'52).

GUBERNUR SARIMIN TENTANG KEADAAN DI SUNDA KETJIL

Dalam pertjakapan dengan "Antara", mengenai bahaja kelaparan terutama jang timbul didaerah Lombok, Gubernur Sarimin terangkan, bahwa pokok sebab jang menimbulkan bahaja kelaparam itu adalah terletak pada faktor kekuasaan tuan tanah besar sehingga funksi sosial dari tanah disana sama sekali tidak ada. Tuan tanah besar ini pada umumnja adalah pegawai2 pemerintah dan pamongpradja jang mendjalankan pemerintahan dengan mengikat diri pada adat2 sehingga menjebabkan sedikit banjak dapat dipersamakan sebagai landheer terhadap budaknja. Rakjat di Lombok sebahagian ketjil memiliki tanah2 akan tetapi sebahagian besar harus bekerdja untuk tuan2 tanah tersebut dan kebanjakan produksi beras mengalir kepada tuan2 tanah jang menimbun untuk beberapa waktu lamanja, kemudian didjual apabila harga beras mulai meningkat.

Menurut Gubernur Sarimin, daerah Lombok mempunjai penghasilan beras jang besar dan apabila timbul kelaparan, maka itu disebabkan tidak lain karena hasil2 beras tidak dapat tersebar keseluruh daerah.

Penimbunan beras harus dilarang.

Untuk mengatasi kesulitan2 jang dialami daerah Lombok dewasa ini menurut Gubernur Sarimin, ialah pertama susunan pemerintahan harus diperbaiki dan hal ini mudah dapat didjalankan oleh karena pemerintahan di Lombok itu bukan pemerintahan swapradja dan bisa dimulai misalnja dengan pemindahan dan pemberhentian dari pegawai2 jang tidak tjakap.

Rijstordonnantie 1948 jang tidak berlaku didaerah Lombok, baik didjalankan dan dipraktekkan di Lombok dengan disampingnja suatu peraturan jang melarang penimbunan jang tidak perlu. Dan achirnja tanah2 djangan dibuat tempat melakukan sociale macht seperti sekarang, akan tetapi sesuai dengan undang2 dasar kita

-harus dapat-

harus dapat terlaksana kewadjiban2 sosial.

Kata Gubernur Sarimin, disamping itu perlu diadakan penerangan besar2an supaja rakjat insjaf dengan bimbingan pemerintah akan keadaannja jang buruk. Penerangan sedemikian ini perlu sekali didjalankan oleh pemerintah dan djangan sampai didahului oleh keinsjafan rakjat sendiri, dalam bentuk revolusi sosial.

Keadaan daerah2 lain.

Tentang keadaan dikepulauan lain di Sunda Ketjil, Gubernur Sarimin terangkan, bahwa di Sumbawa memang tadinja disinjalir adanja kekurangan makanan, tapi kekurangan itu terutama disebabkan karena baru2 ini ada bandjir jang merusak tanaman padi. Pulau Sumbawa sendiri bisa selfsupporting dalam soal beras, malahan kelebihannja sebanjak 4.000 bisa menutup kebutuhan rakjat Flores dan Sumba dan Timor. Di Sumba dikatakan ada bahaja kelaparan, karena tidak lantjarnja perhubungan dan terutama meradjalelanja penjelundupan beras. Oleh pemerintah daerah pada waktu ini sudah diusahakan supaja diadakan pengawasan jang keras terhadap penjelundupan ini.

Segala kesulitan2 itu, menurut Gubernur Sarimin, dilihatnja dengan rasa optimistis akan terdapat pemetjahannja pada achirnja, asal sadja ada tjukup saling memberi bantuan antara pulau2. (Antara, 3/5-'52).

UNDANG2 DARURAT BUAT MENGATUR PENGGILINGAN PADI

Dari kalangan jang mengetahui didapat keterangan, bahwa antara keputusan2 jang penting jang diambil oleh sidang kabinet jang terachir pada tanggal 29/4 adalah penetapan peraturan penggilingan padi dalam suatu rentjana Undang2 Darurat. Kalau dahulu peraturan menggiling padi buat pemerintah serta pemberian prioriteit pada padi pemerintah hanja ditetapkan dalam suatu peraturan dari Menteri Perekonomian, maka sekarang hal ini mendjadi penetapan kabinet dalam suatu rentjana Undang2 Darurat.

Bedanja sekarang ialah, bahwa sesuatu pelanggaran peraturan ini, akan dituntut menurut hukum.

Mengenai prinsip kebidjaksanaan finansiil, didapat keterangan, bahwa penghematan pengeluaran2 uang djuga akan didjalankan terhadap anggaran2 belandja tiap2 kementerian. Anggaran2 belandja ini akan ditindjau terlebih dahulu setjara integraal oleh kabinet, kemudian dimana perlu dibatasi masing2 menurut perbandingan keperluan2 jang penting. (Antara, 3/5-'52).

MR.MOH.YAMIN PIMPIN HARIAN "MIMBAR INDONESIA.

Harian "Mimbar Indonesia" jang akan diterbitkan oleh NV Harian Mimbar Indonesia di Djakarta akan mulai terbit tanggal 10 Mei jang akan datang ini.

Pimpinan Umum harian tersebut akan dipegang oleh Mr.Moh. Yamin. Haluan harian tersebut menurut keterangan dari pihak penerbit ialah bebas dan non-party, sebagai haluan dari madjalah "Mimbar Indonesia" jang tetap akan terbit terus. Dinjatakan seterusnja, bahwa perhatian sk. tersebut terutama akan ditudjukan pada pembangunan daerah2 di Indonesia. (Antara, 3/5-'52).

TJONTOH2 BARANG DJEPANG DALAM FANCY-FAIR.

Perwakilan dagang Djepang jang ada di Surabaja mempunjai stand dalam Fancy-Fair Indonesia ke II jang dibuka semalam dikota ini. Dalam stand itu dapat dilihat berbagai hasil industri Djepang. Ini adalah usaha pertama jang tampak dimuka umum dari pihak Djepang untuk meluaskan perdagangannja. (Antara, 4/5-'52).

"DJATINEGARA" KAPAL KEPUNJAAN DJAKARTA LLOYD.

Semalam diatas kapal "Djatinegara" kepunjaan Djakarta Lloyd dilangsungkan malam ramah tamah. Kapal ini hampir selesai diperbaiki oleh droogdok Surabaja dan Penataran Angkatan Laut.

Dalam pertjakapan dengan "Antara" Darwis Djamin menerangkan bahwa kapal "Djatinegara" akan mengadakan pelajaran pertama ke

-Marseilles.....-

Marseilles dengan muatan kopra jang akan berlangsung kira2 tanggal 20 Mei jad. Kapal ini tadinja adalah kapal emigran Inggris dan dapat mengangkut 800 orang. Besarnja ada 9800 ton. Tapi kini kapal itu diubah sifatnja hingga dapat lebih banjak memuat angkatan barang. Opsir2nja semuanja, terdiri atas bangsa Djerman dan anak buah-lainnja bangsa Indonesia.
Djakarta Lloyd kini mempunjai 2 kapal, jang lainnja bernama "Djakarta Raya" (dahulu "Diponegoro"). Disamping itu dicharter 2 kapal dari Hongkong. (Antara, 4/5-'52).

PIMPINAN AKSI SEBDA DJAWA TENGAH

Dioper oleh Sentral Biro SOBSI.

Sentral Biro SOBSI kabarkan, bahwa S.B. SOBSI pada tanggal 2/5-'52 telah menemui Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem, untuk minta keterangan lebih landjut sekitar tuntutan SEBDA Djawa Tengah dan pelepasan2 besar2an terhadap kaum buruh daerah otonoom Djawa Tengah jang telah melakukan pemogokan mulai pada tanggal 23/4-'52 itu.

Belum ditegaskan oleh SOBSI, apa hasil pertemuan itu.

Dikatakan, bahwa pemetjatan tsb. adalah pelaksanaan instruksi Menteri Dalam Negeri jang disampaikan kepada gubernur Djawa Tengah Mr. Budiono pada tanggal 19/4.

Pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri tersebut, ditambah pula dengan laporan SOBSI KD V dan VI - demikian kabar itu selandjutnja - telah memberi bahan2 jang tjukup bagi Sentral Biro SOBSI untuk bertindak mengoper pimpinan aksi kaum buruh daerah otonoom Djawa Tengah tersebut dari tangan DPP-SEBDA, dengan harapan masalah buruh daerah otonoom Djawa Tengah ini akan dapat dengan segera diselesaikan antara Pemerintah Pusat dengan Sentral Biro SOBSI. (Antara, 4/5-'52)

TAMBAH BANGUNAN SEKOLAH RAKJAT ATAU HENTIKAN PENERIMAAN MURID BARU?

Pada saat sekarang, kelas 1,2,3 dan 4 dari sekolah2 Rakjat jang ada dikota Bandung hanja mendapat peladjaran separonja dari waktu beladjar, jang berarti bahwa murid kelas 4 jang sekarang naik ke kl. 5,baru menerima peladjaran dua tahun waktu beladjar biasa (normal), demikian J.Sudjana Prawira, kepala Djawatan PPK propinsi Djawa Barat dalam keterangannja kepada "Antara ".

Ia menjatakan selandjutnja, bahwa tidak akan dapat dipertanggung-djawabkan, bila kl. 5 djuga hanja akan diberi separo waktu peladjaran. Oleh karena itu, untuk memberi tempat kepada anak2 jang naik dari kl.4 kekelas 5 diperlukan 2 x sebanjak ruangan dari jang dipergunakan mereka dikelas 4 sekarang.

Bagaimana tjara mentjukupinja.

Untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan ruangan untuk kl.4 jang naik ke kl.5 ini dapat dipergunakan kelas jang nanti akan ditinggalkan oleh murid2 jang keluar dari kl.6.

Banjaknja ruangan bekas kl.6 hanja hampir tjukup untuk memenuhi kekurangan jang dibutuhkan untuk murid jang naik dari kelas 4 ke kelas 5.

Kesimpulannja adalah, bahwa dengan persediaan bangunan2 sekolah Rakjat jang ada sekarang dan dengan peraturan memberi hanja separo waktu beladjar kepada kl.1,2,3 dan 4 pada permulaan tahun peladjaran jad. tidak akan dapat diterima murid2 baru untuk Sekolah Rakjat.

Pembikinan gedung S.R.jang urgent.

Berhubung dengan keterangan diatas itu, dinjatakannja,bahwa penambahan bangunan S.R. untuk kota Bandung sangat urgent, dan perlu dilaksanakan dalam waktu jang singkat. Soal ini telah diusulkan olehnja.

Menurut rentjana untuk kota Bandung mau didirikan 11 gedung S.R. jang bersifat semi-permanent, dengan biaja seluruhnja Rp.2,175 djuta. Dalam waktu tiga bulan bangunan2 ini sudah harus selesai.

Uang tersedia.

Djawatan Pekerdjaan Umum telah diminta melaksanakan pekerdjaan ini.

-Djalan mengatasi-

Djalan mengatasi kesukaran sekarang: Stop penerimaan murid.

Sementara itu, apabila dari pihak pelaksana rentjana belum dapat diwudjudkan pendirian2 bangunan dalam waktu jang telah ditentukan, ada dipertimbangkan mengambil dua djalan. Jang kini sedang dipertimbangkan dengan Inspektur S.R. adalah sbb.:

a. menunda penerimaan murid2 baru sampai bangunan2 S.R. jang baru selesai.
b. mengurangi djumlah peladjaran untuk kelas satu sampai sepertiga waktu.

Meskipun sub. b sangat ditentang oleh guru2 dan PGRI-nja, namun bila pemerintah dapat memberikan ketentuan, bahwa keadaan ini hanja akan berlaku dalam waktu sesingkat mungkin, menurut pendapatnja, adalah sub b ini jang dapat ditempuh untuk mengatasi kesulitan ini.

Berapa djumlah murid S.R.?

Untuk memperlengkap keterangan ini, ditambahkan, bahwa dalam ∠ 150.000 orang.

Djumlah murid S.R. jang tertjatat dalam bulan Djanuari 1951 adalah 943.000 orang; dalam seluruh tahun-peladjaran 1951/1952 djumlah murid S.R. mendjadi 1.195.382 orang.
Demikian keterangan Sudjana Prawira. (Antara, 4/5-'52).

PLANNING KONGKRIT TENTANG MAKSUD PEMBANGUNAN HARUS DIPUNJAI DULU.

Anggota parlemen nona Susilowati dari seksi Pendidikan jang kini sedang mengadakan perdjalanan penindjauan di Sulawesi dan baru2 ini kembali dari Minahasa malam kemarin dengan bertempat di Pressroom Makasar telah mengadakan pertemuan tanja-djawab dengan para wartawan. Dalam mengemukakan kesannja tentang masalah pendidikan, Susilowati mengatakan, bahwa umumnja kesulitan2 jang dihadapi diseluruh Indonesia dalam masalah ini adalah sama sadja sekalipun menurut perbandingan dalam soal pendidikan Minahasa sangat madju. Dikatakan, bahwa letak dari kesulitan itu ialah pada soal pemerintahan dan dalam hubungan ini dikemukakan, bahwa parlemen sekarang sesuai dengan persetudjuan R.I.-R.I.S. belum lagi mengesjahkan undang2 22 R.I. dulu (mengenai pemerintahan daerah) jang menjebabkan timbulnja dualisme.

Kata Susilowati selandjutnja, oleh karena masalah pendidikan ini adalah bagian dari pembangunan negara, maka untuk keluar dari kesulitan2 itu kita lebih dulu harus mempunjai planning jang kongkrit jang memberikan gambaran djelas tentang maksud pembangunan itu.Dalam planning negara ini jang tentunja harus disusun oleh suatu Dewan Perantjang Negara harus dapat dipisah2kan mana jang lebih penting dan mana jang kurang penting.

Dalam memberikan pendjelasan selandjutnja tentang pendapatnja, Susilowati mengatakan, bahwa kita terutama tentunja mesti membangunkan ekonomi kita. Pembangunan ekonomi ini tidak dapat berdjalan lantjar apabila pemerintahan tidak berdjalan lantjar dan untuk melantjarkan djalannja kedua-duanja ini kita memerlukan tenaga2 jang banjak itu, pendidikan harus dipentingkan oleh pemerintah. Demikian Susilowati. (Antara, 4/5-'52).

KONPERENSI DIANTARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN PARA GUBERNUR SELURUH INDONESIA

Pada tanggal 19, 20 dan 21 bulan ini di Djakarta akan dilangsungkan konperensi diantara Kementerian Dalam Negeri dengan para Gubernur seluruh daerah Indonesia, demikian didapat kabar dari pihak berkuasa pada Kementerian Dalam Negeri.

Didalam konperensi itu akan dibitjarakan antara lain soal politik dalam negeri jang akan diselaraskan dengan program pemerintahan baru sekarang ini. Disamping itu djuga akan dibitjarakan soal keamanan didalam hubungannja dengan urusan dan pelaksanaan pemerintahan dalam negeri.

∠tahun 1951 telah diterima murid baru di Djawa Barat sebanjak 1.k.

-Soal Mangkunegaran-

Soal Mangkunegaran dan Swapradja Solo.

Ditanja bagaimana pendirian Kementerian Dalam Negeri terhadap tuntutan dari pihak Mangkunegaran itu, pihak berkuasa tersebut diatas menerangkan, bahwa Kementerian Dalam Negeri didalam hal ini masih ingin menunggu dulu bagaimana keputusan hakim mengenai tuntutan Mangkunegaran itu.

Ditambahkannja lagi, bahwa proses mengenai Mangkunegaran itu nanti akan membawa pengaruhnja pula kepada penjelesaian soal Swapradja Solo.

Mangkunegoro VIII, sebagai kepala dari "Daerah Istimewa Mangkunegaran" telah memadjukan tuntutan sipil terhadap pemerintah mengenai status Mangkunegara sebagai Daerah Istimewa dan diaturnja Dana Milik Mangkunegara, jang oleh Pemerintah Pusat dibekukan beberapa lama berselang. (Antara, 5/5-'52).

P.B.SARBUKSI MEMPROTES TINDAKAN GUBERNUR DJAWA TENGAH

Berhubung dengan pemetjatan jang dilakukan oleh gubernur Djawa Tengah terhadap kaum buruh anggota Sebda didaerah propinsi Djawa Tengah jang mendjalankan pemogokan sedjak tanggal 23 s/d tanggal 30 April jl., Pengurus Besar Sarekat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia (Sarbuksi) jang berkedudukan di Solo, telah mengadjukan surat protes terhadap tindakan gubernur Djawa Tengah tersebut, jang dianggapnja tidak bidjaksana, dan menuntut kepada pemerintah pusat supaja tindakan gubernur Djawa Tengah tersebut dibatalkan dan kaum buruh dipekerdjakan kembali sebagaimana mestinja.

Selain itu, P.B. Sarbuksi mengadjak kepada semua serekat buruh dan massa, organisasi serta partai2 untuk memperkuat protes tersebut.

Protes jang telah diadjukan itu berdasarkan atas pertimbangan2 Sarbuksi bahwa hak mogok didjamin oleh Undang2 Dasar Sementara R.I. pasal 21 dan tindakan mendjalankan pemogokan tidak boleh dianggap sebagai "dienstweigering", karena kaum buruh bukannja mendjalankan "dienstweigering", tetapi hanja menuntut kenaikan upah dan djaminan sosial belaka. Djuga atas pertimbangan bahwa gubernur Djawa Tengah menurut Sarbuksi tidak berhak mendjalankan pemetjatan2 terhadap kaum buruh jang mogok, karena tindakan itu bertentangan dengan undang2 dasar tersebut. (Antara, 5/5-'52).

PERHATIAN RAKJAT SUMATERA UTARA TERHADAP PERGURUAN TINGGI

Kegiatan dan minat penduduk Sumatera Utara agar selekas mungkin terwudjud pendirian fakultet kedokteran di Medan ternjata besar sekali berhubung soal mengongkosi peladjar2 dari daerah ini jang meneruskan peladjaran diperguruan tinggi2 di Djawa menelan biaja jang sangat besar dan boleh dikatakan sangat memberatkan bagi orang2 tua jang berpentjaharian ketjil.

Oleh sebab itu dalam waktu 4 bulan sadja oleh Panitya Mempersiapkan Perguruan Tinggi di Medan telah dapat dikumpulkan sumbangan uang sebanjak Rp. 912.028,58 terdiri Rp.458.839,38 sumbangan dari penduduk umum, Rp. 289.888,45 sumbangan dari perguruan2, Rp. 57.204,80 dari perusahaan2 dan Rp.106.095,95 dari kantor2.

Sumbangan terbesar diterima dari penduduk di Tapanuli Selatan jaitu sedjumlah Rp. 123.618,52. Sementara itu sumbangan2 seperti ini masih terus mengalir. (Antara, 5/5-'52).

SOAL BANTUAN TEHNIK PBB PADA INDONESIA

Kemarin pagi dengan bertempat dipasanggrahan pegawai negeri di Medan telah dilangsungkan konperensi pers dengan A.Balinski (wakil PPB urusan pameran), J.Cuvelier dan J.Stapanek masing2 anggota Panitya Tehnik PBB bagian perburuhan dan perindustrian di Indonesia, jang baru2 ini tiba di Medan dalam perkundjungan penindjauannja kedaerah ini untuk pertama kalinja.

Oleh A.Balinski dengan pandjang lebar didjelaskan apa arti dari bantuan tehnik PBB, dan dana jang disediakan oleh PBB untuk bantuan tehnik itu sebanjak 20 djuga dollar setahun.

Maksud dan tudjuan bantuan tehnik PBB ini adalah buat membantu negara2 terkebelakang untuk memadjukannja;bantuan tsb dalam bentuk menjediakan penasihat2 jang ahli. Selain itu djuga memberikan bea-siswa dan fellow-ship jang belum begitu dikenal di Indonesia. Bantuan teknik ini baru diberikan oleh PBB, apabila ada permintaan dari negeri jang meminta dan bantuan itu terlepas dari pada soal2 ekonomi dan politik dari negara jang meminta. Tegasnja, bantuan diberikan untuk pembangunan negara jang berkepentingan. Mengenai hubungan Indonesia dengan bantuan teknik ini dinjatakan, bahwa walaupun Indonesia baru mendjadi anggota PBB dalam tahun 1950, akan tetapi missi tehnik PBB telah dikirimkan ke Indonesia, dibulan Mei 1949 untuk mempeladjari keadaan di Indonesia dan bagaimana tjara sebaiknja untuk membantu Indonesia. Dibulan Nopember 1950 barulah ditanda tangani perdjandjian bantuan tehnik untuk Indonesia diantara Indonesia dan PBB. Dalam persetudjuan ini Indonesia meminta bantuan tehnik dalam lapangan ekonomi, sosial, perburuhan, pertanian, kehutanan dan kesehatan.

Ditahun 1951 ke Indonesia oleh PBB telah dikirimkan 16 para ahli dan ditahun 1952 para ahli ini telah berdjumlah 22 orang sedang achir tahun ini djumlah itu akan bertambah mendjadi 60 sampai 70 orang. Menurut Balinski PBB akan keluarkan dari dana bantuan tehnik PBB untuk Indonesia lebih dari satu djuta dollar.

Hasil2 bantuan tehnik. Mengenai hasil2 dari bantuan tehnik PBB jang diberikan selama ini, Balinski terangkan, bahwa untuk mengatakannja satu demi satu sukar sekali. Sebaliknja diterangkannja, bahwa atas usul J.Stepanek, penasihat dilapangan perindustrian, telah didirikan paberik keramik di Plered, dekat Purwakarta. Tentang rentjana2 jang lain, diterangkannja jang sedang dilaksanakan sekarang adalah paberik semen di Gresik.

Di Sumatera Utara ini telah ditindjau sumber belerang di Tarutung dan kemungkinan2nja kelak.

Sebab ke Sumatera. Achirnja Balinski katakan, bahwa perkundjungan para ahli dari Panitya Tehnik PBB ke Sumatera Utara adalah karena sudah dirasakan, bahwa Sumatera selama ini tidak mendapat perhatian, dan dengan perkundjungan jang mereka lakukan sekarang ini didapat kesimpulan, bahwa kepada Sumatera harus lebih banjak ditumpahkan perhatian.

Perobahan ekonomi. J.Stepanek, ahli dalam industri ketjil menerangkan, bahwa setahun jl telah ada satu rentjana untuk merobah perekonomian di Indonesia. Ekonomi di Indonesia sekarang hanja berdasarkan ekspor hasil2 Indonesia dan impor keperluan2 Indonesia dari luar negeri, sehingga karena itu untuk keperluannja, Indonesia seratus prosen bergantung kepada luar negeri.

Dan perobahan itu ditudjukan kepada industrialisasi ketjil dalam negeri, jang gampang dapat dihidupkan dari pada industri besar2an.

Stepanek tundjukan dengan berbagai tjontoh, bahwa Indonesia dapat membikin barang2jang diperlukannja, sedang deviezen jang digunakan untuk membeli barang2 dari luar negeri itu bisa pula digunakannja untuk membeli traktor2 jang masih belum dapat diperbuat di Indonesia.

Diterangkannja, bahwa Indonesia kini harus mengimpor sedemikian banjak barang petjah-belah, sedang bahan2 untuk membikin barang petjah-belah itu didapati di Bangka dan Rembang.Djuga tumit2 sepatu dari karet, jang kini diimpor dari Eropa dapat diperbuat di Indonesia dan tidak perlu didatangkan dari luar.

Kini di Balai Pendidikan Industri di Djakarta bekerdja 12 orang ahli dari Panitya Tehnik PBB jang membikin rentjana untuk industri di Indonesia, dan dalam padaitu djuga telah dikirimkan tenaga2 Indonesia keluar negeri. Menurut keterangan Stepanek, sesudah 3 tahun pekerdjaan para ahli tehnik PBB ini akan bisa diambil over oleh tenaga2 Indonesia, jang dilatih diluar negeri itu.

-Achirnja oleh-

Achirnja oleh Stepanek dinjatakan, bahwa dalam rombongan ahli2 tehnik ke Sumatera Utara ini turut djuga Miss.B.Montgomery, ahli dalam urusan rami. Perlu dikabarkan, bahwa djuga oleh kebon2 milik asing didaerah ini ada ditanami rami,antara - nja dikebon Laras dekat Pematang Siantar.Kata Stepanek,kalau produksi tjukup dan rami dapat diprodusir mendjadi kain didalam negeri, maka Indonesia tidak perlu mengimpor kain jang dibikin dari rami berasal dari Djepang dan lain2 negeri.

Perburuhan. J.Cuvelier, ahli dalam urusan perburuhan menerangkan, bahwa keadaan buruh didaerah ini lebih baik, antaranja kesehatannja, walaupun sebaliknja keadaan perumahan buruh didaerah ini belum dapat dikatakan sempurna. Semua perobahan, kata Cuvelier, memerlukan waktu dan ditambahkannja lagi, bahwa keadaan buruh banjak bergantung kepada keadaan ekonomi. Dalam hubungan ini ditundjukannja bahwa harga2 pasaran luar negeri, antaranja dengan djatuhnja harga getah sekarang, akan mempengaruhi keadaan buruh.

Mengenai organisasi buruh dan tuntutan2nja diwaktu jang achir ini, Cuvelier ada melihat tendens politik dibalik organisasi2 itu, sedang tuntutan2 buruh itu ada pula jang tidak pantas. Dan kalau tuntutan2 akan itu semakin banjak, bukan tidak mungkin menurut Cuvelier, kebon2 akan tutup. Karena djangan dilupakan, katanja pula, bahwa kebon2 ini harus membangun dengan apa jang diperolehnja sekarang. Diterangkannja lagi,benar kebon2 itu sebelum perang tidak banjak mengambil tindakan guna kepentingan sosial buruhnja, akan tetapi keuntungan dimasa lampau jang telah keluar dari negeri ini, tidak akan bisa ditarik lagi ke Indonesia.

Cuvelier berpendapat, bahwa dikalangan buruh perlu diluaskan pengetahuan tentang ekonomi dan sosial.

Tentang pemogokan2 jang dilakukan dimasa belakangan ini, ia berpendapat ada jang tidak dapat dibenarkan, bila dipandang dari segi internasional. Karena kepada madjikan ataupun buruh harus ada kebebasan ekonomis (economical liberty). Dalam hubungan ini menurut pendapatnja di Indonesia buruh terikat pada madjikan, karena dengan keadaan di Indonesia sekarang seorang buruh jang dilepas dari sang madjikan, berarti djuga ia kehilangan djaminan sosial, sebagai pensiun dll. Tidak demikian halnja dengan dinegara2 Eropah Barat, dimana seorang buruh dapat berhenti tapi ekonomis dan sosial ia terdjamin oleh negara, dan seorang madjikan djuga dapat melepaskan buruhnja (Antara, 5/5-'52).

PUTUSAN KABINET MENGENAI UPAH PEKERDJA HARIAN DJAWA BARAT.

Putusan sidang Dewan Menteri tanggal 25/4 antara lain mengenai masalah upah pekerdja harian Djawa Barat sebagai hasil daripada Panitya Pemerintah Pusat jang terdiri dari Kementerian Perburuhan, Kementerian Urusan Pegawai, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan,Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga serta Kementerian Keuangan jang disampaikan kepada Panitya Aksi Sentral Biro SOBSI - menurut pengumuman Panitya Aksi Sentral Biro SOBSI - adalah sebagai berikut:

1. Upah pekerdja harian dipropinsi Djawa Barat (ketjuali Djakarta Raya) pada kantor2 pemerintah sipil menurut peraturan2 jang berlaku pada tanggal 23 Oktober '51, mulai tanggal 24 Oktober 1951 (berlaku surut) ditambah dengan djumlah sehingga upah:

a. kurang dari Rp. 3,50 s/d Rp. 3,50 - mendjadi Rp. 4,50
b. lebih dari Rp. 3,50 s/d Rp. 4,50 - ditambah Rp. 0,75 dengan pengertian sekurang2nja mendjadi Rp. 4,50
c. lebih dari Rp. 4,50 - mendjadi Rp. 5,25
d. semua upah diatas Rp. 5,25 - tidak ditambah.

2. Pekerdja wanita dan pekerdja muda, jang menurut aturan2 jang berlaku pada tanggal 25 Oktober 1951 menerima upah harian kurang dari Rp. 2,80 mulai tanggal tersebut mendapat penghasilan

-sedikit2nja-

penghasilan sedikit2nja Rp. 3,60 dan seterusnja menurut djumlah perimbangan dalam peraturan jang berlaku.

3. Waktu kerdja 7 djam sehari atau 40 djam seminggu. Keterangan jang disampaikan Kementerian Urusan Pegawa kepada panitya aksi menjatakan bahwa dengan demikian hari Minggu kaum buruh mendapat upah penuh.

4. Pekerdja2 jang dipekerdjakan lebih dari apa jang dibutuhkan dalam fatsal 3 dibajar upah lembur menurut peraturan jang berlaku. Djika disuatu djawatan belum ada suatu peraturan uang lembur, maka pembajaran didjalankan sbb.:

a. pada hari biasa untuk tiap2 djam 150% dari upah sedjam.
b. upah biasa pada hari Minggu atau hari besar resmi 200% dari upah hari biasa.
c. uang lembur pada hari2 tersebut dalam letter b untuk tiap2 djam 300% dari upah biasa.

5. Upah kerdja borongan didasarkan atas penghasilan sehari dari pekerdja harian.

6. Upah pada hari2 mogok tidak dibajar.

7. Uang jang terlandjur dibajarkan kepada jang berkepentingan menjimpang dari instruksi ini tidak dipungut kembali.

8. Kepada pegawai2 jang ikut serta dalam pemogokan, diberi hukuman djabatan menurut peraturan pemerintah No. 11 tahun 1952.

Demikian putusan sidang kabinet tanggal 25/4 jang disampaikan kepada Panitya Aksi Sentral Biro SOBSI.

Panitya Aksi pada tanggal 29/4 telah mengirimkan surat kepada P.M. Wilopo jang isinja, bahwa Panitya Aksi mengenai fatsal2 upah sebagai langkah pertama untuk penjelesaian sementara dapat menerimanja, tetapi jang mengenai fatsal2 6 dan 8 dengan tegas tidak dapat menjetudjuinja,karena dengan demikian timbullah kesulitan2 baru, sebab ini berarti bahwa pemerintah tidak mengakui hak mogok bagi kaum buruh seperti didjamin oleh UUD Sementara R.I. fatsal 21. Demikian Panitya Aksi Sentral Biro SOBSI. (Antara, 5/5-'52).

PROF. MR.SUNARIA TENTANG DANA MILIK MANGKUNEGARA

Prof. Mr.Sunaria, Guru Besar dalam ilmu ekonomi dan sosiologi pada Universitet Gadjah Mada dan bekas superintendent perusahaan2 Mangkunegaran, dalam keterangannja kepada "Antara" tentang tuntutan sipil Mangkunegara VIII terhadap pemerintah pusat mengenai Dana Milik Mangkunegara, berpendapat, bahwa juridis kekuasaan mengatur kekajaan dari Pradja Mangkunegaran adalah beralih kepada pemerintah Republik Indonesia sedjak dikeluarkannja penetapan pemerintah tanggal 15/7-'46 No. 16/SD, jang antara lain menentukan, bahwa "sebelum bentuk susunan pemerintahan daerah Kasunanan dan Mangkunegaran ditetapkan dengan Undang2, maka daerah tersebut untuk sementara waktu dipandang merupakan satu keresidenan dikepalai oleh seorang residen", sehingga dengan begitu menurut Prof. Mr.Sunaria pemerintah sedjak itu berhak menguasai segala kekajaan jang antara lain berupa barang2 seperti terperintji dalam fatsal 10 Zelfbestuursregelen Mangkunegaran (Stbl. 1940 no. 543), jaitu jang menjebutkan djuga,bahwa sebagian dari kekajaan itu terhimpun dalam suatu "Fonds van Eigendommen van het Mangkunegaransche Rijk" jang kedudukannja diatur dalam beslit Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesia.

Prof. Mr. Sunaria menjatakan pula, bahwa sebelum diadakan tindakan oleh Menteri Dalam Negeri dalam kabinet **Sukiman/Suwirjo terhadap Dana** Milik Mangkunegaran itu, beberapa kalangan jang mengetahui keadaan sebenarnja berpendapat, bahwa pemerintah terlalu bersikap lunak terhadap tindakan2 dari beberapa orang terkemuka jang tertentu dalam Pradja Mangkunegaran selama revolusi kemerdekaan dan chususnja setelah daerah Surakarta direbut dan dikuasai pasukan kolonial Belanda, jang pada dasarnja sangat bertentangan dengan kepentingan rakjat Mangkunegaran, bahkan dengan kepentingan rakjat seluruh Republik Indonesia.

-Prof.Mr.Sunaria-

Prof. Mr. Sunaria menamakan tuntutan sipil Mangkunegara VIII itu suatu kedjadian jang "uniek", dan menjatakan kejakinannja, bahwa peristiwa jang tragis itu tidak akan terdjadi andai kata didjaman revolusi nasional pimpinan Mangkunegaran dipegang oleh seorang Mangkunegara VIII atau IV jang menurut Sunaria tjakap dan bidjaksana itu. (Antara, 5/5-'52).

PERPUSTAKAAN JAJASAN HATTA DIBUKA

Tadi malam di Jogja berlangsung upatjara pembukaan perpustakaan Jajasan Hatta. Ketua umum jajasan Prof. Ir.H.Johannes mengutjapkan pidato pembukaannja dan kemudian berturut-turut memberikan sambutannja Wahjudi Djojohadinoto dan Margono Djojohadikusumo, meriwajatkan berdirinja Jajasan Hatta di Jogja pada pertengahan tahun 1949 sekembalinja Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta dari pengasingannja di Bangka.

Menurut Prof. Ir. H.Johannes maksud daripada Jajasan Hatta jalah ditudjukan dalam pembangunan negara, terutama dalam soal pendidikan, antara lain dengan djalan menjelenggarakan perpustakaan nasional jang bersifat universil, mengadakan dan membantu mengurus studie-fonds untuk membeajai peladjaran pemuda Indonesia jang memerlukan bantuan. Dikemukakan bahwa sebagai penderma pertama untuk jajasan tersebut adalah Wakil Presiden Hatta jang menjetorkan uang sebesar 3½ (tiga setengah) djuta rupiah ialah wang jang ia terima dari Mangkunegoro ke-VIII Surakarta sebagai sumbangan guna pembangunan negara Republik Indonesia.

Pada waktu Wakil Presiden Hatta dinegeri Belanda telah dibuatnja kontrak dengan N.V.Boekhandel Brill di Leiden untuk membeli buku2 seharga 2 (dua) djuta rupiah, buku2 mana sebagian besar sudah diterima dan sampai sekarang ditempatkan diperpustakaan sebanjak 30619 buah. Dalam lapangan pendidikan Jajasan Hatta tahun jang lalu telah dapat membantu pengiriman 5 pemuda untuk melandjutkan peladjarannja keluar negeri. (Antara, 5/5-'52).

HASIL PEMILIHAN KETUA SEKSI2 TG. 5 MEI 1952.

Hasil pemilihan ketua seksi2 parlemen jang dilakukan semalam di DPR adalah sbb.:

Seksi perekonomian tetap Mr. Teuku Moh.Hassan (non-partai), seksi keuangan tetap Hutomo Supardan (PKI), Seksi Pertanian-Agraria R.Hindrosudarmo (Masjumi), tadinja Gondosuwandito (Masjumi), Seksi Pekerdjaan Umum & Tenaga - Perhubungan tetap Asrarudin (Partai Buruh) Seksi P.P.& K. - Agama - Kesehatan tetap Zainal Abidin Ahmad (Masjumi), Seksi Perburuhan - Urusan Pegawai - Sosial G.A.Moeis (Masjumi), tadinja Sumarto (Parkindo), Seksi Dalam Negeri - Penerangan Sjamsudin Sutan Makmur, tadinja Sutardjo Kartohadikusumo (PIR), Seksi Kehakiman - Keamanan dalam negeri Mr. Iwa Kusumasumantri, tadinja Mr. Lukman jang sekarang mendjadi Menteri Kehakiman, Seksi Pertahanan tetap Zainal Arifin (Masjumi) dan Seksi Luar Negeri tetap Mr.Sunario (PNI). (Antara, 6/5-'52).

MASJARAKAT DESA HARUS "SPORTMINDED"

Tidak lama lagi disetiap ketjamatan didaerah kabupaten Bandung akan dilangsungkan pertandingan sepakbola antara kesebelesan desa melawan desa. Maksud ini selain untuk memilih djuara kabupaten, djuga agar dengan pertandingan2 ini masjarakat desa gemar akan olahraga.

Sebagai permulaan dari pertandingan2 ini akan dilangsungkan pada tanggal 8 sampai 11 Mei j.a.d. di Tjimahi untuk memilih djuara desa dari ketjamatan tersebut. Pertandingan2 ini diselenggarakan oleh Djawatan Pendidikan Masjarakat. (Antara 6/5-'52).

-BURUH-

BURUH DAN PEGAWAI NEGERI

Oleh: Mr. Jusuf Wibisono

Mendjelang tanggal 1 Mei sebagai hari Buruh, baru2 ini timbul kedjadian2 jang bertalian dengan soal buruh. Pertama mengenai soal, apakah pada tanggal 1 Mei kantor2 pemerintah harus tutup atau tidak: kedua mengenai soal, apakah pegawai negeri boleh mogok atau tidak.

Soal jang pertama timbul berhubung dengan peraturan baru jang dibuat oleh Pemerintah Sukiman-Suwirjo tentang hari2 libur. Oleh karena dalam masa pembangunan ini dipandang tidak patut oleh Pemerintah jang lalu untuk mengadakan begitu banjak hari2 libur, maka sebagian dari hari2 libur resmi dikurangi dengan kira2 seperempat. Hari 1 Mei ditentukan sebagai bukan hari raja buat kantor2 pemerintah, sehingga kantor2 itu harus buka terus. Ketentuan lain mengatakan selandjutnja bahwa kepada pegawai2 negeri mengingini, dibolehkan untuk tidak masuk kantor supaja dapat turut merajakan hari buruh itu.

Memang di Eropah Barat dan dilain2 negara demokrasi, perajaan 1 Mei tidak lagi dilakukan oleh partai2 Sosialis dan Komunis sadja seperti dulu, melainkan dilakukan pula oleh lain2 golongan "progressief" jang menganggap 1 Mei itu sebagai 'hari untuk merajakan umum kerdja", sebagai "algemeen feest van de arbeid", akan tetapi tidak sebagai hari libur nasional.

Disini masih ada sadja aliran jang menuntut supaja pada hari 1 Mei kantor2 pemerintah ditutup, seakan2 Indonesia sudah mendjadi negara sosialis seperti R.R.T. atau negara2 Eropah timur.

Saja rasa tuntutan itu sebagian berdasar atas salah paham, jang timbul dari kenjataan bahwa sarekat2 sekerdja pegawai2 negeri jang berasal dari Republik Djokja dulu, menamakan diri sarekat buruh ini dan sarekat buruh itu. Kalau orang berpendapat bahwa pegawai negeri itu buruh pula, sedang menurut peraturan pemerintah sendiri, buruh pada hari 1 Mei dibebaskan dari kewadjibannja bekerdja, maka adalah logis bila kemudian ada tuntutan supaja pada hari tsb, kantor2 pemerintah ditutup sadja, karena para pegawai2nja toh dibebaskan dari kewadjibannja.

Maka untuk menghindarkan salah paham ini, perlu sekali djika Pemerintah membuat peraturan dimana ditentukan bahwa untuk membedakan antara sarekat sekerdja pegawai negeri dan sarekat buruh partikelir, sarekat2 sekerdja pegawai tidak boleh menamakan diri sarekat buruh.

Ada terkandung dua bahaja apabila pegawai negeri diboleh-kan menamakan dirinja buruh pula. Pertama, paham buruh membawa paham lawannja, j.i. madjikan. Jang dipandang sebagai madjikan tentunja Pemerintah, seakan2 Pemerintah kita suatu badan perusahaan jang bekerdja untuk mentjari untung sebanjak2nja buat diri dengan memeras para pegawai negeri.

Peladjaran2 tentang perdjoangan kaum buruh tidak dapat dilepaskan dari peladjaran2 Karl Marx tentang "klassenstrijd". Maka lalu timbullah pikiran pada para pegawai negeri bahwa mereka itu masuk kelas jang tertindas jang mempunjai musuh besar kelas penindas, j.i. Pemerintah. Karena buat pegawai negeri kita tidak larangan untuk mendjadi anggauta partai apapun djuga, maka mereka jang berhaluan Marxis-Leninis tentunja tidak akan mengabaikan kesempatan untuk mempropagandakan klassenstrijdleer dari Marx kepada teman2nja sedjawat.

Bagi kaum Marxis-Leninis, suatu negara bordjuis(burgerlijke Staat) seperti Republik Indonesia ini, adalah alat kaum kapitalis untuk menindas kaum proletar, dan Pemerintahnja dari negara itu dipandang sebagai wakil dari kaum kapitalis tadi. Maka dari itu, Pemerintah manapun djuga, harus dilawan. Tjara legal untuk mempersukar tugas Pemerintah ialah dengan mengadakan pemogokan2 besar-besaran.

Maka teranglah bahwa negara kita akan terantjam hidupnja, apabila pegawai2 negeri sampai berpikir demikian. Inilah bahaja

-jang pertama.-

jang pertama. Bahaja jang kedua jang terkandung dalam paham bahwa pegawai negeri itu buruh pula, ialah pendapat bahwa pegawai negeri mempunjai hak mogok djuga seperti baru2 ini terdjadi. Tidak untuk pertama kalinja, sebab dalam pertengahan tahun 1950 menurut berita2 pers jang tersiar waktu itu, segolongan pegawai2 D.K.A.Bandung melakukan pemogokan pula. Redaksi "Mimbar Indonesia" dalam artikelnja tentang "Buruh kita", nomer 26 Djuli 1950, telah mengandjurkan supaja Pemerintah mengadakan larangan mogok terhadap para pegawai negeri. Sajang bahwa hingga sekarang Pemerintah rupa2nja belum sempat untuk mempertimbangkan peraturan demikian itu.

Ada orang2 jang membantah mengapa pegawai2 negeri tidak boleh mogok. Bukanlah dalam U.U.D. pasal 21 hak mogok diakui sebagai hak azasi bagi para warga negara dan bukanlah pegawai negeri itu warga negara djuga? Selandjutnja ada jang menundjukkan kepada beberapa tjontoh di negara2 lain seperti Italia dan Mesir,dimana pegawai2 negeri boleh mogok. Ini menurut kabar2 pers jang sampai disini.

Mengenai pasal 21 U.U.D., dapat dikatakan bahwa pegawai negeri memang warga negara, tetapi warga negara jang dengan sukarela telah menempatkan diri pada suatu kedudukan hukum dalam negara dimana hak mogok tidak sesuai dengan kedudukan itu. Pun anggauta2 Polisi dan Angkatan Perang adalah warga negara: apakah karena itu mereka boleh mogok? Saja rasa tidak tepat djika pasal 21 U.U.D. itu dipakai untuk mengakui hak mogok bagi pegawai2 negeri. Ketentuan ini masih dapat dikupas lebih landjut,tetapi sekian dulu sudah tjukup.

Tentang keadaan2 di lain2 negara, umpamanja kabar2 tadi benar, itu terserah kepada mereka sendiri. Kalau mereka bisa membiarkan pegawai2 negerinja main2 mogok, dengan tidak dapat melihat bahaja besar jang dibawa olehnja, itu mereka harus tahu sendiri akibatnja. Sepandjang saja tahu, di kebanjakan negara2 para pegawai negeri dilarang mogok. Di negeri Belanda tidak sadja para pegawai negeri tidak boleh mogok, melainkan buruh partikelir dari Kereta Api sebagai perusahaan vital jang sangat penting artinja bagi kehidupan ekonomi negara, dilarang djuga untuk memakai sendjata mogok.(Mimbar Indonesia, 1/5-'52).

-KESAN2.....-

KESAN2 DARI SANGIHE-TALAUD
Oleh Subakir

II.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sangihe Talaud beranggauta 16 orang, diantaranja jang seorang nonactief, menunggu penjelesaian suatu perkara jang terdjadi didjaman NIT. Menurut keterangan dari sekretaris DPR disana, pemilihan DPR itu dilakukan bertingkat melalui kiesman berdasar peraturan 1949 jang dibikin oleh Dewan Radja2. Kaum wanita tidak mendapat hak memilih, tetapi boleh dipilih mendjadi anggauta, akibatnja pun tidak ada seorang wanita jang terpilih mendjadi anggauta DPR. Persatuan Wanita Indonesia Sangi -Talaud (Perwist) telah memprotes, sedang Perwari jang telah terbentuk di Sangihe pada permulaan bulan ini, kabarnjapun akan memperdjuangkan hak azasi wanita itu.

Njatalah, bahwa dualisme sebagai pembawaan masa peralihan, jakni dari alam feodalisme ke alam demokrasi, tidak sadja nampak dalam pemerintahan, tetapi pun dalam DPR sendiri sebagai lambang demokrasi. Dan adalah merupakan contrast jang njata, bahwa DPR jang menurut keterangan diatas dipilih menurut peraturan Dewan Radja2 itu achirnja memutuskan pula hapusnja swapradja.

Djika perdjuangan parlementer diibu kota Djakarta pada umumnja terlalu banjak terpengaruh oleh "siasat kepartaian" jang tidak djarang sangat berbelit-belit, maka perdjuangan dalam DPR Sangihe-Talaud masih banjak tergantung pada persoalan oknum (individu), meskipun 14 dari 16 anggauta adalah orang2 partai atau mewakili golongan. Sebab2nja menurut keterangan jang didapat, ialah karena partai2 politik belum dapat memainkan rol jang penting pada masa pemilihan, sehingga pemilihan anggauta dilakukan oleh para kiesman lebih tjondong pada faktor individu.

Ada pula suatu contrast jang sangat mengherankan, jaitu masuknja suatu usul resolusi dari anggauta2 DPR sendiri untuk membubarkan DPR dengan alasan, bahwa DPR tidak capabel mendjalankan kewadjibannja. Djiwa dari resolusi itu seolah2 bertjorak "kedjenkelan" semata, lepas dari suatu maksud politis. Untungnja pada saat2 terachir - karena desakan dari kanan kiri - para pengusul rupa2nja mendjadi insjaf, bahwa djika usulnja itu mendapat kemenangan, belum tentu akan menguntungkan usaha2 mendemokratisoer pemerintahan jang sudah dimulai dengan baik. Akibatnja, usul tersebut tidak djadi dibitjarakan.

Putusan2 DPR Sangihe-Talaud jg patut dihargai sbg usaha jg demokratis antaranja ialah rentjana peraturan pengganti pinontol (rodi), rentjana peraturan pemilihan kepala kampung dan rentjana peraturan gotong-rojong pembersihan kampung. (Dengan rentjana peraturan2 menganti pinontol itu dimaksudkan supaja pekerdjaan rodi jang lamanja 6 hari tiap tahun dari rakjat(penanggung rumah tangga) untuk kepentingan kepala kampung dihapuskan, diganti dengan uang kehormatan kepada kepala kampung jang diminta kan dari begroting pemerintah daerah).

Susunan DPR adalah sbb: PNI 4, Parkindo 3, PSI 2, PSII 1, Pasri (Partai Sosialis Radikal Indonesia)3, Pergerakan Pemuda Pembangunan Perodisa (PPPP)1, dan tiada berpartai 2.

Demikian serba sedikit dari badan legislatif di Sangihe-Talaud, dan untuk ilustrasi ada baiknja disebutkan djuga, bahwa gedung DPR Sangihe-Talaud masih merupakan gedung darurat, bentuknja setengah gedung setongah rumah, beratap zink, kira2 empatpuluh meter dari pantai. Serambi belakang dari gedung itu didjadikan ruangan sidang, luasnja lk 8 kali 7 m2, diberi beberapa korsi jang sangat sederhana. Disudut sebelah kanan diteruh beberapa bangku, diatasnja nampak sebuah papan dengan tulisan "Pers." Saja agak heran, bahwa tempat jg seterpentjil itu tidak luput pula dari gangguan njamuk2 pers.

-Reorganisasi-

Reorganisasi kehakiman dan pelanggaran2.

Usaha kearah terlaksananja trias politika, jaitu terpisahnja kekuasaan pemerintahan perundang2an dan kehakiman, sebagai sjarat mutlak untuk melepaskan masjarakat dari suasana feodalisme jang didjaman jang lampau mempunjai kekuasaan jang absoluut, maka Dewan Pemerintah Daerah Sangihe-Talaud atas desakan DPR sedjak pertengahan bulan ini mengadakan reorganisasi kehakiman jang nantinja akan ditudjukan kepada pembentukan pengadilan negeri. Djika tadinja kekuasaan mengadili itu ada pada swapradja dengan Madjelis Pengadilan Swapradjanja (Zelfbestuursrechtbank) untuk perkara2 besar dan Madjelis Ketjil Swapradja (Landschapsgerecht) untuk perkara2 ketjil, maka reorganisasi itu jang hakekatnja merupakan suatu masa peralihan berwudjud dengan penempatan seorang ambtenar pemerintah sebagai ketua dari zelfbestuursrechtbank dan sebagai hakim dari landschapsgerecht, lepas dari tjampur tangan pamongpradja. Pun dinamika dalam urusan pengadilan ini mendahului perundang2annja.

Meskipun dari sudut pengadilan, reorganisasi itu menguntungkan, namun menimbulkan kesan, bahwa bagi hakim jang hanja satu orang sadja itu, agaknja terlampau berat mendjalankan kewadjibannja, terutama pula kalau diingat, bahwa madjelis2 pengadilan itu tersebar di 6 tempat, 3 diantaranja dipulau2 diluar Sangihe Besar, jaitu di Tagulandang, Siau dan Talaud djauhnja lebih dari 100 mil dari Taruna. Dan djangan disangka, bahwa ditempat jang terpentjil itu tidak banjak terdjadi perkara.

Dalam pertjakapan dengan hakim tersebut didapat keterangan, bahwa djumlah perkara2 ketjil diseluruh Sangihe-Talaud tiap tahun lk ada 500, sedang perkara2 besar jang masuk ditahun 1951, perdata 399, pidana 327, telah diputus perdata 172, pidana 143 perkara. Disamping itu masih ada tunggakan lk 100 perkara pidana dan perdata jang mendjadi tugas Landgerecht, artinja jang terdakwanja terdiri dari orang2 asing atau ambtenar pemerintah jang diwaktu jang lalu tidak bisa diadili oleh pengadilan swapradja.

Menarik sekali perhatian, bahwa sebagian terbesar (lk 60%) dari perkara2 di Sangihe-Talaud adalah pelanggaran zede (Zedenmisdrijven). Menurut keterangan hakim, sebabnja jang terutama karena adat di Sangihe-Talaud memandang, bahwa perkawinan antara dua orang jang masih berhubungan pamili 4 deradjat termasuk "bloedschande", sedang perkawinan antara dua orang dalam hubungan pamili 6 deradjat menurut adat harus mendapat pengesjahan jang istimewa dari kaum keluarga.

Perkara2 lainnja jang sering terdjadi ialah pertikaian tentang batas2 kebun (kelapa), karena di Sangihe-Talaud belum ada pendaftaran tanah, sehingga batas2 tanah tidak njata dan djelas. Orang berkata, bahwa pertikaian mengenai sebatang pohon pisang jang tumbuh pada perbatasan sesuatu kebun "naik" pula kepengadilan.

Di Sangihe kini masih tergantung suatu perkara besar, jaitu pembunuhan dan "bloedschande" jang oleh kedjaksaan-tinggi dimintakan hukuman mati. Selain perkara2 "zeden" itu, sering pula terdjadi perkara2 perlukaan, karena mabok. Minuman jang populer di Sangihe-Talaud adalah saguer (tuwak), dan ditjeritakan kepada saja, bahwa pembalasan dendam kepada seseorang biasanja didjalankan dengan terlebih dulu minum saguer sampai mabok. Bahkan kata orang, untuk leluasa mengeluarkan isi hati kepada pembesar jang disegani, orangpun minum saguer lebih dulu. Beberapa orang jang tempoh hari menghadap Wakil Presiden Hatta, ketika beliau mengundjungi Sangihe-Talaud (September 1951), kabarnjapun berbuat serupa itu.

Demikianlah setjara sepintas lalu tentang reorganisasi kehakiman, tentang delicten dan tentang.....saguer.(Antara 25 April 1952)

Akan di sambung

- - - - -

No. 30.
Selasa, 27 Mei 1952.

SARI WARTA DAN ICHTISAR PERS

D A R I

I N D O N E S I A

Terbit pada tiap2 hari Selasa dan Djum'at.

Dikeluarkan oleh
Dinas Penerangan Indonesia
Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag.

Gra. cmw 2/5 13/11

PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

Information Service Indonesia

SARI WARTA INDONESIA

PERUNDINGAN PENGGANTI KERUGIAN PERANG TIDAK MUNGKIN DALAM BULAN MEI

Dari kalangan Kementerian Luar Negeri Djepang didengar kabar, bahwa hampir tidak ada kemungkinan akan diadakan perundingan Indonesia-Djepang kedua mengenai penggantian kerugian perang dalam bulan Mei ini, seperti direntjanakan dalam perundingan preliminer di Tokio tempo hari, berhubung dengan keadaan politik baru di Indonesia; a.l. perubahan kabinetnja, demikian wartawan "Antara" di Osaka.

Selandjutnja kalangan Kementerian Luar Negeri Djepang itu menduga, bahwa Indonesia tidak akan meratifisir perdjandjian damai San Francisco, melainkan akan mengadakan perdjandjian damai tersendiri dengan Djepang seperti apa jang hendak diadakan oleh Birma dalam waktu jang singkat. Dugaan ini berdasarkan sifatnja kabinet Wilopo. Didalam perdjandjian damai tersendiri itu Indonesia diduga mau memasukkan fasal2 mengenai peraturan pembajaran penggantian kerugian perang.

Terhadap kemungkinan ini pemerintah Djepang akan memegang teguh prinsip2 fasal 14 dari Perdjandjian San Francisco dalam peraturan penggantian kerugian perang jang dimasukkan kedalam perdjandjian damai tersendiri, tetapi djiwa dan tudjuan dari persetudjuan sementara jang diparaf di Tokio pada bulan Djanuari j.l. itu mau dipakai sebagai dasarnja.

Apabila ada tuntutan, Djepang tidak keberatan akan mengadakan perundingan sebelum negara itu meratifisir baik Perdjandjian San Francisco maupun perdjandjian damai tersendiri, tetapi pembajaran harus didahului oleh ratifikasi.

Dalam menetapkan djumlah ganti kerugian perang seluruhnja, Djepang meletakkan titik berat pada penjelesaian obligasi asing, karena kedua soal itu sangat bersangkut-paut. Naskah pembajaran ganti kerugian perang jang terachir akan disusun setelah soal pembajaran obligasi asing selesai. Waktunja itu dapat diduga sesudah musim semi tahun ini.

Berhubung dengan mungkin akan lambat tertjapainja persetudjuan penggantian kerugian perang, Djepang bersedia mulai melakukan pembajaran dengan djasa2 sebagai sebagian dari penggantian jang akan disetudjui sebelum persetudjuan penggantian kerugian perang jang terachir tertjapai.

Demikian sikap pemerintah Djepang mengenai penggantian kerugian perang menurut kalangan Kementerian Luar Negeri Djepang. (Antara, 14/5-'52).

BERITA2 DARI SUBANG.

Pembukaan "B.P.M.D." baru di Tjiberes.

Atas usaha Djawatan Pertanian Rakjat daerah kabupaten Subang, pada tanggal 17 Mei j.a.d. di Tjiberes, ketjamatan Pabuaran, kewedanaan Tjiasem, terletak dipinggir djalan raya Propinsi Sukamandi - Tjikampek (kl. 10 km dari Sukamandi) akan dibuka dengan resmi sebuah "Balai Pendidikan Masjarakat Desa" ("B.P.M.D.") jang akan diselenggarakan oleh sebuah panitya setempat dan dikundjungi berbagai instansi sipil dan militer. (Antara, 14/5-'52).

MEMPERDJUANGKAN KEPENTINGAN TAHANAN.

PSII tjabang Solo telah mengawat kepusatnja di Djakarta jang maksudnja minta supaja Arudji Kartawinata, ketua II parlemen, dan Anwar Tjokroaminoto, Menteri Sosial, keduanja dari putjuk pimpinan PSII, datang ke Solo untuk kepentingan (urusan) tahanan akibat pembersihan beberapa waktu jang lalu (sekitar peristiwa pemberontakan bekas bataljon 426) dan jang belum dibebaskan.

-Dalam.....-

Dalam pada itu "Kesatuan Wanita Islam" Surakarta jang diketuai Nj.Mawardi, dengan surat tertanggal 12 Mei, telah mendesak kepada jang berwadjib supaja para wanita tahanan - akibat pembersihan beberapa waktu jang lalu di Solo - jang telah lama meringkuk, segera diperiksa dan jang ternjata tidak bersalah lekas dibebaskan. (Antara, 13/5-'52).

KALIMANTAN KEKURANGAN 9754 GURU SEKOLAH RAKJAT.

"Menurut banjaknja penduduk, seharusnja seluruh Kalimantan mempunjai 2334 buah Sekolah Rakjat VI tahun. Sekolah Rakjat jang ada hanjalah 655 buah, dengan demikian kekurangannja sedjumlah 1680 buah sekolah". Demikian keterangan Dahri, Penilik Kepala Sekolah Rakjat jang diperbantukan pada Kantor Kepala Inspeksi Sekolah Rakjat Propinsi Kalimantan kepada "Antara".

Guru jang diperlukan sekurang2nja 14.004 orang, dengan demikian Kalimantan masih perlu tenaga guru sebanjak 9754 orang.

Untuk menambah kekurangan guru2 itu kini di Kalimantan telah ada 27 buah KPKPKB (Kursus Pengadjar Untuk Kursus Pengantar Kekewadjiban Beladjar). Menurut taksiran terendah dalam masa 10 tahun Kalimantan sudah akan mendapat 810 tenaga guru.

Achirnja Dahri menerangkan, biarpun bagaimana kesulitan jang dihadapi oleh Kantor Inspeksi Sekolah2 Rakjat Propinsi Kalimantan, namun belum pernah terdjadi Sekolah2 Rakjat diseluruh Kalimantan menolak pemasukan murid2 jang akan masuk. (Antara, 14/5-'52).

SEMBURAN2 API DAN BATU2 KETJIL DARI KAWAH TANGKUBANPRAHU

Tentang keadaan bahaja jang pada hari2 ini dinjatakan terhadap kawah Tangkubanprahu, lebih djauh Kepala Djawatan Pertambangan menerangkan, bahwa kini kawah Tangkubanprahu itu menjemburkan api, batu2 ketjil dan abu jang disemburkan bersama-sama dengan asap berwarna kehitam-hitaman. Semburan2 itu hanja mentjapai tinggi 25 meter dan tidak sampai keluar dari lingkungan kawah.

Suara gemuruh jang didengar dari pinggir kawah dan semua itu menandakan, bahwa keadaan gunung berapi itu berada dalam phase pertama dari sesuatu erupsi, tapi kegiatan Tangkubanprahu ini masih belum demikian besarnja.

Sampai kini oleh pihak jang berwadjib diadakan penindjauan2, biasanja pada waktu petang untuk dapat melihat dengan terang kegiatan2 dari semburan2 api tersebut.(Antara,14/5-'52).

PEMOGOKAN BURUH MINJAK DILAKUKAN DJUGA HARI INI

Karena pesan radio tidak didengar. Pemogokan buruh minjak di Pladju/Palembang dilakukan djuga pagi hari ini, sekalipun semalam telah disampaikan instruksi oleh Dewan Pimpinan Pusat Perbum untuk menghentikannja. Dari 7.000 buruh BPM di Pladju kurang lebih 5.500 orang jang mengikuti instruksi melakukan aksi pemogokan.

Menurut keterangan Komisariat Daerah Perbum Sumatera Selatan, setjara resmi mereka baru tadi pagi djam 10.00 mendengar adanja instruksi penghentian pemogokan semalam, /tempat pengurus Komisariat Daerah Perbum daerah ini, listrik mati, sehingga instruksi jang disiarkan via radio itu tidak didengar. Pada djam 11.00 pagi ini baru dapat diadakan pembitjaraan dengan radio-telefoni antara Komisariat Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat Perbum di Djakarta, sehingga baru siang itulah soalnja mendjadi djelas.

Pada waktu berita ini dibuat, belum diketahui bagaimana akan kesudahan pemogokan di Pladju ini. Terutama tidak diketahui keadaan ditjabang2, karena laporan belum ada, dan mengingat pula burukнja perhubungan. (Misalnja dari Djambi).

Dapat dikabarkan, bahwa di Pladju jang mogok ternjata bukan sadja anggauta2 Perbum, tetapi djuga buruh anggauta atau bukan anggauta sama sekali dari sesuatu organisasi buruh minjak lainnja.

/karena kebetulan semalam dimarkas staf aksi Sumatera Selatan, -DPKN.....-

DPKN minta keterangan.

Beberapa orang pengurus Komisariat Daerah Perbum dan tjabang Pladju/Palembang, pagi ini dipanggil DPKN Propinsi Sumatera Selatan, untuk dimintai pendjelasannja.

Penjuluh Perburuhan Anwar Bey kepada Antara menjatakan, bahwa kenjataan diteruskannja aksi oleh Perbum Pladju itu sudah melanggar undang2, sehingga harus pula mereka berani bertanggung djawab atas akibat2nja. Penjuluh harapkan, sesudah diadakan radio-telefoni tersebut, aksi jang sudah berlangsung di Pladju itu harus segera diachiri.

Kiosk2 minjak tutup.

Dalam pada itu beberapa kiosk minjak BPM dikota Palembang, hari ini djuga menutup tank pompanja (tidak mendjual minjak). Apa sebab2nja belum diketahui. (Antara, 14/5-'52).

PASARAN KARET DI PALEMBANG LEMAH SEKALI

Menurut tjatatan dari Persatuan Dagang Indonesia Palembang, pasaran karet sedjak beberapa hari belakangan di Palembang makin lemah. Slab basah sudah djatuh sampai Rp.100.- buat 100 Kg. Slab basah kering diantara Rp. 115.- sampai Rp. 120.-. Sedangkan menurut tjatatan resmi kantor perdagangan di Palembang harga slab basah kering pada tanggal 12/5 Rp. 165.- buat 100 kgnja.

Export slab memang sudah sedjak beberapa bulan ini tidak ada sama sekali. Kantor Urusan Export Kota Palembang hari ini menurunkan Valuta Contrak sampai Str.$. 77,00 buat 100 kg f.o.b. Tadinja Valuta Contrak dibuka dengan harga Str.$.99,00, kemudian diturunkan Str.$.85,00. Achirnja hari ini diturunkan sampai Str.$.77,00. Menurut kalangan pedagang2 Valuta Contrak, ini djuga tidak akan dapat ditutup untuk export.

Dalam pada itu dari pertjakapan dengan beberapa pedagang jang baru datang dari daerah produsen terdapat keterangan, bahwa pada masa achir2 ini ada kelihatan tanda2 akan timbulnja kemungkinan krisis penghidupan dari rakjat jang 100% menjandarkan pokok penghidupannja pada karet. Sangat dichawatirkan, kalau harga karet ini akan lebih merosot.

Seterusnja seorang exporter dan importir jang terkemuka (pengurus salah satu organisasi dagang) dalam pembitjaraannja dengan "Antara" menjatakan, bahwa perbaikan keadaan harga karet didalam negeri buat sementara tidak dapat diharapkan dalam tempo jang singkat.

Menurut perhitungannja, harga karet setidak2nja dalam tempo tiga bulan jang akan datang ini terus akan ditekan dan dipermainkan oleh Amerika, karena USA sudah mengetahui bagaimana stock didalam negeri dewasa ini. Sedangkan membuka perdagangan dengan negeri2 lainnja seperti blok Russia ataupun RRT, tidak akan dapat dilakukan dengan segera. Setidak2nja ini akan memakan waktu sampai dua ä tiga bulan.

Exporter tersebut sangat pessimistis melihat keadaan dewasa ini, meskipun dia dapat melihat kenjataannja jang baik, bila hubungan perdagangan dengan blok Russia dapat dilakukan, dengan sjarat perhubungan harus diatur langsung dengan kapal2 atau alat2 transport negeri2 itu sendiri. Kalau masih djuga harus memakai alat2 transport jang sekarang ini dipakai, tidak dilihatnja akan ada kelantjaran. (Antara, 14/5-'52).

DEMONSTRASI BURUH OGEM PALEMBANG.

Kemarin pagi lebih kurang 100 buruh Ogem (gas-listerik) Palembang bagian Sentral 3 Ilir dan Kantor, mendatangi Kantor Penjuluh Perburuhan setjara demonstratif. Mereka meletakkan pekerdjaannja serentak.

Pada mulanja aksi ini dipelopori oleh lebih kurang 40 buruh dari Sentral 3 Ilir, jang datang berdemonstrasi kekantor Tjabang Ogem dikota, untuk menuntut perbaikan nasib dan dipekerdjakan kembali seorang buruh jang baru ini diperhentikan.

Tuntutan perbaikan nasib itu berhubungan dengan adanja keputusan mengikat dari P4 Pusat, dalam pertikaian antara PB SBLGI dan NS Overzeese Gas & Electriciteits Mij tanggal 30 September 1951, jang diprotes oleh SBLGI Tjabang Palembang 1951, karena

-tidak adil-

tidak adil bagi buruh di Palembang. Protes ini sampai saat kedjadian tersebut tidak ada djawabannja, baik dari P4 Pusat maupun organisasi mereka sendiri, maka itu buruh bertindak sendiri.

Penjuluh Perburuhan, Anwar Bey, mendjelaskan kepada buruh jang berdemonstrasi, bahwa tindakan jang sudah dilakukan oleh buruh tersebut sudah melanggar undang2 No.16 tahun 1951.

Sesudah mendapat pendjelasan dari Penjuluh Perburuhan, buruh kembali kekantor Tjabang Ogem Palembang, meminta bertemu dengan direksi.
Dalam pertemuan antara direksi dan buruh diadjukan satu tuntutan, jaitu supaja diperhentikan seorang pegawai, jang dianggap mereka "kakitangan madjikan".

Bagaimana seterusnja aksi ini belum diketahui. Perkara ini kemudian sampai ketangan polisi. Dan oleh pihak polisi diadakan pemeriksaan pada hari itu djuga.

Meskipun ploeg pertama jang bekerdja di Sentrale mulai pagi sudah melatakkan pekerdjaannja, pemhagian aliran listerik masih didjalankan sebagai biasa.
(ANTARA 13/5).

BATIK INDONESIA MENARIK PERHATIAN PUBLIK LONDON

"Banjak orang, terutama perempuan, jang mau lebih lama berdiri melihat-lihat kain tenunan dan batikan Indonesia", demikian komentar Manchester Guardian kemarin pagi tentang Pameran Indonesia di London.

"Batik Indonesia bagus sekali untuk didjadikan tabir dan pakaian wanita diwaktu malam. Sebelum perang kain batik ada didjual orang di tanah Inggeris. Kata orang, pada abad ke-17 batik sudah diimport ketanah Inggeris Tetapi kini tidak ada orang mendjualnja di London, dan sudah waktunja orang Indonesia mulai mendjualnja lagi disana".

Demikian wartawan "Antara" di London.
(ANTARA 14/5)

RP 12,500 UANG RAKJAT UNTUK MESDJID

Derma jang dikumpulkan dari rakjat didaerah Salatiga telah mentjapai Rp. 12.500.- Dengan disokong oleh jang berwadjib Rp. 54.000.- kini tjukup untuk membangun sebuah mesdjid besar di Salatiga.

Kini sedang giat dikumpulkan lagi uang sebanjak Rp.20.000 guna membikin serambi belakang dari mesdjid itu.
(ANTARA 13/5)

PEMBARUAN SUSUNAN KOMITE PERINGATAN HARI KEBANGUNAN NASIONAL

Susunan Panitia Peringatan Hari Kebangunan Nasional jang terbentuk pada ketika memperingati hari tersebut di Jogja tahun 1948, semalam diperbaharui dalam rapat jang diadakan oleh wakil2 organisasi, bertempat disalah sebuah ruangan digedung parlemen. Dari susunan lama diambil 3 anggota, jaitu Kihadjar Dewantoto, Sabilal Rasjad dan Tjugito, ditambah dengan anggota2 jang terpilih dalam rapat semalam, jaitu Widjadja dari BPP, Trimurti dari Gerwis, Susanto dari Peladjar dan Utarjo dari bekas Pedjuang. Sebagai ketua Dewantoro. Sebelum pemilihan, Tatang Mahmud salah seorang anggota panitia 1948 menarik diri.

Beberapa saran dimadjukan oleh para wakil organisasi, jang pada umumnja menghendaki. bahwa meskipun berhubung dengan kurangnja waktu peringatan hanja dapat dilakukan dengan sederhana, namun harus dapat memberi isi pada peringatan tersebut. Mengenai isi ini semula terdapat beberapa perbedaan tidak berat.

Atas saran2 jang dimadjukan oleh para wakil organisasi itu K.H.Dewantoro mendjawab, bahwa untuk mentjapai persatuan dalam hal peringatan Hari Kebangunan Nasional itu djanganlah para organisasi mengemukakan soal2 jang chusus dan principieel, tetapi hendaknja jang umum sadja, perlunja supaja dapat diikuti oleh semua organisasi. Kemudian rapat membentuk panitia peringatan tersebut.

Sebelum rapat mulai dengan pendapat2 para hadirin, terlebih dulu rapat mendengarkan uraian K.H.Dewantoro tentang maksud peringatan Hari Kebangunan Nasional jang ini seperti djuga ditahun 1948 dirasakan perlunja diadakan guna mempertebal rasa kesatuan. Tanggal 20 Mei 1908 dipandang sebagai Hari Kebangunan Nasional, ialah karena dengan berdirinja Budi Utomo pada waktu itu

-timbullah-

timbullah pula tjita2 baru dalam perdjuangan bangsa Indonesia, jaitu Indonesia jang satu, jang merdeka dan berdaulat, demikian K.H.Dewantoro.

Rapat semalam dihadiri antara lain oleh wakil2 PKI, PSII, Pemuda Demokrat, Wanita Demokrat, Persatuan Bekas Pedjuang Bersendjata, Gerwis, Kowani, Muslimat, Perwari, Panitia Perdamaian, PPKI dan PRI.
(ANTARA 14/5)

LATIHAN KILAT BAGI "PENGUNDJUNG" PEREMPUAN BERSALIN

20 Orang wanita dalam bulan Mei ini akan mengikuti latihan kilat beberapa hari lamanja di Ambarawa (Semarang) untuk mendjadi "pengundjung", jaitu mengundjungi wanita habis bersalin dirumah masing2.

Usaha ini dilakukan oleh Djawatan Kesehatan setempat mengingat adanja ibu2 didesa jang bersalin, tetapi karena djauh tempatnja tidak dapat datang dirumah sakit, sehingga perawatan sebagaimana mestinja kurang terdjamin.

Dengan usaha tersebut djawatan itu berichtiar mendjaga kesedjahteraan ibu dan anak, misalnja dengan mengadakan kursus Dukun Baji didesa2, pembagian susu, Balai Pemeriksaan baji dan ibu jang hamil.
(ANTARA 13/5)

PKI MERAJAKAN HARI ULANG TAHUNNJA JANG KE 32

Pesan CCPKI membentuk Front Persatuan Nasional jang luas

Sekretariat CCPKI mengabarkan, bahwa hari ulang tahun PKI jang ke 32, jaitu tanggal 23 Mei jang akan datang, akan dirajakan oleh PKI diseluruh Indonesia dengan mengadakan resepsi2 dan rapat2. Dibeberapa tempat sudah dibentuk panitia2 perajaan jang terdiri dari anggota2 PKI dan pentjinta2 PKI. Pada resepsi dan rapat2 tersebut akan dibentangkan perkembangan PKI didaerah2 dan "riwajat PKI selama 32 tahun dan politik PKI sekarang", pula kesempatan akan diberikan pada hadirin untuk menjampaikan pesanan2 dan sambutan2nja.

Selandjutnja Sekretariat CCPKI mengabarkan, bahwa berkenaan dengan hari ulang tahun tersebut CCPKI akan menjampaikan sebuah pesanan pada anggota2 dan pentjinta2 PKI, jang antara lain menjerukan supaja meneruskan perdjuangannja untuk mentjapai perdamaian dunia jang abadi, untuk demokrasi, untuk kemerdekaan nasional dan untuk perbaikan nasib rakjat, supaja tetap berusaha menggalang Front Persatuan Nasional jang luas dan kuat, supaja lebih banjak lagi beladjar teori2 revolusioner, beladjar dari tulisan2 Lenin, Stalin, Mao Tse-Tung, Liu Shao-chi dan dari pemimpin2 PKI sendiri, agar dengan demikian lebih mempertadjam kewaspadaannja dilapangan politik organisasi dan dengan demikian dapat mendjaga nama baik PKI.

Dikabarkan pula, bahwa berhubung dengan hari ulang tahunnja itu, CCPKI telah kirim kawat minta pesanan kepada Partai2 Komunis Soviet Uni, Tiongkok, Australia, Belanda, Amerika, India dan Djepang.
(ANTARA 14/5)

PEMBELIAN PADI DI KUDUS GAGAL?

Karena limit pemerintah lebih rendah dari rakjat

Dari Kudus disampaikan kabar kepada "Antara" Semarang, bahwa pembelian padi pemerintah disana gagal sebagai akibat tidak seimbangnja harga padi jang ditetapkan oleh pemerintah dan harga umum sekarang didaerah itu.

Menurut kabar itu harga umum Rp.110.-s/d Rp.125.- sedangkan pemerintah hanja Rp.75 s/d Rp. 90.- dan untuk mengimbangi itu oleh pemerintah Djawa Tengah telah diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk menambah penetapan harga tetapi jang belakangan kabarnja, ditolak.

Patut dikabarkan, untuk pembelian padi itu di Kudus telah dibentuk suatu Badan terdiri dari BTI, STII, PERBETA, PPDI, dan Koperasi Nasional jang masing2 telah menerima modal untuk membeli padi sebanjak Rp.10.000.- tetapi karena gagal itu akan dikembalikan kepada jang berwadjib.
(ANTARA 13/5).

BEBERAPA PUTUSAN P4 DAERAH

P4 Daerah Djawa Barat telah mengambil putusan mengenai beberapa perselisihan antara buruh dan madjikan didaerah Djawa Barat.

Pertama diputuskan, supaja buruh perkebunan karet sebanjak 16 orang di Bantardawa Tjiamis segera dikerdjakan lagi oleh pihak pengusaha dengan memberikan kerugian kepadanja sedjumlah upah mereka selama mereka diberhentikan.

-Kedua-

Kedua diputuskan memberikan andjuran kepada buruh dan Pusat Perkebunan Negara untuk menjelesaikan pertikaian diperkebunan negara didaerah Tjiawi Bogor.

Kepada buruh diandjurkan antara lain2 supaja tuntutannja dirubah djadi permintaan kepada direktur untuk mengangkat buruh2 pemetik mendjadi buruh2 tetap dengan mengingat sjarat2 sbb: paling sedikit telah bekerdja tiga bulan, tiap2 bulan bekerdja 20 hari dan tiap2 hari menghatsilkan rata2 18 kilogram teh mulai tanggal 13 Maret 1952.

Kepada pihak pengusaha antara lain2 diusulkan supaja memenuhi tuntutan buruh dengan mengingat sjarat2 tersebut diatas.

Achirnja kepada kedua belah pihak, djika dalam hal ini tidak dapat menerima andjuran2 diatas bersama-sama memadjukan penjelesaian soal ini kepada Menteri Perburuhan dengan perantaraan P4D dengan kesediaan taat kepada putusan2 jang akan diambil.

(ANTARA 13/5)

MELAKSANAKAN PROGRAM PEMERINTAH TIDAK SAMA DENGAN PEKERDJAAN AANNEMER JANG MEMBIKIN GEDUNG MENURUT GAMBAR.

Kata Menteri Dalam Negeri Mr. Roem

"Pemerintah wadjib mendjalankan programnja dalam batas2 kemungkinan. Program itu dibuat atas dasar apa jang perlu dan mendesak untuk dikerdjakan sekarang. Tapi melaksanakan program itu djangan dibandingkan dengan pekerdjaan seorang aannemer jang membikin gedung menurut gambar tertentu. Membikin negara tidak akan ada habis2nja untuk masa jang akan datang", demikian keterangan Menteri Dalam Negeri Mr Moh. Roem dalam pertemuan dengan pers pagi ini, sebagai djawaban atas pertanjaan sampaimana kesanggupan alat2 negara untuk melaksanakan program pemerintah.

Mengenai perasaan tidak puas tentang keadaan jang sudah amat meluas dikalangan chalajak ramai, Mr Roem menerangkan, bahwa pemerintah sadar akan keadaan itu dan mengerti. Orang mengira, bahwa setelah 7 tahun merdeka, dengan 2 kali mengalami aksi militer, kenikmatan akan gampang tertjapai. Kita telah bersalah dengan mendjandji2kan, bahwa kalau kita sudah merdeka maka kita memasuki pintu gerbang kebahagiaan.

Mr Roem mengharapkan, supaja para pemimpin rakjat djangan menghidup2kan perasaan tidak puas itu. Dalam mengupas siapa bersalah Mr Roem mengambil soal beras sebagai tjontoh. Import beras adalah sebanjak 600.000 ton seharga kurang lebih Rp 1 miljard devisen. Apakah beras dan wang itu harus disunglap? Kesulitan terletak kepada keadaan, sedang orang ramai menjalahkan pemerintah dan pembesar2, jang dipakai sebagai uitlaat-klep untuk melepaskan perasaan tidak puas itu. Perasaan ini, menurut pendapat Mr, Roem, harus disalurkan kearah kerdja-keras.

Atas pertanjaan apa usaha pemerintah untuk meringankan beban rakjat jang berupa iuran2 untuk matjam2 hal seperti untuk bikin sekolah, untuk Pagar Desa, untuk Ronda Malam, untuk bikin djembatan, untuk bikin Bale Desa etc., disamping padjak peralihan jang sekarang sudah mulai diaanslag Menteri Dalam Negeri mendjawab dengan menanja kembali: "sumbangan2 itu untuk kepentingan siapa2, kalau bukan untuk rakjat sendiri?".

Rakjat diminta bantuan untuk sumbangan2 itu karena padjak tidak masuk merata, sedang pemerintah harus memelihara alat2nja jang begitu besar seperti tentara, pegawai negeri jang begitu banjak dan sebagainja.

Landrente jang dulu hanja 5%, sekarang akan diganti dengan padjak peralihan, jang lebih banjak itu. Tapi alat2 negara untuk menjelenggarakannja masih kurang.

Kalau segala usaha, jang diselenggarakan dengan sumbangan rakjat itu, harus diongkosi oleh anggaran belandja maka pemerintah tidak akan dapat memikulnja, sebab untuk pengeluaran2 routine sadja anggaran belandja sekarang mengalami ketekoran Rp 1 miljard.

Sesuatu pengeluaran dari begroting pada hakekatnja berarti pengeluaran dari rakjat sendiri. Soalnja, kata Mr Roem, ialah terletak pada bagaimana menggunakan wang negeri itu. Tapi untuk pengeluaran2 jang produktip pemerintah tidak akan ragu2 memberikannja.

Mengenai pertanjaan bagaimana keadaan ekonomi Indonesia sekarang djika dibandingkan dengan 1 atau 2 tahun jang lalu, Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa keadaan ekonomi sekarang bertambah berat. Satu à 2 tahun jang lalu kita mendapat keuntungan karena harga karet dan timah tinggi sekali. sedangkan

-sekarang-

sekarang tidak. Maka oleh karena itulah pengeluaran harus diperhemat.

Menurut pendapatnja, untuk mengatasi keadaan demikian, kita harus menambah produksi, beras upamanja, dan menjelenggarakan transmigrasi. Keadaan negara2 Asia lainnja pun tidak lebih baik daripada kita sekarang.

Selandjutnja Mr Roem menerangkan, bahwa Kementerian Dalam Negeri sekarang telah mengambil tindakan supaja memotong padi di Lombok dirobah dari 1/60 mendjadi 1/80 (di Djawa 1/5). Djuga orang jang mengerdjakan tanah di Lombok akan diatur supaja mendapat ½-nja dari netto seperti di Djawa. Sebagai diketahui, di Lombok itu terdapat grootgrondbezit, sehingga perbedaan keadaan kaja sikaja dan simiskin besar sekali dan menjebabkan peristiwa2 kelaparan, walaupun daerah itu termasuk penghasil beras.

Tentang kapital asing Mr Roem menegaskan lagi, bahwa oleh karena kita perlu pembangunan tapi tidak punja modal, maka kapital asing itu harus dapat kita terima dengan sjarat2 dan memberi kemungkinan bisa mengembangkannja. Pemerintah akan meminta 25% dari keuntungan.

Selain daripada itu pemerintah dalam beberapa maskape mempunjai saham seperti dalam maskape Nian 50%, dalam Gemengde Biliton Maatschappij 62% sedang saham2 Banka Tin telah 100% ada ditangan Pemerintah.
(ANTARA 13/5)

DJAWA TIMUR DAPAT 1 UNIT ALAT2 PERTANIAN BERMOTOR

Dari inspeksi Pertanian Djawa Timur didapat keterangan, bahwa Djawa Timur akan mendapat 1 unit alat2 pertanian bermotor terdiri atas 10 buah traktor. Unit itu akan dipusatkan dibekas paberik gula "War", 7 Km diluar Surabaia.

Dalam hubungan ini kemarin berangkat dari Djawa Timur Rekanto dari Pertanian Probolinggo dan Sidarto dari Pertanian Sidohardjo ke Djakarta untuk selandjutnja meneruskan perdjalanan ke USA. Di Amerika mereka akan mengikuti suatu peladjaran tentang mekanisasi pertanian selama 6 bulan.

Dalam pada iut Teguh dari Pertanian Madiun dan Sanjoto dari Pertanian Banjuwangi djuga bertolak ke Djakarta untuk mengikuti kursus mekanisasi selama 6 bulan jang diadakan di Djakarta. Djawa Timur kini djuga dimintai seorang achli pertanian jang akan diikutkan dalam delegasi Indonesia kekonperensi pertanian di California (USA).
(ANTARA 13/5)

JANG MENANG DALAM SOAL IRIAN AKAN KALAH?

Wartawan "Het Parool" Dr. Blankenstein jang tiba di Medan sedjak 7 April jl. hari ini terbang kembali ke Djakarta setelah berada didaerah ini selama 5 hari.

Dalam tanja-djawab ketika ditanjakan kepadanja mengenai politik bebas Indonesia, Dr. Blankenstein mengatakan, bahwa perumusan politik bebas adalah satu perumusan jang baik dan populer sekali, tapi Dr. Blankenstein membajangkan djuga, bahwa tempo2 ada djuga kesulitannja mendjalankan politik itu (dalam hubungan ini ia menjebut tentang embargo).

Ditanjakan pendapatnja mengenai Irian Barat, ia mengulangi suatu perumusan jang pernah didengarnja di Amerika tentang masalah itu: "Siapa jang menang dalam soal ini, dialah jang kalah", dan ia tambahkan, bahwa pada satu pihak, jang menang dalam soal ini harus membina disana hal mana berarti "ruine" bagi pihak itu.

Diantara kesan2nja terpenting menurut jang diketahui dari orang jang menemaninja antara lain ialah bahwa umumnja bangsa Belanda di Sumatera Timur masih belum dapat menjesuaikan diri dengan keadaan jang telah berobah, terutama dalam hubungan dengan bangsa Indonesia, jang keadaan ini berbeda dengan jang dilihatnja di Djawa dan Sumatera Selatan.
(Antara, 13/5-'52).

-PENGEMBALIAN.....-

PENGEMBALIAN 315 BEKAS PEDJOANG KEMASJARAKAT

315 Para bekas pedjoang dari Tanah Karo dan Langkat Hulu jang sedjak 1950 mengasingkan diri telah menjatakan dengan resmi kembali kemasjarakat. Pernjataan ini disampaikan mereka kemarin pagi dalam satu upatjara resmi jang disertai tari2an adat oleh para keluarga bekas2 pedjoang itu di Namutrasi (satu kampung 18 km. selatan Bindjai) dihadapan para pembesar sipil tentara dllnja. Dalam pada itu mereka djuga telah serahkan sedjumlah alat sendjata mereka pada pemerintah.

Dapat dikabarkan, bahwa rombongan bekas2 pedjoang ini terdiri dari berbagai organisasi kelasjkaran dimasa jang lalu dan dengan ini telah dua kalilah berlangsung upatjara pernjataan seperti ini dari para bekas pedjoang di Sumatera Timur; jang pertama ialah achir April jang lalu oleh 354 orang didaerah Deli Hulu.

Seperti diketahui, perundingan2 mengenai penjerahan kedua kali ini telah dimulai bulan April jang lalu antara Megang Sitepu dengan pihak Mobrig jang berachir tg. 24/4 dengan persetudjuan kedua pihak dan penetapan tanggalnja dibulan Mei buat adakan pernjataan resminja.(Antara 13/5).

PAMERAN HASIL SENI DI LONDON

Kemarin siang telah dilakukan pembukaan pameran hasil2 kesenian ukir-mengukir dan hasil2 kesenian Indonesia lainnja di.London jang dikundjungi oleh berbagai wakil diplomatik di London. Demikian kawat wartawan "Antara".

Pidato pembukaan dilakukan oleh duta-besar Indonesia di London Dr.Subandrio. Pidato tsb. didjawab oleh Marquis of Reading, wakil menteri luar negeri Inggeris, atas nama para tamu. Dalam pameran tsb. dipertundjukkan pula hasil para seniman modern Indonesia.

Para tamu sangat memudji pameran tsb. dan mereka menundjukkan perhatian jang besar sekali.(Antara 13/5).

TRANSMIGRASI DUMOGA MEMBERI HARAPAN AKAN BERAS

Pendapat T.Olii

Anggota parlemen T.Olii dari seksi Perhubungan, Pekerdjaan Umum dan Tenaga jang baru tiba dari penindjauannja di Sulawesi Utara menerangkan kepada "Antara", bahwa transmigrasi jang kini oleh B.R.N. sedang diusahakan ditanah dataran Dumoga (Sulawesi Utara) memberi harapan sangat baik guna menambah hasil produksi beras.

Menurut Olii, tanah datar Dumoga jang luasnja 32.000 ha. itu terdiri dari tanah jang subur dan separohnja dapat segera diairi dengan mengadakan pekerdjaan irigasi setjara ketjil2an. Djika irigasi itu segera dapat dikerdjakan dan l.k. 10.000 sampai 16.000 transmigranten dapat segera dikirimkan ke Dumoga, maka menurut Olii dalam waktu tiga tahun sadja hasil di Dumoga akan dapat mentjukupi keperluan beras bagi seluruh penduduk Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Minahasa dan Sangihe Talaud. Dan dalam waktu 5 tahun, artinja djika seluruh tanah datar Dumoga dapat dikerdjakan, maka hasil padinja djika digabungkan dengan hasil padi Sulawesi Selatan, akan dapat mentjukupi kebutuhan beras untuk seluruh daerah Sulawesi, Maluku, Sunda Ketjil dan Kalimantan.

Untuk dapat mengerdjakan seluruh tanah datar Dumoga diperlukan pengairan setjara besar2an dan alat2 pertanian jang tjukup, dan akan lebih utama lagi djika bisa didatangkan traktor2, demikian Olii jang berpendapat pula, bahwa sebelum usaha2 transmigrasi itu dapat dilakukan setjara lantjar, terlebih dulu harus dibuka djalan antara Kwandang (Gorontalo) dan Inubonto (Dumoga) jang pandjangnja 200 Km. Ia terangkan pula, bahwa untuk pembukaan djalan ini oleh pemerintah pusat telah disediakan beaja Rp. 3½ djuta, tetapi belum mentjukupi dan mengenai lekas atau lambatnja hasil transmigrasi itu menurut Olii banjak pula tergantung pada lekas atau lambatnja pembikinan djalan tersebut. (Antara, 13/5-'52).

-USAHA SOSIAL-

USAHA SOSIAL SERIKAT BURUH BANK INDONESIA

Oleh Ketua Badan Sosial dari Serikat Buruh Bank Indonesia di Djakarta telah disampaikan kepada Kementerian Sosial uang sedjumlah Rp. 1.691,25 serta 4 helai pakaian tua. Uang dan pakaian itu jang dimaksudkan untuk memberi pertolongan kepada mereka jang membutuhkannja adalah hasil pengumpulan jang dilakukan oleh organisasi tersebut pada tanggal 1 Mei jang lalu.
(Antara, 13/5-'52).

BELUM PERNAH TERDJADI FUSI

Membantah pengumuman Partai Buruh Daerah Djawa Barat, jang menjatakan antara lain, bahwa "berhubung dengan berdirinja Partai Buruh Daerah Djawa Barat, jang tergabung dalam Partai Buruh dalam pimpinan Prof. Abidin, maka Partai Buruh jang dipimpin oleh T.H.Sarojo telah dinjatakan bergabung", dan "bahwa tahun 1951 Partai Buruh T.H.Sarojo berusaha untuk menghidupkan partainja di Bandung, tapi ternjata tidak nampak aktivitetnja, meskipun pada Agustus dikatakan, Dewan Partai Buruh Pusat sudah dipindahkan dari Djakarta ke Bandung", maka Partai Buruh T.H.Sarojo mengeluarkan pengumuman sbb:

"Tidak dan belum pernah ada maksud dari kami untuk fusi dengan Partai Buruhnja Abidin.
Belum pernah Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh pindah ke Bandung.

Aktivitet Partai kami tetap, terutama achir2 ini jang mendapat dukungan dari massa terutama massa Pemuda, baik didalam maupun diluar Ngeri".

Selandjutnja pihak Partai Buruh, jang dalam pengumuman2 lazimnja disebutkan "Partai Buruh Sarojo" tersebut minta diumumkan, supaja dimasa selandjutnja nama partai mereka djangan dihubungkan dengan nama sesuatu persoon. (Antara, 13-5-'52).

PAMONGPRADJA DIDAERAH TOMOHON MELANGGAR HUKUM NEGARA?

Pertanjaan F.A.P.Pitoi.

Oleh anggauta DPR-RI F.A.P.Pitoi telah dimadjukan pertanjaan tertulis kepada Pemerintah mengenai tindakan pamongpradja didistrik bawahan Tomohon jang menurut penanja telah bersikap kedjam dan melanggar hukum2 Negara jang berdasarkan Pantjasila. Menurut Pitoi soal itu kini mendjadi soal jang hangat dikalangan rakjat disana dan menghendaki penjelesaian jang segera oleh Pemerintah.

Dalam hubungan ini oleh penanja dikemukakan peristiwa pemilihan hukum tua (kepada desa) jang walaupun dipertahankan oleh 476 dari djumlah suara sebanjak 721, telah diberhentikan oleh Pamongpradja disana dan digantinja dengan salah seorang pamili dari pihak pamongpradja tersebut.

Tindakan Pamongpradja selandjutnja ialah mengangkat salah satu diantara pamili mereka untuk mengganti J.Polii sebagai Kpl. Desa. Hal ini sangat ditentang oleh pemilih2 sehingga penagihan2 padjak menghadapi kesulitan2. Demikian keterangan F.A.P.Pitoi.
(Antara, 13/5-'52).

PEMULANGAN ORANG2 TERLANTAR TIDAK DJADI DILAKUKAN

Pasar Rebo dan Lenteng Agung akan dibuka sebagai daerah baru.

Ketua Panitya Pemindahan dan Penjebaran Penduduk, D.M.Janur menerangkan pada "Antara", bahwa rentjana pemulangan dari apa jang disebut orang2 terlantar dari daerah Djakarta Raya kedaerah asalnja masing2 seperti telah diputuskan dalam konperensi antara wakikota dengan para residen Djawa Barat beberapa waktu jl, dalam prakteknja sukar sekali dilaksanakan, dan untuk sementara waktu terpaksa dibatalkan.

Dinjatakan, bahwa suatu komisi jang telah dibentuk oleh Panitya Pemindahan dan Penjebaran Penduduk, pada tanggal 16-5 jad akan menindjau Tg. Barat dan Lontong Agung, setelah mana segera akan diambil langkah2 lebih djauh lagi kearah dimulainja pemindahan orang2 terlantar.

-Seperti diketahui,-

Seperti diketahui, Panitya Pemindahandan Penjebaran Penduduk jang diketuai D.M.Janur, terdiri dari kepala2 Djawatan Urusan Tanah, Transmigrasi, Sosial, Kepolisian, Ketenteraan, wakil2 Djawatan Penempatan Tenaga, gubernur Djawa Barat dan Djawa Tengah, Djawatan Urusan Daerah, Djw.Perindustrian dan Djaksa Tinggi.

Menurut Janur, dalam fase pertama, maka orang2 terlantar jang terlihat setiap hari didjalan2 umum, dipasar2, dikolong2 djembatan dsb - jang djumlahnja ditaksir 50.000 orang, akan dipindahkan terlebih dahulu; untuk keperluan mana akan diminta bantuan polisi dan Djawatan Sosial setempat.

Industri2 ketjil diandjurkan dibuka didaerah2 pinggiran kota.

Oleh D.M. Janur lebih djauh diterangkan, bahwa berhubung dengan maksud membuka Tg Barat dan Lenteng Agung sebagai daerah2 baru2 ini, maka Panitya Pemindahan dan Penjebaran Penduduk mengandjurkan kepada seluruh pengusaha2 dari industri2 ketjil jang penuh-padat didalam kota, agar memindahkan industri2nja itu kedaerah2 pinggiran kota, demikian pula kepada kaum pengusaha jang bermaksud membuka perusahaan2, diandjurkan agar djuga membuka perusahaan2nja didaerah2 tersebut.

Adanja perusahaan2 dan industri2 ketjil didaerah2 pinggiran kota, misalnja di Tg. Barat dan Lenteng Agung, sangat besar artinja bagi pemindahan orang2 terlantar, sebab dengan demikian orang2 terlantar itu dengan sendirinja kelak dapat mentjari nafkahnja menurut kepandaiannja masing2 diperusahaan atau industri2 tersebut. Untuk mempekerdjakan orang2 ini diperusahaan2 atau industri2, pihak Panitya bersedia memberikan bantuannja kepada kaum pengusaha, misalnja mentjarikan diantara mereka orang2 jang biasa bekerdja diperusahaan2, dll.

Selandjutnja panitya telah mengadakan hubungan pula dengan Djawatan Transmigrasi mengenai kemungkinan dipindahkannja orang2 ini keluar Djawa.

Tentang pengembalian orang2 terlantar dari Djakarta kedaerah asalnja masing2, menurut D.M.Janur, hanja akan dilakukan,apabila ada permintaan sendiri dari daerah2 jang bersangkutan, tapi kemungkinan permintaan dari daerah2 jang bersangkutan,sangat tipis sekali, melihat bahwa daerah2 di Djawa Barat dan Djawa Tengah tempat orang2 ini berasal, pada umumnja kini sedang mengalami banjak kesulitan2, bahkan banjak pula orang2 dari daerah2 itu sendiri jang didjadikan sebagai kaum transmigrant keluar Djawa, demikian Janur. (Antara, 13/5-'52).

MEMBANGUN DESA DENGAN DIRIKAN PENGGILINGAN ATJI.

Atas inisiatif wedana Pandeglang dan tjamat Bandjar,dikampung Kadutjau telah didirikan satu penggilingan atji kepunjaan desa jang telah memakan biaja l.k. Rp.10.000.-. Biaja tersebut adalah atas usaha wedana Pandeglang dengan setjara mendapat pindjaman dari Bank Rakjat dengan dipertanggung djawabkan kepada desa. Alat2 mesin didapatnja dari Djawatan Perindustrian Daerah Banten dengan pembajaran berangsur-angsur.

Penggilingan tersebut kini telah selesai dan telah mendapat kundjungan dari wakil Perindustrian Daerah Banten serta Djawatan Penempatan Tenaga dan Sosial. Djawatan2 tersebut merupakan koordinator untuk memeriksa hasil2 jang njata dengan adanja penggilingan atji tersebut.

Keterangan jang didapat dari wedana Pandeglang,menjatakan, bahwa kebun singkong diketjamatan Bandjar baharu ada 40 ha., 13 ha. diantaranja sudah dapat digiling untuk dibikin atji. Untuk selandjutnja agar djangan sampai penggilingan atji itu terhenti, akan diusahakan supaja tiap2 desa menanam singkong.

Untuk mewudjudkan adanja penggilingan atji setjara kekeluargaan, maka akan dikeluarkan andil dan tiap2 andil dibatasi paling besar Rp. 250.-. Andil tersebut didjual kepada pegawai pamongdesa, dan kepada orang2 jang menanam singkong.
(Antara, 13/5-'52).

-N.V. THE PANDEGLANG-

N.V. THE PANDEGLANG RUBBER FACTORY

Pada tanggal. 16/5-'52 akan diresmikan pembukaan perusahaan karet crepe dari N.V. The Pandeglang Rubber Factory. Perusahaan tersebut dipimpin oleh seorang Tionghoa dengan modal permulaan Rp. 200.000.- Untuk memberi kesempatan kepada tiap2 orang jang mempunjai hasrat untuk mempunjai andil, maka telah dikeluarkan pendjualan andil paling rendah Rp. 100.-. Para pegawai dan pedagang dikota Pandeglang telah banjak jang memasukkan andil setjara perseroan. Keterangan jang didapat dari pemimpinnja menjatakan, bahwa jang akan dibeli oleh perusahaan itu ialah karet rakjat dan karet onderneming.(Antara, 13/5-'52).

LARANGAN EXPORT BAHAN MAKANAN.

Menurut keputusan Kepala Kantor Pusat Urusan Export, maka export dari bahan makanan seperti beras dan gabah, beras tepung dan dedek gaplek dan tepung gaplek, tapioka-ampas, katjang tanah, katjang kedele, katjang idjo, dan djagung, untuk sementara waktu tidak diperkenankan.

Export tepung sagu hanja dapat diperkenankan dari daerah2 di Sumatera dan kepulauan Riau. Demikian Kementerian Perekonomian bagian Pewartaan. (Antara, 13/5-'52).

- - - - - -

-PEMANDANGAN.....-

PEMANDANGAN UMUM BABAK PERTAMA

Atas keterangan pemerintah. Dalam pemandangan umum babak pertama jang diadakan dalam sidang pleno parlemen Rebo siang atas keterangan pemerintah tentang program politiknja, mendapat giliran 10 anggauta, tetapi seorang mengundurkan pembitjaraannja pada sidang hari Rebo malam. Djalan pembitjaraan adalah sbb.:

1. Prof. Abidin (ketua fraksi Partai Buruh) berpendapat, bahwa program pemerintah pada umumnja merupakan suara2 progressief, tetapi jang penting menurut pendapatnja ialah tindakan2nja jang njata.

Pembitjara meminta lekasnja terlaksananja otonomi daerah dan kesukaran tehnis mengenai peredaran pegawai2 hendaknja dihubungkan pula dengan usaha penjederhanaan organisasi pemerintahan.

Menurut Abidin penting sekali memperluas pasaran dunia bagi pendjualan hasil2 Indonesia didaerah2 blok Sovjet dengan menanggung segala akibatnja, dan perlu perusahaan2 partikelir, terutama jang nasional, diberi pekerdjaan jang bisa dikerdjakan dan dalam hal ini djangan dipesan barang2 dari luar negeri. Abidin meminta supaja anggaran belandja 1952 lekas diadjukan dan kalau perlu tidak usah diadakan pembitjaraan anggaran belandja 1950-1951 dan minta djuga supaja dibentuk suatu kementerian chusus jang mengurus soal2 Irian Barat.

Prof.Abidin menghendaki supaja sjarat2 perdjandjian MSA diubah, karena djika tidak demikian mustahil bisa dilakukan politik bebas. Menurut pembitjara penerimaan bantuan ekonomi dan tehnik seperti jang termaktub dalam seksi 511b dari MSA sjaratnjapun terlalu berat.

Pembitjara meminta supaja bantuan2 jang diminta dari USA itu sjarat2nja lain, dan dalam hal ini menurut pembitjara belum terlandjur, karena MSA belum mendapat persetudjuan parlemen.

2. Abdulrachman Wangsadikarta (Progressief) dengan tidak menjinggung2 soal program pemerintah memperingatkan, bahwa terlalu seringnja krisis kabinet menimbulkan teka-teki bagi rakjat dan merugikan prestige Presiden jang harus menundjuk formateur dengan menghadapi persoal2an jang meminta supaja ia menggunakan keperibadiannja.

3. Mr.Burhanuddin (tidak berpartai) memperingatkan kepada pemerintah, bahwa sebabnja kesulitan jang terus menerus, ialah karena 3 faktor, jaitu: tidak adanja orang kuat jang berani mengambil keputusan, tidak adanja koordinasi kementerian2 dan tidak adanja disiplin dikalangan pegawai dan minta supaja faktor itu dipetjahkan. Pembitjara selandjutnja meminta supaja dalam pemberian hak otonomi kepada daerah2, diserahkan djuga urusan tjukai dan bea sehingga daerah2 itu tidak perlu selalu meminta2 kepada pusat.

Ia berpendapat, bahwa dalam usaha pemerintah2 j.l. untuk merebut Irian Barat hakekatnja ialah bahwa Irian Barat sudah terlepas dari tangan Indonesia dan menamakan persetudjuan MSA suatu tragedie jang menurut pembitjara adalah suatu kelandjutan dari sifat2 USA-minded dari masjarakat Indonesia.

4. St.Makmur (tidak berpartai) menitik beratkan pada soal pemilihan umum, sebab menurut pembitjara, selama belum diadakan pemilihan umum, belum dapat diletakkan dasar2 jang kokoh jang dapat membikin pemerintahan djadi stabil, dan dengan begitu Indonesia akan tetap lemah kedalam dan keluar.

Berhubung dengan belum berlakunja undang2 pemilihan no. 27/1948 buat seluruh Indonesia, sehingga belum dapat dilakukan persiapan2 administratif untuk pemilihan, misalnja kantor2 pemilihan daerah buat seluruh daerah2 di Indonesia, maka pembitjara meminta kepada pemerintah supaja mengadakan undang2 darurat untuk membikin berlakunja undang2 no. 27 tersebut untuk seluruh Indonesia, sementara menunggu selesainja undang2 pemilihan baru, perlunja supaja persiapan2 administratif itu dapat dilaksanakan terus.

-Achirnja.....-

Achirnja St.Makmur meminta keterangan tentang tidak berhasilnja perundingan pembelian beras Siam seharga 90.000 pond sterling jang telah dilakukan diwaktu kabinet Sukiman-Suwirjo.

5. Mr.Burhanuddin Harahap (ketua fraksi Masjumi) didalam pidatonja menjatakan, bahwa tepat sekali pemerintah sekarang ini menjantumkan sebagai pasal 1 dalam programnja maksud mengadakan pemilihan umum untuk Konstituante dan dewan2 perwakilan daerah2.

Dinjatakan pula, supaja pemerintah bersama-sama dengan mengadjukan rentjana undang2 tentang pendaftaran pemilih itu mengadjukan pula rentjana undang2 tentang pemilihannja sendiri.

Dalam menindjau soal otonomi didaerah2 dikemukakan oleh Mr. Burhanuddin Harahap, bahwa kalau tidak diselesaikan soal penjusunan otonomi didaerah2 itu, maka ini dapat memperkuat rasa masa bodoh dan rasa djengkel terhadap pusat sebagai jang terdapat tanda2nja diberbagai daerah, misalnja di Kalimantan dan Sumatera. Dalam soal ini pihak pemerintah pusat terutama harus mengambil sikap jang sangat bidjaksana.

Dalam keterangan pemerintah terutama dikemukakan tentang memperkuat perekonomian rakjat antara lain dengan memperbaiki keadaan bahan makanan (soal beras). Usaha perbaikan dalam lapang ini menurut pembitjara sering2 terhambat dengan masih meradjalelanja sisteem idjon jang hingga kini karena berbagai sebab masih banjak mengalami kesukaran usaha pemberantasannja. Mengenai djatuhnja kabinet Sukiman dinjatakan, bahwa kabinet tersebut djatuh karena beleid luar negeri jang bersangkutan dengan apa jang biasa disebut oleh umum "politik bebas". Dinjatakan, bahwa baik pihak pemerintah Sukiman maupun pihak opposisi, pada waktu itu menggunakan kata2 "politik bebas".

Ia minta supaja DPR dibubarkan pada waktu jang tertentu dan pada waktu itu pemilihan diselesaikan, sebab kalau tidak diberi batas waktu, pemilihan umum akan selalu tertunda. Selandjutnja pembitjara meminta supaja soal2 desa lebih diperhatikan, sebab pembangunan desa hanja dapat dilakukan djika desa2 itu sudah diberi hak otonom.

Pembitjara tidak menjetudjui pendapat Menteri Pertanian, bahwa pertanian tidak membutuhkan mekanisasi. Dalam hal ini Rasuna menundjukkan keadaan2 di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan daerah2 seberang lainnja, jang sangat membutuhkan mekanisasi dalam pertanian, dan menurut pembitjara, lebih baik mendatangkan mesin2 pertanian dari pada mendatangkan mobil2 luxe. Ia meminta perhatian pemerintah kepada tenaga2 jang dikirim BRN kedaerah2 transmigrasi dan kepada lk. 6000 bekas pedjuang di Sumatera Selatan.

Achirnja ia terangkan, bahwa embargo USA telah memukul perekonomian Indonesia dan dalam hubungan ini ia sebutkan, bahwa djumlah petani karet Indonesia ada 790.000 orang jang mempunjai 582 djuta pohon karet. Rasuna menanjakan, apakah alasannja, bahwa kerugian jang diderita USA karena tertutupnja pintu RRT lalu harus dipikulkan kepada Indonesia dan bagaimana nanti Indonesia harus menghadapi Djepang dan Australia kalau Indonesia memisahkan diri dari RRT dan India?

7. Mr.Djody (ketua fraksi PRN) meminta supaja pemerintah menentukan pendirian tegas tentang agreement antara Subardjo dan Cochran dan untuk menentukan sikap fraksinja, maka ia minta supaja:
1.disampaikan tekst agreement tersebut kepada parlemen, 2.minta exchange of letters antara Subardjo dan Cochran mengenai agreement tersebut, 3. bagaimana konsepsi pemerintah sebagai pengganti agreement itu dan 4. faktor2 apa jang dapat mejakinkan pemerintah sehingga optimistis mengenai konsepsinja itu.

Mengenai perekonomian menurut Djody program pemerintah kurang djelas, pembitjara menundjuk pokok2 soal, jaitu padatnja penduduk di Djawa jang dapat diatasi dengan: 1.transmigrasi, industrialisasi, intensivering pertanian di Djawa, extensivering

-pertanian diluar Djawa-

/ 6. Rasuna Said (tidak berpartai).

pertanian diluar Djawa dan perdagangan luar negeri.

8. Ir.Sakirman (ketua fraksi PKI) berpendapat,bahwa pemerintah ragu2 dalam dan luar negeri, ada bagian2 jang kuat dalam program pemerintah, tetapipun ada jang lemah, demikian pembitjara.

Mengenai program, Sakirman kurang puas meskipun ada beberapa hal jang tegas, misalnja selekas mungkin mengadakan pemilihan umum, pembentukan otonomi daerah, penjederhanaan organisasi pemerintah, dan terutama pula karena perekonomian dan keamanan mendapat pula perhatian dan tidak terputar dalam alam pikiran jang vicieus. Pembitjara menjajangkan, bahwa program ekonomi djangka pandjang itu tidak diterangkan setjara konkrit, dan selama tidak dilakukan nasionalisasi perusahaan2 vital, pembitjara berpendapat, bahwa kehidupan rakjat tidak akan mendapat perbaikan.

Pembitjara selandjutnja menundjukkan keragu2an pemerintah terhadap mengambil sikap terhadap "imperialis USA". Pembitjara mengandjurkan, bahwa pemerintah seharusnja berusaha mentjari djalan keluar dalam politik luar negeri jang telah disesatkan Subardjo.

Achirnja ia minta supaja Indonesia mengadakan perdjandjian2 dengan negeri2 lain, diantaranja Sovjet Rusia, dan minta supaja perdjandjian2 KMB, Frisco, perdamaian Djepang dan MSA dibatalkan.

9. Moh.Sjafei (tidak berpartai) sebagai pembitjara terachir dari sidang pertama terutama meminta perhatian pemerintah terhadap keadaan daerah diluar Djawa dan minta supaja sistim pendidikan diubah.

Sesudah menerangkan tentang pendiritaan2 jang dialami rakjat didaerah seberang, chususnja Sumatera, pembitjara meminta supaja hasil2 usaha pemerintah pusat djanganlah hanja diberikan untuk Djawa atau Djakarta sadja, tetapi djuga dibagikan kepada daerah2 lain, terutama jang banjak sumbangannja kepada pusat. Penempatan2 pegawai penting supaja djangan mengenai orang2 dari Djawa sadja, demikian pembitjara jang bertanjakan pula mengapa dari anggauta2 kabinet sekarang hanja satu orang sadja jang berasal dari Sumatera.

Selandjutnja ia minta supaja sistim pendidikan diubah, dinasionaliseer dan sifat passiefnja didjadikan sifat aktif supaja dapat djuga menanamkan aktivitet dalam djiwa anak2 kita. Menurut pembitjara, sesuatu bangsa jang djiwanja passief tentu akan di "makan" oleh bangsa jang aktif. Dalam hubungan ini maka disamping militaire weerbaarheid, maka Indonesia pun memerlukan geestelyke weerbaarheid jang menurut pembitjara hanja dapat ditjapai dengan sistim pendidikan jang aktif pula.

Pembitjara mengusulkan, hendaknja "pendjadjahan kapital asing" terhadap hidup perekonomian dibatasi sadja di Djawa, sedang usaha2 perkembangan ekonomi didaerah2 didasarkan pada ekonomi nasional.

Mengenai soal penurunan harga beras, ia andjurkan supaja disertai djuga penurunan harga bahan2 keperluan hidup lainnja,perlunja supaja djangan merupakan tindasan bagi rakjat petani.

10. Sundjoto (Ketua fraksi Parindra) menjokong program Pemerintah dan memberikan arti pada memadjukan tingkatan penghidupan rakjat adalah memadjukan tingkatan penghidupan tani.

Ia menutup pidatonja dengan andjuran supaja gerakan koperasi dipergiat mengenai segala lapang produksi, tetapi terlebih dulu baik mengenai koperasi2 kredit. Untuk ini perlu disediakan modal uang jang tjukup dan iapun minta supaja soal2 koperasi didjadikan mata peladjaran pada sekolah2 dan djuga meminta kredit jang tjukup bagi pembikinan perumahan rakjat jang sehat.

11. K.H.SIRADJUDDIN ABAS (Perti) mengeritik pembentuk kabinet karena tidak mengadakan hearing dengan semua partai dan berpendapat, bahwa susunan kabinet provincialistis, hanja ada seorang menteri dari Sumatera. Dan berdasar atas pendapat,bahwa program Pemerintah sekarang tidak berbeda dengan program kabinet Sukiman-Suwirjo, pembitjara bertanja apakah Pemerintah sungguh2 akan bekerdja untuk kepentingan rakjat, sebab kabinet jang dulu

-toch sudah gagal-

toch sudah gagal dalam usaha itu, misalnja dalam usahanja membrantas korupsi, birokrasi, mempertinggi mutu achlak alat2 sipil dan militer dan mempertinggi nilai perikemanusiaan masjarakat. Iapun meminta supaja djandji jang ada dalam program itu ditentukan batas waktunja, dan bertanja apakah sebabnja rentjana undang2 pemilihan Konstituante tidak akan diadjukan bersama2 dengan rentjana undang2 pentjatatan pemilih.

12. S.HADIKUSUMO (PNI) terutama berbitjara tentang usaha keamanan dan berpendapat, bahwa dapat diharapkan kabinet Wilopo mempunjai keberanian untuk mendjalankan programnja.

13. Bebasa Daeng Lalo (PRN) pun memusatkan pembitjaraannja pada soal2 keamanan, dan mula2 minta supaja SOB segera ditjabut. Ia minta supaja kabinet Wilopo menindjau kembali tindakan2 pemerintah Sukiman mengenai ex-CTN di Sulawesi Selatan dan setjara bidjaksana menjelesaikannja setjara integraal dan dalam hubungan ini pembitjara minta dibentuk lagi suatu panitya negara jang mendapat kekuasaan penuh untuk mengadakan perhubungan dengan pihak ex-CTN. Selain itu pembitjara meminta pemerintah menindjau kembali beleid personalia diseluruh kementerian2 dan minta antjer2 waktu tentang pembentukan otonomi didaerah2 luar Djawa.

14. Andi Gappa (Masjumi) menganggap pintjang pemberian faciliteit2 keuangan kepada pegawai2 jang dipindahkan dari Djawa kedaerah2 seberang, karena menimbulkan perasaan tidak adil dikalangan pegawai2 didaerah2 tersebut. Iapun mengandjurkan supaja kabupaten2 di Sulawesi segera diresmikan otonominja, supajadapat segera dibentuk DPR2nja jang menurut pembitjara penting sekali untuk menjalurkan energie2 jang ada dalam masjarakat setjara demokratis.

15. Siau2 Giok Tjhian (Progressief) memusatkan pidatonja pada soal2 kewarganegaraan dan minoritet. Ia memperingatkan pemerintah, bahwa sebelum ada undang2 kewarga-negaraan, tidak bisa pemerintah membikin rentjana undang2 tentang pentjatatan pemilih, sebab pemilih adalah warga-negara.

Oleh karena itu menurut pembitjara perlu segera disusun undang2 kewarga-negaraan itu jang harus berisi pula dengan djaminan2 jang sesuai dengan ketentuan2 didalam League of Nation.

Selandjutnja pembitjara meminta ditindjau kembali undang2 darurat no. 1/1952 jang mengatur djual-belu hak eigendom, karena menurut pembitjara akibatnja menghalang pembangunan dan mempengaruhi setjara buruk terhadap peredaran uang karena orang ragu2 menerima rumah sebagai tanggungan hutang.

Pada achirnja pembitjara meminta perhatian pemerintah tentang peraturan pemberian devisen bagi peladjara2 keluar negeri jang menurut pembitjara memberatkan.

16. Moh.Nuh (PIR) sebagai pembitjara terachir malam itu terutama berbitjara tentang corps pegawai. Menurut pendapatnja, banjak terdjadinja korupsi dan kurang adanja disiplin para pegawai, ialah karena kurangnja kontrole. Pun seperti Andi Gappa ia berpendapat, bahwa toelage uang untuk pegawai dari Djawa jang suka pindah kedaerah seberang itu tidak adil dan menimbulkan kurang kesenangan bekerdja pada pegawai2 didaerah.

Selandjutnja pembitjara meminta supaja dilakukan rasionalisasi. Pada pokoknja pembitjara menjetudjui djumlah pegawai sedikit, tetapi mutunja jang baik dan gadjinja jang tjukup. Ia terangkan, bahwa djumlah uang jang didapat negara dari padjak langsung ataupun tidak langsung, 70% dipakai untuk gadji pegawai, dan kalau gadji itu dinaikkan 20%, berartilah itu 85% dari penerimaan padjak. Pembitjara mempertahankan pembagian beras kepada pegawai. (Antara, 15/5-'52).

-PENGARUH.....-

PENGARUH DIBUKANJA HUBUNGAN DAGANG DJEPANG-R.R.T.

Kalangan importir dikota Makasar menduga, bahwa dibukanja hubungan dagang antara Djepang dan R.R.T. akan sangat mempengaruhi pasar barang2 keluaran Djepang seperti kain kasar seperti blatju, keper dan sebagainja. Tanda2 kenaikan barang2 ini sudah mulai terasa. Harga blatju dalam satu minggu telah meningkat hingga 20% keatas.

Harga pada minggu lalu 105 rupiah, sekarang 130 rupiah. (Antara 14/5).

MENTERI DALAM NEGERI DENGAN WARTAWAN

Tanggal 14/5 di Semarang diadakan konperensi antara pihak Pemerintah sipil dan militer di Djawa Tengah jang dihadiri antara lain oleh Menteri Pertahanan Hamengkubuwono dan Menteri Dalam Negeri Moh.Rum.

Konperensi itu kabarnja, chusus membitjarakan masalah tahanan SOB dan keamanan daerah pada dewasa ini.

Menurut Menteri usaha2 mengembalikan para tawanan SOB itu adalah sebagai tindakan pertama untuk menudju ke penghapusan SOB guna diganti dengan Undang2 Nasional dan ini tidak lama lagi akan dimulai didaerah Sumatera Selatan, kemudian daerah Sumatera Utara dan Tengah dan mungkin Kalimantan. Untuk Djawa Tengah djuga akan segera terdjadi disesuaikan dengan perkembangan keadaan dihari2 selandjutnja.

Mengenai soal dana milik Mangkunegaran dikatakan, bahwa kini masih ada perselisihan tafsiran jang diambil dari Undang2 jang ada, dimana satu pihak menjatakan masih tetap statusnja dan dilain pihak menganggap telah hapus. Kini soalnja telah diserahkan kepada Hakim jang akan memutuskan status dan dana milik itu, demikian Menteri. (Antara 14/5).

47 TON BERAS UNTUK PENDERITA KELAPARAN

Didaerah Tegal. Dari Tegal diwartakan, bahwa oleh Pemerintah Kabupaten disana akan segera dibagikan 47 ton beras kepada penderita kelaparan dengan tjara sebagian didjual lebih rendah dari harga pasar, jaitu Rp 1,50 sekilo dan sebagian tjuma2 untuk tiap djiwa sebanjak 5 Kg.

Dikabarkan, djumlah penderita kelaparan didaerah tersebut sebelum panen tertjatat 32.000 orang dan untuk keperluan ini, seperti djuga daerah kabupaten jang lain di Djawa Tengah, Tegal mendapat bantuan dari Pemerintah sebanjak Rp. 50.000.- (Antara 14/5).

PABERIK IKAN DALAM KALENG

Didirikan di Sulawesi dan Djawa Timur. Dalam tahun ini djuga oleh pihak jang berwadjib akan dirikan paberik ikan laut dalam kaleng di Air Tembaga daerah Sulawesi dengan biaja lebih kurang Rp.2000.000.-

Selesainja disana akan menjusul di Muntjar daerah Banjuwangi dimana sekarang ini oleh pengusaha lain telah ada paberik minjak ikan (levertraan).

Menurut kabar jang diperoleh "Antara" Semarang pendirian paberik2 tersebut ialah berhubung dengan banjaknja hasil ikan laut disitu jang tidak seimbang dengan pemakaiannja, sehingga menimbulkan "overproduksi" suatu hal jang berlainan dengan di Djawa Tengah dan Barat dimana hasil ikan jang didapat masih kurang untuk mentjukupi kebutuhan.

Menurut tjatatan jang ada selama tahun 1951 pantai Djawa Tengah barat dan timur. rata2 setiap bulannja menghasilkan masing2 1.000.000, 700.000 dan 100.000 Kg ikan basah. (Antara 14/5).

-GUBERNUR.....-

GUBERNUR ISA "MENJEMBUR" PEGAWAI USIS

Karena tidak sopan. Kemarin, Gubernur Propinsi Sumatera Selatan, Isa, telah mengusir dari kantornja 2 orang tamu, ialah Sabarudin, pegawai Usis di Djakarta, dan kawannja, wakil Indonesian Film Corporation (IFC) di Palembang, karena Gubernur tidak suka lebih lama melajani tamu2 jang bersikap tidak pantas dan sombong.

Sebelum dua orang tersebut menemui Gubernur, mereka lebih dulu mengundjungi Djawatan Penerangan Propinsi, untuk meminta bantuan didalam pekerdjaannja antara lain sehelai surat keterangan. Permintaan ini ditolak oleh djawatan tersebut.

Mereka kemudian pergi menghadap Gubernur, dan diterima dengan baik. Kepada mereka Gubernur menerangkan, bahwa segala sesuatu tindakan didalam lingkungan daerah kekuasaannja haruslah berlaku menurut peraturan2 jang sudah ada. Pertundjukkan film jang bertendens politik, jang datang dari luar, dibolehkan, tetapi hendaklah didalam sebuah gedung, dan hanja untuk para undangan, seperti jang telah dilakukan oleh masjarakat Tionghoa dengan film "Tanah Air Jang Indah" beberapa waktu jang lalu.

Dua orang film tadi mengatakan kepada Gubernur, bahwa mereka akan mempertundjukkan filmnja disatu daerah perburuhan, (jang dianggap sedang hangat keadaannja oleh Gubernur) dan Gubernur menasihatinja supaja djangan dilangsungkan. Mereka membantah, dan menjatakan, bahwa kedatangan mereka di Sumatera Selatan adalah atas sesuatu undangan. Keterangan ini tidak dapat dibenarkan oleh Gubernur, karena Pemerintah Daerah maupun Djawatan Penerangan Propinsi, tidak pernah mengirimkan surat undangan kepada mereka. Djadi mereka tidak perlu mengadakan pertundjukan di Sumatera Selatan.

Karena mereka terus berkeras dengan sikap tidak pantas dan sombong, Gubernur Isa lalu "menjemburnja", dan mengusir mereka dari kantornja. Demikian menurut keterangan pihak jang mengetahui.

Menurut kalangan resmi, Sabarudin dan kawannja mengadu kepada Kepolisian Sumatera Selatan, dan dalam pengaduannja itu diantaranja ada dikatakan, bahwa salah seorangnja adalah bekas anggota CTN, dan berniat mempertundjukkan film untuk CTN. Kalangan kepolisian beranggapan, bahwa mereka boleh menjelesaikan soal ini dengan pihak CTN jang ada dikota Palembang.

Kalangan resmi menjatakan adanja ketjurigaan terhadap tindakan kedua orang tersebut, apa maksudnja jang sebenarnja.

Bagaimana perkara ini selandjutnja belum diketahui, pihak Djawatan Penerangan Propinsi sendiri belum dapat memberikan keterangan. Jang terang, selain membawa film IFC dan Gelora Indonesia, mereka djuga membawa film2 Usis. Djawatan Penerangan berpendirian, bahwa untuk memberi penerangan kepada rakjat Indonesia, Pemerintah mempunjai djawatan penerangannja sendiri. (Antara 14/5).

PEMBUKAAN KONGRES PARTAI BURUH

Pidato2 Prof. Abidin, PM Wilopo, Menteri Tedjasukmana dan Arudji Kartawinata. Semalam dengan bertempat di Balai Pertemuan Djakarta telah dilangsungkan pembukaan kongres kedua dari Partai Buruh jang dikundjungi pula oleh PM Wilopo, Menteri Perburuhan Tedjasukmana, wakil ketua parlemen Arudji Kartawinata dan pemimpin2 lainnja.

Dalam pidato pembukaan Prof.Abidin sebagai ketua umum Partai Buruh menjatakan, bahwa pada waktu ini tampak adanja kegelisahan dikalangan buruh, jang disebabkan karena semakin hari semakin naiknja harga2 keperluan hidup sehari2. Untuk memperbaiki keadaan hidupnja buruh telah mengadakan pemogokan2, tapi hasil kenaikan upah jang didapat dari pemogokan itu tidak seimbang dengan meningkatnja harga2 barang keperluan sehari2 itu. Kegelisahan itu tampak pula ada pada adanja perpetjahan dikalangan buruh.

Dikemukakan ....

Dikemukakan seterusnja, bahwa pergerakan kaum buruh seharusnja: primair adalah gerakan nasional dan secundair: gerakan internasional. Dalam pada itu gerakan buruh sebagai jang didjalankan oleh Sobsi adalah: primair gerakan internasional dan secundair: gerakan nasional. Oleh Prof. Abidin diandjurkan, supaja untuk kepentingan buruh dikurangi pendewaan jang biasa dilakukan hingga sekarang terhadap pemimpin2 negara asing. Disajangkan olehnja, bahwa kini banjak pemimpin2 buruh jang bertindak memusuhi gerakan buruh lainnja. Partai Buruh bukanlah serikat buruh, tapi sifat perdjuangan djauh lebih luas, karena sifatnja sebagai partai itu. Partai Buruh adalah non-komunis, tapi dalam pada itu tidak anti-komunis dan partai tersebut tidak akan bertentangan dengan serikat buruh manapun djuga, jang mendasarkan perdjuangannja atas dasar2 legaal dan sehat. Kepada Pemerintah diandjurkan supaja undang2 jang mengatur segala seluk-beluk jang bersangkutan dengan pekerdja diperbanjak.

Menteri Perburuhan Tedjasukmana dalam kedudukannja sebagai ketua Dewan Politik Partai Buruh dalam pidato sambutannja menjatakan, bahwa perdjuangan kaum buruh tidaklah merupakan kepentingan kelas buruh sadja, tapi kepentingan tiap kelas. Dinjatakan, bahwa

. . . . . sebagai hasil penjelidikan setjara ilmu pengetahuan, maka diketahui bahwa sebab2 dari kepintjangan dalam lapangan produksi dan kepintjangan2 dalam soal pembagiannja, adalah sama diseluruh dunia. Diandjurkan, supaja perdjuangan buruh di Indonesia mengingat hasil2 perdjuangan buruh dinegeri2 lain, karena perdjuangan buruh di Indonesia adalah djuga merupakan sebagian dari gerakan buruh seluruh dunia. Kata Menteri Tedjasukmana, perdjuangan buruh Indonesia tidak usah mengalami kegagalan sebagai jang dialami oleh perdjuangan buruh dilain negeri. Diingatkan olehnja kepada hasil2 pekerdjaan jang ditjapai oleh Karl Marx, Engels, Lenin jang gambarnja tertjantum dipanggung dibelakang medja pemimpin pertemuan resepsi malam itu dan tergantung dibawah gambar Presiden Sukarno. Hasil2 dari pemimpin2 perdjuangan buruh itu bukanlah merupakan dogma dan diandjurkan oleh Menteri Tedjasukmana supaja perdjuangan buruh dilakukan setjara praktis dengan djalan memperkaja diri sendiri dengan pengetahuan dan pengalaman dinegeri sendiri. Si buruh harus dibebaskan dari tipuan2 kerochanian apapun djuga dan diberi kekuatan untuk berpikir setjara bebas. Dikemukakan pentingnja pemimpin2 buruh betul2 mempeladjari perhubungan dan perimbangan kekuatan jang chusus dinegeri sendiri. Dalam soal ini dinjatakan, bahwa sedjarah timbulnja sistim kapitalisme di Indonesia lain dari sedjarah timbulnja sistim tersebut dinegeri2 di Eropa, maka dari itu paham perdjuangan kelas disinipun harus ditindjau lebih dalam. Semua kelas2 dalam masjarakat Indonesia adalah mendjadi korban dari kelas internasional. Kalau Partai Buruh dalam azas perdjuangannja dikatakan berdasarkan atas kelas perdjuangan buruh, maka ini berarti perdjuangan tersebut dilakukan terhadap kapitalisme internasional.

Andjuran PM Wilopo.

Menurut PM Wilopo, diwaktu achir2 ini dalam segala soal, sering Pemerintah didjadikan pusat perhatian, sehinggan kalau ada suatu kegagalan, maka Pemerintahlah jang disalahkan. Kata PM Wilopo, kenjataanja ialah, bahwa pekerdjaan Pemerintah sebetulnja bersifat mendorong. Diwaktu belakangan ini memang Pemerintah tjampur-tangan dalam banjak hal, tapi sifatnja tetap merupakan dorongan. Perkembangan didalam masjarakat tergantung dari kekuatan2 jang ada didalam masjarakat itu sendiri. Diatas ini adalah terutama jang bersangkutan dengan lapangan ekonomi. Tentang usaha stabilisasi politik dinjatakan, bahwa dibeberapa daerah soal2 jang mengganggu keamanan tidak tjukup diatasi oleh alat2 pemerintahan sendiri jang ada.

-Diandjurkan.....-

Diandjurkan oleh PM Wilopo, supaja lekas diadakan pemberhentian dalam pertentangan2 dilapangan politik dan ditangguhkannja sampai pemilihan umum jang akan datang. Dalam kongres Partai Buruh itu diandjurkan supaja dapat diketemukan usaha2 penjelesaian jang tepat mengenai dua hal diatas itu. Demikian PM Wilopo.

Dalam kata sambutannja wakil ketua parlemen Arudji Kartawinata mengemukakan, supaja partai Buruh tetap bersikap kritis terhadap diri sendiri dan berusaha keras untuk mengatasi kekurangan2 jang ada pada diri sendiri. (Antara, 15/5-'52).

A.S. MENURUNKAN HARGA KARET ASELI UNTUK INDUSTRI

Djawatan Urusan Umum, General Service Administration (GSA) semendjak kemarin menurunkan harga karet aseli untuk industri Amerika Serikat dari 48.5 mendjadi 38 sen setiap pond. Demikian berita dari Washington jang disiarkan USIS disini.

Sebelum itu, pada tanggal 1 April 1952, GSA, ialah satu2-nja badan pemerintah jang dikuasakan untuk mengimport karet aseli ke Amerika Serikat, telah menurunkan harga karet dari 50.5 mendjadi 48.5 sen. Seorang djurubitjara GSA menerangkan, bahwa penurunan harga ini sedjalan dengan haluan turun dalam harga karet aseli dipasar dunia. Selandjutnja dinjatakan, bahwa djumlah karet jang mungkin diimport dalam tahun ini, akan sama sekali tergantung pada permintaan akan karet aseli oleh industri dan perdagangan di Amerika Serikat, dan tidak akan dipengaruhi oleh turunnja harga sekarang ini.

Dalam tahun 1951 GSA mengimport karet aseli sebanjak kira2 735.000 ton besar. Malaya, Indonesia dan Thai adalah negeri2 jang terutama menjediakan karet aseli itu. Djurubitjara GSA tsb. pun djuga menerangkan, bahwa dalam bulan2 jang belakangan ini banjak pembeli2 partikelir telah membeli karet aseli di Timur Djauh untuk dikirimkan sesudah tanggal 30 Djuni 1952, jaitu djika GSA tidak lagi menguasai pendjualan karet aseli Amerika Serikat.

Industri ban karet di Amerika Serikat adalah pemakai jang penting dari karet aseli. Industri ini pun djuga menggunakan sedjumlah besar karet sintetis jang sekarang dijual dengan harga 33 sen setiap pond.
(Antara, 15/5-'52).

SUDAH LEBIH DUA MINGGU EKSPOR KARET DARI DJAMBI TERHENTI

Perusahaan karet banjak jang likwidasi.

Sudah lebih 15 hari ekspor karet dari daerah Djambi terhenti; tenaga perdagangan karet lumpuh, karena kerugian2 jang besar jang diderita oleh perusahaan karet didalam tahun ini.

Persediaan smoked sheets, unsmoked sheets, blakets "D" dan flat bark crepe di Djambi sekarang ada l.k. 10.000 ton dan para eksportur menunggu kenegara mana stock ini harus dikirimkan untuk mendapat harga bagus. Andai kata lowongan perdagangan dengan Russia memang terbuka, perusahaan karet di Djambi menjanggupi levering 10.000 ton dalam tempoh 3 bulan, kalau harganja sesuai, lebih dari harga pembelian Amerika Serikat, demikian Perusahaan Karet di Djambi pada "Antara".

-TINDAKAN.....-

TINDAKAN POSITIF PERLU DILAKUKAN UNTUK PETJAHKAN SOAL KARET.

"Pada saat Konperensi Ekonomi Moskow dimulai, kita merasa sedikit lega melihat tindakan Amerika dalam politik karetnja, tetapi ternjata, taksiran jang tadinja akan baik, sekarang lain sekali kedjadiannja", demikian Pimpinan Persatuan Pengusaha Penggilingan Para Palembang (P5), Mr.Lim Tjong Hian dalam suatu interpiu kepada Antara.

Ketika itu oleh P5 diandjurkan semua Remilling bekerdja, sehingga mentjapai sekurang2nja lisensi-kapasitet jaitu kira 5000 ton sebulan.

Selandjutnja Lim menjatakan, tadinja P5 mengira pertemuan rubber studie-groep di Ottawa baru ini djuga akan menghasilkan suasana baik. Ternjata sekarang, menurut jang diberitakan oleh Sadjarwo, konperensi tersebut tidak menghasilkan apa2. Harga karet makin merosot, malahan sekarang tidak ada tawaran sama sekali dari Amerika. Keadaan ini sangat memusingkan kepala para pengusaha, jang tadinja sudah "opstapelen" slabs dengan harga tinggi (Rp. 160,00 sampai Rp.170,00 buat 100 kg). Blankets jang dikerdjakan dari harga slabs diatas, dengan sendirinja sekarang akan menghadapi harga rendah. Sekarang harga slabs sampai Rp. 100.00 buat 100 kg.nja dan masih banjak orang belum berani beli. Djadi meskipun petani2 milir ke Palembang membawa hasil buminja untuk didjual dengan harga rendah, tidak akan laku.

Desak pemerintah adakan tindakan konkrit.

Lepas dari soal politik, Mr.Lim berpendirian, bahwa untuk kepentingan karet, bilamana USA tidak mau beli dan tekan harga, maka sudah selajaknja pemerintah tjari pasaran baru. Tidak perduli siapa dan dimana dia asal mereka mau membeli dan menguntungkan.

"Kita tidak dapat dengan lagi keterangan jang hanja sampai pada batas rantjangan sadja, kita harapkan tindakan konkrit dari pemerintah", demikian Mr.Lim Tjong Hian seterusnja.

"Terus terang saja belum buru2 gembira dengan adanja kesediaan Rusia beli karet dari Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Mr.Kosasih baru2 ini, tetapi sudah selajaknja pemerintah mulai bertindak setjara resmi. Djelaskan dan adakanlah kontak untuk mendapat keterangan konkrit, sampai kemana kesediaan Rusia itu dapat diladeni. Djangan tetapi dengan keadaan tidak resmi sebagai sekarang ini. Kita harapkan pemerintah akan perkuatkan usul Mr.Kosasih, supaja satu delegasi dagang Indonesia jang resmi perlu dikirimkan ke Rusia untuk mengadakan persetudjuan dagang jang tertentu dengan negeri itu.

Seterusnja ia menerangkan, bahwa mulai minggu achir ini produksi dari 8 Remilling di Sumatera Selatan sudah turun kembali, sampai antara 3000-4000 ton dalam sebulan. Untuk perbandingan dapat ditjatat, sebelum peraturan penghapusan D.C. dikeluarkan, produksinja ada 6500 sebulan, dan pada saat jang akan datang, karena installasi dari beberapa Remilling sudah ditambah dapat meningkat sampai 9500 ton blankets sebulan.

Bulan Mei export kosong.

Selandjutnja menurut tjatatan Mr.Lim ½ bulan Mei ini, hampir tidak ada kontrak baru jang ditutup oleh pihak pengusaha Remilling dengan pedagang2 USA.
Diduganja mulai bulan Djuni export akan sangat kurang sekali, dan Djuli dapat dikatakan tidak ada, kalau keadaan pasar tidak berobah.

Dalam pada itu pihak Kantor Urusan Export Kota Palembang menerangkan, bahwa ½ bulan Mei ini export bahan2 mentah dari pelabuhan Palembang sepi sekali. Export slabs pangkal bulan Mei sampai sekarang ini tidak ada. Sedang blankets, walaupun ada pula diexport ke USA, tetapi dalam djumlah jang tidak berarti. Sheets kosong sama sekali.

-Tjatatan.....-

Tjatatan kegiatan export dalam bulan April dikatakan adalah separoh (50%)dari kegiatan dalam Maret 1952.

Sementara itu export kopi Robusta ke Singapura, sudah ada dilakukan oleh beberapa pedagang. (Antara, 14/5-'52).

DEWAN PARTAI PNI MENJETUDJUI TINDAKAN MUKARTO MENGENAI M.S.A.

Djuga mengenai pembukaan kedutaan Indonesia di Moskow, kata Sidik Djojosukarto.

Ketua umum Partai Nasional Indonesia Sidik Djojosukarto menerangkan kepada Koresponden "Pemandangan" bahwa Dewan Pimpinan Partai telah memutuskan dapat menjetudjui perdjandjian MSA atas dasar 511b, jang isinja djauh berbeda dengan 511a seperti jang telah ditandatangani oleh bekas Menteri Luar Negeri Subardjo dan Duta Besar Amerika Serikat di Djakarta, Cochran.

Menurut Sidik perdjandjian MSA atas dasar 511b, sama sekali tidak ada mengandung clausule2 mengenai kemiliteran, dan terutama merupakan bantuan2 tehnik dan ekonomi.

Dalam hubungan ini Sidik djuga menjatakan bahwa tindakan2 Menteri Luar Negeri Mukarto mengenai MSA selama ini telah mendapat persetudjuan dari Partai, demikian djuga mengenai pembukaan Kedutaan Indonesia di Moskow PNI dapat menjetudjui.

PRN akan minta pendjelasan.

Sementara itu ketua Partai Rakjat Nasional Mr.Djody Gondokusumo dalam keterangannja kepada Koresponden "Pemandangan" menjatakan, bahwa untuk memberikan sokongan kepada Kabinet, PRN akan menanjakan kepada Menteri Luar Negeri tentang teks selengkapnja dari perdjandjian MSA jang pernah ditandatangani oleh Subardjo-Cochran, tukar-menukar surat jang telah dilakukan antara bekas Menteri Luar Negeri Subardjo dan Duta Besar Amerika Serikat di Djakarta M.Cochran, serta konsepsi jang telah direntjanakan oleh Menteri Luar Negeri Mukarto mengenai penerimaan MSA atas dasar 511b.

Atas pertanjaan apakah PRN dapat menjetudjui perdjandjian MSA atas dasar 511b, Mr. Djody Gondokusumo tidak hendak memberikan keterangan, hanja menjatakan kalau pendjelasan atas pertanjaan seperti tersebut diatas telah diterima, dan sudah dipeladjari maka kemudian baru dapat menentukan sikapnja. (Pemandangan 14/5).

PEMBEBASAN TAWANAN S.O.B. DILUAR TANGGUNG-DJAWAB DJAKSA AGUNG

Tapi diselenggarakan oleh suatu panitia atas andjuran Menteri Dalam Negeri dan Sub-panitia ditiap daerah.

A.Mutalib Moro djurubitjara Djaksa Agung dalam keterangannja kepada Koresponden "Pemandangan" menjatakan, bahwa mengenai pembebasan tawanan SOB adalah diluar tanggung djawab Djaksa Agung, tetapi diselenggarakan oleh suatu panitya atas andjuran Menteri Dalam Negeri dalam panitua mana ikut duduk wakil dari Djaksa Agung.

Menurut Mutalib Moro didaerah akan diadakan sub panitya jang diusahakan oleh Menteri Dalam Negeri se ndiri, dengan mengadakan rapat2 di Bandung, Semarang, Surabaja dsb., dengan mengadjak semua golongan jang berkepentingan dan jang dapat membantu melaksanakan pembebasan tawanan SOB itu.

Diluar tanggung djawab Djaksa Agung.

Sebelum ini Kedjaksaan Agung, demikian Mutalib Moro lebih landjut, djuga Djaksa Agung sebagai Djaksa Tentara Agung, tidak bertanggung djawab atas pelaksanaan SOB jang semata-mata berada ditangan kekuasaan militer.

Menerangkan tentang pembebasan tawanan SOB Mutalib Moro menambahkan, bahwa untuk mempertjepat pelaksanaan itu kini telah dibentuk panitya kerdja agar pekerdjaan itu dapat berdjalan lantjar, jang anggauta 2nja terdiri dari para Residen, Bupati2, Walikota, Ketua DPRD Kota dan Kabupaten, serta lain golongan jang dapat membantu. (Pemandangan 14/5).

= PUTUSAN2 =

PUTUSAN2 P4 PUSAT.

Kementerian Perburuhan mengumumkan putusan2 P4 Pusat terachir sbb.: Mengenai perselihan antara S.B.Electriciteit Maatschappij Balikpapan dan madjikan di Balikpapan, diputuskan:

I. Mewadjibkan pengusaha memberi hadiah Lebaran tahun 1951 kepada buruh2nja dengan berpedoman pada "Peraturan Hadiah Lebaran bagi pegawai pemerintah".
II. Mewadjibkan pengusaha memberi kenaikan gadji sebesar Rp. 50.- kepada kedua pegawai termaksud pada rundingan tersebut mulai dengan bulan Djuni 1951.
III. Mewadjibkan pengusaha melakukan surut peraturan gadji baru jang didjalankan sedjak bulan September 1951 mulai bulan Djuni 1951.
IV. Putusan ini mengikat baik buruh maupun pengusaha.

Antara S.B.Rokok Indonesia (SBRI) di Surabaja dan British-American Tobacco Manufacturers (Indonesia) Limited dan Leaf Tobacco Development Company (Indonesia) Limited, di Djakarta diputuskan:

I. Menolak tuntutan pembajaran upah selama pemogokan dalam bulan Djanuari 1951.
II. Mewadjibkan pengusaha membajar kepada buruh2 jang bekerdja pada "LTD purchasing-station" di Pamekasan, Garut dan Klakah, dan jang tergabung dalam SBRI, untuk masing2 terhitung mulai dari penggabungannja, upah-terendah sebagai berikut:
   a. Rp. 100.- sebulan untuk buruh-bulanan,
   b. Rp. 4.- sehari untuk buruh-harian,
   c. dengan memperhitungkan upah-terendah jang hingga kini telah dibajarkan kepada mereka.
III. Mewadjibkan pengusaha sub II dimuka berlaku hingga tg. 1 Pebruari 1952.
IV. Menolak tuntutan tentang distribusi.
V. Putusan ini mengikat baik buruh maupun pengusaha.

Selandjutnja djuga telah diputuskan penetapan peraturan hubungan kerdja antara pengusaha dan buruh (BAT-LTD/SBRI) tahun 1952. Dalam peraturan itu a.l. ditetapkan upah terendah buruh harian Rp. 6.- sehari, sedang upah minimun bagi buruh bulanan Rp. 100.- sebulan. Gratifikasi diberikan sebesar ¼ bulan upah bruto sampai 2 bulan upah bruto, menurut masa kerdjanja: mulai 3 bulan (¼ bulan upah) sampai 10 tahun (2 bulan upah). (Antara, 15/5-'52).

KEGIATAN POLISI LALU-LINTAS MENJEBABKAN BERKURANGNJA KETJELAKAAN.

Dari 24.000 betjak, 13.000 pengendaranja.

Kepala Polisi Lalu-lintas, R.Untung Margono, menerangkan pada "Antara", bahwa berkat kegiatan2 dan usaha2 jang didjalankan dilapangan lalu-lintas, maka djumlah ketjelakaan lalu-lintas dalam kota Djakarta,kini menundjukkan tendens menurun. Usaha2 kearah memperketjil angka ketjelakaan lalu-lintas ini, kini terus didjalankan bahkan lebih dipergiat lagi.

Disamping mengadakan beberapa perobahan2 dan peraturan2 baru didjalan umum bagi kendaraan2 bermotor, kinipun sedang dikerdjakan pembuatan djalan satu djurusan (eenrichtingsverkeer) bagi kendaraan betjak.

Djuga mobil2 CD bisa ditangkap.

Oleh Kepala Polisi Lalu-lintas, lebih djauh diterangkan, bahwa tidak sadja kendaraan2 dari orang2 sipil jang bisa dituntut apabila melakukan pelanggaran lalu-lintas, tapi djuga semua kendaraan dari perwakilan2 asing disini bisa dituntut seperti halnja dengan kendaraan umum.

Dinjatakan, bahwa ketjuali mobil jang dikendarai sendiri oleh seorang Konsul atau Duta dari perwakilan2 asing, maka mobil2 perwakilan asing jang dikendarai oleh seorang supir,baik ia supir sipil maupun anggota staf dari perwakilan asing itu, bisa dituntut apabila melanggar peraturan lalu-lintas. Sebagai tjontoh diterangkan, bahwa beberapa waktu jang lalu, pernah

-digiring kekantor-

digiring kekantor besar polisi sebuah mobil CD dari Komisariaat Tinggi Belanda di Indonesia dan dituntut supirnja disebabkan melanggar peraturan lalu-lintas.

13.000 pengendara betjak belum punjai rijbewijs.

Selandjutnja Margono menerangkan, bahwa dari djumlah 24.000 betjak jang terdapat dalam kota Djakarta, kira2 13.000 pengendara betjak diantara jang hingga kini belum mempunjai rijbewijs.

Lebih kurang 50 rijbewijs tjap djempol dirobek.

Sampai sekarang, menurut tjatatan, oleh polisi lalu-lintas dirobek kira2 50 rijbewijs mobil dari pengemudi2nja jang ketika diperiksa karena salah djalan misalnja, ternjata bahwa rijbewijs2 jang diperolehnja itu adalah rijbewijs2 "tjap djempol" atau rijbewijs2 dari asal sogokan dahulu. Kepada mereka jang mempunjai rijbewijs2 sematjam itu dan jang telah ada ditangan polisi, diperintahkan sadja pulang, dan djika ingin memiliki rijbewijs lagi, supaja mengikuti udjian seperti biasa.

Achirnja Margono menerangkan, bahwa dalam pekerdjaan jang bersifat perbaikan dan perobahan2 dilapang lalu-lintas ini, polisi mendapat bantuan sepenuh2nja dari Djawatan Pekerdjaan Umum. (Antara, 15/5-'52).

SOAL PENGGANTI KERUGIAN PERANG TERGANTUNG PADA GOODWILL DJEPANG

Kata Menteri Djuanda.

Berkenaan dengan berita "Antara" tentang sikap Kementerian Luar Negeri Djepang jang menjatakan bahwa hampir tidak ada kemungkinan akan diadakannja perundingan Indonesia-Djepang kedua mengenai penggantian kerugian perang dalam bulan Mei ini, seperti jang direntjanakan dalam perundingan preliminer di Tokyo tempo hari, "Abadi" mendapat keterangan dari Menteri Perhubungan Ir.Djuanda jang pernah mengetuai delegasi Indonesia ke Djepang itu bahwa soal pengganti kerugian perang (warreparations) kepada Indonesia kini tergantung pada goodwill pihak Djepang.

Goodwill pihak Djepang itu menurut Ir. Djuanda selandjutnja bersangkut-paut dengan soal2 kepentingan Djepang di Indonesia terutama sekali soal2 ekonomi.

Selandjutnja Ir. Djuanda menerangkan, bahwa kini tidaklah lagi mendjadi soal apakah tuntutan pengganti kerugian jang diadjukan oleh Indonesia itu harus berdasar pada perdjandjian San Francisco ataukah dengan djalan mengadakan perdamian tersendiri dengan pihak Djepang karena faktor2 politik kini sudah berubah.

"Karena pihak Djepang toch tetap berpegang pada pasal 14 perdjandjian San Francisco itu", kata Djuanda, "maka mustahillah mereka akan dapat memberikan pengganti kerugian jang lebih besar djika kita mengadakan perdjandjian perdamaian tersendiri dengan Djepang itu, karena menurut ketentuan2 jang sudah ditetapkan dalam perdjandjian San Francisco itu pihak Djepang tidak dapat memberikan kerugian perang itu lebih besar daripada kepada negara2 jang menanda-tangani perdjandjian Frisco tersebut ".

Selandjutnja Ir. Djuanda menjatakan, bahwa peranan pihak Amerika dalam soal perdjandjian San Francisco itu tidaklah dapat diabaikan begitu sadja, sebab djika ketika memarap perdjandjian tersebut pihak Amerika mau membantu Indonesia dalam menuntut pengganti kerugian perang dari Djepang itu, maka kenjataan itu kini telah berubah dengan sudah berdjalannja perdjandjian tersebut dan "bargaining power" jang dulunja kita peroleh dalam perdjandjian tersebut sebelumnja Djepang berdaulat kembali kinipun telah hilang.

"Bahkan lebih daripada itu", demikian Ir. Djuanda mengachiri keterangannja kepada "Abadi" "pihak Amerika Serikat sendiri rupa2nja tidak geintereseerd lagi apakah Indonesia meratifisir San Francisco itu atau tidak". (Antara, 15/5-'52).

PUTUSAN2 RAPAT PLENO P.B. IPSI

Pada tanggal 12/5 telah dilangsungkan rapat pleno Pengurus Besar dari Ikatan Pentjak Silat Indonesia dirumah ketua umum Mr.Wongsonegoro, Djl. Diponegoro 53 jang dikundjungi oleh 15 orang anggauta P.B. dari Djakarta dan dari lain2 tempat.

Bagian tehnik jang sekarang berpusat di Djakarta dibawah pimpinan Marjoen dipindahkan ke Jogjakarta dibawah pengawasan wakil ketua umum Sri Paku Alam.

Peri hal peladjaran pentjak silat disekolah akan diusahakan supaja dapat dimulai dengan tahun peladjaran 1952 - 1953,iala. dalam bulan Djuli jad.

Untuk mengumpulkan bahan2 jang dianggap perlu buat menjempurnakan serta mempopularisir pentjak silat akan diselenggarakan filmdocumentatie dari aliran2 diseluruh Indonesia oleh Djawatan Pendidikan Masjarakat atas petundjuk Bagian Tehnik P.B. Ipsi.

Dengan bantuan kantor2 daerah dari Djawatan2 Kebudajaan, Pendidikan Masjarakat dan Pendidikan Djasmani akan diusahakan berdirinja Komisariat ditiap2 ibu kota propinsi dan tjabang2 diibu kota kabupaten serta ranting2 diibu kota kawedanan.

Selandjutnja akan diterbitkan buku peringatan tentang berdirinja dan usaha Ipsi.

Untuk menjiapkan penerbitan buku peringatan ini telah dibentuk suatu panitya terdiri dari Djoemali, Soetardjo dan Roesdi.

Selandjutnja dalam rapat tg.10/5 di Djakarta, chusus membitjarakan soal2 jang mengenai bagian technik a.l. telah dibentuk pengurus dengan susunan sbb:

Ketua: Marijoen Soedirohadiprodjo		Djakarta
Wk.Ketua: Moh.Djumali		Jogjakarta
Penulis I: Soemono		Djakarta
Penulis II: Roesdhi		Jogjakarta
Bendahari: Samsu		Djakarta
Komisaris (pembantu):	Prodjosumitro	Surakarta
	Brotosumarno	Sragen
	Samsi	Djakarta
	Ahmad	Djakarta

(Antara, 15/5-'52).

- - - - - - - -

No. 31.
Djum'at, 30 Mei 1952.-

SARI WARTA DAN ICHTISAR PERS

D A R I

I N D O N E S I A

Terbit pada tiap2 hari Selasa dan Djum'at.
Dikeluarkan oleh
Dinas Penerangan Indonesia
Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag.

HS/2937.-

PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

Information Service Indonesia

SARI WARTA INDONESIA

KONPERENSI BAHASA SUNDA DIMULAI

Persoalan "mendemokrasikan" bahasa Sunda.

Konperensi Bahasa Sunda jang dimulai malam ini di Bandung terutama akan mengemukakan persoalan "mendemokrasikan bahasa Sunda" dengan preadpis dari M.A.Salmun dan R.Satjadibrata.

Bahasa halus supaja dihapuskan.

M.A.Salmun dalam preadpisnja mengusulkan supaja konperensi menjusun sebuah resolusi jang berbunji: "Untuk menjempurnakan revolusi-nasional serta untuk mentjapai Kesatuan-Kebudajaan Indonesia, sambil memberi isi demokrasi dalam hal bahasa Sunda, fungsi bahasa halus jang membeda2kan golongan dihapuskan".

M.A.Salmun dengan pandjang-lebar mengemukakan uraian mengenai "sedjarah tumbuhnja bahasa Sunda-halus dan mendjelaskan, bahwa selama ini bahasa halus itu sebenarnja hanja mempunjai fungsi jang tidak lebih dari pada untuk membeda2kan kelas jang oleh "kaum menak" dengan sengadja diusahakan tersebar kedesa2 untuk "mengenakkan kelas menak".

Menurut M.A.Salmun, adalah tidak selajaknja dimasa segala-sesuatu sudah memakai dasar kerakjatan masih tetap ada bahasa jang dipertuan dan bahasa jang diperbudak.

Didjelaskan selandjutnja, bahwa M.A.Salmun bukan hendak membuang bahasanja, tapi ingin supaha bahasa halus itu tidak didjadikan bahasa untuk membeda2kan kelas masjarakat. Ia memadjukan tiga kemungkinan untuk menghilangkan fungsi bahasa halus itu, jaitu: bahasa halus hanja ada dalam kalangan ilmu-pengetahuan seperti bahasa Kawi dewasa ini; bahasa halus didjadikan bahasa umum; bahasa halus dan bahasa kasar ditjampurkan sesuai dengan keadaan jang sebenarnja dewasa ini.

Mengenai kemungkinan jang ketiga, M.A.Salmun menjebutkan antara lain, bahwa dengan disesuaikannja fungsi itu kepada kehendak zaman, sifatnja bukan sadja djadi demokratis, tapi mendjadi bentukan bahasa Sunda jang tidak mempunjai matjam2 tingkatan seperti sekarang. Hal demikian menurut Salmun, akan membawa bahasa Sunda kepada persamaan tingkatan dengan bahasa persatuan, jakni bahasa Indonesia; sama2 "demokratis".

Kesusasteraan Sunda harus turut merebut kebenaran.

A.S.Dharta jang mengemukakan preadpisnja mengenai perkembangan kesusasteraan Sunda antara lain menjatakan, bahwa kesusasteraan Sunda harus mengerti akan kewadjiban jang sebenarnja, jaitu tanggung-djawab kepada masjarakat, kepada rakjat dan kepada demokrasi.

Kepada kesusasteraan Sunda, seperti djuga dalam hal bahasa, Dharta mengusulkan supaja diberikan isi demokrasi. Disamping itu kesusasteraan Sunda harus turut aktip merebut kebenaran, bukan membawa masjarakat kepada djalan jang salah. Seorang sasterawan Sunda diwaktu sekarang harus mentjintai dan menjajangi rakjat.

Seperti diketahui , disamping preadpisur2 itu terdapat djuga debater dan untuk preadpis M.A.Salmun madju sebagai debater Utuy T.Sontani, R.P.Prawiradinata dan Ahmad Atmadja. Untuk preadpis A.S.Dharta madju sebagai debater A.Sarbini dan Achdiat Kartamihardja. (Antara, 17/5-'52).

74 RUMAH DIMINTA OLEH 3000 KELUARGA.

Untuk membagikan 74 buah rumah jang dibuat oleh Kotapradja Bandung dan sekarang hampir selesai, tidak lama lagi akan diadakan undian.

-Menurut keterangan,-

Menurut keterangan, pihak Kotapradja sampai sekarang telah menerima permintaan dari lk. 3000 orang penduduk kota Bandung, sehingga sekarang sebelum diadakan undian dirasa perlu dibentuk dulu sebuah komisi untuk mengadakan seleksi dikalangan2 peminta, mana jang memang termasuk jang sangat membutuhkan dan mana jang masih dapat ditangguhkan.

Pembuatan rumah2 oleh Kotapradja Bandung jang kemudian diundi ini adalah jang pertama, tapi kabarnja setjara berturut-turut pembuatan rumah2 sematjam itu akan dilandjutkan. (Antara, 18/5-'52).

"BADAN KONTAK NASIONAL" AKAN DIDIRIKAN DI BANDUNG

Oleh partai2 dan organisasi2 masa.

Oleh pengurus2 P.N.I., P.K.I.PIR, Permai, P.S.I.I. Bandung tadi malam telah diadakan pertemuan bertempat diruangan kantor P.N.I. jang antara lain membitjarakan kemungkinan2 dibentuknja suatu "badan kontak" untuk melaksanakan beberapa kepentingan bersama, diantaranja mengenai rentjana pembikinan gedung nasional.

Pada pertemuan itu pun telah diputuskan untuk mengadakan peringatan bersama tanggal 20 Mei, Hari Kebangunan Nasional dan menggabungkan diri kepada panitia jang sudah dibentuk terdahulu atas initiatip Panti Pemuda.

Sementara itu Badan Permusjarawatan Partai2 (BPP) Priangan telah mengeluarkan pernjataan untuk turut merajakan Hari Kebangunan Nasional itu dan mengusahakan supaja pada hari itu, berbagai partai dan organisasi massa akan mengusahakan penanda-tanganan bersama suatu pernjataan jang maksudnja menjetudjui diadakannja pembentukan suatu badan jang bisa menimbulkan kerdja-sama.

Jang dimaksudkan dengan suatu badan kerdja-sama itu ialah "badan kontak nasional". (Antara, 17/5-'52).

PERINGATAN ULANG TAHUN KE-135 KEBUN RAYA.

Bertempat dirumah direktur Kebun Raya Bogor, kemarin telah dilangsungkan upatjara peringatan ulang tahun ke-135 dari Kebun Raya. Hadir a.l. Presiden Sukarno, Menteri Pertanian Moh.Sardjan, wakil Unesco di Indonesia, dan pembesar2 lainnja.

Riwajat Kebun Raya.

Kemudian berbitjara Prof. Ir.Kusnoto, jang sebagai direktur ke-15 dari Kebun Raya Indonesia, setjara pandjang lebar mentjeritera-kan riwajat Kebun Raya sedjak berdirinja pada 17 Mei 1817 jl.itu.

Kebun Raya - istilah sebutan orang ramai-sebenarnja adalah tempat pusat penjelidikan ilmu ajat dan termasuk Djawatan Penjelidikan Alam dari Kementerian Pertanian. Sebagai tempat penjelidikan ilmu tumbuh2an (botanische tuin), Kebun Raya adalah jang terbesar didaerah chatulistiwa, dimana terdapat 3 kebun lain lagi, ja'ni di Calcutta (sedjak 1789). Peradeniya di Ceylon dan satu di Singapura. Kebun sebesar dan selengkap seperti di Bogor bahkan sama sekali tidak terdapat dibenua Afrika maupun dibenua Amerika. Mula2 gubernur Djendral Inggeris Raffles-lah jang meletakkan dasar2 dari usaha penjelidikan alam pada permula-an abad ke-19. Setelah Indonesia kembali pada tangan Belanda kemudian oleh seorang gubernur Djenderal diberikan sebidang tanah disebelah timur dan selatan istananja untuk didjadikan Kebun Raya ('s Lands Plantentuin) dibawah pimpinan direktur pertama Reinwardt. Adapun maksudnja ialah, mengumpulkan pelbagai tumbuhan2 dari daerah chatulistiwa dan daerah sub-tropis, dan usaha penjelidikan bahan2 tersebut terutama ditudjukan untuk memperoleh keterangan2 dasar biologi bagi daerah chatulistiwa. Kemudian dimasukkan tumbuh2an jang mempunjai arti ekonomis dan hasil penjelidikan berarti mempertinggi produksi lapangan perkebunan, misalnja dari gutta, kina, teh, panili, klapa sawit d.l.l. Dibawah direktur ke-3 E.Teysman jang selama 38 tahun memimpin Kebun Raya tersebut (1831-1869) terkumpullah suatu kolleksi tumbuh2an sebanjak 2000 hingga 8000 matjam. Olehnja telah didirikan Balai Herbarium (1850), dimana terdapat koleksi bahan tanaman kering, dan dimulaikan usaha membuat laporan2 setjara ilmu pengetahuan, usaha tukar-menukar tanaman dan bidji tanaman dengan Balai2 Penjelidikan Ilmu Hajat dan serdjana2

-diluar negeri.

diluar negeri. Pada tahun 1842 berdirilah djuga Taman Perpustakan, bernama "Bibliotheca Bogoriensis" berisi pekerdjaan2 dalam lapangan botani dan zoologi (ilmu chewanan).

Dibawah pimpinan Teysman itu oleh dua orang Hertulanus Binnendijk dan Hasskarl (seorang Djerman) pada tahun 1837 dimulai usaha memberikan nama dan etikat pada tiap2 tumbuhan jang ada di Kebun Raya itu.

Atas djasa direktur Teysman djuga diketemukan tjara menghasilkan tanaman panili dengan "kunstmatige bestuiving", berhubung tiadanja djenis hama jang melakukan "bestuiving"itu. Selandjutnja atas/Teysman pula, penjebaran tumbuhan singkong dapat diusahakan, sehingga kemudian tanaman tersebut terdapat diseluruh tanah Indonesia; diketemukannja djuga bidji kepala sawit, untuk mana daerah Sumatera Utara mendjadi pusatnja. Segala djenis tumbuhan2, termasuk sajuran, buah2an dan tanaman hiasan jang tempat tumbuhnja terletak pada garis2 diatas permukaan-laut jang berbeda2 mulai dari Bogor sampai dipuntjak G. Gedeh semuanja dikumpulkan dan didjadikan bahan penjelidikan.

Selama diusahakannja Kebun Raya itu, disamping itu telah berdiri pelbagai balai2 penjelidikan untuk masing2 tjabang ilmu Hajat; pada tahun 1860 didirikan Kebun Tumbuhan Pengunungan di Tjibodas dengan balai penjelidikannja sendiri, kemudian Balai penjelidikannja sendiri, kemudian Balai2 Penjelidikan Pharmacologi, Pertanian, Museum Zoologi, Balai Penjelidikan untuk Serdjana asing, Balai Pemotretan & Penggambaran, Balai Penjelidikan Laut dan Aquarium, Penjelidikan Tanah, Balai Pemurniaan Tanaman,Balai Penjelidikan Perikanan Darat, Balai Pertjobaan Tanaman, Balai Penjelidikan Penjakit Tanaman dan Balai Peternakan Umum. Pada tahun 1868 atas usaha Djawatan Kebun Raya djuga telah didirikan sekolah pertanian pertama di Bogor.

Banjak madjallah2 dan tulisan jang diterbitkan oleh Kebun Raya itu, termasuk suatu standaard-werk jang memuat laporan penjelidikan atas 800 djenis kaju2an jang terdapat dipulau Djawa, dibawah pimpinan direktur Professor Dr.M.Treub.

Ternjata pada suatu ketika betapa pentingnja kedudukan Kebun Raya di Bogor,itu, sehingga hampir tiap2 negeri di Eropa mengadakan "Tropen-Stipendum", suatu dana dengan mana negeri masing2 mengokosi seorang ahli ilmu Hajat untuk mengadakan penjelidikannja di Bogor untuk setahun lamanja.

Usaha2 jang akan datang.

Kini oleh Kebun Raya telah direntjanakan untuk mendirikan suatu "Jajasan Flora Malanesia" jang akan mengusahakan penjelidikan tt. 4000 djenis tanaman anggerek, 1500 djenis paku2 (varens)dan 4000 djenis kaju2an jang terdapat didaerah chatulistiwa antara Indonesia dan benua Australia, Pekerdjaan ini akan diselenggarakan dengan bantuan para kurator-kurator dari negeri2 Swedia, Belanda dan Amerika dan akan memakan waktu lk. 25 tahun. Penjelesaian pekerdjaan raksasa itu berarti Indonesia akan menduduki tempat jang paling teratas dilapangan ilmu pengetahuan tentang tumbuh2an.

Djawatan Penjelidikan Alam dalam tahun ini djuga akan mendapat sebuah kapal Penjelidikan Laut Samudra (ocoanographic vessel) atas bantuan E.C.A. (sekarang M.S.A.)jang berangkat dari negeri Belanda kira2 pada bulan September.

Demikian penjelidikan lautan Nusantara mengenai tumbuh2an, kechewanan serta djenis2 airnja akan diusahakan setjara luas dan modern. Oleh pembitjara diutjapkan pengharapannja agar Pemerintah akan menjediakan beaja jang seperlunja untuk meneruskan usaha Kebun Raya jang telah dikerdjakan selama 135 tahun itu.

Pun diandjurkannja agar golongan pemuda dan pemudi menaruh perhatiannja terhadap ilmu Hajat jang ta' terhingga feadahnja untuk kepentingan nusa dan bangsa. Kini Indonesia belum djuga mempunjai satu orang bioloog dari bangsa sendiri.

Pada achirnja Ir.Kusnoto mengutjapkan kata2 terima kasih atas bantuan pegawai ahli2 asing jang mempertahankan adanja garis

"continuiteit" dalam menjelenggarakan pekerdjaan penjelidikan di Kebun Raya hingga saat ini.

Selandjutnja didapat kabar bahwa telah diangkat mendjadi anggota penghormatan pada Kebun Raya tahun ini ialah Dr.Anton F.Bruun, seorang serdjana Denmark jang terkenal sebagai pemimpin ekspedisi penjelidikan lautan kapal penjelidik "Galathea", jang dalam perdjalanannja beberapa waktu jl. djuga singgah di Tandjung Priok. Kemudian Professor Dr.C.P.Alexander, seorang maha-guru dalam Entomologie di Universitet Massachusetts, A.S. dan Professor Dr. W.K.J.Roepke seorang serdjana Entomologie pada sekolah tinggi Pertanian Wageningen di Nederland. (Antara, 18/5-'52).

KONPERENSI I "PETANI" SUMATERA UTARA.

Dalam resepsi pembukaan konperensi Persatuan Tani Nasional Indonesia sepropinsi Sumatera Utara, ketua Dewan Pimpinan Persatuan Tani Nasional Indonesia, Manuaba, dalam pidatonja menjatakan kegembiraannja melihat kebangkitan serentak dari petani2 Indonesia dewasa ini.

Dapat dikabarkan bahwa Persatuan Tani Nasional Indonesia di Sumatera Utara baru didirikan setahun jl, sebagai tjabang dari Persatuan Tani Nasional Indonesia jang berpusat di Djakarta. Djumlah anggotanja di Sumatera Utara ialah 32000 dan dikabupaten Deli-Serdang (Sumatera Timur) sadja 19000.

Mengenai pembagian tanah jang sekarang sedang berlangsung di Sumatera Timur, Manuaba dalam keterangannja kepada pers katakan, bahwa pembagian tanah itu menurut pendapatnja tidaklah mentjukupi. Dikatakannja, sepantasnja pemerintah memberikan tanah kepada petani2 untuk perladangan dua setengah Ha seorang dan untuk persawahan satu setengah Ha. Djadi tidak seperti jang dibagi2kan sekarang jaitu 2 Ha untuk perladangan dan 1 Ha untuk persawahan. Sebagai alasan ia kemukakan, bahwa tiap petani, disamping untuk persawahan atau perladangan djuga memerlukan tanah untuk perumahan dan peternakan. (Antara, 16/5-'52).

PENGANGKATAN DR. VAN BRAKELL BUYS SEBAGAI GURU-BESAR.

Dengan bertempat di Aula Balai Perguruan Tinggi, Fakultet Kedokteran di Djakarta, kemarin telah dilangsungkan upatjara pelantikan Dr. de Vaynes van Brakell Buys sebagai guru-besar dalam Ilmu Kesusasteraan Inggeris dan Amerika pada Fakultet Sastra dan Filsafat dari Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia.

Upatjara ini dihadiri oleh Dewan Senat dan Dewan Kurator, guru2 besar, lektor, dan mahasiswa serta undangan jang banjak.

Pada upatjara ini Prof. dr. de Vaynes van Brakell Buys mengutjapkan pidato penerimaan djabatannja tentang "Tanggapan hidup dan gambaran dunia dari Robert Browning".

Didalam pidato ini Prof. Brakell Buys mengupas filsafat hidup Robert Browning, pudjangga Inggeris jang hidup didalam abad k.-19, pada masa Ratu Victoria, serta hubungannja dengan ahli2 pikir dan kepertjajaan umum pada masa itu. Dengan mengutip beberapa sadjak dari Browning, guru-besar itu mengupas kepertjajaan serta pandangan hidup, jang katanja sangat individualistis.

Selesai mengutjapkan pidato itu,kepada hadirin diberi kesempatan untuk mengutjapkan selamat kepada guru-besar jang baru diangkat itu. (Antara, 18/5-'52).

2 SAMPAN BERISI KARET DAN KOPI DIBESLAH.

Muatannja akan diselundupkan. 2 Sampan lajar diperairan Tandjong Balai penuh berisi karet dan kopi bidji telah dibeslah oleh polisi Tandjong Balai pada malam tanggal 15 djalan 16 j.b.l.

Menurut keterangan , karet dan kopi bidji itu hendak diselundupkan ke Malaya.

Pada sampan jang pertama terdapat 10 goni karet beratnja 300 kg. Isi sampan jang kedua terdiri dari 8 goni getah majang beratnja 400 kg dan 10 kopi bidji beratnja 400 kg.

Dua dari tiga anak buah perahu pertama jang terdiri dari orang2 Indonesia ditahan sedang jang seorang lagi dapat meloloskan diri. Tetapi dari perahu kedua semua anak buahnja dapat meloloskan diri. (Antara, 16/5-'52).

-PEGAWAI.....-

PEGAWAI INSPEKSI KOPERASI S.U.KE AMERIKA.

Didapat kabar, bahwa Tengku Dhaifah dari Inspeksi Koperasi Sumatera Utara di Medan akan berangkat ke Amerika Serikat, untuk mempeladjari dan menindjau gerakan koperasi disana. Keberangkatannja itu adalah selaras dengan keputusan Menteri Perekonomian untuk mengirimkan pegawai2 Djawatan Koperasi keluar negeri guna mempeladjari dan menindjau koperasi diluar negeri.

Tengku Dhaifah ternasuk bagian Credit Unions. Ia akan berangkat dari Medan tanggal 19 bulan ini dan akan bertolak dari Djakarta permulaan bulan Djuni melalui negeri Belanda. Rombongan pegawai2 Djawatan Koperasi itu akan tinggal l.k. 5 bulan lamanja di Amerika Serikat.

Perlu dikabarkan, bahwa ditahun jang lalu E.D.Damanik, Inspektur Djawatan Koperasi Sumatera Utara, telah djuga berkundjung keluar negeri untuk maksud jang serupa itu. (Antara, 17/5-'52).

RAMI JANG MEMBERIKAN KEMUNGKINAN2 BESAR.

Setelah mengundjungi konperensi Gabungan Koperasi Perikanan Indonesia, Menteri Pertanian Sardjan mengadakan penindjauan ke Gandusari (Blitar) dimana ada tanaman pertjobaan rami dari djenis Bhoemeria Nivea. Dalam pertjakapan dengan "Antara" Menteri menjatakan, bahwa rami dari djenis Bhoemeria Nivea ini dalam tempo jang singkat akan dapat memberi pakaian kepada seluruh bangsa kita. Ternjata, bahwa serat rami tersebut sama halusnja dengan kapas dan sesudah dipreparir lebih putih dari kapas.

Sardjan selandjutnja menjatakan, bahwa Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian Perekonomian segera akan mulai tanam rami itu setjara besar2an. Dari pihak Technical Assistance P.B.B. ada didjandjikan hendak memberikan bantuan tehnik dalam hal ini. Menteri pertjaja, bahwa Indonesia tak lama lagi akan dapat menghasilkan bahan pakaian jang tjukup djumlahnja.

Penjelidikan dan pertjobaan menanam rami Bhoemeria Nivea itu telah dilakukan sedjak beberapa lama oleh Balai Pertjobaan di Bogor dan benihnja sudah pula ditjoba ditanam di Lembang, Trawas dan beberapa tempat di Djawa Timur, dan djuga di Sulawesi Selatan. Tetapi agaknja baru sekarang sadja diketahui, bahwa serat rami itu tidak kalah halusnja dengan kapas. Sampai sekarang rami itu digunakan untuk tali, tali kail dan benang djala.

Bhoemeria Nevea tumbuh baik ditanah jang tingginja 300 meter diatas laut. (Antara, 18/5-'52).

PARA NELAJAN DJAWA TIMUR MEMPUNJAI PENGALAMAN PAHIT DALAM HAL KOPERASI

Dalam pertjakapan dengan kepala Djawatan Perikanan Laut Djawa Timur "Antara" mendapat keterangan, bahwa sedjalan dengan usaha2 jang technisch wetenschappelijk, djawatan itu djuga mementingkan lapangan sosial-ekonomis. Tugas dari bagian ini adalah penjuluhan, mendjaga perhubungan dengan rakjat nelajan, menjiarkan hasil Jajasan Perikanan Laut dari pertjobaan2nja untuk dipraktekkan (modernisering). Jang penting adalah mendirikan organisasi2 perikanan jang berbentuk koperatif. Titik-berat dari penjuluhan itu disalurkan kepada kesedjahteraan masjarakat nelajan dengan mengadakan: tempat pelelangan ikan, pengawasan serta pimpinan atas koperasi2 perikanan.

Kini sedang didirikan/diperbaiki koperasi2 perikanan laut. Jang kini sudah dapat djalan lantjar ialah didaerah2: Bodjonegoro 4 koperasi, Malang 1, dalam pada itu kini sedang dalam pertumbuhan didaerah2: Bodjonegoro 3, Malang 3, Besuki 1, Madiun 1, Madura 1. Dalam hal pertumbuhan koperasi ini GKPI besar bantuannja. Konsulat Surabaja memberikan kader2 pimpinan, Kredit dan bahan jang diperlukan.

Koperasi pembikinan perahu penangkap ikan didirkan di: Klatakan (Panarukan), Majangan (Probolinggo). Koperasi ini mempersatukan tukang2 galang perahu untuk memudahkan mengurus perizinan kaju, serta mempermudah penilikan. Dengan demikian djuga dapat diatur pesanan2 perahu dengan harga jang tidak merugikan kedua pihak, nelajan dan tukang galang. Sampai sekarang telah dapat dibuat 12 perahu besar/ketjil.

-Pada.....-

Pada penghabisan tahun 1951 telah selesai didirikan gedung2 baru di Kalianak (Tandjung Perak) untuk kantor, pelelangan ikan dan gudang. Digedung2 ditempatkan Jajasan Perikanan Laut dan konsulat GKPI.

Untuk Djawa Timur gerakan koperasi perikanan jang baru ini belum demikian dikenal. Kepala Djawatan itu menerangkan, bahwa Djawa Timur terutama para nelajannja mempunjai pengalaman jang sampai kini masih meninggalkan bekas2 jang pahit dalam lapangan koperasi. Dengan demikian para nelajan masih "kurang pertjaja" akan gerakan baru ini. Keinsjafan berorganisasi perlu dipupuk kembali, dan harus ditundjukkan bukti jang njata untuk mengembalikan kepertjajaan para nelajan. Untuk itu Djawatan Perikanan Laut membutuhkan waktu.

GKPI konsulat Surabaja untuk menolong para nelajan telah membuka toko bahan2 perikanan di: Bulu (Tuba), Tuban, Blimbing/ Brondong, Weru, Bangkalan, Probolinggo, Besuki, Panarukan dan Muntjar (Banjuwangi).
Demikian kepala Djawatan Perikanan Laut Djawa Timur.
(Antara, 18/5-'52).

PENJELESAIAN2 PERSELISIHAN PERBURUHAN.

F.B.M.I.-NV. de B.P.M. Dalam perselisihan perburuhan antara Federasi Buruh Minjak Indonesia dan NV de Bataafsche Petroleum My, P4 Pusat telah memutuskan: menolak tuntutan gratifikasi jang terlepas dari hadiah lebaran, menetapkan peraturan tjuti jang mulai berlaku pada tanggal 1/5 jl dimana ditentukan tempat bertjuti: tempat tinggal jang terachir dan tempat asalnja, setelah buruh bekerdja 12 tahun pada pengusaha, dengan pengertian, bahwa pemberian perongkosan pulan pergi bagi buruh beserta keluarganja ketempat asalnja, hanja diberikan sekali dalam masa-kerdja. Selandjutnja P4 Pusat menangguhkan keputusan mengenai tuntutan buruh tentang djaminan hari tua jang memerlukan penjelidikan lebih djauh.

Sebagai diketahui tuntutan buruh adalah gratifikasi sebanjak 3 bulan gadji kotor tiap2 tahun 1951 dan menghendaki dipisahkannja antara gratifikasi dengan hadiah-lebaran, tjuti tahunan dan djaminan hari-tua.

Penolakan tuntuan gratifikasi jang terlepas dari hadiah-lebaran menurut keterangan jang didapat dari Kementerian Perburuhan ialah, karena baik hadiah-lebaran maupun gratifikasi bersifat penghargaan djasa-kerdja buruh, sehingga keduanja tidak dapat dipisahkan satu dengan jang lain. Putusan ini dinjatakan mengikat kedua belah pihak.

SBIM - Sumber Mas. Dalam perselisihan antara Serikat Buruh Industri Metal di Surabaja lawan Paberik Mesin & Constructie werkplaats Indonesia "Sumbermas" di Malang telah diperintahkan kepada buruh dan pengusaha untuk mengadakan perundingan selambat2nja pada tanggal 20 Mei 1952 guna mentjapai suatu perdjandjian perburuhan dibawah pimpinan Kantor Penjuluh Perburuhan di Surabaja.

SBHR - NV. My Hotel des Indes. Putusan mengikat telah diberikan oleh P4 Pusat untuk menjelesaikan perselisihan antara Serikat Buruh Hotel dan Rumah Makan di Djakarta lawan N.V. My. "Hotel des Indes" di Djakarta. Putusan itu menolak tuntutan buruh, supaja 3 orang buruh jang dipetjat dipekerdjakan kembali, karena 3 orang jang diberhentikan itu semula diangkat oleh pengusaha atas andjuran kepala Kantor Polisi Seksi IV Djakarta dengan diberi tugas untuk berusaha agar pentjurian di Hotel des Indes berkurang, akan tetapi ternjata selama 4 bulan tidak ada hasilnja. Achirnja ketiga orang tersebut diperhentikan dengan mendapat uang pesangon sebesar satu bulan gadji ditambah lagi dengan "extra uitkering" sebesar Rp. 100,--.

-Sarbupri.....-

Sarbupri - Nat.Ind.& Landbouw My.

Mengenai perselisihan antara Serikat Buruh Perkebunan R.I. ranting Djatinangor lawan gedelegeerde dari N.V. My. tot Exploitatie der Ondernemingen, nagelaten door Mr. W.A. Baron Baud, jang dalam hal ini diwakili oleh Nationale Industrie en Landbouw My. NV. di Djakarta, P4 Pusat memutuskan:

Mengizinkan kepada pengusaha mulai 30 April 1952 memberhentikan buruhnja di Djatinangor sedjumlah 1.k. 200 orang, jaitu jang biasa bekerdja bergelirian. Pemberhentian seterusnja sampai mentjapai "buruh bestand" sedjumlah 619 orang, dilakukan berangsur2 dalam 3 bulan, jaitu pada tanggal 1 Djuni, 1 Djuli dan 1 Agustus 1952. Mewadjibkan pengusaha memberi pesangon kepada buruh jang diberhentikan sebanjak 1 sampai 4 bulan gadji menurut masa kerdjanja masing2. (Antara, 18/5-'52).

NASKAH LAPORAN INTERNATIONAL RICE CONFERENCE Di Bandung.

Seperti telah dikabarkan, International Rice Conference pada tanggal 15 jang lalu telah mengachiri konperensinja jang telah berlangsung mulai tanggal 12 di Bandung. Pada achir sidangnja itu International Rice Conference telah menerima baik suatu naskah laporan jang terdiri dari 77 halaman dan memuat ichtisar tentang masalah2 jang telah dibitjarakan selama sidangnja di Bandung itu.

Dalam laporannnja itu International Rice Conference mentjurahkan perhatiannja kepada usaha2 guna mempertinggi produksi beras.

Telah ditindjau oleh konperensi masalah2 perbaikan dan pemilihan bibit, menambah suburnja tanah dengan menggunakan rabuk, usaha2 jang harus dikerdjakan untuk menghindarkan hilangnja beras dengan djalan memperbaiki tjara penjimpanan dan penggilingannja dan djuga dibitjarakan berbagai aspek ekonomi dan pasaran jang mengenai beras, serta masalah mechanisasi penanaman padi.

Sebagai tempat penjimpanan beras jang tidak baik disebut dalam laporan itu kebiasaan orang untuk menjimpan beras digudang-gudang barang, jaitu didalam gudang2 guna menjimpan barang2 dalam peti jang keadaannja tidak baik bagi penjimpanan beras. Penjimpanan dan pengangkutan beras dengan kapal didalam karung2 jang mahal memudahkan kutu2 dan hama2 jang lazim merusak beras. Lebih baik penjimpanan dan pengangkutan beras itu terdjadi didalam tumpukan2 besar. Kurangnja perhatian untuk mengeringkan beras termasuk djuga salah satu sebab jang bisa merusak beras.

Tentang mechanisasi penanaman padi disebut didalam laporan itu, bahwa menurut pendapat utusan2 dari berbagai negeri, mechanisasi penanaman padi sepenuhnja tidak mungkin didjalankan didaerah2 jang luas dimana terdjadi pemindahkan bibit atau pemindahan tanaman.

Selandjutnja didalam laporan itu dikemukakan baiknja mengadakan normalisasi djenis2 beras dan mengusahakan suatu menu bagi penduduk jang memakai beras sebagai bahan makanan pokok. Produksi padi didaerah2 pegunungan dan didaerah2 kering mendapat perhatian djuga dari konperensi.

Usaha2 pendorong untuk menambah produksi beras jang didjalankan oleh pemerintah2 diberbagai negeri disebut didalam laporan itu sbb:

1. Pembagian rabuk atau keperluan2 lain setjara pertjuma atau dengan bajaran jang dikurangkan kepada kaum tani;
2. Pengolahan tanah dengan menggunakan traktor dengan ongkos2 jang murah;
3. Menjediakan air irigasi dengan pertjuma;
4. memberikan bantuan2 kepada kaum tani untuk memperbaiki tjara tjara bekerdjanja;
5. memberi djaminan2 tentang harga jang pasti untuk beras atau menentukan harga jang seimbang dengan barang2 jang diperlukan oleh kaum tani;
6. memberikan berbagai kredit djangka pendek dan djangka pandjang kepada mereka untuk memperbaiki alat2 pertanian, guna mengongkosi panen dan tudjuan2 lain;

-7. penempatan.....-

7. penempatan kaum tani didaerah2 baru atau didaerah2 jang telah ditinggalkan;
8. mengadakan koperasi2 untuk mengoper pekerdjaan2 kaum tengkulak dan guna menjediakan kredit.
9. penjebaran penggilingan2 beras kedaerah2 tempat padi.

Achirnja didalam laporan itu, dimuat djuga perubahan2 didalam anggaran dasar dan rumah tangga International Rice Conference sendiri. (Antara, 18/5-'52).

KONPERENSI PARA GUBERNUR SELURUH INDONESIA.

Resepsi. Sebagai pendahuluan konperensi diantara Kementerian Dalam Negeri dengan para gubernur seluruh daerah Indonesia, kemarin malam telah diadakan resepsi ditempat kediaman walikota Djakarta; sebagai tuan rumah bertindak Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Rum dan walikota Sjamsuridzal beserta njonja2nja.

Hadir dalam resepsi tersebut pembesar2 pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, pembesar2 dari Kementerian Dalam Negeri, dan kotapradja Djakarta Raya, sedang dari pemerintah pusat tampak PM Wilopo, Wakil PM Prawoto, Menteri Luar Negeri Mukarto, Kepala Staf A.P. Djenderal Major Simatupang, kepala Polisi Negara Sukanto, Djaksa Agung Suprapto, beberapa orang sekretaris-djenderal dll.

Pembukaan konperensi. Konperensi itu djam 08.30 pagi ini akan dibuka diruangan Istana Negara, dan akan berlangsung selama 3 hari ini.

Menurut sekretaris-djenderal Kementerian Dalam Negeri Mr.Sumarman, dalam konperensi tersebut akan dibitjarakan soal2 desentralisasi, soal pemerintahan desa, agraria, personalia, keuangan, kaum minoriteit, keamanan umum, transmigrasi dan perundang2-an didalam mana termasuk soal pemilihan umum.

Konperensi para gubernur Indonesia ini adalah jang kedua kalinja diadakan di Djakarta ini; konperensi jang pertama telah berlangsung didalam bulan Djanuari 1949, demikian menurut keterangan pihak Kementerian Dalam Negeri.
(Antara, 19/5-'52).

PERNJATAAN BERSAMA.

Untuk Hari Kebangunan Nasional jad. Sebuah rentjana "Pernjataan Bersama" jang telah disusun oleh "Panitya Peringatan 44 tahun Kebangunan Nasional" jang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara telah disetudjui Minggu kemarin oleh 42 putjuk pimpinan organisasi2 politik, sosial dan ekonomi dalam pertemuan jang diadakan digedung parlemen.

Isi pernjataan itu baru akan diumumkan pada Hari Kebangunan Nasional tanggal 20 Mei jang akan datang pada suatu upatjara peringatan di Istana Merdeka.

Dari organisasi2 politik jang telah turut menanda-tanganinja ialah PNI, PIR, PKI, Parindra, Partai Buruh, PRN, PSII, PRI, Permai. Beberapa lainnja belum. Telah ditetapkan, bahwa kesempatan turut menanda-tanganinja masih terbuka sampai hari Selasa pagi jang akan datang.

Sesudah tanggal 20 Mei akan dibentuk suatu panitya guna menjusun suatu program pelaksanaan Pernjataan bersama itu. Banjak usul2 jang dikemukakan oleh berbagai organisasi kemarin akan diteruskan kepada panitya jang akan dibentuk itu sebagai bahan menjusun program pelaksanaan. (Antara,19/5-'52).

KALIMANTAN AKAN DAPAT MENAMBAH HASIL BERAS 1.000.000 TON.

Dalam 8 tahun jang akan datang. Ir.Dr.Schophuys, Inspektur Djawatan Pertanian Kalimantan, menerangkan kepada "Antara", bahwa dalam 8 tahun di Kalimantan akan terbuka tanah pertanian seluas 400.000 ha, sehingga di Indonesia akan dapat dihasilkan tambahan beras sebanjak 1.000.000 ton. Sebagai diketahui, kini kekurangan Indonesia tiap tahunnja adalah 600.000 ton.

-Dalam.....-

Dalam interviewnja dengan "Antara" Semarang itu ia mentjeritakan tentang pekerdjaan besar jang kini sedang dilakukan di Kalimantan Selatan dalam lapangan "pengeringan" tanah. Pekerdjaan ini kini telah dimulai dengan menggunakan tenaga-kerdja penduduk Kalimantan sendiri, dan kemudian akan disusulkan pula tenaga mesin jang kini sebagian telah tersedia dipelabuhan Surabaja.

Sebelum tanah dapat dikeringkan, selama 2 tahun ini dianggapnja tidak perlu untuk mendatangkan transmigran ke Kalimantan.

Ia terangkan, bahwa rentjana pembangunan Kalimantan itu telah disetudjui oleh Wakil Presiden Moh.Hatta dan kini masih dalam pertimbangan kabinet Wilopo. Tidak lama lagi akan datang putera2 Indonesia dari luar negeri jang telah menjelidiki soal2 "inpoldering"; pengetahuan-baru mereka akan dipraktekkan di Kalimantan. Kemudian akan dikirim lagi keluar negeri 15 orang untuk mempeladjari mekanisasi dll, jang erat pula hubungannja dengan pembangunan Kalimantan itu. (Antara, 18/5-'52).

USA IMPORT MINJAK MENTAH.

Dari Sumatera.

Untuk pertama kali dalam sedjarah, USA akan menginport minjak mentah dalam djumlah jang besar dari Sumatera, demikian AFP New York. Hal ini diumumkan Minggu kemarin oleh Standard Oil of New Jersey.

Import itu akan dimulai tanggal 1 Djuni jang akan datang, rata2 20.000 barrel tiap hari. Putusan ini diambil berhubung dengan tidak adanja imbangan antara produksi, eksport dan konsumsi minjak di negara2-bagian sebelah barat USA.

Minjak mentah Sumatera itu akan dimasuk dalam pabrik2 Standard Oil New Jersey di Richmond, California.(Antara, 19/5-'52).

MISSI PERDAGANGAN DJEPANG.

Djuni ke Indonesia.

Didapat kabar, dalam bulan Djuni jang akan datang Djepang akan mengirim missi perdagangan ke Indonesia dan Thai untuk mempertjepat perundingan dagang jang sekarang terhenti itu. Demikian UP Tokio.

Kalangan jang mengetahui menerangkan, bahwa missi itu akan terdiri a.l. dari pegawai2 kementerian luar negeri, perdagangan dan keuangan.

Sebagai diketahui, perundingan dagang antara Indonesia-Djepang jang dimulai tahun jang lalu terhenti, karena Djepang tetap pada pendiriannja supaja Indonesia membajar dengan dollar.

Dalam perdagangan dengan Djepang Indonesia mempunjai balans import sebesar 60 djuta dollar. Menurut "Nihon Keizai" Djepang berusaha,/dollar dengan "swing account" sebesar 5 djuta dollar (selisih jang harus dibajar oleh Indonesia,Red.). (Antara, 19/5-'52).

SOAL MSA DIBITJARAKAN.

Antara Indonesia-USA.

Pembesar2 Amerika hari Sabtu katakan, bahwa soal bantuan ekonomi dan tehnik kepada Indonesia sedang dibitjarakan antara USA dan Indonesia, demikian UP Washington.

Mereka mengharapkan, pemerintah Indonesia akan setjara langsung dan resmi memberitahukan kepada penerintah Amerika mengenai perubahan2 jang dikehendakinja dalam bagian 511 Mutual Security Act jang telah disetudjui oleh pemerintah Indonesia tanggal 5 Djanuari jl. (Antara, 19/5-'52).

SUBARDJO DI MANILA.

Bekas Menteri Luar Negeri Indonesia Mr.Subardjo malam Minggu tiba di Manila dalam perdjalanannja ke Tokio dan akan tinggal di Manila 5 hari lamanja. Demikian AFP Manila.

Kepergiannja ke Tokio dimaksudkan untuk mempeladjari kemungkinan2 mengadakan kembali perhubungan diplomatik dengan Djepang. Subardjo terangkan, bahwa ia sekarang "dalam perlop" dan tidak bersedia memberi keterangan2 lebih landjut mengenai maksud perdjalanannja.

Hanja mengenai kedatangannja di Manila ia katakan, bahwa ini bersifat "privé". (Antara, 19/5-'52).

-SOBSI.....-

/supaja terdapat persetudjuan balans perdagangan sebesar 52 djuta

SOBSI MENUNTUT HADIAH LEBARAN.

Untuk semua buruh.

Dalam resolusinja jang disampaikan kepada pers kemarin, Sentral Buro SOBSI memutuskan, menuntut kepada penerintah dan madjikan, supaja kepada buruh diberikan hadiah lebaran, supaja rakjat dapat menjambut dan merajakan Hari Lebaran itu.

Kaum buruh pemerintah, baik militer maupun sipil, dan kaum buruh perusahaan partikelir supaja diberi minimum satu bulan gadji kotor. (Pokok dan tundjangan). Pensiunan satu bulan pensiun. Buruh penganggur satu bulan tundjangan. Selain itu supaja dilakukan pembagian beras jang merata dengan harga pemerintah (Rp.1). (Antara, 19/5-'52).

RUMAH PERAWATAN ANAK2 KM6

Diresmikan Menteri Sosial.

Sabtu jl sudah dilangsungkan pengresmian rumah perawatan anak2 jatim piatu kepunjaan Djawatan Sosial di Km 6, jang dilakukan oleh Menteri Sosial dan dihadiri oleh banjak kalangan terkemuka.

Menteri dalam kata sambutannja a.l. katakan, haruslah didjaga/ sampai anak2 jang dirawat dalam perumahan itu merasa terasing dari masjarakat seumumnja, jang sangat tidak baik bagi pertumbuhan djiwa anak2 tersebut dikemudian hari. (Antara, 19/5-'52).

MASALAH "MENDEMOKRASIKAN" BAHASA SUNDA

Pendapat2 "golongan tua dan muda".

Diantara atjara2 dari konperensi bahasa Sunda jang berlangsung pada babak pertama hari ini ternjata, bahwa masalah "mendemokrasikan" bahasa Sunda mendapat perhatian besar dan memakan waktu paling lama.

Berbitjara pada pertemuan itu pemuka2 "tua, sedang dan muda" jang masing2 memadjukan pendapatnja, baik berupa preadpis maupun berupa debat, tetapi pada kenjataannja tidak seorang pun jang dapat mengemukakan pendapatnja jang terang2 menentang aliran "pendemokrasian", meskipun masih ada jang mengemukakan bahwa bahasa halus itu sekarang tidak lagi menjatakan adanja klas2 dikalangan masjarakat Sunda.

Disamping pendapat2 setudju tentang adanja "pendemokrasian", terdapat pula keinginan2, bahwa djuga bahasa Sunda itu harus diusahakan sehingga dapat mentjukupi kebutuhan ilmu pengetahuan dewasa ini.

Utuy Sontani sebagai debator, selain mengemukakan pendapatnja, bahwa djiwa baru dalam bahasa Sunda jang sedang tumbuh itu mustahil dapat dikekang oleh "pemangku2 kebudajaan", djuga menghendaki supaja pendemokrasian bahasa Sunda itu disertai pula dengan keharusan bagi "pemangku2 kebudajaan" supaja turut mendemokrasikan djiwanja dan menjelami djiwa demokrasi jang sedang tumbuh didalam masjarakat luas.

Bujung Saleh diantaranja dalam debatnja mentjela pendapat2 jang mengatakan, bahwa "bahasa rakjat" atau "bahasa kasar" adalah "hina" sehingga sering2 dikatakan "bahasa kampung". Terhadap suatu anggapan, bahwa kalau bahasa Sunda itu akan djadi primitief djika "didemokratiskan", Bjung Saleh berpendapat sebaliknja dan menjatakan, bahwa dalam keadaan katjau-balau dan bertingkat-tingkat itu bahasa Sunda itu adalah primitief.

Malam resepsi.

Wakil Badan Musjawarat Kebudajaan Nasional Bujung Saleh dalam sambutannja mengaskan bahwa BMKN itu menjambut dan menghargai konperensi bahasa Sunda dengan ketentuan, bahwa dengan dipeliharanja serta diperkajanja bahasa2 daerah, bahasa Indonesia akan mendjadi lebih kaja. Memelihara atau memperkaja bahasa daerah itu, demikian Bujung Saleh, tidaklah hendaknja dimaksudkan sebagai gerakan separatisme dikalangan kebudajaan. (Antara, 19/5-'52).

/ djangan

REAKSI KALANGAN KARET RAKJAT TERHADAP PENURUNAN HARGA KARET ASLI OLEH G.S.A.

Berhubung dengan diturunkannja harga karet oleh General Service Administration Amerika dari 48.5 sen dollar mendjadi 38 sen, kalangan karet rakjat dan asing di Medan menjatakan pendapatnja, bahwa turunnja harga karet itu akan lama baru terasa didaerah ini. Turunnja harga karet sekarang ini mengingatkan kalangan2 itu kepada keadaan di tahun 1931.

Turunnja harga karet di Amerika itu, menurut pendapat kalangan2 karet didaerah ini, mungkin sekali karena peperangan di Korea akan dapat dihentikan dan besarnja stock karet jang ada di Amerika sekarang.

Sementara itu semakin keras terdengar suara dikalangan karet diMedan, bahwa kalau Amerika terus menerus menurunkan harganja, sehingga produksi karet akan sukar sekali, agar pemerintah djuga mentjari djalan lain dan dalam hubungan ini mentjari pasaran baru.

Sementara itu karet rakjatlah jang banjak menderita karena turunnja harga karet. Walaupun export karet rakjat masih djuga dilakukan selama bulan2 jang terachir ini, akan tetapi boleh dikatakan pengiriman karet itu berlangsung dengan rugi.

Sebagai tjontoh dapat dikemukakan pengiriman karet rakjat jang dilakukan oleh Kooperasi Persatuan Karet Rakjat Labuhan Batu, jang telah menutup kontrak untuk 50 ton karet rakjat dengan harga Str. dollar 1.72, sedang sesampainja karet itu baru2 ini di Singapura pasaran karet telah merosot mendjadi Str.$ 1.30.

Sementara itu export karet rakjat menundjukkan tanda2 menurun: Djanuari 6183 ton, Pebruari 2984 ton, Maret 4763 ton dan April 3688 ton. Naiknja export karet rakjat dibulan Maret adalah berhubung dengan dihapuskannja singlebuying system dari Amerika. Ditahun 1951 export karet rakjat ditaksir 40 sampai 45.000 ton.

Minjak kelapa sawit masih baik. Dalam pada itu export minjak kelapa sawit masih berdjalan sebagai biasa, walaupun menurut kabar jang diperoleh harganja sudah turun djuga.Perlu diketahui, bahwa export minjak kelapa sawit dan palmkernen dari Sumatera Timur adalah 99% dari seluruh export Indonesia.

Mutu minjak kelapa sawit dari Sumatera Timur diakui baik sekali, berhubung hudjan didaerah ini teratur turunnja, walaupun Afrika adalah daerah asal dari kelapa sawit. (Antara,16/5-'52).

NERATJA RINGKAS DE JAVASCHE BANK

Menurut neratja ringkas De Javasche Bank jang ditentukan pada tanggal 14 Mei 1952 sesudah penutupan kas, uang kertas negeri jang diperedarkan atas nama pemerintah Republik Indonesia Rp.336.368.410.- diantaranja uang kertas negeri lama Rp.113.942.610.- uang kertas negeri baru Rp. 222.425.800.- sedang uang-muka kepada pemerintah Republik Indonesia Rp. 2.098.677.793,01. (Antara,19/5-'52).

DALAM PEKAN INI INDONESIA AKAN SERAHKAN NOTA KEPADA DJEPANG.

Berdasarkan keputusan kabinet dalam sidangnja pada hari Sabtu jang baru lalu untuk membuka hubungan baru diantara Indonesia dengan Djepang, maka oleh Kementerian Luar Negeri kini sedang dipersiapkan suatu nota kepada pemerintah Djepang untuk membuka suatu konsulat-djenderal Indonesia di Tokyo. Pengiriman nota ini akan sudah dapat berlaku didalam pekan ini djuga, demikian menurut keterangan jang kita perdapat dari djurubitjara Kementerian Luar Negeri hari ini.

Kedudukan serta keadaan dari misi diplomatik Indonesia di Tokyo dewasa ini oleh Kementerian Luar Negeri masih ditindjau,

-tetapi jang-

tetapi jang sudah pasti ialah bahwa Mr.Sudjono, Kepala Misi Diplomatik Indonesia buat Djepang jang sedjak beberapa hari ini telah berada di Djakarta tidak akan kembali lagi ke Tokyo.

Apa djabatan baru jang akan diberikan kepada Mr. Sudjono nanti masih belum ada ketentuannja.

Djuga masih belum ada ketentuannja, siapa jang akan memegang djabatan konsol-djenderal Indonesia di Tokyo itu ialah supaja sebelum adanja ketentuan dalam hubungan diplomatik diantara Djepang - Indonesia, hubungan2 dagang dan sebagainja jang terlingkung kedalam lapangan pekerdjaan sesuatu konsulat-djenderal dapat berdjalan terus diantara kedua negara itu.

Sedang untuk membuka sesuatu hubungan diplomatik adalah tidak mungkin dilakukan oleh Indonesia, selagi ia belum mengakui kemerdekaan Djepang sedjak tanggal 28/4 itu.

Atas pertanjaan mengenai berita AFP dari Manilla, jang menjatakan, bahwa kepergian Subardjo ke Tokyo dimaksudkan untuk mempeladjari kemungkinan2 mengadakan kembali perhubungan diplomatik dengan Djepang oleh Indonesia, djurubitjara Kementerian Luar Negeri hanja menerangkan: Djika berita AFP itu benar, maka dapat saja njatakan, bahwa tentang hal itu Kementerian Luar Negeri tidak tahu menahu sama sekali. Jang diketahui, ialah bahwa kundjungan Mr. Subardjo ke Djepang itu adalah suatu perdjalanan-prive. (Antara, 19/5-'52).

STANDARD OIL COMPANY OF CALIFORNIA JANG MENGIMPORT MINJAK MENTAH DARI SUMATERA.

Bukan Standard Oil Coy of New Jersey.

Berhubung dengan berita . . . . . mengenai USA import minjak mentah dari Sumatera, berasal dari AFP-New York, oleh fihak kantor pusat Standard Vacuum Oil Company dinjata bahwa nama Standard Oil Company of New Jersey jang disebutkan didalam berita tersebut seharusnja adalah Standard Oil Company of California. Sebagaimana umum mengetahui, oleh perusahaan minjak Caltex Pacific Petroleum Coy mulai bulan ini dikirim minjak mentah asal dari sumber2nja di Sumatera Tengah ke Amerika untuk dimasak dipaberik2 Standard Oil Company di Richard diwilajah California. (Antara, 19/5-'52).

BEBERAPA PUTUSAN P4 PUSAT

Untuk menjelesaikan perselisihan antara Serikat Buruh Gula tjabang Kaliwungu, di Kaliwungu (Kendal), lawan Verenigde Vorstenlandsche Cultuur Mij. N.V. di Semarang, P4 Pusat telah mengambil putusan jang mengikat dengan membenarkan pemberhentian 147 orang pegawai/pekerdja dari bekas paberik gula Kaliwungu, mulai 1 Nopember 1951 dan mewadjibkan pengusaha membajar kepada mereka jang diberhentikan pesangon sebanjak 1 sampai 4 bulan gadji menurut masa kerdjanja.

Selandjutnja mewadjibkan pengusaha untuk memberikan prioriteit kepada orang2 jang diberhentikan itu djika paberik gula Kaliwungu dibuka kembali.

Putusan P4 Pusat ini berdasarkan hasil penjelidikan Panitya Enquête jang antara lain menerangkan bahwa keadaan perusahaan tersebut memang benar2 menjedihkan, disebabkan oleh besarnja kerusakan dan kerugian jang diderita berhubung dengan turunnja produksi menurut buku2 produksi jang ditundjukkan kepada Panitya Enquête itu dan pengusaha tidak mungkin mendapat crédit djarak pandjang sampai berpuluhan djuta rupiah.

Sementara itu perselisihan perburuhan antara Serikat Buruh Angkatan Udara tjabang Djakarta lawan N.V. Garuda Indonesian Airways di Djakarta telah diselesaikan pula dengan putusan jang mengikat sbb: memerintahkan kepada pengusaha untuk memberikan pakaian-kerdja dan sepatu kepada buruh Technische Dienst jang karena sifat pekerdjaannja mudah merusak pakaian dan sepatunja sekali dalam setahun dan memerintahkan kepada pengusaha untuk memperbaiki bedeng Motorpool dan bedeng Bandung selama belum dikosongkan atas petundjuk2 dari Djawatan Pengawasan Perburuhan.

-Selandjutnja.....-

Selandjutnja mengenai perselisihan Sarikat Buruh Gula (D.P.P.) di Surabaja lawan N.V. Java Cultuur Mij jang diwakili oleh Nationale Industrie & Landbouw Mij. N.V. (Paberik Gula Padjarakan) di Surabaja diputuskan bahwa pengusaha dibenarkan untuk mengadakan pengurangan pekerdja2 sedjumlah 95 orang dibagian paberik dengan ketentuan, bahwa kepada mereka akan diberikan uang pesangon dan uang djasa mulai tanggal 16/5 jl.

Pengusaha tidak dibenarkan mengadakan pemetjatan terhadap 48 pekerdja2 di railbaan dan 15 pekerdja2 untuk pemeliharaan gedung2. Demikian pengumuman jang diterima dari Kementerian Perburuhan. (Antara, 19/5-'52).

KELUAR DARI PARTAI DEMOKRASI RAKJAT

Dan mendjelmakan "Gerakan Banteng Republik Indonesia".

Berdasarkan pendapat bahwa antara Dewan Partai jang dipimpin oleh Iman Sutardjo di Djakarta dan sementara tjabang2 dan ranting2 Partai Demokrasi Rakjat tidak ada kesesuaian langkah perdjuangan, maka mulai tanggal 16/5 jang lalu tjabang2 dan ranting2 Partai Demokrasi Rakjat Krawang, Kalidjati/Subang, Kedunggedeh, Rengasdengklok, Tjariu/Tjibarusah, Djonggol, Bekasi, Pangkalan, Tjikampek, Telagasar, Klari, Pisangsambo, Wadas, Selang, Patokbesi, Pabuaran, Haurgeulis, Rawamerta, Kosambi, Tjigarukgak, Dawuan, Djatisari, Tjileungsi, Tambun, Tg. Priok, Djatinegara, Bogor dan Tanggerang jang beranggota lebih kurang 85.000 orang menjatakan keluar dari Partai Demokrasi Rakjat dan mendjelma kedalam organisasi "Gerakan Banteng Republik Indonesia" berpusat dikota Krawang dengan ketua umum W.G.Subroto dan ketua umum kehormatan almarhum Dr. Muwardi.

Demikian diumumkan W.G.Subroto atas nama tjabang2 dan ranting2 tersebut diatas. Tentang Gerakan Banteng Republik Indonesia ini selandjutnja diterangkan dalam proklamasi pendiriannja jang antara lain menjatakan bahwa organisasi ini mempunjai azas dasar sosialisme-demokrasi-kemurbaan dan bertudjuan mempertahankan dan menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia merdeka diatas dasar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, berdasar kepada aksi-massa-teratur, sedang bentuk dan sifat organisasi ialah organisasi massa jang bebas berdiri sendiri tidak bersifat partai atau setengah partai.

TUGAS DAN HASIL2 ANGKATAN LAUT HINGGA SEKARANG.

Wakil kepala Staf Operasi Angkatan Laut Major Abimanju dan kepala bagian penerangan Angkatan Laut Kapten Iskak dalam konperensi pers di Djakarta hari ini menjatakan, bahwa perhatian rakjat umumnja terutama dari golongan terpeladjar terhadap Angkatan Laut dapat dikatakan hingga kini masih kurang.

Tahun ini akan diadakan penerimaan untuk perwira 200 orang dan untuk anak buah biasa 1.500 orang. Malahan di Indonesia Timur ada perhatian lebih besar untuk masuk Angkatan Laut itu, misalnja untuk golongan rendahan, jaitu di Ampenan dan Flores, djuga di Timor.

Dinjatakan, bahwa untuk membentuk Angkatan Laut jang kuat terutama jang dibutuhkan ialah, bahwa kita harus mempunjai industri2 untuk keperluan itu sendiri. Dalam soal ini dinjatakan, bahwa misalnja untuk keperluan menambah alat2 modern dan kapal2, memang hal ini djuga termasuk rentjana, tapi soal itu tergantung pula dari keadaan diluar negeri.

Tugas Angkatan Laut.

Dinjatakan, bahwa tugas jang diberikan kepada Angkatan Laut permulaan ialah tugas polisionil dan membangun. Dalam kewadjiban diatas itu termasuk pemberantasan penjelundupan dan usaha pasifikasi misalnja ketika terdjadi Azis-affaire, pemberontakan di Ambon. Tugas berperang (defensi) pada tahun jl belum dapat didjalankan. Sekarang ini dapat dimulai dengan usaha tugas defensi itu dan tahun ini telah dibentuk djawatan penjapu randjau (mijnenvegers).

-Mengenai pemberantasan-

Mengenai pemberantasan penjelundupan2 dilaut dikatakan, bahwa dalam tahun 1951 sadja telah ditangkap dan diserahkan selandjutnja kepada pihak jang bersangkutan lebih kurang 850 kapal2 penjelundup. Barang2 jang tersangkut dalam penjelundupan itu terutama berupa bahan2 hasil bumi dari Indonesia keluar negeri dan jang masuk ke Indonesia, ialah barang2 luxe dan djuga mas. Penjelundupan kopra jang banjak dilakukan dari Sulawesi Utara ke Pilipina a.l. djuga disebabkan, karena kurangnja alat2 pengangkutan disana. Disamping itu kapal2 KPM terutama memuat kopra dari Coprafonds, sedang perusahaan2 pelajaran nasional jang sudah ada terutama memberikan perhatiannja kepada perhubungan pelajaran antara Djawa/ Sumatera dan Malaja jang banjak menghasilkan dollar. Penjelundupan ke Pilipina dari kopra itu djuga disebabkan, karena harga kopra di Pilipina jang djauh lebih tinggi dari harga kopra jang ditentukan oleh Fonds Kopra di Indonesia.

Barang2 jang dismokkel dari Sumatera ke Malaja adalah terutama karet, timah dan hasil bumi lainnja. Kapal2 penjelundup itu rata2 berukuran antara 10 ton hingga 150 atau 200 ton. Kapal2 penjelundup itu kebanjakan dipersendjatai sendjata ringan dan kalau dilihat menghadapi kapal ketjil sering2 melakukan tembakan2.

Guna membantu meringankan kekurangan alat2 pengangkutan dilaut di Indonesia, maka Angkatan Laut djuga menjediakan dua kapal transport masing2 besar 700 ton untuk membantu pengangkutan bahan2 hasil bumi dari satu kelain daerah. Tapi ini adalah termasuk tugas secundair. Sebab sebagai diketahui, tugas jang pertama ialah tugas polisionil, pasifikasi dan diwaktu jang achir ini djuga dengan permulaan tugas defensi.

Kini di Den Helder (Nederland) sedang menuntut peladjaran untuk perwira 60 pemuda jang terdiri dari tiga angkatan. Dalam tahun ini angkatan pertama diharapkan kembali ke Indonesia jaitu lebih kurang 20 orang.

Penataran Angkatan Laut di Surabaja (Marine Etablisement) sebelum perang dulu dapat membuat kapal penjapu randjau. Sekarangpun penataran Angkatan Laut tersebut dapat mengerdjakan pekerdjaan tersebut, tapi kesukaran terletak dalam soal alat2. Mengenai Nederlandse Militaire Missi bagian Angkatan Laut jang terdiri atas l.k. 100 orang di njatakan, bahwa hubungan antara Angkatan Laut dengan NMM baik sekali dan mereka bertindak sebagai instrukteurs.

Tentang kapal pemburu Gadjahmada dinjatakan, bahwa pekerdjaan pembetulan jang dilakukan oleh PAL di Surabaja atas kapal tersebut adalah sangat memuaskan dan kini kapal tersebut telah dapat berlajar kembali dengan ketjepatan sebagai biasa, sebagaimana telah dibuktikan dalam pelajaran2 diwaktu jang lalu dan ikut pula dalam manoevre disekitar kepulauan Karimundjawa baru2 ini. (Antara, 19/5-'52).

PERAJAAN PEKAN KANAK2 DI DJAKARTA RAYA

Sedjak hari Sabtu di Djakarta telah dilangsungkan perajaan Pekan Kanak2 jang telah dimulai dengan pembukaan resmi oleh ketua Panitya Pekan Kanak2, Nj.Arudji Kartawinata dan walikota Djakarta Raya Sjamsjuridjal melalui tjorong radio RRI pk. 10 pagi tepat, sedangkan pada waktu itu djuga dikelurahan2 oleh anak2 dari kelurahan2 masing2 dinaikkan bendera kebangsaan, jang dilandjutkan dengan berbagai permainan kanak2 dan perlombaan2.

Dibawah pimpinan Nj.Suwadji, serta njonja2 dokter2 dan Palang Merah Pemuda dirumah2 sakit telah dibagikan pula hadiah2 dan hiburan2 bagi anak2 jang sakit. Dirumah2 piatu pun dibagikan oleh panitia sekedar sokongan uang, buku2 tulis, gula2, potlod dll.

Sebagai kesan daripada perajaan Pekan Kanak2 ini jang baru pertama kali ini diadakan dapat dikabarkan bahwa boleh dikatakan "memuaskan", walaupun belum sempurna dan melihat wadjah anak2 jang dihibur boleh dikatakan sangat memuaskan.

Anggaran belandja Panitya Pekan Kanak2 adalah Rp.100.00.-, sedangkan uang masuk hingga hari ini ialah Rp.42.000.- dan ribuan sumbangan barang2 berupa mainan kanak2 dll. (Antara, 19/5-'52).

-KOMITE.....-

"KOMITE MELAWAN BAHAJA KELAPARAN"

Panitya Pusat 1 Mei 1952 untuk meneruskan aktiviteitnja dalam gerakan melawan bahaja kelaparan merasa perlu diadakannja satu bentuk organisasi jang dapat mengatur dan memimpin gerakan tersebut, jaitu satu "Komite Melawan Bahaja Kelaparan" jang bertudjuan mempersatukan seluruh rakjat dalam mengadakan usaha2 jang njata, untuk memetjahkan dan mengatasi kesukaran beras guna menjelamatkan rakjat dari bahaja kelaparan.
(Antara, 19/5-'52).

"HARI KEBANGUNAN NASIONAL"

"Hari Kebangunan Nasional" diperingati semalam di Istana Negara, jang dihadiri oleh hampir segenap anggauta kabinet, anggauta2 parlemen, wakil2 partai dan organisasi. Ki Hadjara Dewantara sebagai ketua panitya dalam pidato pembukaannja a.l. menjatakan, semoga Hari Kebangunan Nasional pada malam ini memberi kita semangat baru guna mengatasi segala kesukaran, baik jang berasal dari luar, maupun jang timbul berkembang didalam rumah kita sendiri

"Pernjataan Bersama" jang telah ditanda-tangani oleh 62 putjuk pimpinan partai dan organisasi (disamping itu ada beberapa jang tidak atau tidak bersedia) kemudian dibatjakan oleh anggauta panitya S.Rasjad.

Sebagai penutup berpidato Presiden Sukarno, jang antara lain menjatakan bergembira dan berterima kasih, bahwa Panitia Bersama telah memutuskan "menjatakan kesediaan untuk segera melaksanakan pembangunan nasional, dalam arti membangun sosial, ekonomi dan kebudajaan untuk kepentingan segenap rakjat", dan demikianpun akan "menggalang kesatuan sikap, program serta tindakan untuk melaksanakan demokrasi, untuk kesedjahteraan dan keadilan sosial, untuk menghapuskan perdjandjian2 jang merugikan rakjat, untuk kembalinja Irian Barat". Dalam hubungannja dengan ini Presiden peringatkan, bahwa persatuan menghendaki saling menghargai dan disiplin nasional, sedang keinginan "main menang" sadja, "main dominasi" akan menggagalkan segala maksud tersebut.

Pidato Ki Hadjar.

Ki Hadjar mengatakan, bahwa jang penting dari perajaan ini adalah pernjataan semua organisasi, termasuk partai2 politik, dalam mana kita sanggup membulatkan tekad serta menjatukan sikap dan tindakan guna mengatasi segala kesukaran dan bahaja jang mengantjam.

Sebagai penutup Ki Hadjar Dewantara memberi ingat, bahwa kita sekarang masih menghadapi bahaja jang memerlukan perdjuangan bersama, dan djuga disampingnja melaksanakan pembangunan disegala lapangan, sosial, ekonomi, pendidikan, pengadjaran, politik dan ketentaraan. Semoga Hari Kebangunan Nasional pada malam ini memberi kita semangat baru guna mengatasi segala kesukaran, baik jang berasal dari luar, maupun jang timbul berkembang didalam rumah kita bersama, kata Ki Hadjar.

Pernjataan Bersama dari partai2 dan organisasi memang mentjerminkan apa jang perlu untuk mentjapai hasil baik dalam kelandjutan perdjuangan kita jang sesulit dan seberat itu, jaitu kesatuan sikap, program dan tindakan. Demikian Presiden Sukarno jang berpendapat, bahwa meskipun tidak semua partai menanda-tangani Pernjataan itu, ia tetap menggembirakan, karena didalam-nja tegas dikemukakan kesatuan.

Perdjuangan kita akan lebih kuat dan berhasil, kata Presiden, bila sjarat persatuan itu dipenuhi.

Presiden menguraikan perkumpulan dan partai2 jang tumbuh diatas beginsel ini, mulai dulu sampai sekarang, dan katakan, bahwa tidak mungkin ada 17 Augustus 1945 djika tidak ada 20 Mei 1908 lebih dulu. Maka ia mengandjurkan pemuda dan pemudi lebih mengetahui sedjarah dan djasa2 pemimpin jang sudah wafat, agar tahu siapa Tjokroaminoto, Tjiptomangunkusumo, Kijai Dahlan, Setiabudi, Sutatmo Surjokusumo d.l.l.

-Tentang.....-

/Pidato Presiden.

Tentang perdjandjian dengan negara2 lain, Presiden Sukarno berkata, bahwa baik Uni Indonesia-Belanda, maupun beberapa ketentuan lain hasil K.M.B. dan perdjandjian lain apapun djuga, jang merugikan rakjat dan negara, harus diichtiarkan penghapusannja dengan djalan jang sesuai dengan deradjat negara, karena kita bernegara.

Mengenai Irian Barat, Presiden menegaskan, bahwa Irian Barat masih wilajah kita, dan harus dikembalikan mutlak kedalam kekuasaan kita. Manakala kita pada waktu ini menunda perundingan dengan fihak Belanda mengenai status Irian Barat, - menunggu selesainja pemilihan umum dinegeri Belanda - djanganlah ini diartikan, kata Presiden, bahwa kita menunda tuntutan nasional kita. (Antara, 19/5-'52).

NJ.PUDJOBUNTORO TENTANG PEMILIHAN UMUM.

Dihadapan para anggota PNI dan para undangan semalam Nj.Pudjobuntoro dari Kantor Pusat Pemilihan Umum di Djakarta dan anggota PNI jang aktif di Djakarta telah mengadakan tjeramah mengenai kesan2nja selama menindjau perdjalanan pemilihan umum di India sebagai anggota delegasi jang diutus Pemerintah kesana baru2 ini.

Pertemuan ini diusahakan oleh Dewan Propinsi PNI Sumatera Utara dan tjeramah Nj.Pudjobuntoro itu disertai kesempatan tanja-djawab.

Menurut Nj.Pudjo persiapan untuk mengadakan pemilihan umum jang rapi akan makan tempoh lama sekali. Lebih dulu rentjana undang2 pemilihan harus dimadjukan Pemerintah kepada parlemen dan sesudah parlemen menerimanja barulah didjadikan undang2.

Kemudian barulah diadakan pendaftaran dari penduduk jang berhak memilih dan dipilih dan ini tidak dapat dilakukan tjepat2.

Pemilihan umum di India, kata Nj. Pudjo, bolehlah dikatakan dilakukan sangat rapi. Ia katakan bahwa pegawai2 negeri disana telah dikerahkan dengan sepenuhnja untuk keperluan ini, disamping partai2 jang aktif melakukan kampanje buat pemilihan umum itu.

Katanja, walaupun dari 357 djuta penduduk India terdapat 80% jang butahuruf, tapi berkat persiapan jang sempurna itu pemilihan umum telah dapat berhasil dengan sebaiknja.

Atas pertanjaan apakah tjara pemilihan umum di India dapat dipergunakan di Indonesia nanti, Nj.Pudjo katakan, bahwa prinsipnja tentu tidak, karena ini sudah tertera dalam undang2 dasar negeri kita. Tetapi organisasinja dan tjara2 melaksanakannja banjak jang dapat ditiru.

Djuga tempat2 lain didaerah ini akan dikundjung Nj.Pudjo untuk keperluan jang sama. (Antara, 19/5-'52).

SOKONGAN UNTUK KAUM PENGANGGUR DIPERBESAR.

Penganggur jang telah terlatih akan dipekerdjakan untuk membikin sekolah2.

Mulai tanggal 1 Djuni jang akan datang Peraturan Menteri Perburuhhan No.33/1952, jang mengatur soal pemberian "upah darurat" sebagai pengganti "sokongan tambahan" kepada penganggur2 jang telah terlatih dan soal menambah sokongan kepada kaum penganggur jang telah tertjatat, akan berlaku.

Menurut peraturan lama, kaum penganggur jang dilatih dalam tempat2 latihan-kerdja atau dipelbagai instansi dengan mengerdjakan pekerdjaan seadanja dan semaunja - djadi mereka ini bukan penganggur 100% - tiap bulannja didalam kota2 besar mendapat "sokongan tambahan" maximum Rp. 120.- atau sokongan B.

Disamping itu ada sedjumlah kaum penganggur jang tidak terlatih. Mereka ini ditjatat didalam daftar dan menunggu kalau2 ada lowongan. Selama waktu menunggu itu mereka mendapat sokongan A, jaitu sedjumlah Rp.30.-

Dengan adanja peraturan baru, maka orang2 jang mendapat sokongan B itu akan mendapat "upah darurat" sebesar Rp.6.- sehari maximum dikota2 besar seperti di Bandung, Tjirebon dan sebagainja, dengan sjarat2, bahwa mereka itu harus mendjalankan pekerdjaan

-jang bersifat-

jang bersifat umum, jaitu suatu pekerdjaan jang telah direntjanakan oleh sesuatu badan otonoom, oleh desa atau instansi2 resmi.

Sokongan A dikota2 besar akan dinaikkan mendjadi Rp.60.- sebulan. Kepala Djawatan Penempatan Tenaga Djawa Barat menerangkan, bahwa kenaikan itu ialah untuk mentjegah merosotnja kemauan mereka akan bekerdja karena telah terlalu lama menunggu.

Usaha menempatkan tenaga mereka. Dalam triwulan pertama tahun ini djumlah kaum penganggur jang akan mendapat upah darurat itu adalah 1028 orang, sedang kaum penganggur jang tidak terlatih adalah 1998 orang. Menurut taksiran diseluruh Djawa Barat djumlah kaum penganggur itu kurang lebih 30.000 orang. Ongkos2 jang dikeluarkan untuk sokongan2 mereka selama 3 bulan itu adalah antara 2 dan 300.000 rupiah.

Mengenai penempatan tenaga mereka, diterangkan, bahwa sekarang telah ada maksud untuk mengerdjakan kaum penganggur jang telah terlatih itu dalam usaha2 pembikinan bangunan2 sekolah, terutama didaerah2.

Sekarang banjak djuga daerah2 jang telah menjediakan rentjana untuk pembikinan sekolah2 itu, tetapi belum bisa terlaksana,karena biajanja tidak tjukup. Dengan mengerdjakan kaum penganggur jang telah terlatih, jang akan tetap mendapat upah darurat dari Djawatan Penempatan Tenaga, maka badan2 otonoom didaerah2 hanja tinggal menjediakan orang2 jang akan memimpin mereka itu sadja.

Djuga diharapkan supaja penganggur golongan A, jang umumnja terdiri atas orang2 jang masih buta-huruh dan hanja sedia kerdja kasar sadja mendapat tempat. Kesukaran2 jang didjumpai sekarang, ialah banjaknja perusahaan seperti onderneming2 jang bukan menerima tenaga demikian, bahkan memetjatnja karena kebanjakan. Perusahaan2 kepunjaan orang2 demikian banjak2.

Achirnja Kepala Djawatan Penempatan Tenaga menunggu2 selesainja sentrale tempat latihan kerdja. Sebagian dari mesin2 jang berharga sudah tiba. Sangat diharapkannja supaja soal keuangan tidak mendjadi seret. (Antara, 20/5-'52).

KETUA DPRDS KOTABESAR MINTA MUNDUR.

Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Kota Besar Bandung, Th.W.Korompis, dalam suratnja jang ditudjukan kepada anggota2 DPRDS hari ini memadjukan permintaan mengundurkan diri sebagai ketua DPRDS.

Sebagai alasan dikemukakan, ialah bahwa karena seorang anggota DPRDS baru2 ini telah mengemukakan pendapatnja, bahwa ketua DPRDS sekarang harus diganti. Pendapat anggota ini menurut atjara akan dibitjarakan dalam sidang terbuka besok pagi.

Anggota jang mengemukakan pendapat seperti dimaksudkan diatas itu ialah Satjawisastra.

Seperti diketahui, Th.W.Korompis dipilih djadi ketua DPRDS sebagai ganti A.Zachri dari PNI jang djuga dengan "mendadak" telah mengundurkan diri, ketika sidang DPRDS meminta supaja susunan Dewan Pemerintahan Daerah Kota Besar Bandung harus diganti. (Antara, 20/5-'52).

KONGRES PERBUPRI KEDUA.

Pemimpin Umum Perbupri, Mr.H.Silitonga, dalam resepsi kongres kedua Perbupri di Medan tadi malam, antara lain2 menjatakan, bahwa sebab tidak bersatunja Perbupri dengan Sarbupri, adalah karena ketika diadakan hubungan antara kedua organisasi buruh itu untuk mempersatukannja tidak lama setelah kedaulatan diserahkan kepada Indonesia, Sarbupri memadjukan dua sjarat kepada Perbupri. Sjarat pertama, supaja Perbupri menerima anggaran dasar Sarbupri dan sjarat kedua, agar Perbupri masuk WFTU. Sjarat kedua inilah jang sukar diterima oleh Perbupri dan menimbulkan pertanjaan dikalangan Perbupri, katanja.

Djuga A.M.Dirdjo, utusan Perbupri dari Djawa Timur (Djember), menjatakan bahwa Perbupri tidak mau didjadikan alat dari pihak mana pun djuga, walaupun WFTU ataupun ICFTU. Karena, katanja

-selandjutnja,-

selandjutnja, diketahui bahwa WFTU adalah untuk memperkuat Sovjet Rusia,sebaliknja ICFTU untuk mengokohkan negara2 masing2 dalam menghadapi Sovjet Rusia.

Diterangkannja selandjutnja, bahwa Perbupri tidak segan pula untuk kerdjasama dengan siapa djuga, asal sadja guna kepentingan buruh dengan berdasarkan kenjataan2 jang meliputi buruh dan keadaan rakjat jang lesu sekarang ini. Ia menganggap bahwa belum masanja diadakan hubungan dengan pihak Moskow atau Amerika melihat kenjataan2 masjarakat kita jang lesu sekarang. Ditegaskannja pula bahwa karena berlainan pandanganlah maka Perbupri di Djawa tidak sedjalan dengan Sarbupri.

Perbupri dan perdjoangannja. Dalam pidatonja sebagai pembukaan resepsi kongres Perbupri kedua ini, Mr.H.Silitonga, setelah menguraikan dengan pandjang lebar perdjoangan Perbupri, jang didirikan dibulan Desember 1950, katakan, bahwa gerakan dari Perbupri tidak terbatas kepada Sumatera Utara sadja, akan tetapi Perbupri djuga adakan hubungan dengan serikat2 sekerdja jang sedjalan dengannja di Djawa, sehingga terbentuklah komisariat Perbupri di Djawa Barat dan Djawa Timur.

Perihal kenaikan upah, Mr.Silitonga terangkan, bahwa kenaikan upah tidak sadja harus ditindjau dari kenaikannja berupa uang, akan tetapi disamping itu adalah djuga penting adanja tjatu dengan pertjuma.

Tentang pendidikan anak2 buruh, dikatakannja, bahwa oleh Perbupri telah diadakan hubungan dengan PPK untuk pembukaan sekolah2 di perkebunan2, akan tetapi dalam hal ini dikemukakannja, bahwa PPK djuga terbatas tenaganja, bukan sadja dalam soal keuangan,djuga dalam soal tenaga. Karena itu dari pihak buruh diadakan hubungan dengan nadjikan, untuk mengadakan sekolah untuk anak2 buruh.

Koperasi simpanan. Mengenai koperasi, Mr.Silitonga terangkan, bahwa Perbupri sangat berhati2 dalam hal ini; pengalaman dimasa lampau menundjukkan, bahwa banjak koperasi (verbruikscooperatie) tidak berdjalan,karena soal keuangan.

Sebaliknja Perbupri menumpahkan perhatiannja kepada koperasi simpanan, guna mendidik buruh untuk menabung uangnja guna hari tuanja.

Dalam hubungan ini djuga dikemukakannja, betapa pentingnja koperasi sedemikian, istimewa dengan adanja penutupan kebon2 sebagaimana terdjadi permulaan tahun ini di Sumatera Timur.

Demikian antara lain uraian Mr.H.Silitonga.
Perbupri di Sumatera Timur mempunjai lebih kurang 100.000 orang anggota. (Antara, 19/5-'52).

PEMANDANGAN UMUM BABAK PERTAMA

Sidang ke-9. Rapat ke-9 pemandangan umum babak pertama atas keterangan pemerintah dilangsungkan hari Selasa pagi, dihadiri oleh 121 anggota, P.M.Wilopo, Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan dan Menteri Urusan Pegawai. Rapat mula2 dipimpin wakil ketua II Arudji Kartawinata, kemudian oleh wakil ketua I Mr.Tambunan. Berbitjara 7 anggauta, jaitu njonja Mangunpuspito (Masjumi), Sahetapy Engel (Demokrat), Utarjo (PKI), Abdullah Jusuf (PNI), Nieuwenhuysen (PIR), Moh.Padang (Progressief) dan Slamet Tirtosubroto (PNI). Dengan begitu jang berbitjara sudah berdjumlah 62 anggota.

Djalan pembitjaraan dalam rapat ke-9 adalah sbb.:

56. Njonja S.Mangunpuspito (Masjumi) menanjakan mengapa oleh pemerintah tidak disebut bentuk kabinet, apakah zaken - ataukah koalisi-kabinet dan apakah maksud jang terkandung, mengapa bentuk itu tidak disebut2 oleh pemerintah. Tidak nampaknja perbedaan dengan program jang lalu oleh pembitjara diartikan, bahwa kabinet jang sekarang meneruskan usaha2 dari kabinet jang lalu.

Selandjutnja pembitjara meminta perhatian pemerintah supaja dokter2 asing djangan dikirim ke pelosok2, supaja kedudukan para ahli ditindjau, supaja diperhatikan keperluan mereka akan alat2 perhubungan, dan minta diperhatikan pula perimbangan djumlah

-antara para-

antara para dokter dan para ahli2 obat2an, dan djangan penghematan dilakukan dalam usaha2 kesehatan rakjat.

Mengenai usaha2 pendidikan, pembitjara meminta coordinatie jang baik antara Djawatan PPK dan Djawatan Agama dan supaja diusahakan PB4 dapat lekas memberi hasil. Pun pembitjara mengemukakan adanja perbedaan perlakuan terhadap SR-Agama, antara lain bahwa murid2nja tidak diperbolehkan turut udjian ke S.M.P. Iapun meminta supaja Djawatan Pendidikan Masjarakat lebih mentjurahkan perhatian terhadap sendi2 kesusilaan Timur. Achirnja ia minta didjelaskan tugas Kementerian Agama dan supaja tahanan2 jang tidak bersalah dilepaskan.

57. Sahetapy Engel (ketua fraksi Demokrat) berbitjara tentang pemilihan, otonomi, keuangan, perekonomian, SOB, pendidikan, politik luar negeri dan persoalan antara Indonesia - Belanda.

Ia menghendaki, bahwa pemilihan umum Konstituante harus didahului dengan pemilihan dewan2 daerah, perlunja supaja pemilihan Konstituante itu berdjalan dalam suasana politik jang tenang, sebab sebelum terbentuknja dewan2 daerah, suasana menurut pembitjara tetap tegang, dan selain itu, pemilihan dewan2 daerah itu dapat dipergunakan sebagai pengalaman bagi pemilihan Konstituante dan parlemen.

Mengenai pembentukan daerah2 otonom pembitjara berpendapat, bahwa harus didasarkan kepada undang2. Dalam hubungan ini ia kemukakan keruwetan di Indonesia Timur berhubung dengan adanja undang2 no. 44 dari NIT jang sampai kini sjah dan undang2 no. 22 R.I. jang menurut hukum tidak berlaku di NIT, tetapi jang menurut pembitjara atjap kali dipergunakan, maka pembitjara bertanja, berdasarkan apa daerah2 itu nanti diberikan hak otonomi, dan djikalau dalam menentukan hubungan-keuangan antara pusat dan daerah-otonom oleh pemerintah tidak ditunggu undang2nja pokok, pembitjara bertanja bagaimana tjara pelaksanaannja. Dan oleh karena itu menurut pembitjara djalan satu2nja ialah membikin undang2 pokok dan hendaknja rentjananja segera diadjukan kepada parlemen. Selandjutnja ia tanjakan atas dasar apa pembagian Sulawesi djadi 13 daerah, Maluka djadi 3 daerah dan bagaimana penjelidikan pembagian daerah Sunda Ketjil. Selandjutnja ia bertanja berapa kader2 pegawai jang sedang disiapkan, dari mana asalnja, berapa tiap tahunnja, dimana kursus2nja, mengapa hanja pegawai pindahan dari Djawa keseberang jang mendapat toelage2 istimewa.

Mengenai program perekonomian pembitjara bertanja: Apakah kepada bonafide importir2 Indonesia diberi kemungkinan dan bantuan untuk mengambil bagian dalam pesanan-miljunan dari pemerintah, berapa % dari pesanan itu jang sudah melalui importir2 bangsa Indonesia, apakah pesan2an dilakukan dengan koordinasi ataukah oleh kementerian2 tersendiri, dan badan mana jang kontrole? Bagaimana nanti perbandingan antara kapital asing dan kapital aslu dalam usaha perindustrian, bagaimana hasil Panitya Industrialisasi, dan bagaimana pembagian modal jang disediakan pemerintah untuk industri besar, menengah dan ketjil? Bagaimana koordinasi antara Djawatan Transmigrasi dari Kementerian Sosial dengan BRN?

Kemudian mengenai keamanan pembitjara meminta dihapuskannja keadaan SOB untuk hampir seluruh Indonesia dan minta supaja tawanan2 bekas RMS segera diadili.

Dalam menindjau soal politik luar negeri, ia berpendapat, bahwa mengenai perdjandjian dengan Djepang terlebih dulu harus ditentukan sikap terhadap perdjandjian Frisco, dan ia ingin mengetahui bagaimana nanti sikap kabinet kerdja sama ini, karena pendirian Masjumi berlainan dengan pendirian PNI mengenai Frisco.

58. Utarjo (PKI) mula2 menjatakan kegembiraannja, bahwa pemerintah dalam pemetjahan soal keamanan melihat, bahwa soalnja jang primair ialah sosial ekonomia. Pembitjara mengandjurkan supaja SOB segera ditjabut. Tentang pemilihan umum ia minta supaja semua lapisan masjarakat harus turut, meskipun jang buta huruf dan memperingatkan pemerintah, bahwa pemilihan umum akan merupakan suatu karikatuur, djika berlaku dibawah SOB. Selandjutnja ia minta supaja dalam usaha mendemokratiseer pemerintah2 daerah, hendaknja ditjabut I.G.O., I.G.O.B. undang2 no. 44/NIT dan penindjauan kembali undang2 no. 22, sedang dalam pembentukan otonomi hendaknja

-selain.....-

selain memerlukan penindjauan ekonomis ialah penindjauan etnologisch. Pada pokoknja menurut pembitjara ialah bahwa pemberian hak otonomi djangan sampai berarti pemberian beban kepada daerah. Pembitjara mengemukakan pentingnja penentuan penghasilan pamong desa sebagai usaha menghilangkan adat2 feodal dan mengeritik pemerintah jang kurang memberikan bimbingan kepada desa.

Disamping perlunja pembersihan dikalangan alat2 sipil, pembitjara pun mengemukakan perlunja hal tersebut dilakukan dikalangan tentara. Dalam hubungan ini pembitjara mensiteer tulisan Kolonel Nasution jang maksudnja menghendaki supaja tentara kembli mendjadi tentara rakjat. Ia terangkan, bahwa partainja mengakui, bahwa tidak semua tentara anti-rakjat, bahkan sebagian paling besar tidak anti rakjat, lebih dari 90% anak tani, buruh, pedagang, tetapi jang oleh KMB lalu diubah mendjadi tentara-polisi, demikian pembitjara.

Kemudian sebagai djawaban atas pidato Zainul Arifin (Masjumi) jang menjinggung soal2 affaire Madiun, pembitjara membatjakan statement partainja jang berisi pembelaan terhadap affaire tersebut.

Achirnja pembitjara dalam menindjau soal perburuhan mengemukakan, bahwa tindakan Menteri Perburuhan Tedjasukmana dalam kabinet Sukiman, menurut pembitjara tidak menguntungkan kaum buruh dan menanjakan bagaimana pelaksanaan program pemerintah nanti dalam perburuhan.

59. Abdullah Jusuf (PNI) minta supaja tahanan2 selekasnja diselesaikan, diantaranja Jacob Siregar dan Saleh Umar jang sudah 2½ tahun ditahan tiada dengan ketentuan. Selandjutnja pembitjara minta supaja pemerintah melakukan kontrole terhadap korupsi dan main sogok jang menurut pembitjara sudah begitu mendjadi umum, sehingga dilakukan dengan terang2an sadja. Achirnja ia memintakan perhatian pemerintah tentang gedung Taman Siswa di Simalungan jang sampai kini masih dibuat asrama tentara, pada hal perguruan tersebut membutuhkan gedung.

60. Nieuwenhuysen (PIR) minta ketegasan pemerintah tentang tjara2 melaksanakan programnja. Berhubung dengan belum disampaikan anggaran belandja maka menurut pembitjara parlemen belum dapat mengadakan penelitian tentang beleid pemerintah, tjuma ia menanjakan, bagaimana nanti pemerintah menutup kekurangan dalam anggaran belandja itu. Anggaran belandja jang chronisch menundjukkan adanja kekurangan, menurut pembitjara buruk pengaruhnja terhadap koers uang dipasaran dunia, dan supaja koers uang rupiah stabil, maka menurut pembitjara pemerintah harus berusaha mentjapai keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan jang hanja didasarkan pada penerimaan padjak menurut pembitjara opportunistis, dan ia menanjakan bagaimana hasil pekerdjaan Panitya Padjak jang diserahi menindjau sistim padjak baru.

61. Mohamad Padang (Progressief) tidak gembira melihat susunan kabinet, karena menurut pembitjara, komposisi itu adalah kristalisasi dari kehendak diparlemen, jang hakekatnja merupakan kompromi antara kehendak jang tidak menjukai KMB dan jang pro KMB, sehingga dengan begitu menurut pembitjara susunan itu hakekatnja mengandung pertentangan2.

Selandjutnja pembitjara memusatkan pembitjaraannja pada soal2 Maluku, jang ia pintakan supaja segera mendapat hak otonomi seluasnja.

Pembitjara minta perhatian pemerintah terhadap: 1. bahwa untuk keperluan daerah Maluku hanja disediakan kapal sebuah sadja besarnja lk.100 ton, bahwa di Maluku hanja ada 3 dokter, bahwa di Banda tidak ada bidan, bahwa Maluku hanja sekali seminggu didatangi kapal KPM, bahwa pembagunan perumahan hanja mengenai kepunjaan pemerintah sadja.

62. Slamet Tirtosubroto (PNI) pembitjara terachir dalam rapat ke-9 memusatkan pidatonja pada soal2 kemakmuran, memadjukan pertanjaan antara lain sbb.: Usaha apa jang akan dilakukan pemerintah supaja export bahan2 mentah dilakukan oleh perusahaan2 nasional? Berapa prosen dari pendapat tjukai adalah tjukai dari export produksi rakjat?

-Tentang.....-

Tentang pemakaian modal asing ia andjurkan, bahwa pemerintah harus waspada, memperlipat-gandakan hasil bahan makanan harus disertai merendahkan harga barang import, dalam memadjukan koperasi harus ditjari pasar dari hasil2 koperasi dan mengobarkan semangat menabung. Ia minta keterangan pemerintah, bagaimana mengatasi pertentangan antara hakekat kebutuhan pengusaha nasional dan koperasi disamping pula adanja NV2 raksasa. Ia minta supaja "historisch recht" dalam meminta idjin membuka trajek perhubungan jang kini umumnja ada pada pengusaha2 asing ditjabut dan memberikan faciliteiten kepada pengusaha2 nasional. Achirnja mengenai pertanian ia minta supaja anggaran belandja djangan terlalu sedikit, begitu djuga anggaran belandja transmigrasi dan minta supaja dalam usaha mengadakan persediaan beras dilakukan kontrol setadjam2nja.
(Antara, 21/5-'52).

PERUBAHAN MENGENAI TJUKAI TEMBAKAU

Untuk rokok2 buatan tangan.

"Antara" Semarang memperoleh berita, bahwa mulai 1 Djuni jang akan datang tjukai tembakau untuk rokok2 buatan tangan dipungut atas dasar harga buat sigaret kretek, kelembak menjan dan lain2 5 sen sebatang dan rokok daun (strootjes) 2½ sen sebatang.

Peraturan tersebut dilakukan sambil menunggu dan mendahului akan peraturan tjukai-tembakau baru, jang kini kabarnja sedang direntjanakan, berhubung adanja kesukaran2 jang dihadapi oleh industri rokok kretek terutama dalam soal bahan2 tjengkeh misalnja (Antara, 20/5-'52).

HASIL UAHA SOSIAL PANITYA 1 MEI KOTA PALEMBANG.

Oleh Panitya 1 Mei kota Palembang bagian aksi dalam lapangan sosial sudah disampaikan kepada jang berhak menerimanja sedjumlah Rp. 10.000, jaitu sebagai hasil pemungutan derma jang dilakukan oleh panitya tersebut.

Hasil aksi sosial ini diberikan kepada korban gempa bumi di Ma Aman 50% dan kepada korban bahaja gadjah di Ketaun 50%.

Sementara itu hasil jang berupa pakaian2, piring mangkok dan lain2 alat rumah tangga belum dapat diperhitungkan, karena sedang dikumpulkan.

Wang Rp. 10.000 tersebut sudah disampaikan pada Djawatan Sosial Propinsi untuk diteruskan kepada korban2 jang dimaksud itu. (Antara, 20/5-'52).

CORPS MUSIK TT II DIRESMIKAN.

Oleh Panglima TT II Overste Bambang Utojo, kemarin sudah dilakukan pengresmian dan pelantikan dari corps musik TT II, dengan bertempat ditanah lapang belakang benteng.

Hadir pada pengresmian ini undangan2 baik militer maupun sipil.

Sesudah pelantikan tersebut, corps musik ini mengadakan pawai keliling kota, dengan memperdengarkan lagu2nja untuk memperkenalkan diri pada masjarakat kota Palembang. (Antara, 20/5-'52).

PRESIDEN MENERIMA DUTA BESAR INDIA.

Presiden Sukarno kemarin pagi telah menerima kundjungan duta-besar India Bhagwat Dayal di-Istana Merdeka. Pada kesempatan itu duta-besar India telah memperkenalkan kepada Presiden anggota parlemen India Nityananda Kanungo, jang selama International Rice Conference di Bandung baru2 ini, telah mengetuai delegasi India.

Kanungo menjampaikan kepada Presiden Sukarno sebuah buku bergambar tentang tjandi2 di Orissa dan tiga helai pakaian tenunan tangan.
(Antara, 21/5-'52).

MINISTERIE VAN OORLOG 's-Gravenhage, 17 Maart'49.
HKGS
Sectie G 3 B
No: V-702-2/49 ZEER GEHEIM **ZEER GEHEIM**
Bijl: ----
Onderwerp: Rasono Brugman

Vol...
19 MRT 1949
ACD 579000

B

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 28 October 1948, No. 47729, moge ik U het navolgende berichten. 664

Een dezer dagen bleek, dat bedoelde Thelma Brugman+) in November 1948 door de Centrale Personeelsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken als kantoorkracht was opgegeven aan het Ministerie van Oorlog, waar zij sedert 1 December 1948 in losse dienst is geweest. Nu niet meer?

Heden wordt mij bericht dat haar man Raden Mas Rasono werkzaam zou zijn bij de Afd. Rechtsherstel (?) van het Ministerie van Justitie te 's-Gravenhage.

Genoemde ministeries zijn door mij niet ingelicht.

Typ:MvdH
Coll:

Het Hoofd Sectie G 3 B,
De Luitenant-Kolonel,

(M.P.Kokje)

AAN:
Hoofd C.V.D.,
Javastraat 68,
's-G R A V E N H A G E.

+) Is op politiek gehad by [illegible] niet [illegible], althans [illegible] 47729 in OD 664.

No. 4062 c-'47.
Uw brief: No. 45962 d.d. 23-9-'48.

Amsterdam, 12 October 1948.

Verge
16 OCT. 1948
ACD 47729

Onderwerp: Republikeinse Voorlichtingsdienst.

(K)

G E H E I M .

In antwoord op bovenaangehaald schrijven wordt medegedeeld, dat tot voor kort aan de Oude Zijds Achterburgwal 185, alhier, gevestigd was het secretariaat van de Perhimpoenan Indonesia.
Naar werd vernomen, was het in verband met de minder gunstige financiële toestand van de vereniging niet meer mogelijk de huur van het kantoor, waarin het secretariaat, alsmede de republikeinse voorlichtingsdienst, was gevestigd, te bekostigen.
Het secretariaat van de Perhimpoenan Indonesia, alsmede de republikeinse voorlichtingsdienst, werd toen overgebracht naar de woning van de secretaris van deze vereniging Raden Mas RASONO, geboren te Soerakarta, 22 Juni 1913, student Indisch Recht, gehuwd met Thelma BRUGMAN, geboren te Madioen, 26 Augustus 1909, wonende Lodewijk Boisotstraat 2-I, alhier.
Zonder dat hieromtrent zekerheid kan worden verkregen, kan worden aangenomen, dat RASONO thans hoofd is van de republikeinse voorlichtingsdienst, of althans daarin een zeer vooraanstaande functie vervult.
Niet kon worden vastgesteld, of bij deze voorlichtingsdienst nog andere personen werkzaam zijn, terwijl, voor zover kon worden nagegaan, geen andere personen bij RASONO inwonen.

O. 2.

UITGEBOEKT

28 October 8.

BX.47729.

VIII. TZ.3.

G E H E I M.

A-181/48.
14 September 1948.
Rep. Indon. Inf. Bureau.

#/57988

Met verwijzing naar Uw in margine genoemd geheim schrijven heb ik de eer U mede te delen, dat zowel het secretariaat van de "Perhimpoenan Indonesia" als de "Republikeinse Voorlichtingsdienst" gevestigd waren in perceel Oude Zijds Achterburgwal 185 te Amsterdam.

Tengevolge van de minder gunstige financiële toestand van de P.I., was deze niet langer in staat de huur voor het pand te bekostigen. De "Perhimpoenan Indonesia" werd daarop evenals de "Republikeinse Voorlichtingsdienst" overgebracht naar Lodewijk Boisotstraat 2 I te Amsterdam, waar woonachtig is de secretaris van de "Perhimpoenan Indonesia", Raden Mas Rasono, geboren 22-6-1913 te Soerakarta, student Indisch Recht. Hij is gehuwd met Thelma Brugman, geboren 26-8-1909 te Madioen.

Hoewel bij het ingestelde onderzoek hieromtrent geen zekerheid werd verkregen, kan worden aangenomen, dat R.M.Rasono thans het hoofd is van de "Republikeinse Voorlichtingsdienst".

Geldgebrek belemmert de activiteit van deze Voorlichtingsdienst.

HET HOOFD VAN DE DIENST,
Voor deze:

J.G.Crabbendam.

Aan de Heer Hoofd der Afd.III B
van de Generale Staf,
Juliana-kazerne,
Zlingendaal,
te
's-G R A V E N H A G E.

UITGEBOEKT

23 September 8.

B. 45962.

VIII. TZ.4.

GEHEIM.

a/47729

Republikeinse
Voorlichtingsdienst.

Volgens een ontvangen mededeling zou het bureau van de Republikeinse Voorlichtingsdienst, dat gevestigd was aan de O.Z.Achterburgwal 185 te Uwent, thans zijn overgebracht naar de Lodewijk Boisotstraat 2 1 te Amsterdam.

Ik mage U verzoeken mij te willen doen berichten of het bedoelde bureau inderdaad aan laatstgenoemd adres is gevestigd, waarbij ik tevens gaarne in kennis zal worden gesteld met de namen, personalia en verdere gegevens van de personen, die bij dit bureau werkzaam zijn.

HET HOOFD VAN DE CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST,
Namens deze:

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie,

AMSTERDAM.

L.L.van Laere.

MINISTERIE VAN OORLOG
HKGS
Sectie G 3 B
No: A-181/48
Bijl: ----
Onderwerp: Rep.Indon.Inf.Bureau

's-Gravenhage, 14 Sept. 1948.

B - C .

Volgno.
16 SEP. 1948
ACD/ 45962

Voor de goede orde bericht ik U dat het adres van het in margine genoemde bureau gewijzigd is van O.Z. Achterburgwal 185, Amsterdam (C) in Lodewijk Boisotstraat 2 I, Amsterdam (W).

Typ:MvdH
Coll: AR

HET HOOFD SECTIE G 3 B,
De Luitenant-Kolonel,

M.P.Kokje.

Aan:
Hoofd Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
's-G R A V E N H A G E.

Groot succes in Parijs voor Indonesiërs

Progressief Parijs geniet van Indonesische volksdansen

Een rode Parijse voorstad onthaalde de Indonesiërs

(Van onze correspondent)

IN de eerste helft van deze maand heeft een groep Indonesische arbeiders en studenten onder leiding van de Perhimpoenan Indonesia hier te lande een bezoek gebracht aan Parijs. Zij gingen op uitnodiging van de Internationale Democratische Federatie van Vrouwen, die ter gelegenheid van de door haar georganiseerde Internationale Vrouwententoonstelling, de Indonesiërs verzocht heeft een uitvoering te geven van Indonesische volksdansen en zang. Deze eerste kennismaking van vooral de progressieve Parijzenaars met de Indonesische cultuur is verrassend geweest.

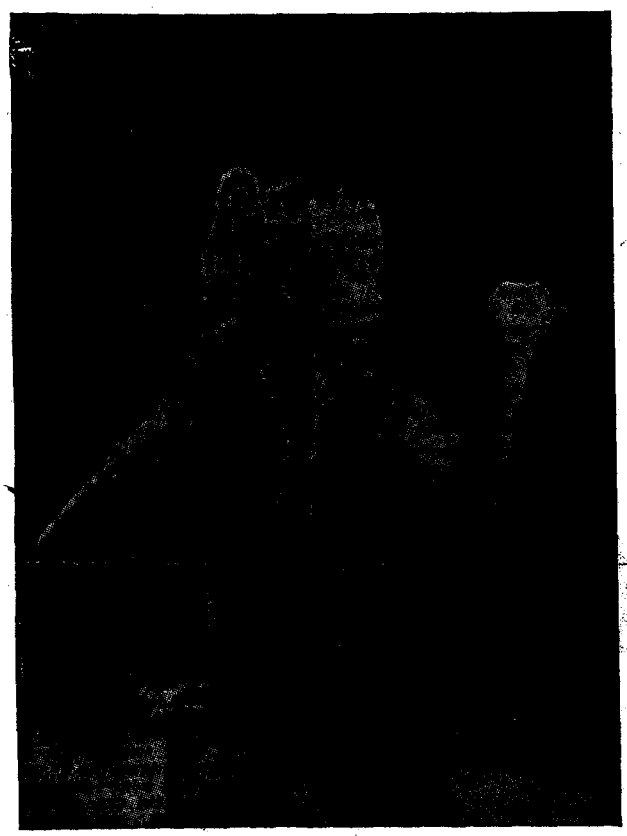

VOORAL DE KLASSIEKE JAVAANSE DANSEN trokken de aandacht van de Parijzenaars. Geboeid keken zij naar de gevechtdans tussen een Javaanse held en een krijger „van overzee". Ook de ontvoering van Dewi Sinto, de vrouw van koning Rama vond veel bijval. Hierboven een gracieuse Javaanse danseres in de rol van Dewi Sinto.

Gasten van rood Saint Denis!

BEHALVE de gasten van de Internationale Vrouwenfederatie waren de Indonesiërs ook gasten van de gemeente Saint Denis, één der grootste voorsteden van Parijs met een bevolking van 60.000 zielen. Saint Denis is een zeer progressieve stad. De burgemeester Gillot, is een metaal-arbeider geweest, een bekende Franse revolutionnair en lid van het Centrale Comité van de Communistische Partij. Zijn vrouw, Simone Gillot — eveneens metaalarbeidster — is voorzitster van de afdeling Saint Denis van de grote vrouwenorganisatie, de „Unie van Franse Vrouwen". Beiden zijn zeer geziene figuren in de oude historische stad Saint Denis, waar Frankrijks koningen begraven liggen.

Het waren vooral de Gillots, die gezorgd hebben, dat het de Indonesiërs aan niets ontbrak. Bij hun aankomst werden zij officieel door de burgemeester in het stadhuis ontvangen.

DE eerste uitvoering gaven de Idonesiërs op een gala-avond van de Internationale Vrouwenfederatie in één van de grootste theaters van Parijs, de „Salle Pleyel", tezamen met delegaties uit vele andere landen. Vooraanstaande personen waren aanwezig, o.a. Maurice Thorez, Jeanette Vermeersch, Madame Coton, Marie Claude Vaillant-Couturier en vele anderen.

Toen de Indonesiërs optraden, was de gehele zaal als het ware gefascineerd door de Indonesische dansen en muziek. Een donderend applaus brak na de uitvoering los en men riep langdurig: „Bis! Bis! Bis!" Een waarlijk groot succes voor de Indonesiërs.

Een andere grote uitvoering werd gegeven in het gemeentelijke theater van Saint Denis, georganiseerd door de Unie van Franse vrouwen. Ook daar was de zaal geheel vol en de toeschouwers, hoofdzakelijk arbeidsters, hoefden geen entreeprijs te betalen. Een Indonesische bracht onder groot enthousiasme van de aanwezigen een groet van de Indonesische vrouwen over. Langdurig applaus en enthousiaste uitroepen gaven blijk van grote waardering van de Franse arbeiders, niet alleen voor de Indonesische dansen en muziek, maar ook voor de onafhankelijkheidsstrijd van de Indonesische Republiek.

Een aardige bijzonderheid valt er nog te melden. Om de kosten voor deze uitvoering te dekken moest men in de pauze een grote hoeveelheid ijsjes, suikertjes en chocolaadjes verkopen. Simone Gillot, de burgemeestersvrouw, zwoegde het hardst van allen om zoveel mogelijk van het snoepgoed te verkotwee ijslolly's betaald had, maar pen. Toen zij een arbeider, die voor één gaf, riep de man: „Hé, kom eens gauw terug. Ik heb voor twee betaald en je geeft mij maar één. Hoe is dat nu?"

Lachend verontschuldigde Simone zich en de arbeider knikte tevreden: „Goed, goed, goed." Dit typeert de grote verbondenheid tussen deze burgemeestersvrouw en het werkende volk. De arbeiders gingen geheel ongedwongen met haar om. Zij was immers ook metaal-arbeidster en één van hen!

Belangstelling van Russische ambassade

EEN groot succes voor de Indonesiërs was ook de uitvoering op de tentoonstelling zelf. Er was enorm veel belangstelling. Leden van de ambassade der Sovjet-Unie, waaronder de echtgenote van de ambassadeur, hebben de voorstelling bijgewoond. Na afloop heeft de echtgenote van de ambassadeur de leider van de Indonesische groep begroet en haar waardering uitgesproken over hetgeen door de Indonesische delegatie werd vertoond. Zij wenste de delegatie tevens veel succes toe.

Een komische noot vond plaats op de sluitingsavond van de tentoonstelling. Alle delegatieleden, uit de aard der zaak allen vrouwen, moesten op het podium plaats nemen, teneinde bloemen en geschenken van Franse vrouwen namens hun organisaties in ontvangst te nemen. Daar intussen de Indonesische delegatie vertrokkens was op de leider na, was deze laatste verplicht om als enig mannelijk persoon temidden van een zee van vrouwen uit verscheidene delen van de wereld op het podium plaats te nemen. Bij het overhandigen van de bloemstukken werden de delegatieleden naar Franse gewoonte gekust. Of hij wou of niet, onze Indonesische vriend moest een paar dikke zoenen in ontvangst nemen en zelf ook teruggeven, onder groot applaus van de aanwezigen!

Zo eindigde een succesvolle tocht van de Indonesische culturele groep van de Perhimpoenan Indonesia naar Parijs. Zij bracht een nauwere kennismaking en contact tussen de progressieve Internationale Democratische Federatie van Vrouwen met een ledental van 80 millioen en waarvan de Indonesische Vrouwenfederatie, Kowani, lid is en jonge vertegenwoordigsters en vertegenwoordigers van de Indonesische Republiek. Ongetwijfeld zal deze kennismaking een belangrijke bijdrage zijn tot versteviging van de vriendschap tussen de volkeren en tot steun van de vrijheidsstrijd van het Indonesische volk.

I.D.
D E N H A A G.

Doss.13/476.

G E H E I M.

(K) 48 B

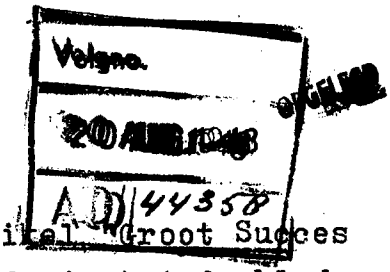

Hierbij doe ik U toekomen het artikel "Groot Succes in Parijs voor Indonesiërs", voorkomende in het dagblad "De Waarheid" van Zaterdag, 24 Juli 1948.

De in dit artikel afgebeelde Javaanse danseres is Mejuffrouw Loeti SOESILO uit Amsterdam, verloofde van SOERIPNO, vertegenwoordiger der Republiek Indonesië te Praag, over wie reeds herhaaldelijk werd gerapporteerd.

Verzonden op 17 Augustus 1948.
aan: C.V.D.
C.v.P.

N O T I T I E

0D664

BUREAU B
30-3-48

Volgnr. OPGELEGD
15 MRZ. 1948
ACD/3/321

Uit doorgaans goed ingelichte bron vernam ik onderstaande, dat in December 1947 ontvangen werd van de Indonesische Republikeinse Voorlichtingsdienst in Nederland.

X "Mevrouw SOEBANDRIO, de vrouw van het hoofd van de Rep. Voorlichtingsdienst in Nederland, houdt lezingen voor de Nederlandse Vrouwenbeweging, een communistische cover-organisatie. Deze lezingen houden meer intimidatie dan voorlichting in. De kantoren van de Voorlichtingsdienst zijn gevestigd in het gebouw van de Perhimpoenan Indonesia.
De P.I. staat wederom in nauw contact met de C.P.N. De publicaties van de Rep. Voorlichtingsdienst in Nederland worden gestencild door een Indonesische communist, die zowel lid is van de P.I. als van
/hij de C.P.N., terwijl/tevens relaties onderhoudt met de E.V.C.
De Rep. Voorlichtingsdienst te Amsterdam is evenzeer onder communistische invloed als de zusterdienst in Indonesia."

8-3-48 LP

C.B. 2393 - 50.000 (A) 30543 - '46

Notitie van B VIII van het schutblad 1/4

ACD. De gegevens in dit bericht vermeld, zijn onze gegevens. Komen voor in rapp. over republiekeinse Voorlichtingsdienst dat hier is opgemaakt en dat naar Indie is gezonden en in het kort opgenomen in een Nefisrapport. Reeds met C besproken.

AFSCHRIFT.

INDONESIAN INFORMATION.

Issued by

THE INFORMATION DEPT., INDONESIAN OFFICE, LONDON.

3rd March, 1948 Vol. 2, No. 18

: :

SUPPLEMENTS
---oOo---

Page One to Page Nineteen — Verbatim Report of the Two Hundred and Fifty First Meeting of the Security Council At Lake Success.

Page Twenty — Constitution of the Plebiscite Movement of the Republic of Indonesia

: :

For further copies apply to: 16 Rutland Court, Knightsbridge, London, S.W.7.

Kensington 2389

HCD/3

Dit kan wel worden opgeborgen in 664

Dit stuk is een afschrift van de 1ste bl. van een uitgave van de Rep. Voor. Dienst te London. De inhoud van het gehele nummer was niet van direct belang. Overland mededeling van J.D. Den Haag.

BVIII 5/4

No. 25 19th January, 1948.

MERDEKA

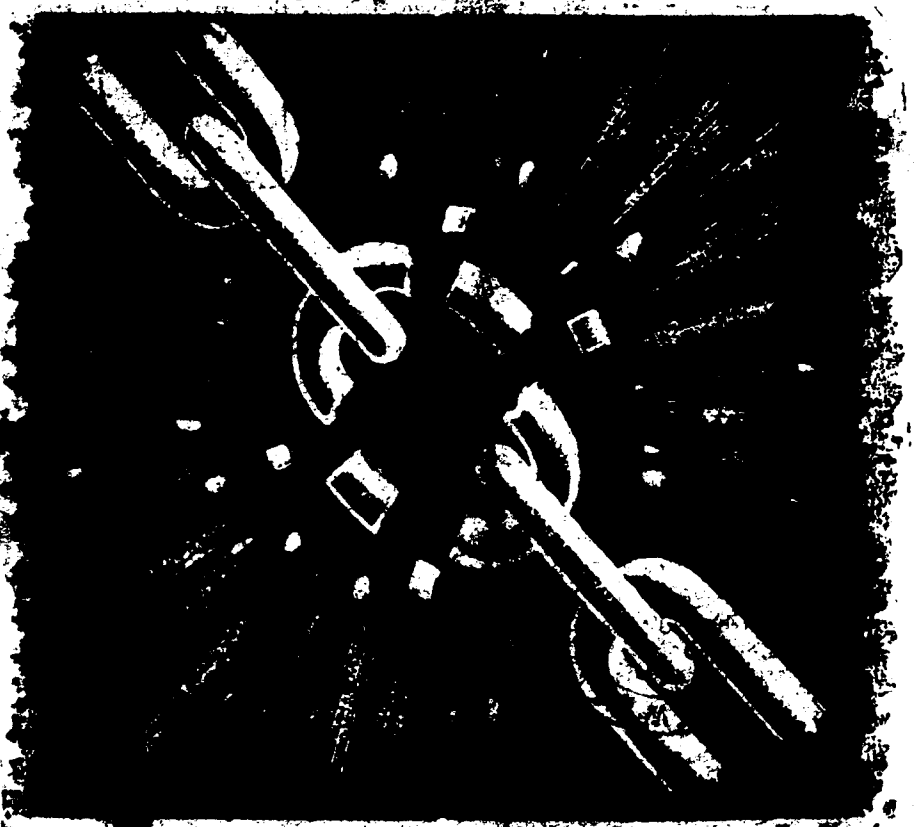

ISSUED BY

INDONESIAN INFORMATION SERVICE

C/o CONSTITUTION HOUSE, CURZON ROAD,

NEW DELHI, INDIA

GRAM: "JAWAPEN" Tel. No. 7111 Ext: 194

15
AGUSTUS
TRIMA KASIH SEBUAH
SELAMAT HARI-RAJA
KEMERDEKAAN
KITA BERDJUANG TERUS
UNTUK PERDAMAIAN
DUNIA

I.D.
D E N H A A G.

BUREAU B
14-11-47
OPGELEGD

Volgno:
12 NOV. 1947
ACD 24341.

Doss.13/370/8.

G E H E I M.

PD 4164

Van betrouwbare zijde werd vernomen, dat SOERIPNO, Secretaris-Generaal van de Indonesische Republikeinse Voorlichtingsdienst te New Delhi, ongeveer 2 weken geleden in Londen verbleef.en vermoedelijk aldaar thans nog aanwezig is. Hij is naar Engeland gegaan om contacten op te nemen, alsmede propaganda te voeren voor de Republiek Indonesia.

11/11

Verzonden op 11 November 1947
aan: het Hoofd van de C.V.D.

1 afd 16

I.D.
D E N H A A G.

Doss. 13/370/7

Volgno.
8 NOV. 1947
ACD/ 22930.

G E H E I M.

Hierbij wordt toegezonden afschrift van publicatie No.11 d.d. 24 October 1947, uitgegeven door de Republikeinse Voorlichtingsdienst te Amsterdam.

BUREAU B
11-11-47

Verzonden op 6 November 1947
aan: het Hoofd van de C.V.D., alhier.

REPUBLIC OF INDONESIA.

INFORMATION SERVICE

185 O.Z.Achterburgwal, Amsterdam (Holland)
phone 44459.

Publications of the Ministry of Information.

Press Reviews, etc.

No.11.

24th. October 1947.

TEXT OF THE INTERIM REPORT SUBMITTED TO THE SECURITY COUNCIL BY THE CONSULAR COMMISSION.

1. Although investigations cannot be regarded as complete until reports can be received from all military observers. Commission has unanimously reached certain definite and inevitable conclusions after visits by members to eleven different Dutch and Indonesian controlled areas in Java and Sumatra since the Commission began its work on September 1. In view of the urgency of the problem we think that these should be transmitted to you without delay and very concisely for your advance information.

2. Advances by Netherlands troops between July 20 and August 4 were in the nature of spearheads and some fighting occured. While the main bodies of Republican troops in most areas retreated, considerable numbers of Republican troops remained between the spearheads in some areas and guerillas remained in all areas. The Indonesian scorched earth policy and other disturbances, including looting and heavy loss of life especially of Chinese, were intensified between and behind the spearheads during and after the Dutch advance. On August 29 the Netherlands East Indies Government declared its intention to complete restoration of law and order and the complete disarmament and winding up of all armed organisations opposing the Netherlands East Indies authority within a demarcation line covering Dutch advances positions. The Indonesians did not accept the Dutch demarcation line. The Dutch line entailed patrol and other activities which were regarded by the Indonesians as hostile movements. Patrol clashes and sniping results with diminution notwithstanding the cease fire order.

3. We find that the cease fire order is not fully effective, and that casualties and damage continus and that this state of affairs is due in the main to the situation described above. So long as this situation continues, it will be impossible to secure anything like a complete observance of the cease fire order.

4, We have so far been unable to discover any practical interim measures which would secure a more effective observance of the cease fire order or reduce casualties.

5. As the work of the Commission is not yet completed, it is requested that these advance conclusions may be regarded as confidential.

6. Consular Mission hopes to complete written report on or about September 30.

(Dated) September 22, 1947.

By a unanimous decision of the Security Council, it was decided

to ignore paragraph 5 of this report.

::

SPEECH DELIVERED BY MR.PALAR, REPRESENTATIVE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AT THE TWO HUNDREDTH AND EIGHTH MEETING OF THE SECURITY COUNCIL,HELD AT LAKE SUCCESS ON TUESDAY,7th.OCTOBER,1947.

The interim report drawn up by the Consular Commission appointed to supervise the cease fire order in Indonesia is a document both realistic and pessimistic. As the result of observations made in eleven areas, the Commission speaks of having reached "certain definite and inevitable conclusions."

These conclusions are: Firstly, that it is impossible to secure anything like complete observance of the cease fire order.Secondly,that the Consular Commission has so far been unable to discover any practical interim measure which could secure a more effective observance of the cease fire order or reduce casualties. These conclusions are realistic, and the Commission goes on to give reasons for the existing state of affairs.

The first point made is that the advances registered by Dutch troops were in the nature of spearheads. The second is that the Dutch unilaterally fixed demarcation lines in such a way as to include large areas which had not in fact been occupied by Dutch troops at the time when the Security Council gave its cease fire order.

These facts must be taken in conjunction with a statement made by the Dutch Prime Minister to his Parliament on 23 September. He then spoke of "rounding off" the areas occupied by Dutch troops. This "rounding off" process is a curious business . What took place was simply this. Dutch spearheads stopped their forward movement. Immediately , an imaginary line was drawn regurlarly and laterally and all territory falling behind that arbitrary, unreal and unilaterally line was proclaimed as Dutch occupied territory.

Mr.van Mook, acting Governor-General, on September 25,stated in Batavia: "We cannot occupy only a portion of a complete administration area and ignore the rest".

Then commenced the phase termed by the Dutch "mopping-up operation" These in reality were military operations against towns and villages which fell behind the fictitious line unilaterally drawn by the Dutch. Therefore, days and weeks after the Security Council cease fire order, Dutch planes, tanks and flame-throwers were operating full blast such towns as Tasikmalay and Garut. Dutch military communiques have not attempted to disguise what has been going on as a continuous process since the Security Council cease fire order on 1 August.

From the evidence my delegation has adduced, it will be clear to the members of this Council that the Dutch have disregarded and still are disregarding the cease fire order. Nor is that all. The Dutch even speak of future military action as a contingency not be lost sight of.

Mr.van Mook, the chief Dutch official in Indonesia, stated in Batwia on 26 September: "Resumption of police action against the Republic of Indonesia will be dependent on the result of the Dutch-Indone-

sian discussions under the auspices of the three-member commission appointed by the Security Council. Let us wait and see."

The Dutch, it will be apparent, have not acted in the spirit and letter of the Security Council cease fire order. Not only have they continued violating the Security Council's cease fire order, but they are - in spite of their reluctant commitment to accept the good offices of the three-man commission appointed by the Security Council- contemplating a continuation of their military action. Their future actions are based on the assumption that the committee will fail in its task of conciliation and that they must resort to force again. The Dutch are planning to act unilaterally despite the Security Council and the United Nations.

This assumption is strengthened by the statement made to the Dutch Parliament by the Dutch Prime Minister on 23 September. He then made clear that troop dispositions, at the time of the Security Council's cease fire order, were arranged in such a manner as to permit immediate resumption of hostilities.

My delegation wishes to reiterate here the danger to peace in Indonesia so long as Dutch troops remain on Indonesian soil. The Dutch army has become so powerful that it has ceased to be only an instrument of the Dutch-Government, and decided largely what the Dutch Government should do. This so-called police action was inspired by the Dutch Army. The Dutch Government's declaration on 23 September shows clearly that it was the plan of the Dutch Army to attack Djokjakarta, the capital of the Republic. Only the intervention of the Security Council prevented it.

With such an army present in Republican territory, it is understandable that the Consular Commission has come to a pessimistic conclusion.

Therefore, we would urge upon this Council consideration of the request repeatedly made here by Mr.Sjahrir for withdrawal of Dutch troops to the positions occupied by them as determined by the Truce Agreement of 14 October, 1946. The presence of Dutch troops in Republican territory is responsible for all the difficulties spoken of in the Interim Consular Report. And these difficulties will remain unsolved so long as Dutch troops remain on Indonesian soil.

With regard to the establishment of the three-member commission, I wish to make a brief statement. In the first place my delegation wishes again to convey its gratitude to the Security Council for the offer of the Council's good offices, and also the Governments of Australia, Belgium and the United States for their acceptance of membership on the Commission of Three. Furthermore, my delegation is certain that the persons representing Australia, Belgium and the United States in the three-nation commission offer the necessary guarantee for a speedy and just solution.

Speed and justice are what the Indonesians want, as well as a guarantee that any possible solution will be binding on both parties.

We want speed, because my country and my people have fallen

victims of a war which is still raging in my country, and postponement of peace would mean further loss of lives and destruction, not to speak of additional difficulties in rehabiliation and reconstruction.

We want justice, because my people desire nothing more then a just solution of the conflict between the Netherlands and the Republic of Indonesia. And to guarantee a just solution, it is advisable that the three-member commission carry out its work principally outside the areas of the Netherlands and Indonesia to prevent possible direct influence.

In conclusion, it must be guaranteed that any solution to be found with the co-operation of the Security Council will be binding on both parties.

The characteristic of Dutch actions since the signing of the Linggardjati Agreement has been their unilateral nature.

The Dutch decided unilaterally that their interpretation of the Linggardjati Agreement was the only valid one.

They unilaterally abrogated the Linggardjati Agreement.

They unilaterally drew demarcation lines after the cease fire order was issued by the Security Council.

Based upon this, my delegation wishes to stress that as originally asked for by the Indonesian delegation in previous meetings of this Council, we feel that arbitration should be made obligatory on both parties to the dispute. Let me repeat what Mr.Sjahrir stated here on 29 August:

"The Indonesian delegation hopes that the work of this Committee will lead to the arbitration asked for."

In conclusion, let me say a word or two about the speech of the Dutch representative. His statement in its entirely is made up of accusation against the Republic. He has not adduced evidence to show that the Dutch Army has followed the Security Council's cease fire order. In fact, his statement was an attempt at explaining why the Dutch have been and are ignoring the cease fire order. Therefore he has dwelt long on cruelties allegedly committed by the Indonesians. He is probably quoting Dutch military communiques.

In addition, such happenings often take place all over the world where two forces are fighting for supromacy or where the existing authority has collapsed.

In the Republic of Indonesia such a situation does not exist in areas occupied by the Dutch troops and in areas not occupied by the Dutch but where Dutch forces are carrying out their so-called "mopping-up operations". In these areas, then, cruelties have been committed.

If such cruelties have taken place, on whom does responsibility

fall? Certainly on the party who creates such a situation. It is the Dutch military actions which has given rise to chaos in the territories of the Republic.

Before the Dutch launched their military action of 20 July there always was a certain amount of tension and unrest along the demarcation lines, on the Dutch side as well as on the Indonesain side.

The Republican territory, however, in spite of the Dutch blockade there was as usual law and order, and energetic rehabiliation. Foreign correspondence have repeatodly stated this fact. So also have Dutch journalists. In March of this year a party of Dutch news-papermen visited Republican territory. They then issued a joint statement to counter what they regard as "inaccurate representation" current in Holland, of affairs in the Indonesian Republic.

This party attended the Indonesian National Executive Assembly at Malang, and on their return to Batavia they issued the following statement:

"We Netherlands journalists of different political and religious convictions, as a result of our experience and observations during our visit to the territory of the Republic of Indonesia, declare the following:

"The National Revolution is not exclusively a matter of superficial upper layers. The desire for independence embodied in the Republic is general in broad layers of the population.

"There is especially among the younger people a striking activity and thirst after knowledge.

"The feeling of independence is in general not accompanied by hatred of whites or of enmity towards the Netherlands; on the contrary, when the independence of Indonesia is assured, the Netherlands can depend on the friendly co-operation of a people which is conscious of its own value as well as of its own shortcomings.

"We have moved without escort among the people and encountered no enmity. Contact with the people and attendance at the meetings of the National Executive have taught us that they are planning to build up a new state in a democratic spirit. This democratic spirit expresses itself among others in the existence and function of many youth and women's organisations and trade unions.

"In the areas visited by us, there is no suffering through hunger There are few textiles. There is a great scarcity of transport. Where we went, we found the sawahs cultivated and everywhere a very intensive use of the cultivatable ground available.

"Dutch is spoken and listened to without revulsion.

"We make this declaration because we regard accurate information for both people a vital interest, and because we wish to put in, against the inaccurate representations of affairs which is current in certain quarters in Holland, our own experience and facts verified by us."

That is the report of Dutch journalists. But let me also read to you excerps from a report made by a man who is Chef de Cabinet to Mr.van Mook in Batavia, His name is Mr.P.J.Koets, and he was here a short while ago when he shepherded the delegation from East Indonesia which tried unsuccessfully to participate in the discussions of this Council. In October last year, Mr.Koets and five other Dutch officials went on a goodwill tour of Indonesian territory. On his return to Batavia, Dr.Koets officially declared:

"The picture in general is of a society consolidating itself, and not in the course of dissolution. What struck me was the quiet and peacefulness. The farmer is busy on the farm, the women planting of harvesting, the people gathered at the market place,peddlers with heavy leads along the roads, the dogtrot of the carrier with his load on his back, a merchant on his way to the next village.

"I had a long talk with a Republican leader whom I'd known in Holland. He used the comparison with water in the course of freezing: "Consolidation", he said, "is like water that freezes on top; there are large stretches where one can walk over in safety because the ice is thick and strong. There are parts where one can walk,but hear the threatening sound of cracking, and there are sections where only a thin skin of ice forming, and over the deepest spots, there are still open cracks".

"But the process of freezing continues; consolidation is progressing.

Mr.Koets also announced his impression that a majority of the Indonesian people, so far as they were able to form an opinion about political matters, backed the Republican movement. Asked is his trip left him with the impression that he had visited a democratic community. Mr.Koets replied that he had observed a noticeable development in a democratic direction.

That is an official report by the Chef de Cabinet,to Mr.van Mook.

It is clear that there has always been law and order in Republican territory, It is equally clear that Dutch military actions has brought chaos in those areas now occupied by the Dutch and those which are still the scene of Dutch military action.

As the Dutch representative has dwelt long on this question of cruelty, I want to draw his attention to happenings in South Celebes, under Dutch control for over a year, where the Dutch carried out a similar police action between November 1946 and March 1947. There, however, the Dutch did not have to contend with the Republic, nor could the Indonesians of that area bring their case before the Security Council.

The Dutch Army in South Celebes has been guilty of such revolting cruelty that we of the Republic have been fortunate enough to have the so-called Dutch police-action in Java and Sumatra thrashed out before an international forum such as this. It is essential that the international world should know something of Dutch colonial

policy as existent in the Celebes today. Charges with regard to Dutch cruelty in South Celebes are so serious and so evident that the Dutch Colonial Government was forced to establish a commission of investigation. This commission has been functioning for months, but the findings of the Commission are apparently such that the Dutch are not prepared to publish them. Needless to say, the composition of the investigating commission is such as to give the Indonesians reason to doubt its impartiality.

The Dutch representative spoke of curruption in Republican territory, but forgot to tell us what is happening in that regard in Dutch occupied areas such as Batavia,Bandung,Surabaya and the Dutch controlled territories. Now, just what is the extent of corruption in areas dominated by the Dutch? The East Indonesian Cabinet just a fortnight ago was compelled to dismiss its Prime Minister for practising flagrant corruption. Mad just who is this man who has been guilty of corruption in the highest post open to men in that area? Well, he is none other dan Mr.Nadjamuddin who was in this very Council-Chamber - at the same time as Mr.Koets - to speak for East Indonesia of th Council had given him an opportunity to do so. And what is one to think of the Dutch colonial Government which, knowing this mans unsavory record, appointed him Prime Minister of East Indonesia?

I have one last word before I finish. The Dutch representative has seized every opportunity to tell the mebers of this Council that the Republic of Indonesia and the actions of its Government are Japanese inspired. He has merely followed a myth assiduously cultivated by the Dutch as a propaganda device to discredit the Republic. But let me read to him what Mr.Hubertus van Mook, the head of the Dutch Colonial Government, said in October last year.Listen to Mr.van Mook, who says: "Although wo - that is the Dutch-originally reported the Republic as too mucht of a Japanese invention - a sort of Japanese machination . it is apparent, looking back on the history of the past year that forces were at work in Indonesia which were significant and had deeper roots than any more surgo of wild terrorism, forces which,at the same time, had on the whole resisted the Japanese fascist war".

October 13th, 1947.

<u>Bantam loyal to Republic.</u>
Bantam KNI opposed the idea of Dutch sponsored autonomous region of West Java. The people of Bantam as a whole also sent a cable to President Sukarno a cable to that effect.
Working Committee of the KNIP approved on October 11 that there should be commissioners appointed with a Ministrial rank in areas where Dutch have disrupted communication with us.Thus two commissaioners one for interior and another for finance have been appointed fur Sumatra.

<u>The International Brigade in Indonesia.</u>
Mr.Ahmad Hakim, a representative of the International Brigade in Indonesia, said that the brigade regards the present Indonesian struggle as one fighting for democratic rights. He further declared that in addition to the four freedoms (freedom of speech,religion,want and of fear), there should be one more freedom, the freedom of a country and in this case that of Indonesia.

The International Brigade was formed by various foreigners in Indonesia and are mainly composed of Malays, Indians,Phillipinoes, and Chinese.

Will not return home until Republican ideals are achieved.
A representative of the Indian Unit of the International Brigade when presenting a painting to President Sukarno, said his men will not return home until they have done their duties,which are to build closer relations between India,Pakistan and Indonesia through expressing their loyalty to the Republican ideals in deeds.

Egyptian doctors flying to Sumatra.
The Egyptian doctors who left their country to render medical help to the Indonesians and arrived some time ago in Singapore,will be flying to Bukit Tinggi in Sumatra in an Intereross plane on October 15.

Chinese and Indonesians never to be used as imperialists' tools.
The Deputy Chinese Consul said at a banquet given to him by the Chinese organisation CHCH at the Republican capital Djokjakarta, t that Indonesians and Chinese will never allow themselves to be used as tools by the imperialists. He further declared that the Government of China is prepared to receive Indonesian students to study in Chinese universities.

Minister of Religious Affairs arrested.
Haji Amwah Alim has been appointed Minister of Religious Affairs of the Republic to succeed Kiai Asjari, who was arrested by the Dutch in Palembang, South Sumatra, and whose whereabouts are not known now.

UITGEBOEKT

OPGELEGD

7 November 7.

XXXX
XXXX

0/664.

B22553.
een.
VIII. TZ.3. **G E H E I M.**

Republikeinse Voorlichtingsdienst te Amsterdam.

Met verwijzing naar mijn geheim schrijven van 31 October j.l., No. 22553, handelende over het hoofde dezes vermelde onderwerp, heb ik de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden afschrift van de uitgave No.11 van de Republikeinse Voorlichtingsdienst, naar de inhoud waarvan ter bekorting verwezen moge worden.

HET HOOFD VAN DE CENTRALE
VEILIGHEIDSDIENST
Namens deze:

J.G.Crabbendam.

Aan Zijne Excellentie de Minister
van Overzeese Gebiedsdelen,
(t.a. Chef Kabinet),
Plein,
's G R A V E N H A G E.

OPGELEGD

0/664 7 November 7.

B. 22553.
een.
VIII. TZ.3. GEHEIM.

XXXX
XXXX

UITGEBOEKT

Republikeinse Voorlichtingsdienst.

Ik heb de eer U hiergevens ter kennisneming aan te bieden uitgave No's 10 en 11 van de Republikeinse Voorlichtingsdienst te Uwent.
Ter bekorting mage naar de inhoud daarvan verwezen worden.

HET HOOFD VAN DE CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST
Namens deze:
H/

Aan de Heer Hoofdcommissaris van Politie,
te
AMSTERDAM.

J.G.Crabbendam.

3/10 Rapport
Een en. aa Ing Hier bestaat
B VIII 3/11

GEHEIM.

DE REPUBLIKEINSE VOORLICHTINGSDIENST TE AMSTERDAM.

Medio van dit jaar zond de "Perhimpoenan Indonesia" (P.I.),de reeds tal van jaren bestaande politieke vereniging van Indonesische studerenden te Amsterdam, een circulaire aan lezers en abonné's,waarin werd medegedeeld, dat o.a. ten gevolge van de repatriëring van meerdere Indonesiërs de uitgifte van het blad "Indonesia" voorlopig gestaakt moest worden. In de circulaire werd echter de hoop uitgesproken, dat"in de naaste toekomst omstandigheden geschapen zouden worden" voor een bredere en uitgebreidere voorlichting omtrent de Republiek.

Voor insiders was het aanstonds duidelijk wat hiermede bedoeld werd, immers de hoofdredacteur van het verenigingsblad "Indonesia", met name Djajeng Pratomo, was bereids bezig voorbereidingen te treffen voor de oprichting te Amsterdam van een "Republikeinse Voorlichtingsdienst", een voorpost van het Republikeinse Ministerie van Voorlichting te Batavia. Djajeng Pratomo heeft dit niet eigener initiatief gedaan; voor genoemd Ministerie was het van belang een eigen centrum in Nederland te scheppen om zodoende hier te lande de nodig geachte activiteit te kunnen ontwikkelen en om meer direct in Europa over verbindingen te kunnen beschikken. Dit viel ongeveer samen met berichten, dat er te Singapore een Republikeinse Voorlichtingsdienst zou worden opgericht,Singapore daartoe dan uiteraard gekozen als belangrijk contact-centrum in het Verre Oosten.

Zó belangrijk achtte men blijkbaar de oprichting van een Republikeinse Voorlichtingsdienst in Nederland, dat genoemd Ministerie een harer leidende figuren, Dr.Soebandrio,toen Secretaris-Generaal van het Republikeinse Ministerie van Voorlichting, herwaarts zond vergezeld van zijn echtgenote. In wijde kring, ook buiten die der Indonesiërs, ondervonden deze personen bijzondere belangstelling,hetgeen o.a. geleid heeft tot het organiseren van lezingen over de "Republiek Indonesia". De echtgenote van Dr.Soebandrio sprak o.a.voor de Nederlandse Vrouwenbeweging, een communistische mantelorganisatie.

In het kantoor van de "Perhimpoenan Indonesia", O.Z.Achterburgwal no.185 te Amsterdam, werden de verdere voorbereidende maatregelen besproken en uitgewerkt en het eerste naar buiten waarneembare teken van leven was de op 4 Augustus jl. uitgegeven, in afschrift hierbij gevoegde, "Special Edition",welke, behoudens het hoofd op de eerste bladzijde, geheel gestencild was.

In een rood vak staat gedrukt "Republic of Indonesia,Information Service 185 O.Z.Achterburgwal Amsterdam (Holland)-phone 44459" en rechts daarnaast "Publications of the Ministry of Information". Hieruit blijkt dus al genoegzaam, dat het e.e.a. verzorgd en uitgegeven wordt namens dit Republikeins Ministerie op Java.

De inhoud is uiteraard een en al propaganda ten behoeve van de Republiek. Vastgesteld is, dat deze uitgave o.a. werd toegezonden aan de hier te lande vertoevende buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigers.

In een inleidend artikel met opschrift "Stop the war of Agression in Indonesia" is o.a. gesteld: "It is clear that Dutch policy has never been directed towards a peaceful settlement in Indonesia", welke kwaadsappige mening bij vele Indonesiërs hier te lande bestaat, al dan niet beïnvloed door derden.
Als slot van deze uit tien bladzijden bestaande "Special Edition" is opgenomen "Indonesians in Holland appeal to their progressive Dutch Comrades",gedateerd 25 Juli 1947, waarvan de eerste alinea luidt: "With great consternation and deep indignation the Indonesians, coming from the Republican, as well as the so-called Malino-areas "and belonging to different social groupings, have taken cognizance "of the resolution by the Dutch Government to break off negotations "with the Indonesian Government and to proceed to the applications "of military force of order to set the Republic their demands."

Aanleiding om deze passage hier weer te geven, ligt in het feit, dat met het uiting geven aan de mening van new-comers uit de Republiek en van groepen uit de zgn.Malino-gebieden (onder wie dan in de eerste plaats gerekend worden de Malino-studenten) naar dzz. oordeel kennelijk beoogd is te suggereren, dat Indonesiërs, die recente indrukken uit Indië medebrachten, zich al aanstonds in Nederland verzameld hebben tegen de politiek der Nederlandse Regering en dat zelfs ook de Malino-studenten (die met medewerking en op kosten van de Nederlands-Indische Regering voor studiedoeleinden herwaarts zijn gekomen) het voor de Republiek opnemen.
Gelijk in de Republiek geen gelegenheid wordt verzuimd om de anti-Nederlandse "eensgezindheid" der onderdanen te demonstreren,zo is ook hier de propaganda-machine in werking gesteld om van deze "eensgezindheid" te doen blijken.
Meerdere gegevens wijzen evenwel uit, dat van het P.I.-centrum en

ook van de Republikeinse Voorlichtingsdienst te Amsterdam invloeden uitgaan, die er op gericht zijn er voor te waken,dat geen Indonesiër zich aan de zijde van Nederland schaart. In het bijzonder is en wordt o.m. gezorgd voor beïnvloeding ("bewerking") der Malino-studenten, welke groep haar naam ontleent aan de bekende conferentie te Malino (Juli 1946), waar de Lt.Gouverneur-Generaal heeft medegedeeld, dat het in de bedoeling lag jongelieden,zowel Indische Nederlanders, Indonesiërs als Chinezen te doen aanwijzen om in Nederland te studeren,dus met een Gouvernements-toelage. De Indonesische groep "Malino-studenten" is aanstonds door de P.I.-volgelingen met bijzondere onwelwillendheid tegemoet gezien en prompt aangemerkt als verraders.

Zou de naam der meergenoemde instelling te Amsterdam van het Republikeinse Ministerie van Voorlichting doen veronderstellen,dat deze geschapen is uitsluitend als voorlichtingscentrum,sedert is echter genoegzaam komen vast te staan, dat haar taak mede is een voortdurende en zo geheim mogelijke beïnvloeding van de Indonesiërs alsmede het bevorderen van hun eenheid, een blokvorming tegenover Nederland.Dat dit evenals in de Republiek gepaard gaat met intimidatie, behoeft geen betoog.

Het e.e.a. heeft dan ook bereids geleid tot een bepaalde mate van vrees bij andersdenkenden, zo bijv.onder de groep Ambonnezen hier te lande. Slechts enkele fanatieke lieden zijn voor deze intimidatie al voldoende.

Pogingen verder tot beïnvloeding van Indo-Europeanen en Chinezen om hen te bewegen zich aan de zijde der Republiek te scharen,zijn mede gesignaleerd,evenals beïnvloeding van Indonesische schepelingen bij de Marine met het doel hen te bewegen de Marinedienst te verlaten, waarbij dan als motief moet gelden, dat Indonesiërs niet tegen de Republiek mogen strijden en dat zij, die ontslag nemen, in de Republiek een goede betrekking kunnen bekomen.Aan een bij name bekend persoon in een der lagere rangen der Marine, die bereids ontslag heeft gevraagd, is voorgehouden,dat hij in de Republiek Marineofficier zou worden.

De Republikeinse Voorlichtingsdienst heeft sedert het op 4 Augustus verspreide geschrift nog een tweetal gestencilde publicaties verspreid, resp.van 26 September en 4 October jl.

Uit "Notice to our Readers" in het nummer van 26 September

blijkt, dat de Republikeinse Voorlichtingsdienst sedert de politionele maatregelen op Java geen direct contact meer met de Republiek heeft gehad en dat hierdoor geen regelmatige verschijning van de uitgaven mogelijk is geweest.Langs andere kanalen is sedert evenwel publicatie-materiaal bekomen,zodat op 26 September jl. - zij het dan vertraagd , weer een nummer het licht kon zien.

Is met het vorenstaande beoogt een samenvattende schets te geven van het ontstaan en de werkzaamheid der Republikeinse Voorlichtingsdienst te Amsterdam, een beknopte beschouwing gewijd aan enkele andere bijzonderheden dient hieraan nog te worden toegevoegd. Vooreerst betreft dit het feit, dat deze dienst is ondergebracht in het kantoor van de "Perhimpoenan Indonesia", welke vereniging, naar al geruime tijd bekend is, nauw contact onderhoudt met de Communistische Partij Nederland (C.P.N.)Verscheidene P.I.-leden zijn communist en aangesloten bij de C.P.N., onder wieom een paar namen te noemen - de hoofdbestuursleden T.Loemban Tobing en Djajeng Pratomo, een der oprichters en leiders van de Republikeinse Voorlichtingsdienst. Waar een zo innige verbondenheid met de C.P.N. bestaat en verschillende berichten - onafhankelijk van elkaar - uitwijzen, dat de C.P.N.Indonesiërs financieel steunt (de schuld van de P.I.is ook enige tijd geleden door een C.P.N.-storting tot een beduidend lager bedrag teruggebracht) behoeft het zeker geen verder betoog, dat ook de Republikeinse Voorlichtingsdienst nauw met de C.P.N. verbonden is en dat zij elkander aanvullen in de volkomen overeenstemmende propaganda voor de Republikeinse eisen. Internationaal is dit ook van betekenis,want het kan als vaststaand worden aangenomen, dat recente reizen van genoemde Loemban Tobing naar Londen en Praag met financiële hulp van de C.P.N. zijn gemaakt, terwijl in aansluiting hierop een andere ontvangen mededeling (uit een m.i.goed ingelichte bron) behelst,dat deze communist zich kortgeleden naar Praag heeft begeven ten behoeve van het contact van de Perhimpoenan Indonesia met Moskou.-

Het stencillen van meerbedoelde uitgave van de Republikeinse Voorlichtingsdienst geschiedt niet zoals voor de hand zou liggen aan het adres O.Z.Achterburgwal no.185 te Amsterdam,waar deze dienst gevestigd en ook telefonisch bereikbaar is,maar met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gebeurt dit ten huize van de Indonesiër Slamet Faiman, wonende van Eeghenlaan no.4,aldaar.

Slamet is een revolutionnair type, een felle agitator voor de Republikeinse zaak, lid van de Perhimpoenan Indonesia (P.I.) en eveneens van de C.P.N. Hij leeft in concubinaat met een Nederlandse vrouw, die ook bij de communistische partij is aangesloten en wier zuster gehuwd is met een E.V.C.-functionaris.
Toen het blad "Indonesia" nog verscheen, werd dit vanuit het huis van Slamet verspreid, en blijkbaar is het laatste nummer van het blad ook middels in de in zijn woning aanwezige stencilmachine gereed gekomen. Deze machine is,naar verluidt,geleend door Mevr.Trees Soenito-geb.Heiligers, even extremistisch georienteerd als vorengenoemde lieden.(In 1946 was zij voorzitster van het te Amsterdam gehouden Vrouwencongres, belegd om te komen tot de oprichting van de - thans nog bestaande - en reeds in dit verslag genoemde communistische mantelorganisatie "De Nederlandse Vrouwenbeweging".)

Geregeld komen er Indonesiërs, enkele Indo-Europeanen en enkele Chinezen in de woning van Slamet. Voornamelijk met de eerste groep houdt hij politieke besprekingen, en, lettende op 's mans politieke mentaliteit, is het niet aan twijfel onderhevig, dat hier extremistische beïnvloeding plaats vindt,waarover trouwens al meer dan eens een mededeling is ontvangen.

Samenvattend kan als vaststaande worden aangenomen,dat de Republikeinse Voorlichtingsdienst te Amsterdam volkomen opgaat in een communistische sfeer, alle daarmede in verband staande invloeden verweeft in woord en geschrift en zodoende getrouw naleeft de methode van propaganda op Java door het Republikeinse Ministerie van Voorlichting, dat ook communistische invloeden heeft benut.

REPUBLIC of INDONESIA

INFORMATION SERVICE

185 O.Z.Achterburgwal, Amsterdam (Holland) - phone 44459.

Publications of the Ministry of Information.

Press-Reviews, etc.

SPECIAL EDITION

No.8 Aug. 4th 1947.

STOP THE WAR OF AGRESSION IN INDONESIA.

The sign of relief that was heard in the world after the Indonesian Republican Government had accepted most of the Dutch proposals on the setting up of an Interim Government in Indonesia during the transition period, has completely disappeared and has given place to a feeling of the greatest anxiety since the morning of 21st Juli 1947, when the Dutch started their all out military attack.

What is the cause, that, after it had seemed as if Indonesians and Dutch had come closer together, now they obviously have drifted so far apart that it resulted in an armed conflict ?

Let us consider the facts that have led to the present circumstances, and thus enable us to judge which side is responsible for the present disastrous situation in which a danger of a heavy and long battle has become as great as never before.

The conflict has arisen out of different views on the transition period. The Linggadjati-agreement provides for the establishment of a sovereign, democratie United States of Indonesia not later than on 1st January 1949. During the transition period the Dutch have put forward proposals concerning:

1. The position of the Dutch Government in Indonesia.
2. The composition of the Indonesian Interim Government.
3. The return of foreign owned properties in republican territories.
4. Foreign relations of Indonesia.
5. Police and military force in Indonesia.

After several exchanges of letters, memoranda, notes and aides memoire, the Indonesian Republican Government has at last agreed to the following, as expressed in the Republican Note of July 8.:

1. The Republican Government accepts the de jure authority of the Netherlands Crown Representative in the Interim Government within the framework of the Netherlands' de jure authority during the transition period. (until January 1949)
2. The Republican Government agrees to an Interim Government composed of the representative of the Crown and the representatives of the future member States of Indonesia.
3. The Republican Government agrees, in connection with Netherlands' sovereignty during the transition period, that foreign relations of the Republic shall be made to conform with the maintenance of the above mentioned sovereignty during the transition period and with the existence of the Interim Government.

4. The Republic desired that the pacts so far concluded by her, should be included in the proposed Dutch regulation of foreign relations of May 27.
5. The rights of foreigners of their estates are recognised by the Republican Government and will be restored unconditionally in confirmity with the Linggadjati agreement. The restitution will be effected simultaneously with the drawing up of an inventory. Government properties within the territories of the Republic are the property of the Republic.
6. With regard to the questions of the maintenance of the internal peace and order by a j o i n t g e n d a r m e r i e, the Republic wishes to remain by the President's reply of June 27. The Republic emphasises the agreement to having a Joint Directorate for internal security, of which the representatives of the several states, and only to be used within the States concerned. Such co-operation should find its embodiment in the Joint Central Directorate.
7. The Republic expresses willingness to abolish all functions and organizations contrary to the Linggadjati agreement.

The Indonesian Republic is fully conscious, that it has given many concessions to the Dutch demands in spite of the fact that according to the Linggadjati agreement the de f a c t o a u t h o r i t y of the Republic in the main Indonesian islands Java, Madura and Sumatra is r e c o g n i s e d by the Dutch and that the Republican Government according to the text and spirit of the agreement is placed on an equal footing with the Netherlands Government; also in spite of the fact that the Dutch policy in Indonesia has been a consistent violation of the Linggadjati agreement by trying to break Indonesian Unity, erecting puppet states, creating separatist tendencies and by continued military actions.

The heavy concessions that the Republican Government is willing to make, are the clearest proof that the Indonesian Republic wants to earnestly and sincerely settle the problem in peace and as quick as possible, in order to enable the country and the people of Indonesia to take their place in the world and to contribute to world prosperity and peace.

The British and American representatives in Indonesia who have constantly been showing a great interest in the course of Dutch-Indonesian negotiations have been satisfied with the Republican peaceful attitude and the Republican clarification note on 8th July. This clarification note does not accept a joint gendarmerie as proposed by the Dutch, but, in spite of this, the Republican Government is fully prepared to re-open negotiations with the Dutch representatives, convinced that also on this point a settlement can be amicably reached. What the Republican Government insists upon is that the Republican authorities shall be responsible in their own territories, thus in confirmity with the de facto recognition of their authority. The Dutch want to have a joint gendarmerie also in Republican territories in order to maintain law and order.

The Dutch need have no ground for their anxiety that the Republic will fail in keeping law and order in her own territory. The history of Indonesia since the proclamation of the Indonesian Republic on 17th August 1945 has given enough evidence, that the Republican authorities are able to master internal security, to safeguard interest and property of citizens and foreigners. The worldknows the reports about the Republican disarming and evacuation of Japanese troops. The world knows that after Japan's surrender the internees in the former Japanese

camps, while awaiting their evacuation, were well looked after by the Indonesians.

Ultimately all the Allied prisoners of war and other internees have been satisfactorilly evacuated by the Republican authorities. Foreign visitors and correspondents have always moved freely in Republican territories and all of them have published favourable reports on internal conditions and security. Even Dutch official missions have got the same impressions. The Chinese, Arabs, Indians and other minorities are living happily in the midst of Indonesians.

We know that only Republican authorities, Republican Army and Police Forces, with the help of the Indonesian Youth, Trade Unions, the People's Voluntary Corpses, but not any outside help, are responsible for this.

Disturbances only occurred in those places where the Dutch after violating agreements tried to get control in our recognized territories. Disturbances occurred in the month of June, because the Dutch troops have violated demarcation lines 300 times. Disturbances occurred in Dutch occupied territories, such as South Celebes, where Dutch troops organized a bestial massacre of the local population. Disturbances always occur just because of the presence of Dutch troops.

But still, in spite of all these facts, the Indonesian Republican Government wanted to start fresh negotiations. But he Dutch had refused and now by an all out military campaign they want to press us to accept unconditionally their demands.

It is clear that Dutch policy has never been directed towards a peaceful settlement in Indonesia. Even after the signing of the Linggadjati agreement the Dutch have been continuing to land more and more troops. They have been bombing, shelling and air-raiding our harbours, towns and villages, killing thousands of innocent civilians, and rendering thousands of other homeless. Dutch policy is directed towards the unconditional surrender of the Republic, the loss of freedom for the people and the recolonization of the whole of Indonesia.

Cynically the Dutch have demanded from the Republic cessation of hostilities, in spite of the fact that the Republican National Army is only defending the country against Dutch attacks. The Republican Government is prepared to order immediately the cessation of all hostilities provided that the Dutch do the same. The Republic is prepared to withdraw her troops provided the Dutch troops will also be withdrawn immediately to their garrisons. Dutch intentions became sinisterly clear when they rejected such a proposal of mutually and simultaneously ordering the cessation of all hostilities and withdrawing of troops and when they pressed only the Indonesians to issue a one-sided order only to the Republican Army. This would mean unconditional surrender of the Republic.

A last minute attempt of the Republican Government to settle the conflict peacefully either by a mutually agreed third party or the International Court of Justice, was also bluntly rejected by the Dutch, who had already started their war. Against all regulations the Dutch shot dead the Republican Deputy Mayor of Padang and arrested hundreds of Republican officials, such as the Mayor and Deputy Mayor of Djakarta, and even topranking Ministers such as Vice Premier Dr.A.K.Gani and Vice-Minister for Foreign Affairs Dr.Tamzil, who happened to be in Djakarta on behalf of the Republican Government, awaiting the Dutch reply to the latest Republican proposals.

Dutch policy is reactionary, imperialist and aggressive.
Dutch policy will plunge once more both Holland and Indonesia into misery, devastation and destruction in a war that will affect the stabilization of world peace.

Dutch policy is contrary to the principles of democracy, self determination and peace, for which the United Nations have fought and sacrificed in a heavy and costly war.

Dutch policy is contrary to the spirit and text of the United Nations Charter.
Dutch policy endangers peace in the world.

The Republic wants peace. She has given enough evidence of that, But now that force is used by the Dutch to crush the Republic, the Indonesian people do not hesitate to defend once more their freedom at any cost, with any means -- a few arms, a burning spirit, a grim determination -- that they possess. All political parties, the youth, the workers, the peasants, the women, the entire people have rallied and stand solidly behind their President and Government in the defence of their country.

However difficult the struggle will be, how many sacrifices the Indonesians will have to suffer, we will not surrender. And though the Dutch troops, better equipped with arms as they are, will perhaps succeed in occupying several towns, guerilla fighting, scorched earth tacties, all these will go on, till at last the Republic will be free again. For this is our conviction: in the end ultimate victory will be ours.
However the struggle will last for months, perhaps even years. And in the meantime the world will lack all those riehes and products that Indonesia has to offer to lighten the postwar burden of the world. Raw materials and food needed for a speedy relief, reconstruction and rehabilitation of the world will not be at her disposal. Not only world peace, but also world prosperity to which the Indonesians are eager to contribute, is hampered by this cool-blooded planned Dutch war of agression.

On behalf of the Government and the people of the Indonesian Republic, in fulfilling the instructions that President Soekarno has given in his speech of 21st July:

We appeal to all the democratic and freedom loving peoples in the world, to the people of Holland in particular, to stop the war of aggression in Indonesia.
We appeal to all the democratic forces in the world to support the Indonesian Republic in her heroic defence.
We appeal to the democratic Governments in the world to put an end to those violations of the most precious principles of humanity, and bring the case of Indonesia before the United Nations Organization.
The world should act. The world should act quickly.

Dr.Soedarsono,
Representative of the Indonesian
Republican Government in India.

Soeripno,
Personal Representative of
Dr.Amir Sjarifoeddin,
Prime Minister Indonesian Republic.

"THE WORLD SHOULD ACT" APPEALED INDONESIAN LEADERS

PRESIDENT SOEKARNO APPEALS TO THE PEOPLE OF INDONESIA AND THE WORLD.
(Radio Republic Indonesia, 21st of Jan.1947)

What we have been fearing to happen ever since the month of June, has finally come into reality. Prime Minister/and Dr.van Mook have violated the agreement concluded with the Republic of Indonesia. Before we are informed, except through the Dutch Radio, the Dutch launched an all-out attack against us. The Dutch will naturally advance various kinds of excuses to justify these actions. But we are confident that the use of force can never be hidden by whatever kind of propaganda./ Dr.Beel.

For the last two years we have been trying to avoid this tragedy, we stand and act for justice and make every effort to avoid a clash with the Dutch.

Our war is a war of liberation while theirs is a colonial war. We are convinced that ninety percent of the world's population including that of the Netherlands does not want any more colonial regime.

We are not afraid, but we are following the path of justice, truth in consonance with humanitarian principles. Nobody with the least bit of feeling for truth will allow any accusation thrown on us.

The Dutch accuse us of many shortcomings. But is it fair to compare our new country with others centuries old? Nevertheless not a few foreigners, even Dutchmen including officials have seen with their own eyes and said of the healthy growth of our free Republic. Is the de facto recognition of the Republic by the Dutch and by other big powers itself not a proof of this fact ? And now all this is denied. Will the world with its principles of justice and humanity accept this slander ? In reality our Republic has been for the last two years a symbol of freedom, justice and of humanitarian principles. To the whole world I appeal to stop the use of force by the Dutch colonialists.

We are convinced that justice and truth are on our side and we are equally convinced that the U.N.O. will be on our side too.

I appeal to all the countries in the world who love truth and have sympathy for the Republic of Indonesia to place the Indonesian question before the U.N.O. The Dutch will employ all means to cover the truth sothat only their voice can be heard. But we believe whatever the Dutch do in this direction that humanity will have nothing to do with force and foreign rules. For this reason, we are confident, we will win, being on the side of truth.

In facing the use of force by the Dutch we must remain calm so that we can beat off all attacks against the Republic. Everything we have has been sacrificed for our Republic to make it more and more perfect. It is as if we have nothing more to give up but to face the present danger, we have to gather all the strength at our disposal. Know that God, who is always on the side of those who stand for Truth and Justice is on our side, especially so in this Holy month of Ramzan. He will not leave us, as long as we are for Truth, Justice and Humanity.

To all sons and daughters of Indonesia, I call upon you to do everything in your power for the defence of our Republic. For this we must all remain calm, everyone must do his duty with great responsibility and sincerity.

Likewise I call upon the sons and daughters of Indonesia living abroad to stand by the Republic. Fight for it and expose all Dutch employments of force and brutality.

To all peoples in Java, Sumatra, Madura, Celebes, Borneo, Moluccus, Smaller Sundas and of all the smaller islands of Indonesia to work harder to build up a strong defence system and to fight all Dutch offensive.

The Republic is the symbol of freedom, justice and humanity. With the help of God we will win. Once Free Forever Free !

-o-o-o-o-

PRIME MINISTER AMIR SJARIFOEDDIN APPEALS TO THE WORLD.
(Radio Republic Indonesia, 22nd of July 1947)

It should be clear to any observer of the Indonesian scene that war broke out in Indonesia. It is but natural to realize that this war would take the lives of thousands of Indonesian people and would take most of their time and energy. It is also natural that after the second World War no people in this world would like this war; it is all the more pitiable that after the signing of the Linggardjati Agreement this war broke out. It is therefore up to me to explain to the International World the real background of the present conflict. By doing this the world will come to know who is in the wrong and who is in the right.

After the Draft Linggardjati Agreement was initialled on 15th October 1946, it took four month more before it was officially signed. While the Republican Government was prepared immediately to sign the agreement, the Dutch Government was taking their time. In the meantime no evidence of goodwill was shown by them. Violations of ceasefire order continued, and the economic blockade was intensified. The number of troops which according to the Agreement should be decreased was increased by leaps and bound by the Dutch Government. Vital Republican territory in West-Java was occupied by the Dutch under the pretext that the Sundanese wanted the protection of the Dutch military authority. Nobody, who has observed the Indonesian political scene can believe this.

The Republic always wants a peaceful solution of the Indonesian-Dutch dispute, so that after the deadlock of 27th May 1947, the Republic again entered into negotiation with the Dutch Government and agreed to discuss those points of disagreement. The Republic knows very well that military conflict would not only affect the Indonesian and Dutch peoples but also the world which is keenly waiting the opening of Indonesia to International trade.

The Republic agrees to the setting up of an Interim Federal Government before 1st January 1949 and has also accepted the legal position of the Dutch Crown representative in the Interim Government. The Republic has also accepted the proposal affecting the foreign relations and the return of foreign nationals' property found in the Republican de facto territory. Only on one point that the Republic maintains her irrevocable stand i.e. the establishment of joint gendarmerie. Joint police force in the Republican territory is a clear violation of the Linggardjati Agreement, which definitely recognizes the de facto authority of the Republic in Java, Sumatra and Madura, including those areas which are now occupied by the Dutch in these islands. This de facto authority of the Republic is also recognized by other big powers. We therefore ask the question, why then should we

accept the joint police force in our own territory ?

The past records of the Republican Government has proved that she is capable of maintaining law and order in her own territory. Why impose Dutch policemen in her territory ? We have accepted more than half of the Dutch proposals and we expect that the true principles of the Linggardjati Agreement should be abided by the Dutch. Joint Gendarmerie cannot guarantee this principle, much less can it guarantee the co-operation between the Indonesian people and the Dutch people. What has happened suddenly ? Before a solution of the political problem is arrived at, the Dutch suddenly ordered the Indonesians to stop onesided military hostilities and to withdraw 10 kilometres from the demarcation lines; while on their part there is no such undertaking. By so doing they wanted to shift the issue from political to military matters. Dutch officials however declared that they wanted to maintain law and order in our territory.

Since 21st July Dutch planes have bombed Indonesian airfields, railways, running trains and the civilian population. In East Java Dutch mechanised units attacked Indonesian positions and penetrated in the direction of the interior. It is thus very clear that these activities are large-scale colonial war and not police-activities. It is the restoration of colonialism under the guise of sweet and democratic slogans.

At this moment, our people are looking to our friends, who have consistantly supported our cause in the past two years, in America, Australia, England, Europe, Egypt, India, China, Burma, Middle East, U.S.S.R. and other countries for their co-operation in stopping this disasterous war. This war must be stopped in order to allow the Indonesian people to start their national reconstruction and the world to share the material wealth of Indonesia. International intervention should come quickly and effectively and should be based on the recognition and restoration of the de facto authority of the Republican Government. I appeal to all freedom-lovers and freedom-fighters in America, Australia, England, Europe, Egypt, India, China, Burma, Middle East, U.S.S.R. and other countries to strengthen the defence for freedom and humanity.

-o-o-o-o-

INDONESIAN YOUTH FEDERATION APPEALS TO THE YOUTHS ALL OVER THE WORLD.
(Radio Republic Indonesia, 22nd of July 1947)

Comrades,

Receive the revolutionary salute of the fighting Indonesian youths, MERDEKA.

The World Federation of Democratic YOUTHS are celebrating their Youth Festival and we, the Indonesian youths take the liberty of calling your attention to the following:

On July 20th at about 22.00 hours Indonesian Standard time the Dutch started large scale military attack on the Indonesian Republic. The Indonesian Republic always desires to settle the Indonesian-Dutch dispute in a peaceful way, but this has been made impossible by the Dutch military offensive.

The Dutch ruled Indonesia for three and a half centuries. During this period the Dutch instead of trying to introduce modern inventions in Indonesia, have tried their level best to deprive Indonesia of modern discoveries and culture. It is to be specially noted that in 1942 only 5% of the Indonesian people can read and write.

Every progressive movement was destroyed before it was born; leaders of the national movement were put into jail, exiled or put to death. When in 1942 the Pacific War broke out, the Dutch without any sense of responsibility left Indonesia to the mercy of the Japanese invaders. The suffering that the Indonesian people bear during te Japanese regime was immense, but like true fighters of democracy the Indonesian people against heavy odds carried on underground struggle against the Japanese fascists.

In August 1945 Japan was defeated; Democracy won. The Indonesian people, who had been oppressed by the Dutch and Japanese fascists proclaimed their Independence on 17th August 1945. A revolution started in Indonesia, a revolution aimed against colonialism and every type of oppression. The Republic becomes the symbol of democracy, a principle for which the world has been fighting for at the cost of heavy sacrifices. The Indonesian Youth like the Youths of other countries, played an important role in the revolution and the capture of power from the Japanese hands.

Then in the name of the Allies came the British. With them followed the Dutch. They landed in Indonesia and everywhere their presence results in misery, plunder and murder for our own people. From the beginning, through their activities, we could clearly see that they wanted to recolonize Indonesia.

After months of discussions and negotiations, the Dutch agreed to sign the Linggardjati Agreement. But Dutch provocations and signs of their insincerety continued. Cease-fire agreements were violated by the sending of more and more troops to Indonesia, when it was clearly stated in the Linggardjati Agreement that the number of troops was to be reduced. In the meantime the Indonesian people were anxiously awaiting the fulfillment of the Linggardjati Agreement. Provocations continued, more and more troops poured into Indonesia and when they found that they were strong enough, demanded us to accept terms which would mean a violation of the de facto authority of the Republic. The Indonesians conceded most of their demands in order to prevent the outbreak of war, but their thist was not quenced till the Republic lay stretched at their feet, a colony again. In the name of sweet-coated phrases "the maintainance of law and order" they plunged Indonesia into war, the Indonesian people whose only crime is that they want to live in peace in their own country.

Comrades, Democracy for which you have been fighting for has been trampled down by the Dutch in Indonesia. We remember, when the three members of the Youth Commission, comrades Jean Lautissier, Olga Chetchetkina, and Rajko Tomovic visited Indonesia, they have seen with their own eyes that there is peace and order in Indonesia, so that there is no reason for the establishment of a joint police force in Indonesia to "maintain law and order". They have also promised us that they would support us in all possible ways in our struggle, when the Dutch started a large and general attack on the Indonesian people. Faithful to the desire of every youth in this world, the establishment of Democracy, we have been fighting regardless of the sacrifices that we have to bear. Every minute saved means so many lives of Indonesian Youth saved.

Comrades, youths of the World Federation of Democratic Youth and progressive youths of the world, lots of words have been spoken; we now appeal to you to prove with deeds and actions your promise to support us in our struggle. We once again appeal to you for the creation of a democratic world free from colonialism.

Accept our revolutionary salute, M E R D E K A.

S.O.B.S.I. (ALL INDONESIAN CENTRAL ORGANIZATION OF TRADE UNIONS) APPEALS TO THE WORKERS ALL OVER THE WORLD. (22nd of July 1947).

In the early morning of the 21st of July the Dutch troops in Indonesia started an all out military offensive.

This opportunity has been eagerly awaited for by the Dutch colonialists and imperialists. Ever since the proclamation of the Indonesian Republic, Dutch policy has never been sincerely directed towards a peaceful settlement with the Indonesians. Dutch policy has never seriously respected the Indonesian People's right of self-determination, one of the main principles for which the United Nations have fought and won the war with so many sacrifices.

For the last few weeks the Indonesian Republican Government has seriously and sincerely been making attempts to avoid a military conflict by accepting most of the Dutch demands. But those heavy concessions still did not satisfy the Dutch colonialists.

It is clear to the world that the Dutch colonialists never want to put the Indonesian-Dutch agreement into effect. Events in Indonesia have shown that Dutch policy has always been trying to sabotage the Linggardjati agreement. The main point in the agreement, the recognition of the de facto authority of the Republic, means a heavy blow to colonialism and imperialism.

Finally, finding the Indonesians standing firm by the conception of the de facto authority of the Republic, recognized by the Dutch themselves in accordance with the agreement, by not conceding to the Dutch the demand of a joint constabulary, they opened on July 21st large scale hostilities on land, from the air and from the sea, throughout Java and Sumatra.

The people of the Indonesian Republic put a heroic resistance in their patriotic war. The whole people are solidly backing their democratic Government of National Unity.

The S.O.B.S.I. (All Indonesian Central Organization of Trade Unions) has taken a leading part in the People's War for Liberation in organizing the masses of the Indonesian Workers in People's Volunteer Corps for the purpose of guerilla warfare, scorched earth tactics, strikes struggle. The Indonesian Workers are fighting hand in hand with the rest of the Indonesian people and well-disciplinedly follow the instructions of the Republican Defence High Command.

The entire Indonesian people are convinced, that, whatever weapons the Dutch troops may use, and how long the war may last, in the end victory will be theirs !

The war in Indonesia is however a concern of all the peoples in the world. Particularly the workers of all countries, who, irrespective of colour, race or nationality, have the same interests to promote and defend, know that what is at stake in Indonesia, is also the interest of the international workingclass and her movement.

The workers know that the Indonesian people are defending their freedom against imperialism that also oppresses them.

The workers know that the Indonesian people are defending a free Republic; that means a heavy blow and a break in the imperialist chain around the world.

The fighting a war for the defence of the Republic, the Indonesian people are at the same time defending the interests of the workers all over the world. We call upon the workers all over the world to render the utmost support to the fighting Indonesian people.

We urgently request you to follow the lead that our comrades, the Australian waterside workers, who ever since the proclamation of the Indonesian Republic have never failed to support the Indonesian people.

In the name of the people and workers of the Indonesian Republic:

We appeal to you to organize a world-wide workers campaign in giving a concrete shape to your natural sympathy towards the Indonesian fight for freedom.

Stop the war of agression in Indonesia !
Long live the Indonesian Republic !
Long live international working class solidarity !

-o-o-o-o-

INDONESIANS IN HOLLAND APPEAL TO THEIR PROGRESSIVE DUTCH COMRADES.

With great consternation and deep indignation the Indonesians, coming from the Republican, as well as the so-called Malino-areas and belonging to different social groupings, have taken cognizance of the resolution by the Dutch Government to break off negotiations with the Indonesian Government and to proceed to the application of military force in order to set the Republic their demands.

This took place, in spite of the fact that the Republican Government has met nearly all the ultimative demands of the Dutch Government.

The Indonesian Government was quite willing to do so, because people only want to start reconstructing their new state in peace and freedom as soon as possible. The force of arms by the Dutch prevents the Indonesians from doing this way.

One ought to be puzzled to know, how the Government of a nation, that has been fighting for freedom and justice under distressful conditions quite recently, now pressing onward its armies against an other nation, that devotes itself to the same values.

No juridical spin-funs can alter the fact, that war has broken out in Indonesia now. Many cities and villages are burning. With that, all attempts made by the Indonesians in this country to plug up the golf fixed between the Dutch and the Indonesian peoples, have been seriously injured; if it has not been made impossible all together.

We know, however, that a considerable part of the Dutch people, standing by the principles of freedom and justice, have turned away from the Dutch policy of violence.

The Indonesians in Holland urgently appeal to them, to lead the Dutch Government to stop the force of arms at once.

Perhaps it is not too late yet.

Amsterdam, July 25th 1947.

TZ.4.

REPUBLIC OF INDONESIA

Information Service

185 O.Z. Achterburgwal, Amsterdam (Holland)

phone 44459

Publications of the

Ministry of Information

Press-Reviews, etc.

No.9. Sept. 26th 1947.

NOTICE TO OUR READERS.

After the commencement of hostilities between the Netherlands and the Indonesian Republic, the publication of this Information Bulletin was temporarily discontinued. Loss of immediate contact with the Republican Government was a natural consequence of the complete prevention of communication with Republican territories. A logical result of the above is our failure to put this bulletin into circulation regularly.

In view of this we are glad to receive material, relayed to us via other channels. Although these tidings are not up-to-date, it is, because of their documentary value, most suitable to circulate them among our readers.

WE WILL WIN THIS WAR OF FREEDOM.

(by Sutan Sjahrir, former prime-minister of the Republ.Government July 1947.)

We Indonesians never wanted the war that now is being waged between us and the Dutch. In fact during its two years' existence the Republic did everything that is humanly possible to avoid fighting. And as now that the Dutch imperialists have launched this treacherous attack on us because they believe in tanks and bombs for the attainment of their aims, knowing that we have no bombs, tanks of other modern and murderous weapons, we once more will have to prove that in human history, human values, moral and spiritual, still decide at the end the course of history. Because justice, truth and human dignity are on our side we are convinced that at the end we will conquer this brutal force in the service of destruction, oppression, imperialism, this denial of human dignity and history. We will win this war of freedom.

MESSAGE TO THE WOMEN'S INTERNATIONAL DEMOCRATIC FEDERATION.

July 1947.

We, Indonesian women, urgently call your attention to the latest events in Indonesia.
On 20th July the Dutch started a war in Indonesia. They bombed our cities, and their military forces attacked and have occupied several places. All this, in spite of all our efforts to solve the Indonesian-Dutch problem in a peaceful way.
They sent us five demands, four of which we accepted. But the demand for a joint gendarmerie for all areas we had to refuse because it affects the very heart of our independence.
We have decided to fight to the bitter end, but we are afraid that this war may be the prelude to a third war. We are sure you will do your best to prevent this with all your might and main.
We expect you to act immediately.

On behalf of all the Indonesian women,
KOWANI.
Kongres Wanita Indonesia.
(Indonesian Women's Federation)

APPEAL BY MRS. S.K.TRIMURTI, REPUBLICAN MINISTER OF LABOUR.
July 1947.

Mrs.Trimurti addressed her appeal to all workers throughout the world, making particular mention of those in Malaya, India, China and Australia, as being countries linked through geographical and other condition together.

Remarking that a new State, the Republican of Indonesia, had come into being nearly two years ago, she stated that the independence of the Indonesian people was important to all the people of the world, on the grounds of Indonesia's essential products and raw materials, quite apart from the aspect of the rights of humanity.

The aim of the Republic of Indonesia was precisely that of the peoples of all the democratic countries.

On 20th July the Indonesian were attacked by the Dutch on the pretext of "police-action", which in fact was warfare. The Indonesian people had sincerely kept to a policy of following the path of peace, and were interested in securing the peace and order of their own territory.

This had now been violated by the Dutch, and therefore, the Indonesian people cried out to the whole world to get on their sympathy and mercy, and put a stop to further useless bloodshed.

Mrs.Trimurti concluded her speech with a call on all the working people of the world to take whatever decisive action lay within their power, direct or indirect, in support of their fellows in the Republic of Indonesia on whom the Dutch wished to impose their repressive rule once more.

THE RADIO-SPEECH OF DR.AMIR SJARIFUDDIN. July 21st 1947.
(Prime and Defence Minister of the Republic of Indonesia)

To-day the Dutch announced that their military forces have started their actions, to carry out "police measures" as they call it.

What these "police measures" mean, will be explained later on. But what is important here, is the fact that the Dutch have given up the road of peace; that in 1947, after World War II, after the creation of a United Nations Organisation; after years of existence of the International Court of Justice, after the Indonesian side have submitted a letter to the Dutch, requesting for a peaceful solution of the Dutch-Indonesian question by using article 17 of the Linggardjati agreement, which recommends the use of arbitration; that in 1947 a certain nation has raised her arms against a peaceful country, machine-gunning and bombing defenceless civilians; and all this in the name of "justice and law and order". Do the Dutch not know that these "police measures" can only result in further bloodshed, tragedies, and sufferings to thousands and thousands of people ? And do the Dutch not know that the existing relations between the Dutch and the Indonesians, achieved with some good result at the cost of so many difficulties, will be destroyed, and with a great chance forever? Worse, that feeling of revenge and hatred against the Dutch will aroused and never can be forgotten? The Dutch have made so many accusations against us, which, they said, finally forced them to use the strong hand.

But the fact is that after a long course of negotiations a small measure of agreement was reached, viz, the one which was taken to Hoge Veluwe in Holland by the Commission-General.

Who rejected this after the Dutch, the British and the Indonesian representatives had agreed upon? The world had been waiting eagerly for an Indonesian-Dutch agreement, so that trade and production could be resumed. But at the beginning and by the middle of 1946, after negotiations had been started in the month of November 1945, it was the Dutch who had always postponed a decision. Lord Killearn came and it was

because

because of his efforts that negotiations were resumed. After one month of discussion, a basis of agreement was reached on November 15th 1946, the draft agreement of Linggardjati.

The Dutch delegation left for Holland - saying only for a short vi in order to have the Netherlands Parliament sanction her decision. The result was a tragedy. What was agreed upon by the Dutch Commission-General, was debated, bargained and amended by the Netherlands cabinet and Parliament. It was only by the middle of January 1947 - 1½ months after their departure from Indonesia - that she returned, bringing with them not the same agreement to be signed, but one which was altered in meaning because of her own interpretation. Was this an attitude of sincerity? This was what the Dutch called serving the world's interests. Because of the different interpretation given by the Dutch to the agreement, four months more were spent in negotiations, untill finally the draft agreement of Linggardjati was signed on March 25th 1947.

Political conditions grew worse and as a result the military situat too. Could we believe in the sincerity of the Dutch, when the latter agreed to sign the agreement only after 4 months?
"The military situation is bad and consequently also the political", sa the Dutch, forgetting that their dilatory tactics had roused a feeling of distrust against them. Military incidents increased in numbers and t Dutch in addition often violated the demarcation-line regulations; in t Krian area because they said they merely fulfilled the population's desire. Naturally outsiders would ask: "What about Sidoardjo?" Did not the Dutch admit that the Dutch military actions in Krian-Sidoardjo were done without the knowledge of the Dutch Commission-General and of van Mook.

The Dutch said we constantly violated the truce, and that they were merely acting on self-defence. Those, who want to believe them, saying that all Dutch soldiers are kastrijas and Indonesian freedom fighters are criminals, can do so. On countless occasions, the Dutch violated truce; our coastal villages had often been shelled by Dutch war-vessels; their war planes ignored many times the truce regulations. They said that they only temporarily occupied Krian and Sidoardjo, but they never withdrew from these places. They created trouble in Bogor, [redacted] promised to return the town to the Republic but up till now they have no done it. In the month of January 1947, a new agreement on fixing demarcat ion lines was made. It was then agreed that both sides should withdraw 2 km behind the demarcation lines. But it turned out that the Dutch had refused to do so at more than 25 places, because, they said, they had no received any orders yet. These are the facts, and we are ready to put th case before an impartial third party. We are ready to abide sincerely by the Linggardjati Agreement, but the real one, and not by what the Dutch understand it, which is not the same. For them the de facto authority of the Republic has a special meaning, for they attach certain limitations to it. Even with regard to military questions, they have their own interpretation. According to the Linggardjati Agreement, the Dutch forces must be reduced, but what really happened had just been the contrary. Their present number of armed forces is greater than what was agreed upon in the truce agreement. Even this is open to investigations of a third party

It is often said that armed forces are necessary for maintaining peace and order. But we know what peace a la Dutch means: have a look at South-Celebes. Such is the state of affairs there that attention was drawn to them in the debates in the Netherlands Parliament. The same conditions, chaotic, unrest, oppression, etc. exist in Bali island. But if the Dutch accusations were true - and it is certainly not true - must the Dutch have 90.000 troops, completely equiped with heavy guns, tanks, planes ? Under the Dutch regime there were only 30.000 and in facing the Japanese they found 60.000 more than enough.

Nobody

Nobody can ever be convinced that present Dutch actions amount merely "police measures". Police measures involving the use of more than 100.000 men ? No ! What the Dutch are doing now is a colonial war. A colonial war in 1947, when the British are quiting India, and when Burma is on the threshold of freedom !

And we know what a colonial war is aiming at: 1. slandering the good name of the people, the opponent; 2. to divide and rule the people; 3. isolating the leadership from the people. And this is exactly what the Dutch are doing and saying: The Indonesian people are affected by Japanese influences; they don't have a wide outlook; large numbers of Indonesians want the Dutch to come back; and finally the Republican Government and the people's leadership themselves are no good. We are tired of hearing them. We have had bitter experiences under the Dutch and Japanese regimes. We are a free and united nation, organized into a state under an able government. For that reason we do not recognise and cannot accept police measures bu foreign powers in our country. We only know the existence of a national defence, if by police measures are meant the Dutch into our territory.

During the latest negotiations there was <u>only one question</u> about which no complete agreement could be reached, i.e. the question of joint gendarmerie. What was proposed to us was that we should accept the entry of Dutch troops into our territory. To our knowledge the responsibility of maintaining law and order within the Republic of Indonesia, lies upon the shoulders of the Republic herself. We are ready to co-operate in the gendarmerie directorate, but entry of Dutch soldiers into our territory means ignoring the existence of our authority, if not limitting it. We have refused this demand. <u>And this is the basis of our political differences</u>. It is not the question of cease fire, nor of food blockade. If the Republic were asked what her complaints are, she would say: Why all this blockade, making it difficult for the import of clothing materials and medicines; why not open the big ports for export of our products and trade in general; why are the Dutch forces not reduced; why are Krian, Sidoardjo, Bogor not returned; why have the Dutch, following article 1 of the Linggardjati Agreement, not immediately returned the occupied areas? And so on, a long list of them. What the Dutch really want is a colonial war, to recolonize Indonesia, even if force is necessary. The people of Indonesia, let us all utilise all our energy, all efforts of the entire nation for the defence of our independence. We have many friends abroad, and we have still plenty of strength in our country. We will fight on, every one of us, every section of the people, every party, youth, woman, the armed forces, the whole country. Once more ! I ask you to answer the call of the National Defence.

On 21st July, Mr.PETER RATCLIFFE, the "only Englishman in Jogjakarta" as he said, broadcast to the world because he felt it his duty to make an unbiassed report on what he himself had seen and heard in the Republic since the opening of the Dutch hostilities. Australian papers state that this speaker is a Lieutenant Colonel on demobilisation leave from Singapore; in his radio speech he himself only claimed to be an Englishman on a private visit, forced by his conscience to make a first broadcast in order to deny Dutch propaganda that there was disorder or unrest in Republican Territories. He also added the Republican forces were but poorly equipped and that against these and the civilian population the Dutch were using heavily mechanised planes, warship, tank and armoured units. Mr.Ratcliffe concluded his broadcast by asking for international assistance to come immediately to end the bloodshed, and secure justice.

In his second radio-speech he said: When I spoke to you before, I wasn't taking sides in the political dispute in Indonesia; I also said I wasn't making propaganda. That still remains true, and I haven't changed my mind on those matters.

But a thoroughly unsavoury situation has developed here in the Indonesian Republic, and I must tell you about it.

It is all to apparent that a full-blooded colonial war is now raging in this country and that of Sumatra. By a colonial war, I mean a war undertaken by the N.E.I. Government to impose on the Indonesian people an extent of colonial dominion they could not obtain by negotiation.

It is the same sickening situation all over again: if you cannot get what you want by negotiation, you rattle and sabre: we have seen it all before in Europe. That is what has happened here in Indonesia. The Republic did make compromises, but didn't concede everything that the Dutch demanded and that was not enough for the Dutch. They could see the Republic there before them, their forces were strong and wellequipped,and their patience was exhausted, as Hitler used to be.

You will be able to estimate by this what degree of independence the Indonesians might expect to receive if the Dutch gain their ends. This is not a war to restore order to a troubled country, it is a war to restore colonial rule, and the Indonesians feel they have had enough of that. The colonial rule of the Dutch during the past 350 years had a policy so oppressive and illiberal that anything would be better to the Indonesians than to return to that once more.

I am speaking to you tonight because I feel I must, and my capacity in doing so is merely that of a private citizen and subject of the King, and my address is directed particularly to my own English people. I am here in Jogjakarta, because there is no transport to get out - not that I am greatly concerned about that. I shall be quite happy here. But I am not going to stay here and sit back and do nothing when the situation here is an exact prototype of what we fought in Europe.

I cannot ask you to help relieve this position, as I did in my last broadcast, and I myself do nothing to assist. It is to our advantage to help on moral, humanitarian and economic gen grounds.

There is one aspect of particular interest to the British people. The British Government has shown its wisdom and statesmanship in deciding recently to hand over the government of India to the two new Indian Governments. But is has displayed not only statesmanship and a feeling for the new national currents prevalent throughout the world, it has shown real goodwill to the Indian people. And so we are justified in feeling thoroughly disgusted at what is happening in this country and in Sumatra, where the Dutch are displaying a quite outmoded mentality,and where a new war has been started.

Yesterday I was privileged to have a quite long talk with President Sukarno, who extended his appreciation and gratitude for the good offices of the British people for their assistance in helping with the negotiations which seems they would be so nearly successful. President Sukarno said to me: "I would like you to believe that I am not a diplomat, but I think I

MAY

may claim to have some influence over my people. And I assure you that if the British people can now do something to stop this war, then the people of this country will never forget it". The president was being more than modest of his own capacity, but I am sure that what he said of his people was very true.

Many of them here in Jogjakarta speak English, and I have always found them very appreciative of what our people have been able to do to help. I couldn't help being impressed by the way the people are behaving during the last few days. There has been no fuss and certainly no disturbances or panic. They are behaving very much as the English people would have done if Churchill had call them to fight the Battle of Britain with their own hands on their own soil, in their own streets.

It is true that they no means to withstand for very long the mechanised attacks of the Dutch. I think those means may shortly be only knives; or stones. It is evident that the Dutch will make many early gains. But it is very clear that there will never be peace or security in this country unless this war is stopped very soon. It is also very doubtful how many Dutchmen will remain alive, even if they win all the big battles.

I am therefore now appealing to the British people wherever they may be to urge their several Governments to put a stop to this ghastly and unnecessary war. It is to their own advantage to do so. For if we let it go, when can say but what we may not be faced with the same position in Europe before long ?

This war is causing the slaughter of many patriotic but unarmed young men; but is also the sort of thing that will cause the British and the Dutch people too to stay short of sugar and motorcar tires for the rest of their lives. And it not a pleasant thing to stand by and see a weak nation being bullied and beaten by a strong one.

President Sukarno told me he had always urged his ministers to seek peaceful solutions in their negotations, and that he had never really believed that a war is possible. If you could see what I have here you would agree that the complete lack of any serious preparations for war are just about the best testmony to the truth of this statement that anyone could ask for.

In Djakarta (Batavia), I met and talked to many Dutch officers who were fair goodwill, and I know that if these men of goodwill were allowed to meet the men of goodwill here, a peaceful solution could be found through discussion.

It is to the greatest interest of us all to help, and if the British people will urge their Governments to act <u>NOW</u>, they will bring a solution to this problem, and will ensure their own future.

<u>APPEAL TO AUSTRALIAN YOUTH.</u> July 1947.

To our fellow youth in Australia, we, Indonesian Youth, wish to say that we fully realise what you have already done to assist and help us, and that your aid has been received with heartfelt gratitude by the Indonesian Youth and people.

Your love of justice is well-known to the world and we too, the Youth of Indonesia, are resolved to hold fast to our principles of justice and democracy.

Our two peoples are bound togheter by bonds of friendship and understanding and by the ties of the same ideology and aspirations.

We appeal to you for your support in this crisis for our country, for your full support. We appeal to you to boycott the Dutch now and all their undertakings, so that peace and order can be restored in Indonesia in the shortest possible time. Act NOW.

<u>MESSAGE TO THE WORLD YOUTH FESTIVAL AT PRAGUE.</u>

Broadcast on 28-7-'47.

<u>The</u>

The youth of Indonesia, through the All-Indonesian Youth Congress, the Indonesian Islamic Youth, and the National Union of Indonesian Students, sends the following message to the World Federation of Democratic Youth at its Prague conference, the World Youth Festival:

Comrades, progressive and democratic Youth the world over, who are at this moment chiefly celebrating the World Youth Festival in Prague, we Indonesian Youth urgently call your attention to the following.

On July 20th, the Dutch started large-scale military actions in our country in spite of Indonesia's proved good-will to settle the Indonesian-Dutch dispute in a peaceful way. The Republic had been willing to accept nearly all the Dutch proposals, so long as the democratic principles and the de facto authority of its Government was not endangered. But all this did not quench the thirst of the Dutch reactionaries who still sought their dominion over us, and so, under cover of highsounding phrases launched their attacks throughout our country, plunging Indonesia into a colonial war.

Thousands are being driven towards violent death, thousands of our Youth are being put into prisons and concentration camps, our towns and villages are being bombed and machine-gunned. The Indonesian Youth, loyal to the democratic principles they hold in common with you, are firmly resolved to defend their rights against the agressor while their strenght lasts, and they still live.

To our comrades and progressive Youth in Festival, building a peace and a new world, on behalf of the fighting Indonesian Youth, we pass to you this appeal for help and assistance.

The moment has come to act. Every day of postponement means many hundreds of young lives sacrificed to the greedy Dutch war-machine.

COUNCIL OF THE WORLD FEDERATION OF DEMOCRATIC YOUTH (WFDY), PRAGUE, August 1947.

Resolution on the aid of the WFDY to the Youth of Indonesia.

The Council of the WFDY condemns the Dutch attack on the Indonesian Republic as a menace to peace and an imperialist attempt to deprive the youth of the Indonesian Republic of their newly won freedom.

It salutes the heroically fighting Indonesian youth and declares its full support with their struggle for National liberation. Considering the future tasks of the WFDY for peace, the Council calls upon the member organisations of the Federation.

a) to hold solidarity demonstrations demanding the end of the war in Indonesia and the complete withdrawal of Dutch troops.

b) to call on young dockers to refuse to load and unload Dutch ships carrying war material, and request the WFDY to give a similar call throughout the world.

c) to run a campaign to prevent Dutch planes for Indonesia from using the airfields of their countries.

d) to send supplies and medicines to the Indonesian Republic.

e) to exert the maximum pressure on their governments to support the Indonesian case in UNO.

f) to demand UNO arbitration as against the intervention of any single country, on the basis of the recognition of the de facto sovereignty of the Indonesian Republic.

The Council welcomes the action already taken by the progressive Dutch youth to end the colonial war and appeals to them to fully realise their responsibility in the matter and strengthen their work against the Dutch reactionaries who have launched the war.
It appeals to the British and American Youth to exert maximum pressure

SR

on their governments to stop arming and training Dutch troops and giving financial aid in the forms of loans etc. to the Dutch and to support the Indonesian case in the UNO. It welcomes the action already taken by the Indian and Australian youth on the Indonesian issue and asks them to strengthen it still further.

The Council instructs the Executive Committee and the Secretariat of the Federation to lead this campaign with maximum energy and effectiveness.

MESSAGE FROM U.S.A. DELEGATION. August 1947.

The U.S. council members to the World Federation of Democratic Youth (WFDY), on behalf of American Youth, warmly greet the heroic Indonesian youth in your valiant struggle against Dutch agression.

We express our deep regrets that the U.S.government is aiding the Dutch government to prevent the independence and freedom of Indonesia. Upon our return to the United States we pledge to do our utmost to develop among American youth a real understanding of your struggle and to unify our youth on your behalf.

Long live the heroic Youth of Indonesia !!

(sg) Doris Sink
American Youth for a Free World.

AMERICAN YOUTH SALUTES YOUTH OF INDONESIA.(Youth Festival Bulletin)
Prague, 15-8-'47.

At a meeting of the American delegation at the World Youth Festival attended by 60 members, it was adopted to send the following message on the present situation on Indonesia:

"The American delegation at the World Youth Festival warmly greets the heroic people of Indonesia on their present valiant struggle for selfdetermination and freedom from Dutch oppression. Because of our own heritage of fighting for freedom in the Revolutionary War, we American Youth understand your determination to be a free and independent nation.

We recognize the United Nations as the organization through which such a dispute should be settled and strongly urge that the Security Council adopt such procedure. We regard attempts to bypass the United Nations in such disputes as undermining the foundation of world peace and we acclaim the Indonesian people for voluntarily submitting their just demands for liberation to this body.

We consider the continued presence of Dutch troops in Indonesia as a condition which makes impossible peaceful settlement of those questions. The immediate withdrawal of Dutch troops would be a documentation of the sincerity of the Dutch Government. Only through such positive action can the cause of world peace and democracy be advanced and the oppressed and exploited colonial people of the world fulfill their just demands of self-determination: We pledge to do our utmost to unify the American youth and people on behalf of the Indonesian people."

REPUBLIEK OF INDONESIA

INFORMATION SERVICE

185 O.Z.Achterburgwal, Amsterdam (Holland)
phone 44459.

Publications of the
Ministry of Information.

Press-Reviews,etc.

No.10. October 4th 1947.

STATEMENTS MADE BY DR. SUTAN SJAHRIR BEFORE THE SECURITY COUNCIL MEETINGS. (August - September 1947).

On 10th August, Dr.Sjahrir arrived in New York to represent his country before the Security Council, and on 12th August, the Council decided by eight votes to three in favour of hearing him. The three votes against were cast by Britain,Belgium and France.

After discussions on the Indonesian question in which Dr.Sjahrir was supported by the Delegations of India,Australia, the USSR, Colombia and Poland, the Security Council adopted by seven votes to nil, Poland, Colombia, Great Britain and the USSR abstaining, a joint Chinese and Australian proposal which noted "with satisfaction the statement made by the Netherlands Government issued on 11th August in which they affirm their intention to organise a sovereign,democratic, United States of Indonesia, in accordance with the purpose of the Lin gardjati Agreement". It proposed that the Consuls in Batavia of the States represented on the Security Council should act as a body of observers on the cease-fire order in Indonesia and investigate conditions in the military occupied areas. Dr.Sjahrir expressed uneasines about this proposal on the grounds that most of the Consuls looked at the situation through Dutch eyes and would "naturally be considered prejudiced observers."

The speeches which followed are those made by Dr.Sjahrir, and together they provide a valuable summary of the rise of the nationalist movement in Indonesia and of events since the formation of the Republic on 17th August 1945.

I. DR.SUTAN SJAHRIR.

"At the very outset I, on behalf of the Government of the Republic of Indonesia thank you, Mr.President, and the Members of the Council for your sense of fair play and justice in granting me the opportunity to participate in the discussions of the Security Council of the Indonesian question.

In my capacity as representative of the Republic of Indonesia, I am going to address the Members of this Council on behalf of a country which, for the common people of the occidental world, has only recently come into existence, or even on behalf of a people considered as just having started on the road to nationhood. Such being the

case, it may be fitting for me to point out that I am here to represent a people whose history goes back more than a thousand years.

In the fourteenth century, my people constituted the Empire of Madjapahit which embraced all the islands of Southeast Asia and extended from Papua te Madagascar. This kindom had an efficient administration, and in those days - maintained relations with countries as far distant as China and Europe . In the sixteenth century my people first came in contact with people of the West. It was most unfortunate that this contact should have taken place at a time when we were on the decline, Western influence began to make itself felt and kept on increasing in proportion to the rate at which we were falling backward.

The rapid expansion of western power led to the decline and fall of my people, and in his process my country lost its freedom. By this time the Dutch East India Company has established itself. Later it was transformed into the Dutch colonial government and as such held away for nearly one and a half centuries. By this time the degration of my people was complete. These factors must be borne in mind when evaluating our relations with the Dutch. It must also be remembered, however, that as a people we have had our own history and traditions - both as a nation and as a state - going back many centuries.

Our history books and the great stone relics scattered about our islands bear evidence of the civilisation and culture we achieved in the past. However, under Dutch domination and colonial rule, our history took a tragic turn. Not only did Dutch oppression and exploitation account for our backwardness and degradation, but they also led to the fall of my country from its ancient proud place to that of a weak dejected colony.

Long after we as a people had, so to speak, disappeared from the face of the earth, the general political awakening of Asia, the rebith of the Orient, also affected us. At the end of the nineteenth century we began to regain our soul gave bith to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. From that time on, it has been our constant desire, our one ideal, our strife and struggle, to become a nation again.

In 1918 our national movement gained great strength and the desire to free Indonesia from Dutch rule had become universal.

A common with similar movements in other countries, my people too bent all their energies to achieve the status of an independent nation. But as in other countries, the national movement was not popular with colonial rulers. Nationalists were imprisoned and exiled, but the struggle went on. In 1926 the Dutch carried out large-scale military actions against Indonesians. Those made prisoners but who could not be convicted by the courts were sent to the Dutch concentration camps in New Guinea. And as these oppressive measures were carried out against thousands of nationalists all over the wide territory of the archipelago it is apparent that opposition to Dutch rule was widespread.

When the Japanese attacked the Dutch in Asia, our national movement had already been in existence for decades in all the islands of the Archipelago. Since 1918 our national movement for freedom had chosen democracy as the goal of the country from among all the current political ideologies. In the second world war we placed our reliance on the democracies in their fight against the Fascist countries. We accordingly asked the Dutch colonial government to assign our national movement

an active role in the war. Our offer, however, was turned down by the Dutch, thus destroying a good chance to bring about a new and better relationship between us and the Dutch.

At the time when the Dutch were defeated by the Japanese, the Indonesian people were not given a chance by the Dutch to manifest, as a people, what our attitude and esires were in the field of global relations.

Eventually we were sacrificed to the night of the Japanese. The result was three and a half years of misery for my people, and for all that happened during the Japanese occupation the Dutch must be held responsible. Our sufferings were in no way less than those of other countires.

During the Japanese occupation our national movement was continually seeking opportunities to organise itself as a force with which to end Japanese domination. We were convinced that the Democracies were bound to win. Our people placed their faith in the promises of the Atlantic Charter; its meaning for us was that we would be set free from colonial domination. The Japanese were keen to win over the nationalists, but our people were bent on the achievement of full nationhood, rejecting each and every kind of alien leadership or tutelage.

When, in the middle of 1945, it was plain that the Japanese were going to lose the war, the Indonesian democratic movement took steps to act for the people and take their future in their own hands. Therefore, it was not the conversation of some Indonesian leaders with the Japanese at Saigon in [July 1945, which lies at the root of the constitution of the Indonesian Republic, but that the birth of the Republic was a result of positive action on the part of the national movement in the country.

It can conclusively be proven that, at the time of the conversations at Saigon - and even later - the Japanese had no real intention of setting up any kind of a free Indonesia, let alone the independent Republic of Indonesia. On the contrary, some days before the Japanese surrender there was every indication that the Japanese were trying to prevent and counteract Indonesian activity in that sense. In February 1945, there was a mutiny of Indonesian troops of the National Voluntary Degense Forces under the Japanese command. Subsequently the Japanese started gradually to disarm all Indonesian troops.

Form my own knowledge I can [say that the declaration of Indonesian Independence on 17th August 1945, was the work of the democratic movement I spoke of. From the big towns down to the smallest villages, the people seized power from the Japanese and handed it over to the Republic. Is there in the course of history any country as democratic as this, where the people, having seized power, handed it over to their government as the lawful authority?

The past 24 months have the extraordinary longing and desire of the Indonesian people to set up a peaceful state. The people handed over to the Government the arms they had captured from the Japanese and thus the Republican regular army came into existence.

When the Allied forces landed in Indonesia, the people regarded them as friends who had come to liquidate the Japanese occupation. Allied troops were therefore received in all friendliness. The people never for a moment throught that the armed forces of the democratic were going to endanger the freedom of the Republic which the Indonesian people had won for themselves.

Tens of thousands of Dutch nationals concentrated in camps by the Japanese were not regarded by the Indonesians as enemies. It was only when several hundred Dutch soldiers who had landed with the British were guilty of various acts of enmity in Batavia that trouble developed with the Indonesians. It was only then that my people began to question and distrust the attitude of the Dutch towards the Republic.

Tens of thousands of Dutch internees were still in Japanese concentration camps. When the Dutch soldiers in Batavia started trouble, the Allied army of occupation became suspect. Fighting broke out in Surabaja on a big scale.

With the landing of large numbers of Dutch soldiers in Java, relations deteriorated more and more between the Republic and the Allied army of occupation. Clashes became frequent and the atmosphere tense.

However even in those circumstances, the young Republic went ahead in tis task of achieving peace and security. At the same time it was extending all - out aid to the Allied army of occupation to help it carry out its tasks in Java and Sumatra. During a period of 14 months the Republic disarmed 70.000 Japanese troops and evacuated them out of Republican territory. In addition to this, Republic evacuated more than 30.000 Dutch and other allied civilian internees. Both these tasks were delegated by the Allied command to the Republican Army.

The Representative of the Netherlands, in a statement to this Council the other day, accused the Republic of holding 700 hostages; but this accusation has no bais of truth. There are no more internees left in Republican territory. The hostages which the Representative of the Netherlands has suddenly discovered were never before alluded to or mentioned in official Dutch statements, either in Indonesia or in Holland.

The work completed by the Republican of evacuating tens of thousands of Japanese prisoners of war, as well as Dutch and Allied civilian internees, provides a good illustration of the discipline and ability of the Republican troops to carry out their appointed duties. It also furnishes an indication of the ability of the Republic itself - and of its willingness - to implement its undertakings.

When the Dutch civilian administration landed in Java in October 1945, there were no Dutch troops there. The whole of Java, Sumatra and Madura was under the complete control of the Republican Government. In spite of the great military advantage the Republic enjoyed, the Republic was willing to enter into negotiations with the Dutch. From then on, the Republic made repeated attemps to come to an understanding with the Dutch. The Dutch at the start refused to have any discussions.

Finally in March 1946, through the active intervention of the United Kingdom Government, there arrived in Batavia Sir Archibald Clark Kerr, now Lord Inverchapel, who has sent to place his good offices at the disposal of both sides. Thanks to the patience, tact and ability of that British diplomat - and not forgetting the earnest desire of the Republic to come to a settlement with the Dutch - a draft agreement was finally reached. I, in my capacity as Premier, acted for the Republic; Dr.van Mook, the Dutch Lieutenant Governor-General, acted for the Dutch Government.

This draft agreement, gentlemen, was 90 per cent the brain child of Dr.van Mook, but my Government accepted it in order to facilitate a quick settlement, Sir Archibald, an Indonesian delegation under Dr.Suwandi, and a Dutch delegation headed by Dr.van Mook left for Holland to get the approval of the Dutch Government. Dr.van Mook told us when he was

leaving for Holland that he would be back in a couple of weeks with the assent of his government. But the Dutch cabinet completely ignored the draft agreement. Two months went by before Dr.van Mook returned - but with a completely new set of proposals.

After a complete breakdown in the negotiations and a period of continuous military activity by the ever-increasing Dutch forces, the time had come for the British army of occupation to leave Indonesia.

Accordingly, Lord Killearn, British Special Commissioner in Southeast Asia, came to Indonesia to act as mediator in a new attempt to bring both parties to a settlement.

This was in October 1946. Shortly after his arrival, on 14 October a truce agreement was signed whereby the Dutch undertook not to increase their armed forces in Indonesia beyond the figure of Allied strength on that date which stood at 91.000 men.

After weeks of patient negotiations between Indonesian and Dutch delegates, with Lord Killearn in the chair, a compromise was arrived at and the Linggardjati Agreement was initialled by both parties, Indonesian and Dutch, on November 15, 1946. The Dutch Commission-General, which had come to Indonesia from Holland to negotiate this agreement, then left for Holland with the intention of coming back before Christmas of the same year.

The Commission-General finally did arrive back in Indonesia, but not earlier than March this year months later. But they had not come to sign the Linggardjati-Agreement. They came with a demand that the Republic accept the interpretation of the Agreement as given unilaterally by the Dutch Government. This interpretation is known as the Jonkman interpretation, after the name of the Dutch Minister for the Colonies. The Republic refused to accept the Jonkman interpretation and, after prolonged haggling, the Agreement was finally signed on 25 March 1947, four months and ten days after the initialling at Linggardjati, on the understanding that the Jonkman interpretation was not to be binding upon the Republic.

In the meantime, the Dutch had already violated the status quo established by the October truce. Dutch troops seized and occupied the towns of Buitenzorg and Palembang. They started a full scale military action in East Java which culminated in the Dutch occupation of the Republican town of Sidoardji and Krian. Meanwhile, Dutch military activity had increased along all perimeters. Simultaneously, the Dutch maintained an intensive blockade of Indonesian ports.

In this connection, it will be remembered that an American merchantman, the Martin Behrman, proceed to the Indonesian port of Cheribon with the approval of the United States Department of State in Washington. The ship also received permission from the Netherlands Trade Commissioner in Washington to load cargo at Cheribon. In Spite of these undertakings, the Dutch Colonial Government seized the cargo of the Martin Behrman after completion of the loading at Cheribon.

This Dutch naval blockade not only prevented the reconstruction and rehabilitation of Indonesia, but it went so far as to seize as contraband sorely needed medicines shipped to Indonesia from outside ports. Ships, mostly Chinese owned, plying between Singapore and Indonesian ports were seized on the high seas outside territorial waters.And it was generally recognized that this Dutch blockade was aimed at strangling the Republic economically.

But this was not all. Two days before the signing of the Linggardjati Agreement on 25 March last, Dutch forces moved into and occupied the East Java town of Modjokerto. Fighting subsequently flared up in this area, and the consequences of that action were the destruction of property so eloquently described to this Council by the representative of the Netherlands on the afternoon of 1 August.

In spite of repeated Dutch violations, and in spite of the occupation of Buitenzorg, Palemban, Sidoardjo, Krian and Modjokerto by the Dutch army, the Republic signed the Linggardjati Agreement in the sincere belief that Dutch aggression would be brought to an end. It was our hope, that, with the political situation stabilized, we could go ahead with the urgent task of reconstruction and rehabilitation.

One of the points agreed upon between the Dutch and the Republic when the Linggardjati Agreement was initialled in November 1946, was that the future state of the United States of Indonesia was to be brought into being by cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Netherlands Government.

Subsequent to this date, however, the Dutch Colonial Government, without the knowledge or approval of the Republic of Indonesia, set up in violation of the agreement the puppet states of East Indonesia and West-Borneo, together with other political entities as dependencies of the Dutch in the Dutch controlled parts of Indonesia. These creations, it will be clear, were brought into being for the express purpose of using them as bargaining counters against the Republic of Indonesia.

Because of this fact, it is not surprising that the representative of the Netherlands has asked this Council to permit officials of those so-called states to be present here to back his statements. These men, however, are representatives of feudal systems being perpetuated by the Dutch.

These men are more officials appointed by and owing allegiance to the Dutch Colonial Government.

After the signing of the Linggardjati Agreement came the question of its implementation. Here it became apparent that the Dutch were adhering to the Jonkman interpretation which the Republic had rejected as being unilateral. A new crisis developed and came to a head on 28 May of this year when the Dutch issued an ultimatum demanding that the Republic accept new proposals evidently based on the Jonkman interpretation of the Linggardjati Agreement.

The Republic replied with a counter-memorandum dated 7 June, in which the Republic put forward constructive proposals based on the original Linggardjati Agreement.

At this point in the discussions, the Dutch indicated that they were not prepared to negotiate with us any further. As deadlock followed deadlock, the Republic called upon the Dutch to implement Article 17 of the Agreement which provides for arbitration. These repeated Republican requests were ingnored by the Dutch. By this time, Dutch military strength had increased by 30 thousand above the permitted figure of 91.000, and stood at 120 thousand. It was apparent that the Dutch were prepared to make use of their military strength and force us into a complete surrender. We, on the other hand, anxious to preserve peace at any price, conceded nearly all the Dutch demands, in spite of their being contrary to the Linggardjati Agreement, except for some very minor points. Included among these was the Dutch demand for the appointment of a joint constabulary for Republican areas.

On 19 July, we were confronted with another set of demands, included among which was one demanding that all Indonesian troops withdraw ten kilometres from their then positions within twenty-four hours. At this time, it was common knowledge that the Dutch had mustered great strength at these very perimetres. The Republic asked for another twenty-four hours in which to consider the matter. This request was refused by the Dutch.

On 20 July, the Republican Government, throught its Vice-Premier, A.K.Gani, then at Batavia, handed to the Dutch colonial Government a written request from the Republic for implementation of Article 17 of the Linggardjati Agreement. The Dutch Colonial Government stated in reply that the Indonesian request had been forwarded to the Netherlands Government in Holland. This was at 8:00 p.m. on 20 July. At 11:00 p.m. the same night, one hour before the Dutch ultimatum expired. Mr.Gani was handed a letter from Dr.van Mook, acting Governor General, which stated that the Netherlands Government did not consider itself bound any more by the Linggardjati Agreement. It was at this juncture that the Dutch repudiated the Linggardjati Agreement.

Simultaneously, the Dutch army commenced military operations against the Republic. The Dutch seized all communications facilities and arrested two hundred Indonesians in Batavia.
Included among these arrested was Mr.Gani who was therefore, apart from the lack of communications facilities, unable to transmit the Dutch note to the Republican Government in Jogjakarta.

In view of these facts, it appears that the Dutch Government have never at any time sincerely desired a peaceful settlement with the Republic. On the other hand, all Dutch action - political, military and economic - was none other than preparations for agressive action against a partner to an agreement. Although the Republic has been forced to defend itself, military, it still hopes to achieve a settlement by peaceful means. Our Government therefore asked the Security Council to issue the cease-fire order with the undertaking that the Republic would abide by the decision of the Security Council.

Now that the Security Council has already called upon both parties to cease hostilities forthwith - and now that both parties have accepted the order of the Security Council - there has been an increase in the hopes of the Republic for a peaceful solution. So long, however, as Dutch troops remain in Republican territory, there remains the threat to the very existence of the Republic and, therefore, that the Security Council of the United States order the complete withdrawal of Dutch troops from all Republican territories.

In this connection, I would like to go back to the donditions obtaining in Indonesia shortly after the Republic was set up on 17 August 1945. It is conceded by all impartial observers that law and order reigned throughout the country, that the machinery of government turned over smoothly, and that not a single untoward incident marred the cordial relations existing between different groups of the population. But when Dutch troops began landing in Indonesia the whole picture changed. The quietness was rudely shattered. Conflicts broke out. Law and order were upset. And confusion and disorder increased with the number of Dutch troops in Indonesia. Such conflict was inevitable. The Republic states categorically that the possibilities of conflict and interference with law and order have been multiplied manifold by the presence of Dutch troops in large areas of Republican territory. The Republic also states without qualification that if Ditch troops are completely removed from Republican

Republican territory, conditions will once more be established for a peaceful and orderly life and the maineMance of law and order; and, if this is done, the Republic assures the Security Council that it will hold itself responsible for law and order in all Republican teritory.

The Republic can pruduce responsible witnessed - Dutch as well as others - to show that before the present Dutch occupation of Republican territory, disorders were only present along the perimeters where Indonesian and Dutch troops faced each other. Elsewhere in Republican territory, live moved along in quiet, peace and security.

The first stop towards the restoration of law and order in Indonesia would be the withdrawal of Dutch troops to the positions allocated to them by the truce agreement of 14 October 1946.

The Republic of Indonesia also asks for a commission to be appointed by the Security Council of the United Nations to proceed immediately to Indonesia to supervise implementation of the Council's order of 1 August for the cessation of hostilities. Troops of the Republic of Indonesia ceased fire unconditionally,but Dutch troops are still continuing what the Dutch colonial government calls "mopping-up" operations.In addition,conflicting reports of the situation are emanating from both sides in Indonesia, which makes it all the more desirable that there should be present in on the spot an authorative commission appointed by the Security Council to supervise the cessation of hostilities and report back to the Security Council its finding, so that the Council will have before it, at all times, impartial and authotitative reports on the day-to-day situation in Indonesia.

This same commission might eventually report on law and order in those areas recently seized by the Dutch in their present campaign when withdraw takes place of Dutch troops to the positions assigned them by the truce agreement. This commission could also suggest the measures to be taken in case of necessity to guarantee that law and order prevail and that there shall be no retaliations. In view of this, the Republic of Indonesia asks the Security Council to conclude its valuable work on the Indonesian question by appointing a commission to arbitrate on all points of dispute between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Netherlands as the one and only means of ensuring a peaceful and stable solution of the Indonesian question.

I wish it to be placed on record that my Government has gratefully accepted the offers of both the United States' good offices and the Government of Australia's mediation of arbitration as a constructive step towards the setting up of such a commission.

One again I reiterate the pledges of the Government of the Republic of Indonesia, as publicly stated by me in New Delhi,which reads: "I am authorized to declared that the Government of the Republic of Indonesia will accept any impartial arbitration, and will abide by decisions of the Security Council with regard to obligations, duties and responsibilities also by the United Nations Charter."

On behalf of the Government of the Republic of Indonesia, I tender to the President and the honourable Members of the Security Council my thanks for the opportunity given to me to speak at this Council."

II. Dr.SUTAN SJAHRIR.

II. Dr.SUTAN SJAHRIR.

"On 17th August 1945, the people of Indonesia declared themselves independent. They proclaimed and established the Republic of Indonesia. They adopted a constitution; they promulgated laws. They set up a parliament and they formed a government. The administration of the islands of Java, Sumatra and Madura was purely in Indonesian hands. Subsequently, however, certain towns in Java and Sumatra became Dutch-occupied areas. On 15 November 1946, the Republic of Indonesia and the Government of the Netherlands concluded the Linggardjati Agreement. In this agreement the Dutch recognized the de facto status of the Government of Indonesia. This de facto status of the Republic has been and is something more than a "microphone" in Jogjakarta, because it included:

Firstly, an Indonesian administration functioning independently of the Dutch colonial administration.

Secondly Indonesian courts of law officiating independently of te Dutch colonial judiciary.

Thirdly, Indonesian army acting independently of the Dutch army, and

Fourthly, Indonesian finance and currency existing independently of Dutch finance and currency.

The Republic of Indonesia administered the territories under its jurisdiction completely independently of other countries, including the Dutch colonial government and the government of the Netherlands.

Similarly, when the Linggardjati Agreement was concluded, various countires recognized the status and competence of the Republic of Indonesia.

During the past two years the Republic of Indonesia has been responsible for the maintaining of law and order in the territories under its jurisdiction. This fact has been implicity recognised by the various countries - including the Netherlands - which have recognised the de facto status of the Republic of Indonesia.

So much for the status of the Republic of Indonesia. I now want to say a few words about the different proposals put forward in this Council for a settlement in Indonesia.

Generally speaking and to be quite frank, none of these resolutions has helped to dissipate our doubts regarding events in Indonesia. To my mind two facts stand out clearly- the first is that the military threat to the existence of the Republic grows graver with each passing day. The second is that the cease-fire order given by this Council on 1 August - twenty-four days ago - has not put a stop to the fighting. A clear appraisal of the situation makes it necessary for me to reiterate,with all the emphases at my command, my original request for action of a more effective nature by the Security Council.

The Security Council should not hesitate to condemn Dutch aggression; and, as the next logical and inevitable step, should require Dutch troops in Republican territory to retire to the positions they occupied in Conformity with the Truce Agreement of 14 October 1946.

To call on the Republic of Indonesia to negotiate with the Dutch, and at the same time to ignore this fundamental pre-requisite,is not consonent with the dictates of justice.

Because of this inescapable fact, we feel that the resolution put forward by the United States delegation will adversely affect the Republic of Indonesia.

The Republican standpoint, therefore, remains unaltered, namely that there can be no such thing as a stable peace in Indonesia so long as Dutch troops remain in Republican soil. It is in order to achieve that objective in a peaceful manner that we ask for arbitration so that it may be made possible for Dutch soldiers, who now occupy more than half of Java, to be withdrawn from the territories of the Republic.

The Indonesian delegation has categorically stated that the Republic of Indonesia will remain bound by each and every decision of the Security Council in the appointment of a commission or commissions for supervision of the cease-fire order and for arbitration. The Indonesian delegation again signifies its adherence to that pledge, and also wishes to stress at this point how vital it is that the composition of any such commission or commissions should be above suspicion. This delegation therefore, asks the Security Council to give the undertaking that all such commissions will be impartial. If there should exist any doubt on the question of impartiality, it must necessarily follow that the decisions arrived at by those commissions will neither command the confidence of the parties concerned nor be conducive to beneficial results.

The Indonesian delegation is prepared to accept any resolution for impartial arbitration provided the Security Council is not by-passed. But this delegation must confess to a feeling of disquiet about the other resolution - the one over the supervision of the cease-fire - which asks for a commission composed of career diplomats now in Batavia. Up till now most of these men have looked at the situation in Indonesia through Dutch eyes and they, naturally, will be considered prejudiced observers. And this suspicion is heightened by the action in this Council of the delegations of some countries from which those officials come. Openly and clearly and without a shadow of a doubt these delegations have taken the Dutch side in this Council. Their partiality is patent.

The Indonesian delegation feels that the personnel of any commission appointed by the Security Council should be untainted and free from the slightest breath of suspicion. We again stress the need for impartiality, and add that any Security Council commission appointed to supervise the cease-fire and carry out other investigations will receive the active assistance and cooperation of the Republic of Indonesia in the execution of its duties.

Conscious of the fact that every minite wasted in profitless discussion in this Council adds to the rising toll of lives in Indonesia, and to further threats of aggression, I am deliberately restricting myself to a short statement. But I would be failing in my duty if I did not call to the attention of this Council how pointedly official news from both Indonesia and Holland states that Dutch forces, whose activities were never curtailed by the cease-fire order, have resumed their large-scale military aggression. The Dutch have not given up their plans to use their military strength to destroy the Republic, and the destruction of the Republic of Indonesia was, and is, the objective of the Dutch army.

In view of all this, the Indonesian delegation hopes that the Security Council, appreciating the gravity of the Indonesian situation, will arrive at a just and fair decision today, and that that decision will result in speedy, impartial and effective action to eliminate the danger of open hostilities which again threaten to envelop Indonesia."

UITGEBOEKT 01664 OPGELEGD 31 October 7.

B.22553. XXXX
XXXX
2.
VIII. TZ.4. GEHEIM.

Republikeinse Voorlichtings-
dienst te Amsterdam.

Enige tijd geleden deed ik Uw Chef Kabinet ter hand stellen een copy van een door de Republikeinse Voorlichtingsdienst te Amsterdam samengesteld geschrift van 4 Augustus 1947, dat o.a. was toegezonden aan de hier te lande vertoevende buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigers.

Daar de Voorlichtingsdienst haar activiteit in deze voortzet, hetgeen blijkt uit het feit, dat sedert nog twee propagandageschriften zijn verspreid, waarvan afschriften hiernevens zijn gevoegd, en andere van de Voorlichtingsdienst uitgaande invloeden mede de aandacht hebben getrokken, meen ik goed te doen het navolgende ter kennis van Uwe Excellentie te brengen.

Ongeveer medio van dit jaar zond de "Perhimpoenan Indonesia" (P.I.) te Amsterdam, de reeds tal van jaren bestaande politieke vereniging van Indonesische studerenden, een circulaire aan lezers en abonné's van het blad "Indonesia", waarin werd medegedeeld, dat o.a. ten gevolge van de repatriëring van meerdere Indonesiërs, de uitgifte van het blad voorlopig moest worden gestaakt. In de circulaire werd verder echter de hoop uitgesproken, dat "in de naaste toekomst omstandigheden geschapen zouden worden" voor een bredere en uitgebreidere voorlichting omtrent de Republiek.

Voor insiders was het aanstonds duidelijk wat hiermede bedoeld werd, immers de hoofdredacteur van het verenigingsblad "Indonesia", met name Djajeng Pratomo, was bereids bezig voorbereidingen te treffen voor de oprichting te Amsterdam van een "Republikeinse Voorlichtingsdienst", een voorpost van het Republikeinse Ministerie van Voorlichting te Batavia. Djajeng Pratomo heeft dit echter niet eigener initiatief gedaan; voor genoemd Ministerie was het van belang een eigen centrum in Nederland te scheppen om zodoende hier te lande de nodig geachte activiteit te kunnen ontwikkelen en om meer direct in Europa over verbindingen te kunnen beschikken. Dit viel ongeveer samen met berichten, dat er te Singapore een Republikeinse Voorlichtingsdienst zou worden opgericht, Singapore daartoe dan uiteraard gekozen als belangrijk contact-centrum in het Verre Oosten.

Zó belangrijk achtte men blijkbaar de oprichting van een Republikeinse Voorlichtingsdienst in Nederland, dat genoemd Ministerie één harer leidende figuren, Dr.Soebandrio, toen Secretaris-Generaal van het Republikeinse Ministerie van Voorlichting, herwaarts zond vergezeld van zijn echtgenote. In wijde kring, ook buiten die der Indonesiërs, ondervonden deze personen bijzondere belangstelling, hetgeen onder meer geleid heeft tot het organiseren van lezingen over de "Republiek Indonesia". De echtgenote van Dr.Soebandrio sprak o.a. voor de Nederlandse Vrouwenbeweging, een communistische mantelorganisatie.

AAN: Zijne Excellentie de Minister
van Overzeese Gebiedsdelen,
(t/a. Chef Kabinet),
Plein,
's-GRAVENHAGE.

Het

Het eerste bekend geworden teken van bijzondere activiteit van de Republikeinse Voorlichtingsdienst was de in de aanhef van dit schrijven bedoelde op 4 Augustus j.l. uitgegeven en geheel in het Engels gestelde "Special Edition", welke behoudens het hoofd op de eerste bladzijde, geheel gestencild was. In een rood vak staat gedrukt: "Republic of Indonesia", Information Service, 185 O.Z.Achterburgwal, Amsterdam (Holland) - phone 44459 en rechts daarnaast "Publications of the Ministry of Information".

Uit dit laatste blijkt al genoegzaam, dat de geschriften verzorgd en verspreid worden namens dit Ministerie. Beoogd wordt daarmede een propaganda vóór de Republiek en tegen de Nederlandse Regering. Zo is in een inleidend artikel in vorenbedoeld nummer met opschrift:"Stop the war of Aggression in Indonesia" o.a. gesteld: "It is clear that Dutch policy has never been directed towards a peaceful settlement in Indonesia". Deze stemmingverwekkerij emaneert uit het extremistische kamp, maar bedenkelijker schijnt het, dat meerdere Indonesiërs h.t.l. de kwade trouw van de Nederlandse Regering als vanzelfsprekend achten.

Als slot van de "Special Edition" is opgenomen: "Indonesians in Holland appeal to their progressive Dutch Comrades", gedateerd 25 Juli 1947, waarvan de eerste alinea luidt: "With great consternation and deep indignation the Indonesians, coming from the Republican, as well as the so-called Malino-areas and belonging to different social groupings have taken cognisance of the resolution by the Dutch Government to break off negotations with the Indonesian Government and to proceed to the application of military force of order to set the Republic their demands".

Aanleiding om deze passage hier weer te geven ligt in het feit, dat met het uiting geven aan de mening van "new-comers" uit de Republiek en van groepen uit de z.g. Malino-gebieden (waaronder dan in de eerste plaats gerekend wordt de groep der Malino-studenten), naar dzz. oordeel kennelijk beoogd is te suggereren, dat Indonesiërs, die recente indrukken uit Indië medebrachten, zich al aanstonds in Nederland verzameld hebben tegen de politiek der Nederlandse Regering en dat onder meer ook de Malino-studenten, die met medewerking en op kosten van de Nederlands-Indische Regering voor studiedoeleinden herwaarts zijn gekomen, het voor de Republiek opnemen.

Gelijk in de Republiek geen gelegenheid wordt verzuimd om de anti-Nederlandse "eensgezindheid" der onderdanen te demonstreren, zo is ook hier de propaganda-machine in werking gesteld om van deze "eensgezindheid" te doen blijken.

Meerdere gegevens wijzen evenwel uit, dat van het P.I.-centrum en ook van de Republikeinse Voorlichtingsdienst te Amsterdam invloeden uitgaan, die er op gericht zijn er voor te waken, dat geen Indonesier zich aan de zijde van Nederland schaart. In het bijzonder is en wordt o.m. gezorgd voor beïnvloeding der vorenbedoelde Malino-studenten.

Zou de naam der meergenoemde instelling te Amsterdam van het Republikeinse Ministerie van Voorlichting doen veronderstellen, dat

B.22553.

XXXX
XXXX

GEHEIM.

deze geschapen is uitsluitend als voorlichtings-centrum, sedert is echter genoegzaam komen vast te staan, dat haar taak mede is een voortdurende en zo geheim mogelijke beïnvloeding van de Indonesiërs, alsmede het bevorderen van hun eenheid, d.w.z. een blokvorming tegenover Nederland. Dat dit evenals in de Republiek gepaard gaat met intimidatie, behoeft geen betoog. Slechts enkele fanatieke lieden zijn voor deze intimidatie al voldoende.

Pogingen verder tot beïnvloeding van Indo-Europeanen en Chinezen om hen te bewegen zich aan de zijde der Republiek te scharen, zijn mede gesignaleerd, evenals beïnvloeding van Indonesische schepelingen bij de Marine met het doel hen te bewegen de Marinedienst te verlaten, waarbij dan als motief moet gelden, dat Indonesiërs niet tegen de Republiek mogen strijden en dat zij, die ontslag nemen, in de Republiek een goede betrekking kunnen bekomen. Aan een bij name bekend persoon in een der lagere rangen der Marine, die reeds ontslag heeft gevraagd, is voorgehouden, dat hij in de Republiek Marineofficier zou worden.

Uit de "Notice to our Readers" voorkomende in het in afschrift hierbij overgelegde publicatie van 26 September j.l. blijkt, dat de Republikeinse Voorlichtingsdienst sedert de politionele maatregelen op Java geen direct contact meer met de Republiek heeft gehad en dat hierdoor geen regelmatige verschijning van de uitgaven mogelijk is geweest. Langs andere kanalen is sedert evenwel publicatie-materiaal bekomen. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid komt dit o.a. uit New Dehli.

Is met het vorenstaande beoogd een samenvattende schets te geven van het ontstaan en de werkzaamheid der Republikeinse Voorlichtingsdienst te Amsterdam, een beknopte beschouwing gewijd aan enkele andere bijzonderheden dient hieraan nog te worden toegevoegd. Dit betreft het feit, dat deze dienst is ondergebracht in het kantoor van de "Perhimpoenan Indonesia", welke vereniging, naar al geruime tijd bekend is, nauw contact onderhoudt met de Communistische Partij Nederland (C.P.N.). Verscheidene P.I.-leden zijn communist en aangesloten bij de C.P.N., onder wie - om een paar namen te noemen - de hoofdbestuursleden T.Loemban Tobing en Djajeng Pratomo. Laatstgenoemde is een der oprichters en leiders van de Republikeinse Voorlichtingsdienst.

Waar een zo innige verbondenheid met de C.P.N. bestaat, behoeft het wel geen nader betoog, dat dan ook de Republikeinse Voorlichtingsdienst met de C.P.N. verbonden is en dat zij elkander aanvullen in de overeenstemmende propaganda voor de Republikeinse eisen.

HET HOOFD VAN DE CENTRALE
VEILIGHEIDSDIENST
Namens deze:

J.G.Crabbendam.

[redacted] A A G.

Doss.13/370/6.

G E H E I M.

B OPGELEGD

Hierbij wordt toegezonden afschrift van publicatie No.10 d.d. 4 October 1947, uitgegeven door de Republiekeinse Voorlichtingsdienst te Amsterdam.

Verzonden op 25 October 1947
aan: het Hoofd van de C.V.D., alhier.

Volgno.
27 OCT. 1947
ACD/22553
BUREAU B
28-10-47

REPUBLIC OF INDONESIA

INFORMATION SERVICE

185 O.Z.Achterburgwal,Amsterdam (Holland)
phone 44459.

Publications of the
Ministry of Information

Press-Reviews,etc.

No.10. October 4th 1947.

STATEMENTS MADE BY DR. SUTAN SJAHRIR BEFORE THE SECURITY COUNCIL MEETINGS. (August - September 1947).

On 10th August, Dr.Sjahrir arrived in New York to represent his country before the Security Council, and on 12th August, the Council decided by eight votes to three in favour of hearing him. The three votes against were cast by Britain,Belgium and France.

After discussions on the Indonesian question in which Dr.Sjahrir was supported by the Delegates of India,Australia,the USSR, Colombia and Poland, the Security Council adopted by seven votes to nil, Poland, Colombia, Great Britain and the USSR abstaining, a joint Chinese and Australian proposal which noted "with satisfaction the statement made by the Netherlands Government issued on 11th August, in which they affirm their intention to organise a sovereign,democratic, United States of Indonesia, in accordance with the purpose of the Linggardjati Agreement". It proposed that the Consuls in Batavia of the States represented on the Security Council should act as a body of observers on the cease-fire order in Indonesia and investigate conditions in the military occupied areas. Dr.Sjahrir expressed uneasiness about this proposal on the grounds that most of the Consuls looked at the situation through Dutch eyes and would "naturally be considered prejudiced observers".

The speeches which followed are those made by Dr.Sjahrir, and together they provide a valuable summary of the rise of the nationalist movement in Indonesia and of events since the formation of the Republic on 17th August 1945.

I. DR.SUTAN SJAHRIR.

"At the very outset I, on behalf of the Government of the Republic of Indonesia thank you, Mr.President, and the Members of the Council for your sense of fair play and justice in granting me the opportunity to participate in the discussions of the Security Council on the Indonesian question.

In my capacity as representative of the Republic of Indonesia, I am going to address the Members of this Council on behalf of a country which, for the common people of the occidental world,has only recently come into existence, or even on behalf of a people considered as just having started on the road to nationhood. Such being the

case, it may be fitting for me to point out that I am here to represent a people whose history goes back more than a thousand years.

In the fourteenth century, my people constituted the Empire of Madjapahit which embraced all the islands of Southeast Asia and extended from Papua to Madagascar. This kingdom had an efficient administration, and - in those days - maintained relations with countries as far distant as China and Europe. In the sixteenth century my people first came in contact with people of the West. It was most unfortunate that this contact should have taken place at a time when we were on the decline, Western influence began to make itself felt and kept on increasing in proportion to the rate at which we were falling backward.

The rapid expansion of western power led to the decline and fall of my people, and in his process my country lost its freedom. By this time the Dutch East India Company has established itself. Later it was transformed into the Dutch colonial government and has such held away for nearly one and a half centuries. By this time the degration of my people was complete. These factors must be borne in mind when evaluating our relations with the Dutch. It must also be remembered, however, that as a people we have had our own history and traditions - both as a nation and as a state - going back many centuries.

Our history books and the great stone relics scattered about our islands bear evidence of the civilisation and culture we achieved in the past. However, under Dutch domination and colonial rule, our history took a tragic turn. Not only did Dutch oppression and exploitation account for our backwardness and degradation, but they also led to the fall of my country from its ancient proud place to that of a weak dejected colony.

Long after we as a people had, so to speak, disappeared from the face of the earth, the general political awakening of Asia, the rebirth of the Orient, also affected us. At the end of the nineteenth century we began to regain our soul and gave birth to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. From that time on, it has been our constant desire, our one ideal, our strife and struggle, to become a nation again.

In 1918 our national movement gained great strength and the desire to free Indonesia from Dutch rule had become universal.

A common with similar movements in other countries, my people too bent all their energies to achieve the status of an independent nation. But as in other countries, the national movement was not popular with colonial rulers. Nationalists were imprisoned and exiled, but the struggle went on. In 1926 the Dutch carried out large-scale military actions against Indonesians. Those made prisoners but who could not be convicted by the courts were sent to the Dutch concentration camps in New Guinea. And as these oppressive measures were carried out against thousands of nationalists all over the wide territory of the archipelago it is apparent that opposition to Dutch rule was widespread.

When the Japanese attacked the Dutch in Asia, our national movement had already been in existence for decades in all the islands of the Archipelago. Since 1918 our national movement for freedom had chosen democracy as the goal of the country from among all the current political ideologies. In the second world war we placed our reliance on the democracies in their fight against the Fascist countries. We accordingly asked the Dutch colonial government to assign our national movement

an active role in the war. Our offer, however,was turned down by the Dutch, thus destroying a good chance to bring about a new and better relationship between us and the Dutch.

At the time when the Dutch were defeated by the Japanese, the Indonesian people were not given a chance by the Dutch to manifest, as a people, what our attitude and esires were in the field of global relations.

Eventually we were sacrificed to the night of the Japanese. The result was three and a half years of misery for my people, and for all that happened during the Japanese occupation the Dutch must be held responsible. Our sufferings were in no way less than those of other countries.

During the Japanese occupation our national movement was continually seeking opportunities to organise itself as a force with which to end Japanse domination. We were convinced that the democracies were bound to win. Our people placed their faith innthe promises of the Atlantic Charter; its meaning for us was that we would be set free from colonial domination. The Japanese were keen to win over the nationalists, but our people were bent on the achievement of full nationhood,rejecting each and every kind of alien leadership or tutelage.

When, in the middle of 1945, it was plain that the Japanese were going to lose the war, the Indonesian democratic movement took steps to act for the people and take their future in their own hands. Therefore, it was not the conversation of some Indonesian leaders with the Japanese at Saigon in July 1945, which lies at the root of the constitution of the Indonesian Republic, but that the birth of the Republic was a result of positive action on the part of the national movement in the country.

It can conclusively be proven that, at the time of the conversations at Saigon , and even later - the Japanese had no real intention of setting up any kind of a free Indonesia, let alone the independant Republic of Indonesia. On the contrary, some days before the Japanese surrender there was every indication that the Japanese were trying to prevent and counteract Indonesian activity innthat sense. In February 1945, there was a mutiny of Indonesian troops of the National Voluntary Degense Forces under the Japanese command. Subsequently the Japanese started gradually to disarm all Indonesian troops.

Form my own knowledge I can say that the declaration of Indonesian Independence on 17th August 1945, was the work of the democratic movement I spoke of. From the big towns down to the smallest villages,the people seized power from the Japanese and handed it over to the Republic. Is there in the course of history any country as democratic as this, where the people, having seized power, handed it over to their government as the lawful authority?

The past 24 months have revealed the extraordinary longing and desire of the Indonesian people to set up a peaceful state. The people handed over to the Government the arms they had captured from the Japanese and thus the Republican regular army came into existence.

When the Allied forces landed in Indonesia, the people regarded them as friends who had come to liquidate the Japanese occupation.Allied troops were therefore received in all friendliness. The people never for a moment thought that the armed forces of the democratic were going to endanger the freedom of the Republic which the Indonesian people had won for themselves.

Tens of thousands of Dutch nationals concentrated in camps by the Japanse were not regarded by the Indonesians as enemies. It was only when several hundred Dutch soldiers who had landed with the British were guilty of various acts of enmity in Batavia that trouble developed with the Indonesians. It was only then that my people began to question and distrust the attitude of the Dutch towards the Republic.

Tens of thousands of Dutch internees were still in Japanese concentration camps. When the Dutch solders in Batavia started trouble, the Allied army of occupation became suspect. Fighting broke out in Surabaja on a big scale.

With the landing of large numbers of Dutch soldiers in Java, relatins deteriorated more and more between the Republic and the Allied army of occupation. Clashes became frequent and the atmosphere tense.

However even in those circumastances, the young Republic went ahead in its task of achieving peace and security. At the same time it was extending all - out aid to the Allied army of occupation to help it carry out its tasks in Java and Sumatra. During a period of 14 months the Republic disarmed 70.000 Japanese troops and evacuated them out of Republicah territory. In addition to this the Republic evacuated more than 30.000 Dutch and other allied civilian internees. Both these tasks were delegated by the Allied command to the Republican Army.

The Representative of the Netherlands, in a statement to this Council the other day, accused the Republic of holding 700 hostages, but this accusation has no basis of truth. There are no more internees left in Republican territory. The hostages which the Representative of the Netherlands has suddenly discovered were never before alluded to or mentioned in official Dutch statements, either in Indonesia or in Holland.

The work completed by the Republic of evacuating tens of thousands of Japanese prisoners of war, as well as Dutch and Allied civilian internees, provides a good illustration of the discipline and ability of the Republican troops to carry out their appointed duties. It also furnishes an indication of the ability of the Republic itself - and of its willingness - to implement its undertakings.

When the Dutch civilian administration landed in Java in October 1945, there were no Dutch troops there. The whole of Java, Sumatra and Madura was under the complete control of the Republican Government. In spite of the great military advantage the Republic enjoyed, the Republic was willing to enter into negotiations with the Dutch. From then on, the Republic made repeated attempts to come to an understanding with the Dutch The Dutch at the start refused to have any discussions.

Finally in March 1946, through the active intervention of the United Kingdom Government, there arrived in Batavia Sir Archibald Clark Kerr, now Lord Inverchapel, who has sent to place his good offices at the disposal of both sides. Thanks to the patience, tact and ability of that British diplomat - and not forgetting the earnest desire of the Republic to come to a settlement with the Dutch - a draft agreement was finally reached. I, in my capacity as Premier, acted for the Republic, Dr. van Mook, the Dutch Lieutenant Governor-General, acted for the Dutch Government.

This draft agreement, gentlemen, was 90 per cent the brain child of Dr. van Mook, but my Government accepted it in order to facilitate a quick settlement, Sir Archibald, an Indonesian delegation under Dr. Suwandi, and a Dutch delegation headed by Dr. van Mook left for Holland to get the approval of the Dutch Government. Dr. van Mook told us when he was

leaving for Holland that he would be back in a couple of weeks with the assent of his government. But the Dutch cabinet completely ignored the draft agreement. Two months went by before Dr.van Mook returned - but with a completely new set of proposals.

After a complete breakdown in the negotiations and a period of continuous military activity by the ever-increasing Dutch forces, the time had come for the British army of occupation to leave Indonesia. Accordingly, Lord Killearn, British Special Commissioner in Southeast Asia, came to Indonesia to act as mediator in a new attempt to bring both parties to a settlement.

This was in October 1946. Shortly after his arrival , on 14 October a truce agreement was signed whereby the Dutch undertook not to increase their armed forces in Indonesia beyond the figure of Allied strength on that date which stood at 91.000 men.

After weeks of patient negotiations between Indonesian and Dutch delegates, with Lord Killearn in the chair, a compromise was arrived at and the Linggardjati Agreement was initialled by both parties,Indonesian and Dutch, on November 15, 1946. The Dutch Commission-Generaxl, which had come to Indonesia from Holland to negotiate this agreement, then left for Holland with the intention of coming back before Christmas of the same year.

The Commission-General finally did arrive back in Indonesia, but not earlier than March this year months later. But they had not come to sign the Linggardjati-Agreement. They came with a demand that the Republic accept the interpretation of the Agreement as given unilaterally by the Dutch Government. This interpretation is known as the Jonkman interpretation, after the name of the Dutch Minister for the Colonies.The Republic refused to accept the Jonkman interpretation and, after prolonged haggling, the Agreement was finally signed on 25 March 1947, four months and ten days after the initialling at Linggardjati, on the understanding that the Jonkman interpretation was not to be binding upon the Republic.

In the meantime, the Dutch had already violated the status quo established by the October truce. Dutch troops seized and occupied the towns of Buitenzorg and Palembang. They started a full scale military action in East Java which culminated in the Dutch occupation of the Republican town of Sidoardjo and Krian. Meanwhile, Dutch military activity had increased along all perimeters. Simultaneously, the Dutch maintained an intensive blockade of Indonesian ports.

In this connection, it will be remembered that an American merchantman, the Martin Behrman, proceed to the Indonesian port of Cheribon with the approval of the United States Department of State in Washington. The ship also received permission from the Netherlands Trade Commissioner in Washington to load cargo at Cheribon. In Spite of these undertakings, the Dutch Colonial Government seized the cargo of the Martin Behrman after completion of the loading at Cheribon.

This Dutch naval blockade not only prevented the reconstruction and rehabilitation of Indonesia, but it went so far as to seize as contraband sorely needed medicines shipped to Indonesia from outside ports. Ships, mostly Chinese owned,plying between Singapore and Indonesian ports, were seized on the high seas outside territorial waters.And it was generally recognized that this Dutch blockade was aimed at strangling the Republic economically.

But this was not all. Two days before the signing of the Linggardjati Agreement on 25 March last, Dutch forces moved into and occupied the East Java town of Modjokerto. Fighting subsequently flared up in this area, and the consequences of that action were the destruction of property so eloquently described to this Council by the representative of the Netherlands on the afternoon of 1 August.

In spite of repeated Dutch violations, and in spite of the occupation of Buitenzorg, Palamban, Sidoardjo, Krian and Modjokerto by the Dutch army, the Republic signed the Linggardjati Agreement in the sincere belief that Dutch aggression would be brought to an end. It was our hope, that, with the political situation stabilised, we could go ahead with the urgent task of reconstruction and rehabilitation.

One of the points agreed upon between the Dutch and the Republic when the Linggardjati Agreement was initialled in November 1946, was that the future state of the United States of Indonesia was to be brought into being by cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Netherlands Government.

Subsequent to this date, however, the Dutch Colonial Government, without the knowledge or approval of the Republic of Indonesia, set up in violation of the agreement the puppet states of East Indonesia and West-Borneo, together with other political entities as dependencies of the Dutch in the Dutch controlled parts of Indonesia. These creations, it will be clear, were brought into being for the express purpose of using them as bargaining counters against the Republic of Indonesia.
Because of this fact, it is not surprising that the representative of the Netherlands has asked this Council to permit officials of those so-called states to be present here to back his statements. These men, however, are representatives of feudal systems being perpetuated by the Dutch.
These men are more officials appointed by and owing allegiance to the Dutch Colonial Government.

After the signing of the Linggardjati Agreement came the question of its implementation. Here it became apparent that the Dutch were adhering to the Jonkman interpretation which the Republic had rejected as being unilateral. A new crisis developed and came to a head on 28 May of this year when the Dutch issued an ultimatum demanding that the Republic accept new proposals evidently based on the Jonkman interpretation of the Linggardjati Agreement.

The Republic replied with a counter-memorandum dated 7 June, in which the Republic put forward constructive proposals based on the original Linggardjati Agreement.

At this point in the discussions, the Dutch indicated that they were not prepared to negotiate with us any further. As deadlock followed deadlock, the Republic called upon the Dutch to implement Article 17 of the Agreement which provides for arbitration. These repeated Republican requests were ingnored by the Dutch. By this time, Dutch military strength had increased by 30 thousand above the permitted figure of 91.000, and stood at 120 thousand. It was apparent that the Dutch were prepared to make use of their military strength and force us into a complete surrender. We, on the other hand, anxious to preserve peace at any price, conceded nearly all the Dutch demands, in spite of their being contrary to the Linggardjati Agreement, except for some very minor points. Included among these was the Dutch demand for the appointment of a joint constabulary for Republican areas.

On 18 July, we were confronted with another set of demands, included among which was one demanding that all Indonesian troops withdraw ten kilometres from their then positions within twenty-four hours. At this time, it was common knowledge that the Dutch had mustered great strength at these very perimeters. The Republic asked for another twenty-four hours in which to consider the matter. This request was refused by the Dutch.

On 20 July, the Republican Government, throught its Vice-Premier, A.K.Gani, then at Batavia, handed to the Dutch colonial Government a written request from the Republic for implementation of Article 17 of the Linggardjati Agreement. The Dutch Colonial Government stated in reply that the Indonesian request had been forwarded to the Netherlands Government in Holland. This was at 8:00 p.m. on 20 July. At 11:00 p.m. the same night, one hour before the Dutch ultimatum expired, Mr.Gani was handed a letter from Dr.van Mook, acting Governor General, which stated that the Netherlands Government did not consider itself bound any more by the Linggardjati Agreement. It was at this juncture that the Dutch repudiated the Linggardjati Agreement.

Simultaneously, the Dutch army commended military operations against the Republic. The Dutch seized all communications facilities and arrested two hundred Indonesians in Batavia.
Included among these arrested was Mr.Gani who was therefore, apart from the lack of communications facilities, unable to transmit the Dutch note to the Republican Government in Jogjakarta.

In view of these facts, it appears that the Dutch Government have never at any time sincerely desired a peaceful settlement with the Republic. On the other hand, all Dutch action - political, military and economic - was none other than preparations for aggressive action against a partner to an agreement. Although the Republic has been forced to defend itself, military, it still hopes to achieve a settlement by peaceful means. Our Government therefore asked the Security Council to issue the cease-fire order with the undertaking that the Republic would abide by the decision of the Security Council.

Now that the Security Council has already called upon both parties to cease hostilities forthwith - and now that both parties have accepted the order of the Security Council - there has been an increase in the hopes of the Republic for a peaceful solution. So, long, however, as Dutch troops remain in Republican territory, there remains the threat to the very existence of the Republic and, therefore, that the Security Council of the United States order the complete withdrawal of Dutch troops from all Republican territories.

In this connection, I would like to go back to the conditions obtaining in Indonesia shortly after the Republic was set up on 17 August 1945. It is conceded by all impartial observers that law and order reigned throughout the country, that the machinery of government turned over smoothly, and that not a single untoward incident marred the cordial relations existing between different groups of the population. But when Dutch troops began landing in Indonesia the whole picture changed. The quietness was rudely shattered. Conflicts broke out. Law and order were upset. And confusion and disorder increased with the number of Dutch troops in Indonesia. Such conflict was inevitable. The Republic states categorically that the possibilities of conflict and interference with law and order have been multiplied manifold by the presence of Dutch troops in large areas of Republican territory. The Republic also stated without qualification that if Dutch troops are completely removed from

Republican territory, conditions will once more be established for a peaceful and orderly life and the mainenance of law and order, and, if this is done, the Republic assures the Security Council that it will hold itself responsible for law and order in all Republican territory.

The Republic can pruduce responsible witnesses - Dutch as well as others - to show that before the present Dutch occupation of Republican territory, disorders were only present along the perimeters where Indonesian and Dutch troops faced each other. Elsewhere in Republican territory, live moved along in quiet, peace and security.

The first stop towards the restoration of law and order in Indonesia would be the withdrawal of Dutch troops to the positions allocated to them by the truce agreement of 15 October 1946.

The Republic of Indonesia also asks for a commission to be appointed by the Security Council of the United Nations to proceed immediately to Indonesia to supervise implementation of the Council's order of 1 August for the cessation of hostilities. Troops of the Republic of Indonesia ceased fire unconditionally, but Dutch troops are still continuing what the Dutch colonial government calls "mopping-up" operations. In addition, conflicting reports of the situation are emanating from both sides in Indonesia, which makes it all the more desirable that there should be present on the spot an authorative commission appointed by the Security Council to supervise the cessation of hostilities and report back to the Security Council its finding, so that the Council will have before it, at all times, impartial and authotitative reports on the day-to-day situation in Indonesia.

This same commission might eventually report on law and order in those areas recently seized by the Dutch in their present campaign when withdraw takes place of Dutch troops to the positions assigned them by the truce agreement. This commission could also suggest the measures to be taken in case of necessity to guarantee that law and order prevail and that there shall be no retaliations. In view of this, the Republic of Indonesia asks the Security Council to conclude its valuable work on the Indonesian question by appointing a commission to arbitrate on all points of dispute between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Netherlands as the one and only means of ensuring a peaceful and stable solution of the Indonesian question.

I wish it to be placed on record that my Government has gratefully accepted the offers of both the United States' good offices and the Government of Australia's mediation of arbitration as a constructive step towards the setting up of such a commission.

One again I reiterate the pledges of the Government of the Republic of Indonesia, as publicly stated by me in New Delhi, which reads: "I am authorized to declare that the Government of the Republic of Indonesia will accept any impartial arbitration, and will abide by decisions of the Security Council with regard to obligations, duties and responsibilities also by the United Nations Charter."

On behalf of the Government of the Republic of Indonesia, I tender to the President and the honourable Members of the Security Council my thanks for the opportunity given to me to speak at this Council."

Dr.SUTAN SJAHRIR.

"On 17th August,1945 the people of Indonesia declared themselves independent. They proclaimed and established the Republic of Indonesia. They adopted a constitution; they promulgated laws. They set up a parliament and they formed a government.The administration of the islands of Java, Sumatra and Madura was purely in Indonesian hands. Subsequently,however, certain towns in Java and Sumatra became Dutch-occupied areas. On 15 November 1946, the Republic of Indonesia and the Government of the Netherlands concluded the Linggardjati Agreement. In this agreement the Dutch recognized the de facto status of the Government of Indonesia. This de facto status of the Republic has been and is something more than a "microphone" in Jogjakarta, because it included:

Firstly, an Indonesian administration functioning independently of the Dutch colonial administration.

Secondly Indonesian courts of law officiating independently of the Dutch colonial judiciary.

Thirdly, Indonesian army acting independently of the Dutch army, and

Fourthly, Indonesian finance and currency existing independently of Dutch finance and currency.

The Republicof Indonesia administered the territories under its jurisdiction completely independently of other countries,including the Dutch colonial government and the government of the Netherlands.

Similarly, when the Linggardjati Agreement was concluded,various countries recognised the status and competence of the Republic of Indonesia.

During the past two years the Republic of Indonesia has been responsible for the maintaining of law and order in the territories under its jurisdiction. This fact has been implicity recognised by the various countries - including the Netherlands , which have recognised the de facto status of the Republic of Indonesia.

So much for the status of the Republic of Indonesia, I now want to say a few words about the different proposals put forward in this Council for a settelement in Indonesia.

Generally speaking and to be quite frank, none of these resoluti- has helped to dissipate our doubts regarding events in Indonesia. My mind two facts stand out clearly- the first is that the military to the existence of the Republic grows graver with each passing The second is that the cease-fire order given by this Council on - twenty-four days ago - has not put a stop to the fighting. appraisal of the situation makes it necessary for me to reiterate all the emphases at my command, my original request for action of effective nature by the Security Council.

Security Council should not hesitate to condemn Dutch ag- and, as the next logical and inevitable step, should require ps in Republican territory to retire to the positions they in Conformity with the Truce Agreement of 14 October 1946. all on the Republic of Indonesia to negotiate with the Dutch, same time to ignore this fundamental pre-requisite, is not

consonant with the dictates of justice.
Because of this inescapable fact, we feel that the resolution put forward by the United States delegation will adversely affect the Republic of Indonesia.

The Republican standpoint, therefore, remains unaltered, namely that there can be no such thing as a stable peace in Indonesia so long as Dutch troops remain on Republican soil. It is in order to achieve that objectieve in a peaceful manner that we ask for arbitration so that it may be made possible for Dutch soldiers. who now occupy more than half of Java, to be withdrawn from the territories of the Republic.

The Indonesian delegation has categorically stated that the Republic of Indonesia will remain bound by each and every decision of the Security Council in the appointment of a commission or commissions for supervision of the cease-fire order and for arbitration. The Indonesian delegation again signifies its adherence to that pledge, and also wishes to stress at this point how vital it is that the composition of any such commission or commissions should be above suspicion. This delegation, therefore, asks the Security Council to give the undertaking that all such commissions will be impartial. If there should exist any doubt on the question of impartiality, it must necessarily follow that the decisions arrived at by these commissions will neither command the confidence of the parties concerned nor be conducive to beneficial results.

The Indonesian delegation is prepared to accept any resolution for impartial arbitration provided the Security Council is not by-passed. But this delegation must confess to a feeling of disquiet about the other resolution - the one over the supervision of the cease-fire- which asks for a commission composed of career diplomats now in Batavia. Up till now most of these men have looked at the situation in Indonesia through Dutch eyes and they, naturally, will be considered prejudiced observers. And this suspicion is heightened by the action in this Council of the delegations of some countries from which those officials come. Openly and clearly and without a shadow of a doubt these delegations have taken the Dutch side in this Council. Their partiality is patent.

The Indonesian delegation feels that the personnel of any commission appointed by the Security Council should be untainted and free from the slightest breath of suspicion. We again stress the need for impartiality, and add that any Security Council commission appointed to supervise the cease-fire and carry out other investigations will receive the active assistance and cooperation of the Republic of Indonesia in the execution of its duties.

Conscious of the fact that every minite wasted in profitless discussion in this Council adds to the rising toll of lives in Indonesia. and to further threats of aggression, I am deliberately restricting myself to a short statement. But I would be failing in my duty if I did not call to the attention of this Council how pointedly official news from both Indonesia and Holland states that Dutch forces, whose activities were never curtailed by the cease-fire order, have resumed their large-scale military aggression. The Dutch have not given up their plans to use their military strength to destroy the Republic, and the destruction of the Republic of Indonesia was, and is, the objective of the Dutch army.

In view of all this, the Indonesian delegation hopes that the Security Council, appreciating the gravity of the Indonesian situation, will arrive at a just and fair decision today, and that that decision will result in speedy,impartial and effective action to eliminate the danger of open hostilities which again threaten to envelop Indonesia."

AFSCHRIFT.

Top Secret
Nefis publicatie
No 70/1927

ACD
Sep in 664
B VIII 24/11.

NETHERLANDS FORCES INTELLIGENCE SERVICE

SIGNALEMENT

over

het "Front Nasional Daerah Pendoedoekan Djakarta Raya"

(Front Nasional)

In verband met de toenemede belangstelling voor het te Batavia opgerichte "Front Nasional", welk instituut elders navolging vindt, komt het nuttig voor de hieromtrent bekende gegevens in een signalement samen te vatten.

Een niet te ontkennen bezwaar is, dat over het algemeen de beschikbare gegevens van middelmatige of lage evaluatie zijn, welke omstandigheid vermoedelijk in verband staat met het subversieve karakter van de activiteiten van dit "Front Nasional".

Waar alle gegevens elkaar echter zodanig aanvullen, dat een, zij het voorshands algemeen beeld, van deze organisatie wordt verkregen, vormde het ontbreken van meerdere gegevens van hogere evaluatie geen overwegend bezwaar de reeds bekende feiten in onderling verband samen te brengen.

22-10-'47

SIGNALEMENT.

"FRONT NASIONAL DAERAH PENDOEDOEKAN DJAKARTA RAYA".

of kortweg "FRONT NASIONAL".

De Keng Po (Cain.Mal.dagblad) van 29 September 1947 berichtte,dat Mr.MOEWALADI in een voltallige bestuursvergadering van bovenbedoelde organisatie een verklaring had afgelegd, volgens welke dr.IDENBURG, wd. Lt.Gouverneur-Generaal lof had toegezwaaid aan het "FRONT NASIONAL DJAKARTA", en hare bestuursleden had gekwalificeerd als "intellectuelen uit betere kringen". Deze mededeling voor rekening van de spreker latende,heeft het toch wellicht zijn nut om enig licht over de politieke werkzaamheid van deze organisatie te laten schijnen.

De oprichting vond plaats op 25 Mei 1947 in het (republ.)Gemeentehuis te Batavia. Het werd een fusie van 57 (republ.) politieke verenigingen met als voornaamste doel de bestrijding van de invloed en de verbreiding van de P.R.P. De stoot tot de oprichting werd gegeven door de proclamatie van "PASOENDAN" te Bandoeng op 4 Mei 1947, en dit moet dan ook geheel gezien worden in het kader van de bestrijdingsactie, welke de republiek in Mei jl. met verdubbelde ijver inzette tegen de PARTAI RAKJAT PASOENDAN. Overeenkomstige concentratie's vonden plaats onder dezelfde naam in andere plaatsen in West-Java (o.a. het front nasional daerah Bantam). Daarnaast kwamen organisaties met een in hoofdlijnen ~~bd~~ identieke doelstelling in West-Java tot stand onder andere namen, zoals GAPRI (-Gaboengan Anti-Pemetjah Repoeblik Indonesia) in Soebang, Soekaboemi e.a. plaatsen, en "PERSATOEAN PEMBELAAN NASIONAL" te Garoet.

Tot voorzitter werd verkozen SOEPRANOTO (republ.gemeenteambtenaar en leider van de afd. Batavia der SOBSI); tot wd.voorzitter HASIL en tot pembantoe(bestuurscommissaris) Mr.MOEWALADI, toenmaals werkzaam op het Min.van Buitenl.Zaken van de republiek, vice-voorzitter van de Sobsi te Batavia.

Voorname punten in de statuten van de nieuwe organisatie waren:

1) versterking van de positie van de republiek in de bezette gebieden, o.a. door voorlichting aan het volk;
2) het onderhouden van een boycott-actie (pemboikotan) t.a.v. elke beweging,welke de samenleving en de regering van de republiek nadeel zou toebrengen;
3) alhoewel in principe het nemen van besluiten bij meerderheid van stemmen moest gebeuren, zou tijdelijk deze bevoegdheid geheel aan het Bestuur worden overgelaten.

Pamfletten werden aangetroffen, gedateerd 26 Juni 1947, ondertekend door onderwerpelijke organisatie, waarin sprake was van "Die gladde tegenstanders, die de P.R.P. als masker gebruiken. Kameraden, hebt vertrouwen ! Alle door de Nederlanders bezette gebieden zullen tot de republiek terugkeren!"

Op 13 Juni gaf het Min.van Voorlichting te Djokdja opdracht aan haar kantoor voor West-Java te Batavia (evaluatie A-2),dat een "dergelijke ontwikkeling" als van het nationaal front in Batavia moest worden gesteund en gestimuleerd, opdat een dergelijk front tot diep in de desa zou worden opgericht naar hetzelfde voorbeeld.

Een ~~A2~~ A-2-bericht van 6 Juli 1947 meldde, dat in alle Residenties van West-Java een "nationaal front" was opgericht. Het nationaal front in Bantam stond onder leiding van het Bestuur. Het nationaal front in

Batavia

Batavia werd geleid door vertegenwoordigers van de Sobsi (©) en had mede ten doel om strijd te voeren in andere bezette gebieden.

Een order van de Chef Staf Territoriaal Commando West-Java der T.R.I. aan alle plaatselijke territoriale commando's, bestuursambtenaren, gewestelijke defensieraden en aan alle voorzitters "fronten nasional" in West-Java van 17 Juli 1947 bevatte de opdracht, dat i.v.m. de gespannen toestand alle diensten, fronten nasional, guerilla-strijdorganisaties, vernielingscorpsen, wacht-corpsen enz. gereed moesten staan om het programma van de totale volksdefensie ten uitvoer te leggen en alle bevelen en instructies op te volgen. (Evaluatie A-2).

Begin Juli 1947 werd een werkprogramma voor het "FRONT NASIONAL" vastgesteld, dat o.m. inhield de stichting van commissariaten in elk district! In deze tijd was SOEPRANOTO nog voorzitter, doch bekleedde Mr.MOEWALADI reeds de functie van ondervoorzitter en traden als commissarissen op SOEDJONO en DJAHARI.

Na de aanvang van de politionele actie trachtte het "FRONT NASIONAL" de republikeinse positie in Batavia zo goed mogelijk te handhaven. Aanwijzingen zijn aanwezig van contact met DASAAD MOECHSIN (Kantjil Mas), Moh. DAWOED SJAMSI (Modasco), WAHID gelar RADJA LELO (Wahid Soetan), ABDOEL WAHAB en HASMOENI (juwelier) en andere handelaren. Vermoedelijk houdt dit verband met de moeilijke financiële omstandigheden, waarin de republ. ambtenaren kwamen te verkeren, die weigerden met het Nederl. Bestuur samen te werken en die dus geen inkomsten meer genoten.

Op 30 Juli 1947 gaven volgens de Ra'jat (van 30 Juli) alle politieke partijen en jeugdorganisaties, verenigd in het "nationale front" te Batavia een gemeenschappelijke bekendmaking uit ter veroordeling van de Nederl.militaire maatregelen (o.a. het bombarderen en beschieten van steden en dorpen). De Ned.Regering was eenzijdig opgetreden, alhoewel de republiek tot het laatste moment had getracht bloedvergieten te voorkomen. Dit betekende een verkrachten van de overeenkomst van Linggadjati, het vertrappen van de humaniteitsprincipes en van de grondslagen van de democratie. Alle republ.ambtenaren werden aangespoord en gehoorzaam en trouw te blijven aan de republ.regering en aan de instructies van de centrale regering. Alle arbeiders in particuliere bedrijven werd aangeraden om de belangen van de republiek in acht te nemen.

In dit verband zij opgemerkt, dat de republ.regering het verbod van samenwerking voor haar ambtenaren met de Nederlanders officieel heeft uitgevaardigd op 6 Augustus 1947 bij een bekendmaking van de vice-minister van Binnenl.Zaken Dr.ABDOELMADJID DJOJODININGRAT (omgeroepen door R.R.I.-Djokdja op 6/8-'47). Voordien was de propaganda in die geest echter reeds werkzaam.

Begin Augustus was inmiddels tot Voorzitter van het FRONT NASIONAL benoemd Mr.JOESOEF WIBISONO, gewezen onder-Minister van Economische Zaken van de republiek (kabinet Sjahrir). Eerste wd. voorzitter werd Mr. MOEWALADI (x). Tweede wd.voorzitter werd Mr.SOEDJONO. Deze drie heren vormden tezamen met SJAMSOEDIN SA'AT tevens het zogen. "DEPARTEMEN POLITIK", de politieke afdeling. A.M.DASAAD werd een der leiders van het sociale departement. Deze bestuursorganisatie ging volgens de Rakjat van 6 Augustus gepaard met een herziening der statuten. Het doel van het "FRONT NASIONAL" zou voortaan zijn het handhaven van de republiek op politiek en sociaal gebied, het verenigen van de volkskrachten te Batavia het vergroten van het nationaliteitsbesef, en het verlenen van hulp aan

(x) N O O T: Mr.MOEWALADI was het enigst overgebleven, niet-gearresteerde lid van het afdelingsbestuur der Sobsi te Batavia.

(@) N O O T: In herinnering moge worden gebracht, dat op het Sobsi-congres te Djokdja (21 en 22 Juni 1947) geheime instructies werden gegeven tot het vernielen van alle buitenl.kapitaalsinvestaties bij eventuële nadering van de Ned.troepen (Ev. B-2).

aan de slachtoffers van de vrijheidstrijd.

De belangstelling van de zijde van het FRONT NASIONAL voor de financiële toestand van de republikeinse ambtenaren, die weigerden met de Nederlanders samen te werken, moge voorts blijken uit het feit,dat in September 1947 als penningmeester der organisatie optrad Ir.R. SOERACHMAN TJOKROHADISOERJO, gewezen minister van financien van de republiek (kabinetten Sjahrir). Deze ex-minister werd tevens leider van het z.g. Executief lichaam van de B.P.P.R.I.(-Baden Penolong Pegawai Repoeblik Indonesia). Ook Mr.WIBISONO was lid van het comite tot steunverlening aan republ.ambtenaren.

Volgens een hoog geevalueerd bericht (B-2) heeft het "DASAAD MUCHSIN CONCERN" op 21 Augustus jl. aan Ir. SOERACHMAN en Mr.SOEDJONO persoonlijk elk een lening van f.1000,- N.I. Crt. verstrekt.

Een niet al te duidelijk bericht (Ev.: D-3) meldde, dat het tijdschrift "The Voice of Free Indonesia" als propaganda-instrument van de organisatie diende. De redactie zou zelfs in het bezit zijn van een geheime radio-zender.

Meerdere berichten wezen op de activiteit van deze vereniging in anti-Nederlandse zin. Zo zou Mr.WIBISONO o.a. betrokken zijn in de oprichting van ondergrondse bewegingen, zoals de "BARISAN OBOR"(brandstichterstroep). De evaluatie dezer berichten is niet hoog, doch doet het herhaald terugkomen van dergelijke mededelingen een voorzichtige houding t.a.v. het FRONT NASIONAL wel raadzaam voorkomen.

Een D-3-bericht vermeldde, dat het "FRONT NASIONAL" betrokken zou zijn bij een berichtendienst,welke zeer eenzijdig nieuws verstrekt ten behoeve van de Australische Consul EATON op instigatie van Minister GANI. Ook buitenlandse persbureaux, zoals U.P. en Ass.Pr. zouden langs dit kanaal worden ingelicht. Voor deze instelling zou een speciaal fonds bestaan, dat eveneens wordt beheerd door de boven reeds genoemde Ir.R. SOERACHMAN, penningmeester van het FRONT NASIONAL.

Mr.WIBISONO werd inmiddels op 30 Augustus jl. gearresteerd,tezamen met de Indon.advocaat SOENARJO.

Later zijn beide verdachten weder vrijgelaten, doch nam WIBISONO nadien geen functie in het verenigingsbestuur meer in.

Het republ.dagblad "SOEMBER" van 5 Sept. jl. meldde in een artikel met het hoofd "Reorganisatie FRONT NASIONAL", dat Mr.R.SOEDJONO tot voorzitter was aangesteld ter vervanging van WIBISONO. Volgens "MASA INDONESIA" van 8 Sept. zou echter Mr.ALI BOEDIARDJO, de voormalige secretaris van de Indon.delegatie, als voorzitter optreden. R.SOEDJONO zou eerste vice-voorzitter zijn geworden en MOHAMED NATSIR tweede vice-voorzitter.

Ter wille van de standing van de organisatie zou de benoeming van Mr.ALI BOEDIARDJO ongetwijfeld de voorkeur verdiend hebben boven de jonge SOEDJONO, omtrent wien een D-3-bericht werd ontvangen, dat hij betrokken zou zijn bij de infiltratie van verdachte elementen in Batavia.

Overeenkomstig geevalueerde berichten meldden, dat lid van het "FRONT NASIONAL" zijn de Chinezen Mr.TAN PO GOAN, ex-minister van de republiek, INJO BENG GOAT, een zeer ongunstig type, hoofdredacteur van de KENG PO en een der leiders van de SIN MIN HUI, zomede TJOA SEK KIM, procuratie-houder van het DASAAD-concern.

De vermelding in het Dagblad SOEMBER over een reorganisatie van het "FRONT NASIONAL" had mogelijk alleen betrekking op de bestuurswisseling. Het is echter ook mogelijk, dat een meer diepgaande verandering werd aangeduid. Een aanwijzing in die richting is te vinden in een D-3-bericht van 17 September jl. De drukkerij "PEMANDANGAN" zou in Augustus jl. de nieuwe richtlijnen van het werkprogram hebben gedrukt, welke o.a. de volgende punten bevatten.

a) maatregelen voor het plegen van lijdelijk verzet.
Diegenen, die bij Nederl.instanties werken, waren als landverraders te

te beschouwen en zouden t.z.t. ook als zodanig worden behandeld;
b) het is verboden om gunsten van de Nederlanders te ontvangen. Een onderzoek zou worden ingesteld naar de wijze van distributie van sarongs en andere kledingstoffen onder de bevolking, zomede naar de namen van degenen, die zich hiermede belasten;
c) opwekking om door te strijden totdat het republ.gezag weder zou zijn hersteld. De kampongbewoners dienden hieraan mede/werken/te door geinfiltreerde personen in hun huis op te nemen als gezinsleden. De bemiddelde Indonesiers dienden hulp te verlenen door de aankoop van wapens en ammunitie voor de strijders. Contact diende te worden opgenomen met de naastbij gelegen markassen van de T.N.I.

Het standpunt van het FRONT NASIONAL ten aanzien van het door de Nederlanders geopend overleg tot herstel van een normaal functionnerend bestuur in West-Java, bleek duidelijk uit een verklaring van de vice-voorzitter Moh.NATSIR,vermeld in de SIN PO van 3 October jl.

Moh.NATSIR,die van Januari 1946 tot Juni 1947 de functie van Minister van Voorlichting der republiek vervulde,verklaarde dat de a.s. z.g. informele conferentie te Bandoeng niet anders was dan een poging tot omsingeling van de republiek.

Deelnemers aan de conferentie,welke op 13 October te Bandoeng zou worden gehouden,konden niet meer als goede republikeinen worden beschouwd.

Deze ex-minister,die als de verantwoordelijke persoon voor een op zijn minst genomen zeer eenzijdige voorlichting van republ.zijde gedurende anderhalf jaar moet worden beschouwd,is op politiek gebied zeer actief. Alhoewel hem na de aanvang van de politionele actie huisarrest werd opgelegd blijkt hij geheime vergaderingen bij te wonen van MASJOEMI en FRONT NASIONAL (C-3-bericht).

Uit een bericht van Minister GANI aan Djokdja (evaluatie A-2)van 20 October jl. bleek,dat het "FRONT NASIONAL" reeds een plaats had ingenomen in de propaganda-actie van de republiek op internationaal terrein. GANI meldde hierin,dat "de verklaring over het FRONT NASIONAL te Batavia werkelijk reeds aan de Consulaire Commissie,de Consuls-Generaal en de pers ter hand was gesteld". De juiste draagwijdte van dit bericht is door het ontbreken van een nadere toelichting niet aan te geven. Men mag echter verwachten,dat deze organisatie zal zijn voorgesteld als een uiting van de (republikeinse) volkswil in het door de Nederlanders bezette gebied.

Tenslotte zij nog vermeld,dat volgens Radio Djokdja in Banjoemas een eenheidsorganisatie van diverse partijen is ontstaan onder de naam "FRONT NASIONAL INDONESIA". Zij zal de volksvoorlichting verzorgen,en door haar zullen "lasjkar desa" en "lasjkar pelopor" worden opgericht in de desa's.

Blijkbaar vindt het voorbeeld navolging op de grens van het sedert kort door ons bezette gebied, en wel in een zeer militante vorm met de oprichting van strijdgroepen in de desa's.

Afgesloten op 22 October 1947.

I.D.
D E N H A A G.

Doss.13/370/5.

12 (X)

B

OPGELEGD

G E H E I M.

Van betrouwbare zijde werd het volgende vernomen:
KNV Loeti SOESILO, dochter van wijlen Dr.SOESILO, wonende te Amsterdam (adres onbekend), is gehuwd met SOERIPNO.

Deze Soeripno is in December 1946 vanuit Nederland naar Indië vertrokken en is thans Secretaris-Generaal van de Republikeinse Voorlichtingsdienst te New Delhi.

Loeti Soesilo ontvangt regelmatig van haar man de berichten en instructies van de Republiek Indonesia, bestemd voor de leiders van de Perhimpoenan Indonesia en de Republikeinse Voorlichtingsdienst te Amsterdam.

Samen met Djajeng PRATOMO, leider der Republikeinse Voorlichtingsdienst, vertaalt zij de brieven uit het Maleis in de Nederlandse- en Engelse taal.

Verzonden op 17 October 1947
aan: het Hoofd van de C.V.D., alhier.

Volgno.
18 OCT. 1947
ACD/ 22257
BUREAU B
20-10-'47

DOSS. No.:
CRT.: N.D.
DATUM: 15-7-47
PAR.:

VERKIEZINGSPAMFLET NIET BELEDIGEND

De Haagse Rechtbank sprak de heer W. N. Steur, directeur van een drukkerij te Oegstgeest, vrij van de aanklacht, welke indertijd werd ingediend door dr K. J. Brouwer, Zendingsdirector. Dr Brouwer achtte zich n.l. beledigd door enkele uitlatingen op verkiezingspamfletten; in verband met zijn toetreden tot de Partij van de Arbeid had men hem o.a. een politiek avonturier genoemd.

I.D.
D E N H A A G.

Doss.13/370/4.

BUREAU D OPGELEGD

G E H E I M.

6-10-47

Volgno.

- 4 OCT. 1947

AD/21778.

Naar aanleiding van het schrijven van het hoofd van de C.V.D., No.B.20305 d.d. 23 September 1947, kan het navolgende worden medegedeeld:

"De Perhimpoenan Indonesia" vertegenwoordigt de Republiek Indonesia officieel in Europa. De Republikeinse Voorlingtingsdienst, die zijn kantoor heeft aan hetzelfde adres, waar het Hoofdbestuur van de P.I.zetelt, is in feite een onderdeel daarvan en oefent in dezelfde geest zijn intimidatie uit. Reeds eerder werd dezerzijds gewezen op de intimidatie, die de P.I. uitoefent op o.m. de "Roepi".

K.V. De brief van SOERIPNO namens SJARIFOEDIN gericht aan de P.I., waarin vermeld stond, dat alle thans in dienst der Nederlandse regering zijnde Indonesiërs, als landverraders zullen worden beschouwd (zoals ABDOELKADIR en KARTALEGAWA) en verder het besprokene op de geheime vergaderingen van de P.I., wijzen alle de richting, zoals aangegeven in de eerste alinea van Uw schrijven.

K.N.V. Het is dus juist, dat de R.V.D. pogingen aanwendt om Indonesiërs te bewegen ontslag te vragen uit Nederlandse Overheidsdienst en hun betere bestaansmogelijkheden in de Republiek aanbiedt.

Ten aanzien van het perceel Prins Hendrikstraat 55/13 alhier, werd reeds meermalen gerapporteerd. Het perceel is een tehuis, waar ontslagen schepelingen verblijven en waar af en toe de Voorzitter, afdeling Den Haag van de P.I., R.SOEDIBBIO (gegevens bekend) en het Hoofdbestuur van de P.I. te Amsterdam, bezoeken afleggen om deze mensen in hun houding te sterken.

K.N.V. Verder kan worden medegedeeld, dat de Menadonees, A.W.RENKUNG, in het Bevolkingsregister alhier, niet voorkomt. Hij was beroepsmonteur le.kl. en heeft op 2 September 1947 de Marinedienst verlaten. Vermoedelijk verblijft hij thans te Amsterdam.

Verzonden op 3 October 1947
in: het Hoofd van de C.V.D.

23 September 7.

B.20305.
1.
VIII. TZ.4. **GEHEIM.**

UITGEBOEKT

Republikeinse Voorlichtingsdienst.

Met verwijzing naar mijn geheim schrijven van 5 Juni j.l., No. 18794, handelende over de "Republikeinse Voorlichtingsdienst" te Uwent, voor zover bekend gevestigd in het kantoor van de "Perhimpoenan Indonesia", heb ik de eer U mede te delen, dat deze Voorlichtingsdienst een activiteit ontwikkelt welke de nodige aandacht behoeft. Er zijn verder aanwijzingen, dat genoemde Voorlichtingsdienst zich o.a. ook tot taak heeft gesteld politieke beïnvloeding van de h.t.l. vertoevende Indonesiers.

Kortgeleden zond de Republikeinse Voorlichtingsdienst een geschrift aan de hier te lande vertoevende diplomatieke vertegenwoordigers, waarvan een afschrift hiernevens gaat.

HET HOOFD VAN DE CENTRALE
VEILIGHEIDSDIENST
Namens deze:

L.L.van Laere.

Aan de Heer Hoofdcommissaris
van Politie,
te
AMSTERDAM.

23 September 7.

B.20305.

VIII. TZ.4. **GEHEIM.**

UITGEBOEKT

Republikeinse Voorlichtingsdienst.

Met verwijzing naar het geheime rapport van Uw Inlichtingendienst van 14 Augustus j.l., Doss.13/370, heb ik de eer U mede te delen, dat naar dzz. uit goede bron is vernomen de Republikeinse Voorlichtingsdienst (Propagandadienst) pogingen zou aanwenden om Indonesiërs, dienende bij Land- en Zeemacht, te bewegen ontslag te vragen, omdat het niet aangaat - aldus wordt daarbij aan betrokkenen voorgehouden - tegen de Republiek Indonesië te vechten. Verder zou genoemde Voorlichtingsdienst aan betrokkenen betere bestaansmogelijkheden in de Republiek aanbieden.

In het bekende perceel Prins Hendrikstraat 55/13 te Uwent komen geregeld - naar verluidt - ontevreden Indonesiërs samen, w.o. die afkomstig van Leger en Vloot. Ook zouden daar wel eens samenkomsten plaats hebben met lieden van meergenoemde Republikeinse Dienst.

Onder mededeling van het vorenstaande moge ik U uitnodigen mij terzake wel nader te willen inlichten en mij tevens te willen berichten of hier ter stede woonachtig is de Menadonees A.W.RENKUNG, gewezen machinedrijver der Koninklijke Marine, die ook de Marinedienst verlaten zou hebben o.a. na voorspiegeling door vaker genoemde Voorlichtingsdienst, dat hij in de Republiek Officier zou kunnen worden. In het bevestigende geval zag ik mij ook gaarne nopens zijn personalia ingelicht.

HET HOOFD VAN DE CENTRALE
VEILIGHEIDSDIENST
Namens deze:
24/9

L.L.van Laere.

die antw.: 21778

Aan de Heer Hoofdcommissaris
van Politie,
te
's-GRAVENHAGE.

I.D.
DEN HAAG.

KA.

Doss.13/370.

GEHEIM.

UITGEBOEKT

Hierbij wordt toegezonden een door de Republikeinse Voorlichtingsdienst te Amsterdam, aan de hier te lande vertoevende buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigers, toegezonden speciale editie, gedrukt in de Engelse taal.

Dit exemplaar draagt het no.8, doch in feite zou dit het eerste nummer zijn, dat door genoemde Voorlichtingsdienst werd uitgegeven.

Hierbij wordt nog opgemerkt, dat het in de opdruk vermelde adres ook het adres is, waar het hoofdbestuur van de "Perhimpoenan Indonesia" zetelt.

Verzonden op 14 Augustus 1947
aan: het Hoofd van de C.V.D., alhier.

Volgno.
15 AUG 1947
ACD/20305

BUREAU B
Nummer:
Datum: 2-9-'47

REPUBLIC of INDONESIA

INFORMATION SERVICE

185 O.Z. Achterburgwal, Amsterdam (Holland) – phone 44459

- *Publications of the Ministry of Information*
- *Press-Reviews, etc.*

20305

SPECIAL EDITION

No.8 Aug. 4th 1947.

STOP THE WAR OF AGRESSION IN INDONESIA.

The sign of relief that was heard in the world after the Indonesian Republican Government had accepted most of the Dutch proposals on the setting up of an Interim Government in Indonesia during the transition period, has completely disappeared and has given place to a feeling of the greatest anxiety since the morning of 21st Juli 1947, when the Dutch started their all-out military attack.

What is the cause, that, after it had seemed as if Indonesians and Dutch had come closer together, now they obviously have drifted so far apart that it resulted in an armed conflict ?

Let us consider the facts that have led to the present circumstances, and thus enable us to judge which side is responsible for the present disastrous situation in which a danger of a heavy and long battle has become as great as never before.

The conflict has arisen out of different views on the transition period. The Linggadjati-agreement provides for the establishment of a sovereign, democratic United States of Indonesia not later than on 1st January 1949. During the transition period the Dutch have put forward proposals concerning:

1. The position of the Dutch Government in Indonesia.
2. The composition of the Indonesian Interim Government.
3. The return of foreign owned properties in republican territories.
4. Foreign relations of Indonesia.
5. Police and military force in Indonesia.

After several exchanges of letters, memoranda, notes and aides memoire, the Indonesian Republican Government has at last agreed to the following, as expressed in the Republican Note of July 8.:

1. The Republican Government accepts the de jure authority of the Netherlands Crown Representative in the Interim Government within the framework of the Netherlands' de jure authority during the transition period. (until January 1949)
2. The Republican Government agrees to an Interim Government composed of the representative of the Crown and the representatives of the future member States of Indonesia.
3. The Republican Government agrees, in connection with Netherlands' sovereignty during the transition period, that foreign relations of the Republic shall be made to conform with the maintenance of the above mentioned sovereignty during the transition period and with the existence of the Interim Government.

4. The Republic desired that the pacts so far concluded by her, should be included in the proposed Dutch regulation of foreign relations of May 27.
5. The rights of foreigners of their estates are recognised by the Republican Government and will be restored unconditionally in confirmity with the Linggadjati agreement. The restitution will be effected simultaneously with the drawing up of an inventory. Government properties within the territories of the Republic are the property of the Republic.
6. With regard to the questions of the maintenance of the internal peace and order by a j o i n t g e n d a r m e r i e, the Republic wishes to remain by the President's reply of June 27. The Republic emphasises the agreement to having a Joint Directorate for internal security, of which the representatives of the several states, and only to be used within the States concerned. Such co-operation should find its embodiment in the Joint Central Directorate.
7. The Republic expresses willingness to abolish all functions and organizations contrary to the Linggadjati agreement.

The Indonesian Republic is fully conscious, that it has given many concessions to the Dutch demands in spite of the fact that according to the Linggadjati agreement the d e f a c t o au t h o r i t y of the Republic in the main Indonesian islands Java, Madura and Sumatra is r e c o g n i s e d by the Dutch and that the Republican Government according to the text and spirit of the agreement is placed on an equal footing with the Netherlands Government; also in spite of the fact that the Dutch policy in Indonesia has been a consistent violation of the Linggadjati agreement by trying to break Indonesian Unity, erecting puppet states, creating separatist tendencies and by continued military actions.

The heavy concessions that the Republican Government is willing to make, are the clearest proof that the Indonesian Republic wants to earnestly and sincerely settle the problem in peace and as quick as possible, in order to enable the country and the people of Indonesia to take their place in the world and to contribute to world prosperity and peace.

The British and American representatives in Indonesia who have constantly been showing a great interest in the course of Dutch-Indonesian negotiations have been satisfied with the Republican peaceful attitude and the Republican clarification note on 8th July. This clarification note does not accept a joint gendarmerie as proposed by the Dutch, but, in spite of this, the Republican Government is fully prepared to re-open negotiations with the Dutch representatives, convinced that also on this point a settlement can be amicably reached. What the Republican Government insists upon is that the Republican authorities shall be responsible in their own territories, thus in confirmity with the de facto recognition of their authority. The Dutch want to have a joint gendarmerie also in Republican territories in order to maintain law and order.

The Dutch need have no ground for their anxiety that the Republic will fail in keeping law and order in her own territory. The history of Indonesia since the proclamation of the Indonesian Republic on 17th August 1945 has given enough evidence, that the Republican authorities are able to master internal security, to safeguard interest and property of citizens and foreigners. The world knows the reports about the Republican disarming and evacuation of Japanese troops. The world knows that after Japan's surrender the internees in the former Japanese camps, while awaiting their evacuation, were well looked after by the Indonesians.

Ultimately all the Allied prisoners of war and other internees have been satisfactorilly evacuated by the Republican authorities. Foreign visitors and correspondents have always moved freely in Republican territories and all of them have published favourable reports on internal conditions and security. Even Dutch official missions have got the same impressions. The Chinese, Arabs, Indians and other minorities are living happily in the midst of Indonesians.

We know that only Republican authorities, Republican Army and Police Forces, with the help of the Indonesian Youth, Trade Unions, the People's Voluntary Corpses, but not any outside help, are responsible for this.

Disturbances only occurred in those places where the Dutch after violating agreements tried to get control in our recognized territories. Disturbances occurred in the month of June, because the Dutch troops have violated demarcation lines 300 times. Disturbances occurred in Dutch occupied territories, such as South Celebes, where Dutch troops organized a bestial massacre of the local population. Disturbances always occur just because of the presence of Dutch troops.

But still, in spite of all those facts, the Indonesian Republican Government wanted to start fresh negotiations. But the Dutch had refused and now by an all out military campaign they want to press us to accept unconditionally their demands.

It is clear that Dutch policy has never been directed towards a peaceful settlement in Indonesia. Even after the signing of the Linggadjati agreement the Dutch have been continuing to land more and more troops. They have been bombing, shelling and air-raiding our harbours, towns and villages, killing thousands of innocent civilians, and rendering thousands of other homeless. Dutch policy is directed towards the unconditional surrender of the Republic, the loss of freedom for the people and the recolonization of the whole of Indonesia.

Cynically the Dutch have demanded from the Republic cessation of hostilities, in spite of the fact that the Republican National Army is only defending the country against Dutch attacks. The Republican Government is prepared to order immediately the cessation of all hostilities provided that the Dutch do the same. The Republic is prepared to withdraw her troops provided the Dutch troops will also be withdrawn immediately to their garrisons. Dutch intentions became sinisterly clear when they rejected such a proposal of mutually and simultaneously ordering the cessation of all hostilities and withdrawing of troops and when they pressed only the Indonesians to issue a one-sided order only to the Republican Army. This would mean unconditional surrender of the Republic.

A last minute attempt of the Republican Government to settle the conflict peacefully either by a mutually agreed third party or the International Court of Justice, was also bluntly rejected by the Dutch, who had already started their war. Against all regulations the Dutch shot dead the Republican Deputy Mayor of Padang and arrested hundreds of Republican officials, such as the Mayor and Deputy Mayor of Djakarta, and even topranking Ministers such as Vice Premier Dr.A.K.Gani and Vice-Minister for Foreign Affairs Dr.Tamzil, who happened to be in Djakarta on behalf of the Republican Government, awaiting the Dutch reply to the latest Republican proposals.

Dutch policy is reactionary, imperialist and aggressive.

Dutch policy will plunge once more both Holland and Indonesia into misery, devastation and destruction in a war that will affect the stabilization of world peace.

Dutch policy is contrary to the principles of democracy, self determination and peace, for which the United Nations have fought and sacrificed in a heavy and costly war.

Dutch policy is contrary to the spirit and text of the United Nations Charter.

Dutch policy endangers peace in the world.

The Republic wants peace. She has given enough evidence of that. But now that force is used by the Dutch to crush the Republic, the Indonesian people do not hesitate to defend once more their freedom at any cost, with any means -- a few arms, a burning spirit, a grim determination-- that they possess. All political parties, the youth, the workers, the peasants, the women, the entire people have rallied and stand solidly behind their President and Government in the defence of their country.

However difficult the struggle will be, how many sacrifices the Indonesians will have to suffer, we will not surrender. And though the Dutch troops, better equipped with arms as they are, will perhaps succeed in occupying several towns, guerilla fighting, scorched earth tactics, all these will go on, till at last the Republic will be free again. For this is our conviction: in the end ultimate victory will be ours.

However the struggle will last for months, perhaps even years. And in the meantime the world will lack all those riches and products that Indonesia has to offer to lighten the postwar burden of the world. Raw materials and food needed for a speedy relief, reconstruction and rehabilitation of the world will not be at her disposal. Not only world peace, but also world prosperity to which the Indonesians are eager to contribute, is hampered by this cool-blooded planned Dutch war of agression.

On behalf of the Government and the people of the Indonesian Republic, in fulfilling the instructions that President Soekarno has given in his speech of 21st July:

We appeal to all the democratic and freedom loving peoples in the world, to the people of Holland in particular, to stop the war of aggression in Indonesia.

We appeal to all the democratic forces in the world to support the Indonesian Republic in her heroic defence.

We appeal to the democratic Governments in the world to put an end to those violations of the most precious principles of humanity, and bring the case of Indonesia before the United Nations Organization.

The world should act. The world should act quickly.

Dr.Soedarsono,
Representative of the Indonesian
Republican Government in India.

Soeripno,
Personal Representative of
Dr.Amir Sjarifoeddin,
Prime Minister Indonesian Republic.

"THE WORLD SHOULD ACT" APPEALED INDONESIAN LEADERS

PRESIDENT SOEKARNO APPEALS TO THE PEOPLE OF INDONESIA AND THE WORLD.
(Radio Republic Indonesia, 21st of Jan.1947)

What we have been fearing to happen ever since the month of June, has finally come into reality. Prime Minister/and Dr. van Mook have violated the agreement concluded with the Republic of Indonesia. Before we are informed, except through the Dutch Radio, the Dutch launched an all-out attack against us. The Dutch will naturally advance various kinds of excuses to justify these actions. But we are confident that the use of force can never be hidden by whatever kind of propaganda. /Dr.Beel

For the last two years we have been trying to avoid this tragedy, we stand and act for justice and makeevery effort to avoid a clash with the Dutch.

Our war is a war of liberation while theirs is a colonial war. We are convinced that ninety percent of the world's population including that of the Netherlands does not want any more colonial regime.

We are not afraid, but we are following the path of justice, truth in consonance with humanitarian principles. Nobody with the least bit of feeling for truth will allow any accusation thrown on us.

The Dutch accuse us of many shortcomings. But is it fair to compare our new country with others centuries old? Nevertheless not a few foreigners, even Dutchmen including officials have seen with their own eyes and said of the healthy growth of our free Republic. Is the de facto recognition of the Republic by the Dutch and by other big powers itself not a proof of this fact ? And now all this is denied. Will the world with its principles of justice and humanity accept this slander ? In reality our Republic has been for the last two years a symbol of freedom, justice and of humanitarian principles. To the whole world I appeal to stop the use of force by the Dutch colonialists.

We are convinced that justice and truth are on our side and we are equally convinced that the U.N.O. will be on our side too.

I appeal to all the countries in the world who love truth and have sympathy for the Republic of Indonesia to place the Indonesian question before the U.N.O. The Dutch will employ all means to cover the truth sothat only their voice can be heard. But we believe whatever the Dutch do in this direction that humanity will have nothing to do with force and foreign rules. For this reason, we are confident, we will win, being on the side of truth.

In facing the use of force by the Dutch we must remain calm so that we can beat off all attacks against the Republic. Everythingwe have has been sacrificed for our Republic to make it more and more perfect. It is as if we have nothing more to give up but to face the present danger, we have to gather all the strength at our disposal. Know that God, who is always on the side of those who stand for Truth and Justice is on our side, especially so in this Holy month of Ramzan. He will not leave us, as long as we are for Truth, Justice and Humanity.

To all sons and daughters of Indonesia, I call upon you to do everything in your power for the defence of our Republic. For this we must all remain calm, everyone must do his duty with great responsibility and sincerity.

Likewise I call upon the sons and daughters of Indonesia living abroad to stand by the Republic. Fight for it and expose all Dutch employments of force and brutality.

To all peoples in Java, Sumatra, Madura, Celebes, Borneo, Moluccus, Smaller Sundas and of all the smaller islands of Indonesia to work harder to build up a strong defence system and to fight all Dutch offensive.

The Republic is the symbol of freedom, justice and humanity. With the help of God we will win. Once Free Forever Free !

-o-o-o-o-

PRIME MINISTER AMIR SJARIFOEDDIN APPEALS TO THE WORLD.
(Radio Republic Indonesia, 22nd of July 1947)

It should be clear to any observer of the Indonesian scene that war broke out in Indonesia. It is but natural to realize that this war would take the lives of thousands of Indonesian people and would take most of their time and energy. It is also natural that after the second World War no people in this world would like this war; it is all the more pitiable that after the signing of the Linggardjati Agreement this war broke out. It is therefore up to me to explain to the International World the real background of the present conflict. By doing this the world will come to know who is in the wrong and who is in the right.

After the Draft Linggardjati Agreement was initialled on 15th October 1946, it took four month more before it was officially signed. While the Republican Government was prepared immediately to sign the agreement, the Dutch Government was taking their time. In the meantime no evidence of goodwill was shown by them. Violations of ceasefire order continued, and the economic blockade was intensified. The number of troops which according to the Agreement should be decreased was increased by leaps and bound by the Dutch Government. Vital Republican territory in West-Java was occupied by the Dutch under the pretext that the Sundanese wanted the protection of the Dutch military authority. Nobody, who has observed the Indonesian political scene can believe this.

The Republic always wants a peaceful solution of the Indonesian-Dutch dispute, so that after the deadlock of 27th May 1947, the Republic again entered into negotiation with the Dutch Government and agreed to discuss those points of disagreement. The Republic knows very well that military conflict would not only affect the Indonesian and Dutch peoples but also the world which is keenly waiting the opening of Indonesia to International trade.

The Republic agrees to the setting up of an Interim Federal Government before 1st January 1949 and has also accepted the legal position of the Dutch Crown representative in the Interim Government. The Republic has also accepted the proposal affecting the foreign relations and the return of foreign nationals' property found in the Republican de facto territory. Only on one point that the Republic maintains her irrevocable stand i.e. the establishment of joint gendarmerie. Joint police force in the Republican territory is a clear violation of the Linggardjati Agreement, which definitely recognizes the de facto authority of the Republic in Java, Sumatra and Madura, including those areas which are now occupied by the Dutch in these islands. This de facto authority of the Republic is also recognized by other big powers. We therefore ask the question, why then should we accept the joint police force in our own territory ?

The past records of the Republican Government has proved that she is capable of maintaining law and order in her own territory. Why impose Dutch policemen in her territory ? We have accepted more than half of the Dutch proposals and we expect that the true principles of the Linggardjati Agreement should be abided by the Dutch. Joint Gendarmerie cannot guarantee this principle, much less can it guarantee the co-operation between the Indonesian people and the Dutch people. What has happened suddenly ? Before a solution of the political problem is arrived at, the Dutch suddenly ordered the Indonesians to stop onesided military hostilities and to withdraw 10 kilometres from the demarcation lines; while on their part there is no such undertaking. By so doing they wanted to shift the issue from political to military matters. Dutch officials however declared that they wanted to maintain law and order in our territory.

Since 21st July Dutch planes have bombed Indonesian airfields, railways, running trains and the civilian population. In East Java Dutch mechanised units attacked Indonesian positions and penetrated in the direction of the interior. It is thus very clear that these activities are large-scale colonial war and not police-activities. It is the restoration of colonialism under the guise of sweet and democratic slogans.

At this moment, our people are looking to our friends, who have consistantly supported our cause in the past two years, in America, Australia, England, Europe, Egypt, India, China, Burma, Middle East, U.S.S.R. and other countries for their co-operation in stopping this disastereous war. This war must be stopped in order to allow the Indonesian people to start their national reconstruction and the world to share the material wealth of Indonesia. International intervention should come quickly and effectively and should be based on the recognition and restoration of the de facto authority of the Republican Government. I appeal to all freedom-lovers and freedom-fighters in America, Australia, England, Europe, Egypt, India, China, Burma, Middle East, U.S.S.R. and other countries to strengthen the defence for freedom and humanity.

-o-o-o--o-

INDONESIAN YOUTH FEDERATION APPEALS TO THE YOUTHS ALL OVER THE WORLD.

(Radio Republic Indonesia, 22nd of July 1947)

Comrades,

Receive the revolutionary salute of the fighting Indonesian youths, MERDEKA.

The World Federation of Democratic YOUTHS are celebrating their Youth Festival and we, the Indonesian youths take the liberty of calling your attention to the following:

On July 20th at about 22.00 hours Indonesian Standard time the Dutch started large scale military attack on the Indonesian Republic. The Indonesian Republic always desires to settle the Indonesian-Dutch dispute in a peaceful way, but this has been made impossible by the Dutch military offensive.

The Dutch ruled Indonesia for three and a half centuries. During this period the Dutch instead of trying to introduce modern inventions in Indonesia , have tried their level best to deprive Indonesia of modern discoveries and culture. It is to be specially noted that in 1942 only 5% of the Indonesian people can read and write.

Every progressive movement was destroyed before it was born; leaders of the national movement were put into jail, exiled or put to death. When in 1942 the Pacific War broke out, the Dutch without any sense of responsibility left Indonesia to the mercy of the Japanese invadors. The suffering that the Indonesian people bear during the Japanese regime was immense, but like true fighters of democracy the Indonesian people against heavy odds carried on underground struggle against the Japanese fascists.

In August 1945 Japan was defeated; Democracy won. The Indonesian people, who had been oppressed by the Dutch and Japanese fascists proclaimed their Independence on 17th August 1945. A revolution started in Indonesia, a revolution aimed against colonialism and every type of oppression. The Republic becomes the symbol of democracy, a principle for which the world has been fighting for at the cost of heavy sacrifices. The Indonesian Youth like the Youths of other countries, played an important role in the revolution and the capture of power from the Japanese hands.

Then in the name of the Allies came the British. With them followed the Dutch. They landed in Indonesia and everywhere their presence results in misery, plunder and murder for our own people. From the beginning, through their activities, we could clearly see that they wanted to recolonize Indonesia.

After months of discussions and negotiations, the Dutch agreed to sign the Linggardjati Agreement. But Duth provocations and signs of their insincerety continued. Cease-fire agreements were violated by the sending of more and more troops to Indonesia, when it was clearly stated in the Linggardjati Agreement that the number of troops was to be reduced. In the meantime the Indonesian people were anxiously awaiting the fulfillment of the Linggardjati Agreement. Provocations continued, more and more troops poured into Indonesia and when they found that they were strong enough, demanded us to accept terms which would mean a violation of the de facto authority of the Republic. The Indonesians conceded most of their demands in order to prevent the outbreak of war, but their thist was not quenced till the Republic lay stretched at their feet, a colony again. In the name of sweet-coated phrases "the maintainance of law and order" they plunged Indonesia into war, the Indonesian people whose only crime is that they want to live in peace in their own country.

Comrades, Democracy for which you have been fighting for has been trampled down by the Dutch in Indonesia. We remember, when the three members of the Youth Commission, comrades Jean Lautissier, Olga Chetchetkina, and Rajko Tomovic visited Indonesia, they have seen with their own eyes that there is peace and order in Indonesia, so that there is no reason for the establishment of a joint police force in Indonesia to "maintain law and order". They have also promised us that they would support us in all possible ways in our struggle, when the Dutch started a large and general attack on the Indonesian people. Faithful to the desire of every youth in this world, the establishment of Democracy, we have been fighting regardless of the sacrifices that we have to bear. Every minute saved means so many lives of Indonesian Youth saved.

Comrades, youths of the World Federation of Democratic Youth and progressive youths of the world, lots of words have been spoken; we now appeal to you to prove with deeds and actions your promise to support us in our struggle. We once again appeal to you for the creation of a democratic world free from colonialism.

Accept our revolutionary salute, M E R D E K A .

S.O.B.S.I. (ALL INDONESIAN CENTRAL ORGANIZATION OF TRADE UNIONS)
APPEALS TO THE WORKERS ALL OVER THE WORLD. (22nd of July 1947).

In the early morning of the 21st of July the Dutch troops in Indonesia started an all out military offensive.

This opportunity has been eagerly awaited for by the Dutch colonialists and imperialists. Ever since the proclamation of the Indonesian Republic, Dutch policy has never been sincerely directed towards a peaceful settlement with the Indonesians. Dutch policy has never seriously respected the Indonesian People's right of self-determination, one of the main principles for which the United Nations have fought and won the war/so many sacrifices. / with

For the last few weeks the Indonesian Republican Government has seriously and sincerely been making attempts to avoid a military conflict by accepting most of the Dutch demands. But those heavy concessions still did not satisfy the Dutch colonialists.

is clear to the world that the Dutch colonialists never want to put the Indonesian-Dutch agreement into effect. Events in Indonesia have shown that Dutch policy has always been trying to sabotage the Linggardjati agreement. The main point in the agreement, the recognition of the de facto authority of the Republic, means a heavy blow to colonialism and imperialism.

Finally, finding the Indonesians standing firm by the conception of the de facto authority of the Republic, recognized by the Dutch themselves in accordance with the agreement, by not conceding to the Dutch the demand of a joint constabulary, they opened on July 21st large scale hostilities on land, from the air and from the sea, throughout Java and Sumatra.

The people of the Indonesian Republic put a heroic resistance in their patriotic war. The whole people are solidly backing their democratic Government of National Unity.

The S.O.B.S.I. (All Indonesian Central Organization of Trade Unions) has taken a leading part in the People's War for Liberation in organizing the masses of the Indonesian Workers in People's Volunteer Corps for the purpose of guerilla warfare, scorched earth tactics, strikes struggle. The Indonesian Workers are fighting hand in hand with the rest of the Indonesian people and well-disciplinedly follow the instructions of the Republican Defence High Command.

The entire Indonesian people are convinced, that, whatever weapons the Dutch troops may use, and how long the war may last, in the end victory will be theirs !

The war in Indonesia is however a concern of all the peoples in the world. Particularly the workers of all countries, who, irrespective of colour, race or nationality, have the same interests to promote and defend, know that what is at stake in Indonesia, is also the interest of the international workingclass and her movement.

The workers know that the Indonesian people are defending their freedom against imperialism that also oppresses them.

The workers know that the Indonesian people are defending a free Republic; that means a heavy blow and a break in the imperialist chain around the world.

The fighting a war for the defence of the Republic, the Indonesian people are at the same time defending the interests of the workers all over the world. We call upon the workers all over the world to render the utmost support to the fighting Indonesian people.

We urgently request you to follow the lead that our comrades, the Australian waterside workers, who ever since the proclamation of the Indonesian Republic have never failed to support the Indonesian people.

In the name of the people and workers of the Indonesian Republic:

We appeal to you to organize a world-wide workers campaign in giving a concrete shape to your natural sympathy towards the Indonesian fight for freedom.

Stop the war of agression in Indonesia !
Long live the Indonesian Republic !
Long live international working class solidarity !

-o-

INDONESIANS IN HOLLAND APPEAL TO THEIR PROGRESSIVE DUTCH COMRADES.

With great consternation and deep indignation the Indonesians, coming from the Republican, as well as the so-called Malino-areas and belonging to different social groupings, have taken cognizance of the resolution by the Dutch Government to break off negotiations with the Indonesian Government and to proceed to the application of military force in order to set the Republic their demands.

This took place, in spite of the fact that the Republican Government has met nearly all the ultimative demands of the Dutch Government.

The Indonesian Government was quite willing to do so, because people only want to start reconstructing their new state in peace and freedom as soon as possible. The force of arms by the Dutch prevents the Indonesians from doing this way.

One ought to be puzzled to know, how the Government of a nation, that has been fighting for freedom and justice under distressful conditions quite recently, now pressing onward its armies against an other nation, that devotes itself to the same values.

No juridical spin-funs can alter the fact, that war has broken out in Indonesia now. Many cities and villages are burning. With that, all attempts made by the Indonesians in this country to plug up the golf fixed between the Dutch and the Indonesian peoples, have been seriously injured; if it has not been made impossible all together.

We know, however, that a considerable part of the Dutch people, standing by the principles of freedom and justice, have turned away from the Dutch policy of violence.

The Indonesians in Holland urgently appeal to them, to lead the Dutch Government to stop the force of arms at once.

Perhaps it is not too late yet.

Amsterdam, July 25th 1947.

REPUBLIC of INDONESIA

INFORMATION SERVICE

185 O.Z.Achterburgwal, Amsterdam (Holland) - phone 44459.

Publications of the Ministry of Information.

Press-Reviews, etc.

SPECIAL EDITION

No.8 Aug. 4th 1947.

STOP THE WAR OF AGRESSION IN INDONESIA.

The sign of relief that was heard in the world after the Indonesian Republican Government had accepted most of the Dutch proposals on the setting up of an Interim Government in Indonesia during the transition period, has completely disappeared and has given place to a feeling of the greatest anxiety since the morning of 21st Juli 1947, when the Dutch started their all out military attack.

What is the cause, that, after it had seemed as if Indonesians and Dutch had come closer together, now they obviously have drifted so far apart that it resulted in an armed conflict ?

Let us consider the facts that have led to the present circumstances, and thus enable us to judge which side is responsible for the present disastrous situation in which a danger of a heavy and long battle has become as great as never before.

The conflict has arisen out of different views on the transition period. The Linggadjati-agreement provides for the establishment of a sovereign, democratic United States of Indonesia not later than on 1st January 1949. During the transition period the Dutch have put forward proposals concerning:

1. The position of the Dutch Government in Indonesia.
2. The composition of the Indonesian Interim Government.
3. The return of foreign owned properties in republican territories.
4. Foreign relations of Indonesia.
5. Police and military force in Indonesia.

After several exchanges of letters, memoranda, notes and aides memoire, the Indonesian Republican Government has at last agreed to the following, as expressed in the Republican Note of July 8.:

1. The Republican Government accepts the de jure authority of the Netherlands Crown Representative in the Interim Government within the framework of the Netherlands' de jure authority during the transition period. (until January 1949)
2. The Republican Government agrees to an Interim Government composed of the representative of the Crown and the representatives of the future member States of Indonesia.
3. The Republican Government agrees, in connection with Netherlands' sovereignty during the transition period, that foreign relations of the Republic shall be made to conform with the maintenance of the above mentioned sovereignty during the transition period and with the existence of the Interim Government.

4. The Republic desired that the pacts so far concluded by her, should be included in the proposed Dutch regulation of foreign relations of May 27.
5. The rights of foreigners of their estates are recognised by the Republican Government and will be restored unconditionally in confirmity with the Linggadjati agreement. The restitution will be effected simultaneously with the drawing up of an inventory. Government properties within the territories of the Republic are the property of the Republic.
6. With regard to the questions of the maintenance of the internal peace and order by a j o i n t g e n d a r m e r i e, the Republic wishes to remain by the President's reply of June 27. The Republic emphasises the agreement to having a Joint Directorate for internal security, of which the representatives of the several states, and only to be used within the States concerned. Such co-operation should find its embodiment in the Joint Central Directorate.
7. The Republic expresses willingness to abolish all functions and organizations contrary to the Linggadjati agreement.

The Indonesian Republic is fully conscious, that it has given many concessions to the Dutch demands in spite of the fact that according to the Linggadjati agreement the d e f a c t o a u t h o r i t y of the Republic in the main Indonesian islands Java, Madura and Sumatra is r e c o g n i s e d by the Dutch and that the Republican Government according to the text and spirit of the agreement is placed on an equal footing with the Netherlands Government; also in spite of the fact that the Dutch policy in Indonesia has been a consistent violation of the Linggadjati agreement by trying to break Indonesian Unity, creating puppet states, creating separatist tendencies and by continued military actions.

The heavy concessions that the Republican Government is willing to make, are the clearest proof that the Indonesian Republic wants to earnestly and sincerely settle the problem in peace and as quick as possible, in order to enable the country and the people of Indonesia to take their place in the world and to contribute to world prosperity and peace.

The British and American representatives in Indonesia who have constantly been showing a great interest in the course of Dutch-Indonesian negotiations have been satisfied with the Republican peaceful attitude and the Republican clarification note on 8th July. This clarification note does not accept a joint gendarmerie as proposed by the Dutch, but, in spite of this, the Republican Government is fully prepared to re-open negotiations with the Dutch representatives, convinced that also on this point a settlement can be amicably reached. What the Republican Government insists upon is that the Republican authorities shall be responsible in their own territories, thus in confirmity with the de facto recognition of their authority. The Dutch want to have a joint gendarmerie also in Republican territories in order to maintain law and order.

The Dutch need have no ground for their anxiety that the Republic will fail in keeping law and order in her own territory. The history of Indonesia since the proclamation of the Indonesian Republic on 17th August 1945 has given enough evidence, that the Republican authorities are able to master internal security, to safeguard interest and property of citizens and foreigners. The worldknows the reports about the Republican disarming and evacuation of Japanese troops. The world knows that after Japan's surrender the internees in the former Japanese

camps, while awaiting their evacuation, were well looked after by the Indonesians.

Ultimately all the Allied prisoners of war and other internees have been satisfactorilly evacuated by the Republican authorities. Foreign visitors and correspondents have always moved freely in Republican territories and all of them have published favourable reports on internal conditions and security. Even Dutch official missions have got the same impressions. The Chinese, Arabs, Indians and other minorities are living happily in the midst of Indonesians.

We know that only Republican authorities, Republican Army and Police Forces, with the help of the Indonesian Youth, Trade Unions, the People's Voluntary Corpses, but not any outside help, are responsible for this.

Disturbances only occurred in those places where the Dutch after violating agreements tried to get control in our recognized territories. Disturbances occurred in the month of June, because the Dutch troops have violated demarcation lines 300 times. Disturbances occurred in Dutch occupied territories, such as South Celebes, where Dutch troops organized a bestial massacre of the local population. Disturbances always occur just because of the presence of Dutch troops.

But still, in spite of all these facts, the Indonesian Republican Government wanted to start fresh negotiations. But he Dutch had refused and now by an all out military campaign they want to press us to accept unconditionally their demands.

It is clear that Dutch policy has never been directed towards a peaceful settlement in Indonesia. Even after the signing of the Linggadjati agreement the Dutch have been continuing to land more and more troops. They have been bombing, shelling and air-raiding our harbours, towns and villages, killing thousands of innocent civilians, and rendering thousands of other homeless. Dutch policy is directed towards the unconditional surrender of the Republic, the loss of freedom for the people and the recolonization of the whole of Indonesia.

Cynically the Dutch have demanded from the Republic cessation of hostilities, in spite of the fact that the Republican National Army is only defending the country against Dutch attacks. The Republican Government is prepared to order immediately the cessation of all hostilities provided that the Dutch do the same. The Republic is prepared to withdraw her troops provided the Dutch troops will also be withdrawn immediately to their garrisons. Dutch intentions became sinisterly clear when they rejected such a proposal of mutually and simultaneously ordering the cessation of all hostilities and withdrawing of troops and when they pressed only the Indonesians to issue a one-sided order only to the Republican Army. This would mean unconditional surrender of the Republic.

A last minute attempt of the Republican Government to settle the conflict peacefully either by a mutually agreed third party or the International Court of Justice, was also bluntly rejected by the Dutch who had already started their war. Against all regulations the Dutch shot dead the Republican Deputy Mayor of Padang and arrested hundreds of Republican officials, such as the Mayor and Deputy Mayor of Djakarta and even topranking Ministers such as Vice Premier Dr.A.K.Gani and Vice-Minister for Foreign Affairs Dr.Tamzil, who happened to be in Djakarta on behalf of the Republican Government, awaiting the Dutch reply to the latest Republican proposals.

Dutch policy is reactionary, imperialist and aggressive.
Dutch policy will plunge once more both Holland and Indonesia into misery, devastation and destruction in a war that will affect the stabilization of world peace.

Dutch policy is contrary to the principles of democracy, self determination and peace, for which the United Nations have fought and sacrificed in a heavy and costly war.

Dutch policy is contrary to the spirit and text of the United Nations Charter.
Dutch policy endangers peace in the world.

The Republic wants peace. She has given enough evidence of that. But now that force is used by the Dutch to crush the Republic, the Indonesian people do not hesitate to defend once more their freedom at any cost, with any means -- a few arms, a burning spirit, a grim determination -- that they possess. All political parties, the youth, the workers, the peasants, the women, the entire people have rallied and stand solidly behind their President and Government in the defense of their country.

However difficult the struggle will be, how many sacrifices the Indonesians will have to suffer, we will not surrender. And though the Dutch troops, better equipped with arms as they are, will perhaps succeed in occupying several towns, guerilla fighting, scorched earth tactics, all these will go on, till at last the Republic will be free again. For this is our conviction: in the end ultimate victory will be ours.
However the struggle will last for months, perhaps even years. And in the meantime the world will lack all those riches and products that Indonesia has to offer to lighten the postwar burden of the world. Raw materials and food needed for a speedy relief, reconstruction and rehabilitation of the world will not be at her disposal. Not only world peace, but also world prosperity to which the Indonesians are eager to contribute, is hampered by this cool-blooded planned Dutch war of agression.

On behalf of the Government and the people of the Indonesian Republic, in fulfilling the instructions that President Soekarno has given in his speech of 21st July:

We appeal to all the democratic and freedom loving peoples in the world, to the people of Holland in particular, to stop the war of aggression in Indonesia.
We appeal to all the democratic forces in the world to support the Indonesian Republic in her heroic defence.
We appeal to the democratic Governments in the world to put an end to those violations of the most precious principles of humanity, and bring the case of Indonesia before the United Nations Organization.
The world should act. The world should act quickly.

Dr.Soedarsono,
Representative of the Indonesian
Republican Government in India.

Soeripno,
Personal Representative of
Dr.Amir Sjarifoeddin,
Prime Minister Indonesian Republic.

"THE WORLD SHOULD ACT" APPEALED INDONESIAN LEADERS

PRESIDENT SOEKARNO APPEALS TO THE PEOPLE OF INDONESIA AND THE WORLD.
(Radio Republic Indonesia, 21st of Jan.1947)

What we have been fearing to happen ever since the month of June, has finally come into reality. Prime Minister/and Dr.van Mook have violated the agreement concluded with the Republic of Indonesia. Before we are informed, except through the Dutch Radio, the Dutch launched an all-out attack against us. The Dutch will naturally advance various kinds of excuses to justify these actions. But we are confident that the use of force can never be hidden by whatever kind of propaganda./ Dr.Beel.

For the last two years we have been trying to avoid this tragedy we stand and act for justice and make every effort to avoid a clash with the Dutch.

Our war is a war of liberation while theirs is a colonial war. We are convinced that ninety percent of the world's population including that of the Netherlands does not want any more colonial regime.

We are not afraid, but we are following the path of justice, truth in consonance with humanitarian principles. Nobody with the least bit of feeling for truth will allow any accusation thrown on us.

The Dutch accuse us of many shortcomings. But is it fair to compare our new country with others centuries old? Nevertheless not a few foreigners, even Dutchmen including officials have seen with their own eyes and said of the healthy growth of our free Republic. Is the de facto recognition of the Republic by the Dutch and by other big powers itself not a proof of this fact ? And now all this is denied. Will the world with its principles of justice and humanity accept this slander ? In reality our Republic has been for the last two years a symbol of freedom, justice and of humanitarian principles. To the whole world I appeal to stop the use of force by the Dutch colonialists.

We are convinced that justice and truth are on our side and we are equally convinced that the U.N.O. will be on our side too.

I appeal to all the countries in the world who love truth and have sympathy for the Republic of Indonesia to place the Indonesian question before the U.N.O. The Dutch will employ all means to cover the truth sothat only their voice can be heard. But we believe whatever the Dutch do in this direction that humanity will have nothing to do with force and foreign rules. For this reason, we are confident, we will win, being on the side of truth.

In facing the use of force by the Dutch we must remain calm so that we can beat off all attacks against the Republic. Everything we have has been sacrificed for our Republic to make it more and more perfect. It is as if we have nothing more to give up but to face the present danger, we have to gather all the strength at our disposal. Know that God, who is always on the side of those who stand for Truth and Justice is on our side, especially so in this Holy month of Ramzan. He will not leave us, as long as we are for Truth, Justice and Humanity.

To all sons and daughters of Indonesia, I call upon you to do everything in your power for the defence of our Republic. For this we must all remain calm, everyone must do his duty with great responsibility and sincerity.

Likewise I call upon the sons and daughters of Indonesia living abroad to stand by the Republic. Fight for it and expose all Dutch employments of force and brutality.

To all peoples in Java, Sumatra, Madura, Celebes, Borneo, Moluccus, Smaller Sundas and of all the smaller islands of Indonesia to work harder to build up a strong defence system and to fight all Dutch offensive.

The Republic is the symbol of freedom, justice and humanity. With the help of God we will win. Once Free Forever Free !

-o-o-o-o-

PRIME MINISTER AMIR SJARIFOEDDIN APPEALS TO THE WORLD.
(Radio Republic Indonesia, 22nd of July 1947)

It should be clear to any observer of the Indonesian scene that war broke out in Indonesia. It is but natural to realize that this war would take the lives of thousands of Indonesian people and would take most of their time and energy. It is also natural that after the second World War no people in this world would like this war; it is all the more pitiable that after the signing of the Linggardjati Agreement this war broke out. It is therefore up to me to explain to the International World the real background of the present conflict. By doing this the world will come to know who is in the wrong and who is in the right.

After the Draft Linggardjati Agreement was initialled on 15th October 1946, it took four month more before it was officially signed. While the Republican Government was prepared immediately to sign the agreement, the Dutch Government was taking their time. In the meantime no evidence of goodwill was shown by them. Violations of ceasefire order continued, and the economic blockade was intensified. The number of troops which according to the Agreement should be decreased was increased by leaps and bound by the Dutch Government. Vital Republican territory in West-Java was occupied by the Dutch under the pretext that the Sundanese wanted the protection of the Dutch military authority. Nobody, who has observed the Indonesian political scene can believe this.

The Republic always wants a peaceful solution of the Indonesian-Dutch dispute, so that after the deadlock of 27th May 1947, the Republic again entered into negotiation with the Dutch Government and agreed to discuss these points of disagreement. The Republic knows very well that military conflict would not only affect the Indonesian and Dutch peoples but also the world which is keenly waiting the opening of Indonesia to International trade.

The Republic agrees to the setting up of an Interim Federal Government before 1st January 1949 and has also accepted the legal position of the Dutch Crown representative in the Interim Government. The Republic has also accepted the proposal affecting the foreign relations and the return of foreign nationals' property found in the Republican de facto territory. Only on one point that the Republic maintains her irreveeable stand i.e. the establishment of joint gendarmerie. Joint police force in the Republican territory is a clear violation of the Linggardjati Agreement, which definitely recognizes the de facto authority of the Republic in Java, Sumatra and Madura, including those areas which are now occupied by the Dutch in these islands. This de facto authority of the Republic is also recognized by other big powers. We therefore ask the question, why then should we

accept the joint police force in our own territory ?

The past records of the Republican Government has proved that she is capable of maintaining law and order in her own territory. Why impose Dutch policemen in her territory ? We have accepted more than half of the Dutch proposals and we expect that the true principles of the Linggardjati Agreement should be abided by the Dutch. Joint Gendarmerie cannot guarantee this principle, much less can it guarantee the co-operation between the Indonesian people and the Dutch people. What has happened suddenly ? Before a solution of the political problem is arrived at, the Dutch suddenly ordered the Indonesians to stop onesided military hostilities and to withdraw 10 kilometres from the demarcation lines; while on their part there is no such undertaking. By so doing they wanted to shift the issue from political to military matters. Dutch officials however declared that they wanted to maintain law and order in our territory.

Since 21st July Dutch planes have bombed Indonesian airfields, railways, running trains and the civilian population. In East Java Dutch mechanised units attacked Indonesian positions and penetrated in the direction of the interior. It is thus very clear that these activities are large-scale colonial war and not police-activities. It is the restoration of colonialism under the guise of sweet and democratic slogans.

At this moment, our people are looking to our friends, who have consistantly supported our cause in the past two years, in America, Australia, England, Europe, Egypt, India, China, Burma, Middle East, U.S.S.R. and other countries for their co-operation in stopping this disasterous war. This war must be stopped in order to allow the Indonesian people to start their national reconstruction and the world to share the material wealth of Indonesia. International intervention should come quickly and effectively and should be based on the recognition and restoration of the de facto authority of the Republican Government. I appeal to all freedom-lovers and freedom-fighters in America, Australia, England, Europe, Egypt, India, China, Burma, Middle East, U.S.S.R. and other countries to strengthen the defence for freedom and humanity.

-o-o-o-o-

INDONESIAN YOUTH FEDERATION APPEALS TO THE YOUTHS ALL OVER THE WORLD.
(Radio Republic Indonesia, 22nd of July 1947)

Comrades,

Receive the revolutionary salute of the fighting Indonesian youths, MERDEKA.

The World Federation of Democratic YOUTHS are celebrating their Youth Festival and we, the Indonesian youths take the liberty of calling your attention to the following:

On July 20th at about 22.00 hours Indonesian Standard time the Dutch started large scale military attack on the Indonesian Republic. The Indonesian Republic always desires to settle the Indonesian-Dutch dispute in a peaceful way, but this has been made impossible by the Dutch military offensive.

The Dutch ruled Indonesia for three and a half centuries. During this period the Dutch instead of trying to introduce modern inventions in Indonesia, have tried their level best to deprive Indonesia of modern discoveries and culture. It is to be specially noted that in 1942 only 5% of the Indonesian people can read and write.

Every progressive movement was destroyed before it was born; leaders of the national movement were put into jail, exiled or put to death. When in 1942 the Pacific War broke out, the Dutch without any sense of responsibility left Indonesia to the mercy of the Japanese invaders. The suffering that the Indonesian people bear during te Japanese regime was immense, but like true fighters of democracy the Indonesian people against heavy odds carried on underground struggle against the Japanese fascists.

In August 1945 Japan was defeated; Democracy won. The Indonesian people, who had been oppressed by the Dutch and Japanese fascists proclaimed their Independence on 17th August 1945. A revolution started in Indonesia, a revolution aimed against colonialism and every type of oppression. The Republic becomes the symbol of democracy, a principle for which the world has been fighting for at the cost of heavy sacrifices. The Indonesian Youth like the Youths of other countries, played an important role in the revolution and the capture of power from the Japanese hands.

Then in the name of the Allies came the British. With them followed the Dutch. They landed in Indonesia and everywhere their presence results in misery, plunder and murder for our own people. From the beginning, through their activities, we could clearly see that they wanted to recolonize Indonesia.

After months of discussions and negotiations, the Dutch agreed to sign the Linggardjati Agreement. But Dutch provocations and signs of their insincerety continued. Cease-fire agreements were violated by the sending of more and more troops to Indonesia, when it was clearly stated in the Linggardjati Agreement that the number of troops was to be reduced. In the meantime the Indonesian people were anxiously awaiting the fulfillment of the Linggardjati Agreement. Provocations continued, more and more troops poured into Indonesia and when they found that they were strong enough, demanded us to accept terms which would mean a violation of the de facto authority of the Republic. The Indonesians conceded most of their demands in order to prevent the outbreak of war, but their thist was not quenced till the Republic lay stretched at their feet, a colony again. In the name of sweet-coated phrases "the maintainance of law and order" they plunged Indonesia into war, the Indonesian people whose only crime is that they want to live in peace in their own country.

Comrades, Democracy for which you have been fighting for has been trampled down by the Dutch in Indonesia. We remember, when the three members of the Youth Commission, comrades Jean Lautissier, Olga Chetchetkina, and Rajko Tomovic visited Indonesia, they have seen with their own eyes that there is peace and order in Indonesia, so that there is no reason for the establishment of a joint police force in Indonesia to "maintain law and order". They have also promised us that they would support us in all possible ways in our struggle, when the Dutch started a large and general attack on the Indonesian people. Faithful to the desire of every youth in this world, the establishment of Democracy, we have been fighting regardless of the sacrifices that we have to bear. Every minute saved means so many lives of Indonesian Youth saved.

Comrades, youths of the World Federation of Democratic Youth and progressive youths of the world, lots of words have been spoken; we now appeal to you to prove with deeds and actions your promise to support us in our struggle. We once again appeal to you for the creation of a democratic world free from colonialism.

Accept our revolutionary salute, M E R D E K A.

S.O.B.S.I. (ALL INDONESIAN CENTRAL ORGANIZATION OF TRADE UNIONS) APPEALS TO THE WORKERS ALL OVER THE WORLD. (22nd of July 1947).

In the early morning of the 21st of July the Dutch troops in Indonesia started an all out military offensive.

This opportunity has been eagerly awaited for by the Dutch colonialists and imperialists. Ever since the proclamation of the Indonesian Republic, Dutch policy has never been sincerely directed towards a peaceful settlement with the Indonesians. Dutch policy has never seriously respected the Indonesian People's right of self-determination, one of the main principles for which the United Nations have fought and won the war with so many sacrifices.

For the last few weeks the Indonesian Republican Government has seriously and sincerely been making attempts to avoid a military conflict by accepting most of the Dutch demands. But those heavy concessions still did not satisfy the Dutch colonialists.

It is clear to the world that the Dutch colonialists never want to put the Indonesian-Dutch agreement into effect. Events in Indonesia have shown that Dutch policy has always been trying to sabotage the Linggardjati agreement. The main point in the agreement, the recognition of the de facto authority of the Republic, means a heavy blow to colonialism and imperialism.

Finally, finding the Indonesians standing firm by the conception of the de facto authority of the Republic, recognized by the Dutch themselves in accordance with the agreement, by not conceding to the Dutch the demand of a joint constabulary, they opened on July 21st large scale hostilities on land, from the air and from the sea, throughout Java and Sumatra.

The people of the Indonesian Republic put a heroic resistance in their patriotic war. The whole people are solidly backing their democratic Government of National Unity.

The S.O.B.S.I. (All Indonesian Central Organization of Trade Unions) has taken a leading part in the People's War for Liberation in organizing the masses of the Indonesian Workers in People's Volunteer Corps for the purpose of guerilla warfare, scorched earth tactics, strikes struggle. The Indonesian Workers are fighting hand in hand with the rest of the Indonesian people and well-disciplinedly follow the instructions of the Republican Defence High Command.

The entire Indonesian people are convinced, that, whatever weapons the Dutch troops may use, and how long the war may last, in the end victory will be theirs !

The war in Indonesia is however a concern of all the peoples in the world. Particularly the workers of all countries, who, irrespective of colour, race or nationality, have the same interests to promote and defend, know that what is at stake in Indonesia, is also the interest of the international workingclass and her movement.

The workers know that the Indonesian people are defending their freedom against imperialism that also oppresses them.

The workers know that the Indonesian people are defending a free Republic; that means a heavy blow and a break in the imperialist chain around the world.

The fighting a war for the defence of the Republic, the Indonesian people are at the same time defending the interests of the workers all over the world. We call upon the workers all over the world to render the utmost support to the fighting Indonesian people.

We urgently request you to follow the lead that our comrades, the Australian waterside workers, who ever since the proclamation of the Indonesian Republic have never failed to support the Indonesian people.

In the name of the people and workers of the Indonesian Republic

We appeal to you to organize a world-wide workers campaign in giving a concrete shape to your natural sympathy towards the Indonesian fight for freedom.

Stop the war of agression in Indonesia !
Long live the Indonesian Republic !
Long live international working class solidarity !

-o-o-o-o-

INDONESIANS IN HOLLAND APPEAL TO THEIR PROGRESSIVE DUTCH COMRADES.

With great consternation and deep indignation the Indonesians, coming from the Republican, as well as the so-called Malino-areas and belonging to different social groupings, have taken cognizance of the resolution by the Dutch Government to break off negotiations with the Indonesian Government and to proceed to the application of military force in order to set the Republic their demands.

This took place, in spite of the fact that the Republican Government has met nearly all the ultimative demands of the Dutch Government.

The Indonesian Government was quite willing to do so, because people only want to start reconstructing their new state in peace and freedom as soon as possible. The force of arms by the Dutch prevents the Indonesians from doing this way.

One ought to be puzzled to know, how the Government of a nation, that has been fighting for freedom and justice under distressful conditions quite recently, now pressing onward its armies against an other nation, that devotes itself to the same values.

No juridical spin-funs can alter the fact, that war has broken out in Indonesia now. Many cities and villages are burning. With that, all attempts made by the Indonesians in this country to plug up the gulf fixed between the Dutch and the Indonesian peoples, have been seriously injured; if it has not been made impossible all together.

We know, however, that a considerable part of the Dutch people, standing by the principles of freedom and justice, have turned away from the Dutch policy of violence.

The Indonesians in Holland urgently appeal to them, to lead the Dutch Government to stop the force of arms at once.

Perhaps it is not too late yet.

Amsterdam, July 25th 1947.

TZ.4.

I.D.
D E N H A A G.

B 664

Volgno.
19 JUNI 1947
ACD/1743

Ag.no.118/1947.

G E H E I M.

UITGEBOEKT

Van welingelichte zijde werd vernomen, dat op Zater-dag 14 Juni 1947 of Zondag 15 Juni 1947 door de Heer SOE-BANDRIO van de Republikeinse Voorlichtingsdienst in het "Concertgebouw" te Amsterdam, een lezing is gehouden over de Republiek Indonesia. Eenzelfde lezing zal waarschijnlijk in de loop van deze week, te 's-Gravenhage gehouden worden. Het ligt in de bedoeling van de heer Soebandrio deze lezing ook in verscheidene andere plaatsen in Nederland te houden.

Voorts werd de aandacht gevestid op dw woning van de Heer H.M.VAN RANTWIJK, alwaar Soebandrio verblijfhoudt en welke thans het centrum is voor Indonesische studenten - leden der Perhimpoenan Indonesia - . Ook de echtgenote van de Heer Soebandrio vertoeft momenteel aldaar. Volgens "De Waarheid" van 12 Juni 1947 stond zij een interview toe aan de pers.

BUREAU I
20-6-47

Verzonden op 17 Juni 1947.
aan: het Hoofd van de C.V.D., alhier.

INLICHTINGENDIENST
- AMSTERDAM -

No. I.D. 4062-B - 1947

Uw brief:

BUREAU B
10-6-47

Volgno.
16 JUNI 1947
ACD/17293

Amsterdam, 13 Juni 1947

Onderwerp: Vereniging "Nederland-Indonesie"

Bijlagen: Een

GEHEIM.

UITGEBOEKT

16794. t/m 17207.

2e/p Exemplaren met HB. Inl. vragen over de Brouwer.
Spoels
BIII 20.6.47.

Onder verwijzing naar hetgeen over de activiteit vam deze vereniging in de rapporten van 31 Mei en 10 Juni 1947 werd medegedeeld, kan thams het volgende worden opgemerkt:

De bovengenoemde vereniging verkeert momenteel in een toestand van verval. Had zij aanvankelijk veel medewerking van personen en groeperingen uit alle richtingen en standen van het Nederlandse volk, in het laatste half jaar is er bij vele medewerkers geen sprake meer van activiteit of geestdrift. Vooral de meer jongere elementen tonen zich zeer passief. Ook de financiele toestand van deze organisatie is slecht te noemen en reeds moest besloten worden tot stopzetting der uitgave van het maandblad "De Brug - Djambatan". Na Februari 1947 is deze periodiek niet meer verschenen.

De secretaris van de bedoelde vereniging,
Johannes Wilhelmus Elizabertus RIEMENS,
geboren te Hillegersberg, 23 November 1918,
wonende Raphaelstraat 8 III, Amsterdam-Zuid,
is momenteel vrijwel de enige figuur van betekenis. Met een bijna fanatiek idealisme werkt hij voor zijn vereniging en hij is dan ook de man, die de meeting van Woensdag a.s. organiseert. Hij ziet de zaak echter wanhopig in en vreest een mislukking. Tegenover een medewerker verklaarde hij zulks onomwonden en voegde daaraan toe: "We verliezen steeds meer terrein door de politiek van de Nederlandse Regering, maar we zijn weer een beetje gerustgesteld, doordat de Kamerfractie van de Partij van de Arbeid besloten heeft zonder toepassing van geweld het Indonesische vraagstuk op te lossen".

+ alle Indonesiers van de Stoet uitgezonderd

(Bovengenoemde uitlating dient met de nodige reserve te worden beoordeeld en te worden getoetst aan hetgeen gedurende de afgelopen maanden, min of meer officieel, is bekend geworden omtrent het standpunt van de Partij van de Arbeid t.a.v. het regeringsbeleid inzake Indonesie. - Rapporteur).

In September a.s. organiseert de meergenoemde vereniging een tentoonstelling te Rotterdam. De vereniging "Ons Huis" aldaar heeft haar gebouwen beschikbaar gesteld voor deze expositie.

Aan

Wat betreft het contact tussen Indonesische en Nederlandse jongeren, waarover in de beide voorgaande rapporten werd gesproken, kunnen nu nog de volgende bijzonderheden worden weergegeven:

Een groep christelijk georienteerde jongeren uit de Republiek Indonesia is onderweg naar het Wereldjeugdfestival te Praag. Op haar doorreis zal dit groepje in contact worden gebracht met de Nederlandse jeugd. Zij zullen daartoe worden ontvangen

door Dr.K.J.BROUWER, Warmonderweg 19, ~~Oegstgeest.~~ Uiteraard kan dezerzijds niet worden nagegaan, wat de politieke oriëntering is van genoemde Dr.Brouwer. Wel werd vernomen, dat in Oegstgeest een persoon van dezelfde naam een leidinggevende functie heeft bij een bureau voor Zendingswerk. Dit zou gecombineerd kunnen worden met hetgeen werd medegedeeld over het christelijk georienteerd zijn van de betreffende Indonesische jongeren. Bevreemdend blijft dan echter het feit, dat deze jongelui op weg zouden zijn naar het wereldjeugdfeest te Praag, een congres, waar vrijwel uitsluitend de uiterst links georienteerde jeugd bijeen komt. Mogelijk wreekt zich hier de fout, dat alleen het communistische A.N.J.V. contact heeft opgenomen met de Indonesische jeugd en deze laatste groep haar "vorming" op het terrein der internationale jeugdbeweging daaraan te danken heeft.

Hoe het zij, een uitgebreid spoedonderzoek te Oegstgeest of elders is in ieder geval zeer gewenst en het resultaat daarvan zien ook wij gaarne tegemoet.

Door de eerder genoemde secretaris van de Vereniging Nederland-Indonesie was aan Wim KLINKENBERG voorgesteld, dat deze laatste het contact zou leggen tussen de Amsterdamse jongeren en het groepje Indonesiers. Nu Klinkenberg vrij onverwacht naar Engeland is vertrokken zal RIEMENS alle leden van het Amsterdamse Jeugdparlement uitnodigen op een bijeenkomst met de Indonesische jongeren. Deze contactavond zal op een nader te bepalen datum worden gehouden in " 't Gildehuys" te Amsterdam.

Bijgaand een exemplaar van de affiche, waarmede genoemde vereniging de Amsterdammers opwekt tot bijwoning van de reeds eerder gemelde meeting.

Verz. aam Hfd. C.V.D., 's-Hage. M.-3

INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM

UITGEBOEKT

No. I.D. 4062a/47.

Uw brief: 16794 dd.5.6.47

Amsterdam, 10 Juni 1947.

Nummer:
Datum: 14-6-47

Volgno.
12-6-47
ACD 17207

Onderwerp:
Republikeinse Voorlichtingsdienst

Bijlagen: -
GEHEIM.

Onder verwijzing naar dezerzijds rapport nr.4062/47 ID. dd. 31 Mei 1947 en, ter voorlopige beantwoording van het bovenaangehaalde schrijven, volgen hieronder enige byzonderheden.

Vandaag of morgen vertrekt vanuit Ostende Wim KLINKENBERG, het bekende lid van het Amsterdams Jeugdparlement, per boot naar Engeland, waar hij ongeveer een maand zal vertoeven. In Londen zal het/hij congres bijwonen van "De rechten van de mens". Hij gaat daarheen als correspondent van "De Vlam" en "De Stem van Nederland". Ook zal hij daar spreken voor en namens de Vereniging Nederland-Indonesië, waarvan hij een actief lid is.

In latere correspondentie meldde u dan dat z'n onderwijs nu in Gorinchem stond.

Na zijn terugkeer zal hij vermoedelijk enige tijd doorbrengen in zijn woonplaats Vlaardingen. Zijn familie aldaar is telefonisch aangesloten onder No.3612 - adres onbekend -. Hij wordt niet vóór September a.s. in Amsterdam verwacht.

Hoewel het aanvankelijk in de bedoeling lag van de Vereniging Nederland-Indonesië, dat Dr. SOEBANDRIO, die inderdaad ten huize van H.M.van RANDWIJK vertoeft, het contact met de Nederlandse jeugd zou opnemen, heeft men nu besloten te wachten op een deputatie Indonesische jongeren, die per schip onderweg zijn naar Nederland. Onder auspiciën der bovengenoemde vereniging zal nu contact worden gelegd tussen de beide jeugdgroepen. Zo mogelijk volgen hierover t.z.t. nadere mededelingen.

De meergenoemde vereniging, die momenteel onder hoogspanning werkt, organiseert op 18 Juni a.s. te Amsterdam, in het R.A.I.-gebouw, een meeting.

VERZONDEN AAN: Hfd. C.V.D., Haag. M.2.

Waarom is deze brief niet aan B III gepasseerd?

Aan

1000-4-47

I.D.
D E N H A A G.

Ag.no.118/1947.

BUREAU B
No. 5
Volgno.
30 MEI 1947
ACD/16744

G E H E I M.

31-5-'47

In de "Nieuwe Haagsche Courant van 27 Mei 1947, Rotterdam het volgende artikel voor:

" REPUBLIKEINSE PROPAGANDA IN NEDERLAND?

Zondagmorgen kwam secretaris-generaal SOEBANDRIO der republiek Indonesia op Schiphol aan. Volgens het republikeinse blad "Ra'jat" is het doel van zijn reis in Nederland een republikeinse voorlichtingsdienst op te richten."

Van betrouwbare zijde werd vernomen, dat Soebandrio zijn intrek heeft genomen ten huize van H.M.VAN RANDWIJK, hoofdredacteur van "Vrij Nederland", Stadionkade 88 te Amsterdam.

+ po 723

Verzonden op 29 Mei 1947.
Aan: het Hoofd van de C.V.D., alhier.

723

UITGEBOEKT

5 Juni 7.

16794.

vdM. TZ.4. **GEHEIM.**

Republikeinse Voorlichtingsdienst.

Met verwijzing naar het geheime rapport van Uw Inlichtingendienst van 27 Mei j.l., No.118/1947, heb ik de eer U hierbij aan te bieden afschrift van een geheim rapport van de Inlichtingendienst te Amsterdam van 31 Mei j.l. No.4062-1947, naar de inhoud waarvan ter bekorting verwezen moge worden.

Voor eventuele nadere inlichtingen nopens deze aangelegenheid houd ik mij gaarne aanbevolen.

HET HOOFD VAN DE CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST
Namens deze:

J.G.Crabbendam.

Aan de Heer Hoofdcommissaris
n Politie,

's-GRAVENHAGE.

Coll.: WP

UITGEBOEKT

5 Juni 7.

16794.
1.
vdM. SvD.4. GEHEIM.

to

Republikeinse Voorlichtingsdienst.

Met verwijzing naar het geheime rapport van Uw Inlichtingendienst van 31 Mei j.l., no. ID. 4062-1947, heb ik de eer U hierbij aan te bieden afschrift van het geheime rapport van de Inlichtingendienst, alhier, van 27 Mei j.l., no.118/1947, waarin genoemd is de persoon van Seebandrie, die h.t.l. verteeft in verband met de voorbereidingen voor de oprichting van een republikeinse voorlichtingsdienst in Nederland.

Ik houd mij gaarne aanbevolen voor nadere inlichtingen - zo mogelijk - nopens deze aangelegenheid en eventueel ook over de in het rapport van Uw Inlichtingendienst bedoelde vergadering.

HET HOOFD VAN DE CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST,
namens deze:

J.G.Crabbendam.

AAN:
De Heer Hoofdcommissaris van
Politie
te
AMSTERDAM.
Coll.: HP

A F S C H R I F T.

INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM.

No. I.D. 4068-1947. Amsterdam, 31 Mei 1947.

Uw brief:

Onderwerp: Vereniging "Nederland-Indonesië".

Bijlagen:

G E H E I M.

Na afloop van de zitting van het "Amsterdamse Jeugdparlement" op 30 Mei 1947 werd aan belangstellenden in de Indonesische kwestie verzocht, nog even na te blijven. Door het bekende lid Wim KLINKENBERG, Okeghemstraat 3 II, Amsterdam-Zuid, werd medegedeeld, dat de Vereniging "Nederland-Indonesië", secretariaat Keizersgracht 462, Alhier, contact heeft opgenomen met een hier te lande vertoevende deputatie van de Indonesische Voorlichtingsdienst. Klinkenberg verzocht nu namen van hen, die in correspondentie willen treden met Indonesische jongeren en ter bespreking van deze en/of andere contactvormen in de loop van de volgende week een vergadering te willen bijwonen, waar de bovenbedoelde gasten uit de Republiek Indonesia het woord zullen voeren.

Tevens werd door Klinkenberg medegedeeld, dat de bovengenoemde vereniging in de naaste toekomst nog meer activiteit wil ontwikkelen, mede gezien de huidige gespannen toestand in dit Rijksgebied.

Verz. aan Hfd. C.V.D. 's-Hage. M.-2

Typ.: TZ.4.
Coll.: WP

INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM

No. I.D. 4062-1947

Uw brief:

BUREAU D
Nummer:
Datum: 3-6-47

Amsterdam, 31 Mei 1947

Volgno.
2 JUNI 1947
ACD/6794

Onderwerp: Vereniging "Nederland-Indonesie"

UITGEBOEKT

Bijlagen:

GEHEIM.

Na afloop van de zitting van het "Amsterdamse Jeugdparlement" op 30 Mei 1947 werd aan belangstellenden in de Indonesische kwestie verzocht, nog even na te blijvem. Door het bekende lid Wim KLINKENBERG, Okeghemstraat 3 II, Amsterdam-Zuid, werd medegedeeld, dat de Vereniging "Nederland-Indonesie", secretariaat Keizersgracht 462, Alhier, contact heeft opgenomen met een hier te lande vertoevende deputatie van de Indonesische Voorlichtingsdienst. Klinkenberg verzocht nu namen van hen, die in correspondentie willen treden met Indonesischejongeren en ter bespreking van deze en/of andere contactvormen in de loop van de volgende week een vergadering willen bijwonen, waar de bovenbedoelde gasten uit de Rupubliek Indonesia het woord zullen voeren.

Tevens werd door Klinkenberg medegedeeld, dat de bovengenoemde vereniging in de naaste toekomst nog meer activiteit wil ontwikkelen, mede gezien de huidige gespannen toestand in dit Rijksgebied.

Verz. aan Hfd. C.V.D., 's Hage. M.-2

Aan

000-4-47